

**KOMUNIKASI**  
**&**  
**GERAKAN PERUBAHAN**  
Kemajemukan dalam Konstelasi Sosial, Ekonomi, Politik

Dr. Eko Harry Susanto

  
**Mitra**  
**Wacana**  
**Media**  
PENERBIT

## **KOMUNIKASI & GERAKAN PERUBAHAN**

Kemajemukan Dalam Konstelasi Sosial, Ekonomi, Politik

**Dr. Eko Harry Susanto**



Edisi Asli

Hak Cipta © 2016, Penerbit Mitra Wacana Media

Telp. : (021) 824-31931, 82423435

Faks. : (021) 824-31931

Website : <http://www.mitrawacanamedia.com>

E-mail : [mitrawacanamedia@gmail.com](mailto:mitrawacanamedia@gmail.com)

Hak cipta dilindungi undang-undang. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini dalam bentuk apa pun, baik secara elektronik maupun mekanik, termasuk memfotokopi, merekam, atau dengan menggunakan sistem penyimpanan lainnya, tanpa izin tertulis dari Penerbit.

### **UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2002 TENTANG HAK CIPTA**

1. Barang siapa dengan sengaja dan tanpa hak mengumumkan atau memperbanyak suatu ciptaan atau memberi izin untuk itu, dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
2. Barang siapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan, atau menjual kepada umum suatu ciptaan atau barang hasil pelanggaran Hak Cipta atau Hak Terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Susanto Harry Eko

**Komunikasi & Gerakan Perubahan**

Jakarta: Penerbit Mitra Wacana Media, 2016

1 jil, 17 x 24 cm, Hal 204

ISBN: 978-602-318-169-8

1. Fisip
2. Komunikasi & Gerakan Perubahan
- I. Judul
- II. Dr. Eko Harry Susanto



# KATA PENGANTAR

**B**uku berjudul Komunikasi dan Gerakan Perubahan: Kemajemukan Dalam Konstelasi Sosial, Ekonomi, Politik mencoba untuk mengingatkan perjalanan komunikasi di Indonesia masa sebelum reformasi politik tahun 1998. Wajah komunikasi di negara yang menjunjung tinggi kemajemukan, lalu lintas pesan didominasi oleh pergulatan masyarakat dalam mencari, memperoleh dan menggunakan informasi yang selalu bersentuhan dengan pemerintah beserta organ kekuasaannya.

Kalaupun muncul pengakuan, bahwa komunikasi dalam bingkai kekuasaan negara mampu membangun keselarasan dalam kehidupan sehari-hari, tentu saja hal yang wajar. Karena memang tidak muncul gejolak berarti dalam menyikapi aliran pesan linier dengan segala keperkasaannya yang represif. Bermuara pula pada betapa langkanya perlawanan terhadap isi pesan yang dikelola pemilik otoritas informasi. Pemberitaan media juga tanpa hiruk pikuk mengeksplorasi perbedaan pendapat. Semua poros komunikasi yang ada di masyarakat, harus sejalan dengan piramida organisasi kekuasaan dalam perspektif integralistik.

Tidak dapat dinafikan, hak komunikasi dalam struktur kekuasaan negara, analog dengan upaya menutup rapat, bahkan membungkam lalu lintas bicara maupun hak menyampaikan pendapat berbeda. Dalam jerat aliran pesan tunggal yang dijejali variasi klise epigon kekuasaan, rakyat pun wajib beradaptasi dengan jargon keserasian, keselarasan dan keseimbangan yang kerap muncul dalam retorika elite. Tetapi sesungguhnya, bukan berarti rakyat tidak memiliki kehendak menyuarakan perbedaan, sebab semangat itu tetap melekat, walaupun berisiko jika muncul di permukaan. Ketidakberdayaan dalam komunikasi jelas tidak dapat dilepaskan dari belantara regulasi, yang kurang memberikan ruang berbeda pendapat sekecil apapun menyangkut kebijakan negara.

Kendati demikian tidak bisa diabaikan, ada upaya elite di tubuh kekuasaan negara beserta organ-organ politiknya yang berusaha membangun kemajemukan, meskipun terbatas pada penampang luar komunikasi publik yang sangat politis. Kondisi ini tidak menjadikan rakyat merasa puas terhadap hak komunikasi yang dimiliki. Semakin lama

muncul kejenuhan, dan kerinduan untuk berubah menuju komunikasi yang lebih bebas. Dan kesempatan untuk berubah itu, akhirnya muncul juga sejalan dengan perkembangan teknologi komunikasi dan transportasi. Hak komunikasi yang teramat sempit dalam belenggu harmoni integralistik, menjadi hak komunikasi yang luas didukung semangat perubahan.

Memang tidak serta merta menciptakan kebebasan dalam pola interaksi dan komunikasi, mengingat elite dalam kekuasaan negara yang berlindung dibalik belantara peraturan masih tetap mengatur dan mengendalikan lalu lintas informasi di masyarakat. Dengan kata lain, ada perubahan dalam komunikasi, tetapi pola komunikasi antara pemilik kekuasaan dan rakyat yang tidak seimbang masih mewarnai kehidupan sosial, ekonomi dan politik. Interaksi antara elite dan rakyat pada umumnya, tetap menyisakan jarak kekuasaan yang dilembagakan demi untuk memperoleh keistimewaan peran dihadapan khalayak.

Dalam perjalanannya, komunikasi datar yang diwarnai oleh peran berbagai institusi pengendali pesan, dan media massa yang lebih mirip kepanjangan tangan pemilik kekuasaan, semakin menghadapi tantangan karena ketidakmampuan menghentikan kehendak rakyat yang ingin berubah. Beragam sumber informasi di luar ordinat negara tumbuh subur karena dukungan teknologi komunikasi. Kepentingan pemilik modal yang berfokus pada pengembangan usaha juga mendorong tuntutan perubahan perilaku masyarakat maupun elite dalam kekuasaan negara.

Budaya material perusahaan yang berkembang pesat membawa nilai perubahan, berjalan seiring dengan geliat politik kekuasaan pemegang otoritas di tubuh pemerintah. Keeratan hubungan pemilik modal dengan elite politik dan birokrasi dalam kekuasaan negara menghasilkan pesan perubahan yang diproduksi secara massal untuk mempengaruhi rakyat agar mengikuti program-program pembangunan pemerintah yang didalamnya menyangkut kepentingan pemilik modal. Persoalannya, mengarahkan masyarakat yang mempunyai aneka perbedaan nilai, sikap dan kepercayaan bukan perkara mudah. Dalam konteks kemajemukan etnik yang memiliki konstelasi sosial, ekonomi dan politik berbeda bukan hal yang gampang menanamkan kepercayaan terhadap perubahan. Sebab semua akan bermuara pada tuntutan perubahan yang memberikan keuntungan material sebagai ukuran kesejahteraan. Pada sisi lain, yang seringkali diabaikan akibat mengedepankan keuntungan material adalah perubahan yang menghilangkan nilai sosial budaya masyarakat sebagai rujukan baku dalam kehidupan sehari-hari.

Kepedulian untuk mempertahankan karakteristik yang terikat oleh aspek sosial budaya disatu pihak, dan kehendak memperoleh keuntungan dipihak lain, selalu muncul bersamaan. Karena itu bukan mustahil terjadi benturan antara proses pencapaian modernisasi melawan warna tradisional yang menitikberatkan pelembagaan nilai sosial kultural. Karena itu, betapa rumitnya jika suatu kawasan desa tradisional yang didominasi

kehidupan agraris mengalami perubahan cepat akibat tumbuhnya pabrik – pabrik sebagai simbol industrialisasi yang dibangun pemilik modal.

Kawasan yang mengalami pertumbuhan fisik pesat dengan kehadiran pabrik, tentu saja menjadi magnet bagi orang yang ingin mencari penghidupan lebih baik. Berbagai kelompok masyarakat yang memiliki karakteristik berbeda satu sama lain berkumpul dalam satu kawasan dengan tujuan sama untuk hidup lebih sejahtera. Namun keanekaragaman yang menimbulkan kompleksitas interaksi dan komunikasi, ternyata tidak menimbulkan konflik antar kelompok. Tidak ada perlawanan sengit terhadap simbol industrialisasi yang menjurus kepada keberingasan massa. Kalaupun ada konflik di masyarakat, dan protes terhadap keberadaan pabrik, tentu dalam skala kecil, tidak berkelanjutan dan dengan cepat pudar karena kekuatan birokrasi negara dalam mengendalikan situasi. Pada konteks inilah klaim pemerintah yang berkuasa selalu muncul dalam retorika klise, perlunya kehidupan masyarakat yang serasi, selaras dan seimbang dalam koridor stabilitas nasional.

Menyimak buku ini, tidak berlebihan jika berharap muncul interaksi dan komunikasi yang erat antar kelompok berbeda nilai, sikap dan kepercayaan di masyarakat. Namun harus dalam perspektif lebih demokratis yang memberikan hak komunikasi seimbang. Dengan demikian bukan penafsiran sepihak demi kepentingan elite dalam lingkup kekuatan politik pemerintah berkuasa. Kerinduan tanpa gejala di masyarakat, tentu dapat dimaklumi, sebab kondisi pasca reformasi politik tahun 1998, media massa maupun media alternatif setiap saat menyuguhkan aneka pertikaian, konflik, keberingasan massa, dalam belenggu perilaku sub-nasional, komunalisme, sektarianisme dan sejumlah tindakan yang bermuara pada semangat melembagakan perbedaan. (Artikel seputar konflik antar kelompok dapat dibaca di lampiran buku ini)

Dalam dinamika komunikasi sebagai perjalanan sejarah bangsa, dari era yang terbungkam sampai menuju kebebasan berbicara, adalah pelajaran berharga yang harus dijaga dan dipahami. Demokratisasi komunikasi dengan tuntutan kebebasan untuk mencapai kesejahteraan merata tanpa diferensiasi sosial politik harus berakar pada penghargaan terhadap hak asasi manusia. Bagaimanapun juga ini pilihan terbaik yang mampu membangun masyarakat informasi Indonesia berkeadilan.

Buku ini merupakan potret Indonesia sebagai kawasan majemuk yang berjalan damai. Tetapi disisi lain, kebhinnekaan, keanekaragaman dan pluralisme pada masa sebelum reformasi politik tumbuh menjadi jargon klise dalam bingkai Suku, Agama, Ras dan Antargolongan (SARA) yang dinilai membahayakan integrasi nasional. Lebih parah lagi, perilaku otoritarian pengendalian informasi menjadikan rakyat tidak mampu menyuarakan perbedaan meskipun dirugikan oleh berbagai entitas kekuatan negara. Buku ini juga mengupas dinamika kepemimpinan dari sudut pandang kelompok etnik berbeda, sehingga diharapkan dapat memberikan dukungan kepada mereka yang sedang mempelajari kemajemukan komunikasi yang diwarnai oleh kepentingan kelompok.

Mengingat buku ini hasil penelitian ilmiah tahun 1995, maka menggunakan referensi pada kisaran tahun tersebut. Didalamnya memuat konsep, teori dan paradigma terkait dengan pengertian ilmu komunikasi yang paling sederhana sebagai proses penyampaian pesan sampai pada makna konotatif yang memiliki penafsiran kompleks di lingkungan masyarakat majemuk. Kendati demikian, unsur aplikasi komunikasi tetap dikedepankan, agar tidak terlepas dari ilmu komunikasi yang berada pada satu titik persimpangan berbagai ilmu pengetahuan. Dari penerapan ilmu komunikasi ini, dapat diperoleh gambaran komprehensif tentang kondisi faktual di kawasan multi etnik yang mengalami perubahan pada masa pemerintahan sebelum reformasi politik tahun 1998 di Indonesia. Nilai positif dalam hubungan antar kelompok yang beretika, dapat dipakai sebagai referensi membangun kemajemukan untuk masa sekarang dan masa yang akan datang. Sedangkan segala hal yang bernilai negatif dan berpotensi mengganggu kemajemukan harus dijauhkan dalam kehidupan masyarakat yang menjunjung tinggi kebhinekaan.

Pada kesempatan ini, saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Prof. Dr. Harsono Suwardi, MA, Drs. Eduard Lukman, MA dan semua pihak di Program Pascasarjana Ilmu Komunikasi Universitas Indonesia yang memberikan masukan, pengarahan, dan selalu membuka ruang diskusi dalam penyelesaian penelitian yang memiliki sensitivitas terhadap “rasa aman” dan tingkat penolakan tinggi ketika menggali informasi di masyarakat. Terima kasih juga kepada Prof. Ir. Roesdiman Soegiarso, M.Sc., Ph.D, selaku Rektor Universitas Tarumanagara Jakarta tempat penulis saat ini bekerja. Tentu saja saya juga berterima kasih kepada istri, Maya Ratnawati, anak-anak: Dekky, B. Wicaksono, SE., MM, Dennis A. Satrio, SE, dan Deffri I. Adiyanto. Dengan harapan melalui komunikasi terus belajar beradaptasi dengan dinamika perubahan yang positif. Kepada semua pihak yang mendukung penelitian ini termasuk partner diskusi di lokasi penelitian yang terdiri dari beragam profesi saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa melindungi kita



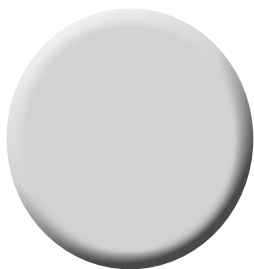
# DAFTAR ISI

<b>Kata Pengantar .....</b>	<b>iii</b>
<b>Daftar Isi .....</b>	<b>vii</b>
<b>Daftar Tabel .....</b>	<b>x</b>
<b>Bab 1. Komunikasi Dalam Keanekaragaman Etnik .....</b>	<b>1</b>
A. Pemimpin Sebagai Sumber Informasi .....	1
B. Budaya Menjadi Landasan Komunikasi .....	5
<b>Bab 2. Kepemimpinan Dalam Komunikasi Antarbudaya.....</b>	<b>11</b>
A. Kredibilitas Kepemimpinan Opini.....	11
B. Perubahan dan Eksistensi Media Massa .....	16
C. Komunikasi Antarbudaya Untuk Meminimalisir Perbedaan.....	24
<b>Bab 3. Menggali Informasi Kemajemukan Etnik.....</b>	<b>33</b>
A. Transportasi, Industri dan Kompleksitas Komunikasi .....	33
B. Menjalin Hubungan Dalam Kemajemukan .....	34
C. Menelaah Karakteristik Keanekaragaman .....	38
<b>Bab 4. Kawasan Komunikasi Multi Etnik .....</b>	<b>41</b>
A. Interaksi dan Komunikasi Dalam Pembangunan .....	41
B. Komunikasi Dalam Kemajemukan Etnik.....	44
C. Komunikasi dan Interaksi Sosial Sebagai Ikatan Harmoni .....	46
D. Media Komunikasi dan Interaksi Antar Kelompok Etnik .....	48

E. Media Tradisional Pemelihara Nilai Budaya .....	51
F. Pemerintahan Sebagai Pengendali Komunikasi .....	53
<b>Bab 5. Interaksi Dan Komunikasi Berbasis Etnisitas.....</b>	<b>57</b>
A. Penjaga Nilai-Nilai Sosial Tanah Kelahiran .....	59
B. Adaptasi dan Kedekatan Hubungan .....	63
C. Menanamkan Semangat Wirausaha dalam Kemajemukan .....	65
D. Kerja Keras Mewarnai Dinamika Kemajemukan.....	67
E. Mencintai Tanah Kelahiran Menghormati Desa Perantauan .....	69
F. Kemajemukan dalam Karakteristik Etnik.....	71
<b>Bab 6. Kemajemukan Sosial, Ekonomi Dan Politik .....</b>	<b>79</b>
A. Kesediaan Beradaptasi Dalam Bingkai Kesetaraan .....	80
B. Berinteraksi dan Berkomunikasi Menjadi Wirausaha .....	83
C. Kelugasan Sebagai Landasan Keeratan Hubungan .....	85
D. Kohesivitas Sosial dalam Kompleksitas Kemajemukan .....	88
<b>Bab 7. Menjalin Hubungan Dalam Kemajemukan .....</b>	<b>91</b>
A. Komunikasi Dalam Penghormatan Nilai Budaya .....	91
B. Merajut Hubungan, Mengembangkan Usaha .....	94
C. Mengedepankan Pendirian dalam Adaptasi .....	96
D. Menjaga Martabat dan Tradisi dalam Kemajemukan.....	98
<b>Bab 8. Kepemimpinan Dan Ekspresi Masyarakat .....</b>	<b>103</b>
A. Kekuasaan Komunikasi Sebagai Agen Modernisasi.....	103
B. Mengkritisi Peran Penggerak Perubahan .....	104
C. Kredibilitas Tokoh Dalam Bingkai Pluralisme.....	109
<b>Bab 9. Kekuasaan Politik Dalam Kemajemukan .....</b>	<b>119</b>
A. Komunikasi dan Dua Kutub Kontradiktif Penggerak Perubahan .....	119
B. Keberadaban Komunikasi dalam Pembaharuan .....	122



<b>Bab 10. Membangun Komunikasi Antar Budaya .....</b>	<b>127</b>
A. Kawasan Heterogin dan Pola Komunikasi Universal.....	127
B. Mengintegrasikan Perbedaan dalam Komunikasi Universal .....	136
C. Menelisik Perubahan Peran Pemimpin dalam Kemajemukan Etnik .....	140
<b>Bab 11. Komunikasi antar Budaya Mendorong Perubahan.....</b>	<b>151</b>
A. Saluran Komunikasi Sebagai Fondasi Perubahan .....	151
B. Komunikasi Antar Kelompok Etnik dan Rasionalisasi Perubahan .....	157
<b>Bab 12. Kemajemukan Etnik Sebagai Pilihan .....</b>	<b>163</b>
A. Menuju Kemajemukan Etnik Demi Kesejahteraan .....	163
B. Berfokus Pada Gerakan Perubahan .....	166
<b>Daftar Pustaka.....</b>	<b>169</b>
<b>Lampiran .....</b>	<b>175</b>



## DAFTAR TABEL

<b>Tabel 1. Identitas Informan Etnik Sunda .....</b>	<b>71</b>
<b>Tabel 2. Identitas Informan Etnik Jawa .....</b>	<b>73</b>
<b>Tabel 3. Identitas Informan Etnik Minangkabau.....</b>	<b>75</b>
<b>Tabel 4. Identitas Informan Etnik Batak.....</b>	<b>76</b>
<b>Tabel 5. Identitas Informan Etnik Madura .....</b>	<b>77</b>
<b>Tabel 6. Pendapat Kelompok Etnik Sunda tentang Kelompok Etnik Pendetang Dalam Hubungan Antar Etnik meliputi Bidang Sosial, Ekonomi, dan Politik .....</b>	<b>130</b>
<b>Tabel 7. Pendapat Kelompok-Kelompok Etnik Pendetang Tentang Kelompok Etnik Sunda Meliputi Bidang Sosial Ekonomi Dan Politik .....</b>	<b>136</b>
<b>Tabel 8. Kepemimpinan Kepala Desa sebagai Agen Modernisasi ditinjau dari Kegiatan Sosial, Ekonomi dan Politik Berdasarkan Pendapat Kelompok Etnik Penduduk Asli dan Pendetang.....</b>	<b>143</b>
<b>Tabel 9. Pendapat Kelompok Etnik Penduduk Asli dan Pendetang Terhadap Kendala &amp; Faktor-Faktor Pendukung Kepemimpinan Kepala Desa Sebagai Agen Modernisasi.....</b>	<b>152</b>

# BAB 1

## KOMUNIKASI DALAM KEANEKARAGAMAN ETNIK

---

### A. Pemimpin Sebagai Sumber Informasi

Komunikasi merupakan upaya membangun kesamaan makna yang mampu mendorong berbagai kelompok masyarakat untuk memperoleh kehidupan dan penghidupan yang lebih baik. Dengan terbukanya akses komunikasi yang didukung fasilitas transportasi, maka perpindahan penduduk dari satu wilayah ke wilayah lain menjadi semakin mudah dilakukan. Kawasan yang semula homogen dari segi etnik, menjadi heterogen yang terdiri dari bermacam-macam kelompok etnik dalam satu wilayah. Keanekaragaman kelompok etnik, selain mencerminkan kemajemukan sosial ekonomi dan politik yang bermakna positif dalam bingkai kebhinekaan, juga berpotensi menimbulkan permasalahan krusial yang mengancam ketenteraman masyarakat. Oleh sebab itu, diperlukan seorang pemimpin yang dapat mengatasi berbagai persoalan masyarakat dan mampu mengelola kemajemukan demi mencapai kesejahteraan bersama.

Secara substantif Stogdill (1974: 215), mengemukakan, bahwa kepemimpinan merupakan hubungan antar manusia, yang terjadi pada situasi dan terarah melalui proses komunikasi tertentu dalam mencapai tujuan yang diharapkan. Sedangkan Rogers dan Svenning (1989:223) menyebutkan, “kepemimpinan merupakan kemampuan bertindak dan berkomunikasi untuk mempengaruhi perilaku orang lain sesuai dengan jalan yang diinginkan dalam mencapai tujuan yang sudah ditetapkan”. Berdasarkan dua pendapat tersebut, dapat disimpulkan bahwa kepemimpinan berkaitan dengan suatu kemampuan berkomunikasi untuk mempengaruhi orang lain, dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Dalam perspektif sosial dan kesejarahan, pendapat lain yang lebih menitikberatkan kepada interaksi antara pemimpin dan pengikut adalah Sartono Kartodirjo (1986:vi) yang mengungkapkan bahwa “kepemimpinan dalam ilmu sosial tidak dapat diterangkan terlepas dari kolektivitas sosial dimana pemimpin bertindak”. Dalam kolektivitas sosial terjadi proses interaksi antara pemimpin dan pengikut yang berpijak kepada, pertama

dengan kekuasaannya pemimpin mempengaruhi pengikut, sedangkan yang kedua, pemimpin berupaya untuk mengarahkan tindakannya menuju pada tujuan kolektif atau mempolakan kelakuan berdasarkan nilai-nilai yang berlaku.

Pada konteks ini, kepemimpinan bukan semata-mata mampu mengkomunikasi tujuan yang hendak dicapai bersama, tetapi juga harus berpijak kepada nilai, norma dan karakteristik lingkungan disekelilingnya. Secara substantif, menghasilkan kepemimpinan yang tidak tercabut dari akarnya dan tetap berpihak kepada pengikut sebagai khalayak yang mempercayai adalah kepemimpinan yang dikehendaki masyarakat.

Interaksi yang timbul antara pemimpin dengan yang dipimpin (pengikut) berhubungan erat dengan aspek komunikasi antar manusia, sebagaimana ditegaskan oleh Bowers dan Bradac (*Communication Yearbook* 5, 1982:2) yang menyatakan bahwa, "komunikasi adalah tingkah laku individu dan merupakan hubungan antara berbagai tingkah laku dari pribadi-pribadi yang berinteraksi". Pendapat yang senada dikemukakan oleh Littlejohn (1992:3), bahwa komunikasi adalah sesuatu yang berarti dan penting, serta merupakan kumpulan dari bermacam-macam perilaku, kemampuan berkomunikasi dengan baik itulah yang membedakan manusia dan binatang.

Kemampuan berkomunikasi adalah sesuatu yang semestinya dimiliki oleh pemimpin, karena pemimpin mempunyai kesempatan yang lebih luas untuk berkomunikasi dengan pengikutnya, sehingga pola komunikasi yang dipakai pemimpin sering menjadi sorotan yang menarik oleh masyarakat (Terry, 1958:38). Hubungan antara kepemimpinan dengan komunikasi dinyatakan oleh Astrid S. Susanto (1977:81), komunikasi yang oleh banyak ahli didefinisikan sebagai suatu proses dimana suatu amanat disampaikan oleh seseorang (komunikator) kepada pihak lain (komunikan) sangat dipengaruhi oleh sikap atau pola kepemimpinan, disamping itu kepemimpinan juga berpengaruh terhadap intensitas komunikasi antar manusia dalam berbagai kelompok yang ada di masyarakat.

Namun pemimpin di lingkungan masyarakat desa, sebagai basis kekuatan negara dalam menegakkan kebhinekaan bernegara, tidak bisa disamakan dengan pola kepemimpinan dalam institusi formal, yang hanya menetapkan aspek keuntungan dalam perspektif tujuan organisasi. Kekuasaan politik dan ekonomi yang sarat dengan beragam ketentuan, seringkali tidak menghiraukan fleksibilitas komunikasi maupun interaksi antar manusia. Karena itu, mengingat hubungan antara pemimpin dan pengikut di lingkungan pedesaan tidak selalu merujuk pada aspek legal formal, maka masyarakat desa juga patuh terhadap kepemimpinan informal yang dipercaya sebagai sumber informasi bermanfaat bagi mereka.

Menurut Soerjono Soekanto (1981:179) pemimpin formal atau *formal leadership*, adalah kepemimpinan yang tersimpul di dalam suatu jabatan yang dalam pelaksanaannya berada di atas landasan-landasan atau peraturan-peraturan resmi sehingga dengan demikian daya cakupannya terbatas.

Merujuk kepada aspek legalitas formal, kepemimpinan di pedesaan melekat dalam Kepala desa sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang No.5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa. Tetapi pada prakteknya unsur-unsur informal dalam pelaksanaan kepemimpinan sangat menonjol, mengingat tugas Kepala desa mencakup pula kegiatan sebagai alat pemerintahan desa, dan sebagai individu yang penuh dengan tindakan-tindakan informal untuk mempengaruhi masyarakat. (Ndraha, 1991:78-89). Pola kepemimpinan yang demikian menunjukkan bahwa Kepala Desa mempunyai posisi strategis dalam memimpin masyarakat pedesaan. Ditegaskan oleh Theodore M. Smith (dalam Kuncaraningrat, 1984: 197), kebanyakan masyarakat desa menunggu bimbingan Kepala desa, bahkan di daerah-daerah tertentu Kepala Desa dianalogikan sebagai raja kecil yang menguasai rakyatnya. Disamping itu, Kepala Desa juga mempunyai posisi kuat sebagai pemerintah di desa.

Dikaitkan dengan aspek komunikasi, peranan memberi bimbingan tentang kebijakan pemerintah pusat, pemerintah desa dan hasil kesepakatan musyawarah desa yang harus diketahui oleh seluruh warga desa, tidak terlepas dari pengertian tentang kepemimpinan pemuka pendapat (*opinion leader*) yang harus mendifusikan pesan secara terbuka kepada masyarakat. Pada prakteknya Kepala Desa bertindak sebagai pemimpin maupun pemuka pendapat, yang dipakai sebagai sumber informasi, berita maupun pesan yang dipercaya oleh warga pedesaan.

Sejalan dengan perkembangan masyarakat sebagai akibat kemajuan teknologi komunikasi dan transportasi, serta pertumbuhan penduduk yang pesat, penerapan kepemimpinan Kepala Desa menciptakan upaya-upaya modernisasi yang menurut Cyrill E.Black (1976:30) sebagai suatu proses perubahan secara cepat dalam hubungan manusia sejak revolusi ilmiah lahir. Dalam kedudukannya sebagai agen modernisasi atau agen pembaharuan, kepemimpinan Kepala Desa dituntut untuk dapat berkomunikasi, beradaptasi dengan lingkungan sosial yang senantiasa berubah mengikuti dinamika sosial, ekonomi dan politik.

Perubahan di pedesaan yang dipicu oleh perkembangan teknologi komunikasi yang menonjol adalah pola interaksi antar kelompok yang bersifat heterogin. Relasi dan komunikasi diantara budaya homogin yang sama dalam karakter sosial dan ekonomi dalam lingkup etnisitas, berubah menjadi komunikasi antar budaya yang berbeda dalam satu lingkungan sosial budaya pedesaan. Kondisi ini menurut Rogers dan Svenning (1969:233-238) dikenal dengan istilah homofili, yang menggambarkan tingkat dimana pihak yang benteraksi memiliki kesamaan dalam beberapa hal seperti nilai-nilai, kepercayaan dan status sosial yang melekat pada masyarakat. Sedangkan heterofili menggambarkan bahwa individu yang berinteraksi sangat berbeda dalam berbagai hal dalam nilai, sikap, kepercayaan dan *worldview*.

Padahal pandangan Gonzales (dalam Jahi, 1988:91), bahwa orang-orang yang tidak memiliki kesamaan dalam karakteristik sosial budaya, cenderung kurang berkomunikasi

satu sama lain. Dengan demikian dalam nuansa perbedaan, komunikasi bisa berjalan kurang integratif dan kohesif yang berpotensi menimbulkan pemahaman makna berbeda terhadap berbagai masalah yang ditafsirkan oleh dua pihak yang memiliki perbedaan nilai, sikap dan kepercayaan dalam satu kawasan.

Bertitik tolak pada pola interaksi tersebut, walaupun heterofili dalam pandangan konvensional bukan suatu hal yang menguntungkan dalam menciptakan komunikasi efektif, khususnya terhadap masalah sosial-kultural diantara kelompok masyarakat yang berbeda karakter, tetapi komunikasi dalam nuansa perbedaan tidak dapat dihindari dalam kondisi yang multi etnik di satu wilayah. Interaksi antar etnik terjadi di berbagai wilayah. Menurut Lee (1987:14), karena meningkatnya peran teknologi yang mengurangi faktor penghalang jarak yang membatasi mobilitas, perhubungan menjadi lebih mudah dan transportasi relatif murah. Kondisi ini menyebabkan masyarakat pada suatu wilayah geografis tertentu dengan mudah melakukan hubungan dengan masyarakat wilayah geografis lainnya yang pada akhirnya terjadi interaksi antar budaya diantara mereka.

Sejalan dengan pemikiran tersebut, dan lebih mempertegas dalam hubungannya dengan perkembangan informasi adalah pendapat Aris Ananta yang dikutip Ida Bagus Mantra (Kompas, 15 November 1995:13), "bahwa dengan peningkatan sarana transportasi dan informasi, penduduk akan makin mobil". Revolusi informasi dan globalisasi yang kini sedang melanda dunia akan mempercepat terjadinya transisi mobilitas penduduk, yaitu suatu proses perubahan pola dan angka mobilitas, dari non permanen ke mobilitas penduduk yang lebih permanen lagi.

Mobilitas tinggi dalam perpindahan penduduk antar wilayah berpengaruh terhadap karakteristik daerah-daerah pedesaan. Banyaknya penduduk dari satu wilayah geografis yang satu ke daerah geografis lain berakibat pula terhadap keadaan desa yang pada mulanya lebih bersifat homogen ditinjau dari keberadaan etnik yang mendiami wilayah, berkembang menjadi heterogen dengan kemajemukan etnik yang memiliki keanekaragaman karakteristik. Di Indonesia menurut Hildred Geertz (1981:1), terdapat "kira-kira tigaratus suku bangsa atau golongan etnik dan lebih kurang duaratus limapuluh bahasa daerah, setiap suku bangsa memiliki identitas budayanya sendiri dan sering juga bahasanya sendiri".

Masyarakat desa yang terdiri dari berbagai macam etnik tersebut, ternyata masing-masing masih memelihara nilai-nilai budaya asli meskipun dalam kadar yang berbeda. Dalam arti, ada kelompok etnik yang terlampaui ketat menjaga nilai dan norma yang berlaku dalam bidang sosial, tetapi cukup longgar dalam penerapan pada masalah ekonomi dan perdagangan. Tentu saja terdapat berbagai variasi dalam menjaga maupun melembagakan nilai sosial budaya, ekonomi dan politik yang ada diantara kelompok-kelompok etnik.

## B. Budaya Menjadi Landasan Komunikasi

Keanekaragaman sosial budaya di suatu wilayah, menciptakan pola komunikasi dalam interaksi antar etnik dan perubahan lain yang membentuk dinamika maupun keragaman konstelasi sosial, politik dan ekonomi. Pendapat Emile Durkheim (dalam Giddens, 1986:92), menyebutkan bahwa, “meningkatnya keanekaragaman sosial menjadi ciri khas proses perkembangan bentuk-bentuk masyarakat tradisional menjadi modern”. Artinya, kemajemukan etnik dengan aneka kelompok yang memiliki perbedaan karakteristik sosial budaya, merupakan gambaran konkrit proses menuju kehidupan masyarakat modern, yang dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat lebih berkualitas dalam mencapai kesejahteraan. Selain itu, secara tegas Jean Martin (1981:141) mengemukakan, “pluralisme sosial adalah sebagai pilihan yang terbaik untuk masyarakat, kelompok maupun individu”. Jelas bahwa, kemajemukan, pluralisme, heterogenitas dan keanekaragaman masyarakat, merupakan jalan yang paling relevan menuju masyarakat adil dan berkeadilan

Berdasarkan pendapat-pendapat tersebut, keanekaragaman etnik sebagai suatu kondisi dinamis dimana aspek-aspek sosial budaya terus berkembang sesuai dengan intensitas interaksi dan komunikasi diantara kelompok-kelompok etnik yang hidup berdampingan dalam suatu wilayah.

Walaupun konstelasi sosial, ekonomi dan politik terus mengalami perubahan-perubahan di lingkungan masyarakat majemuk, tetapi nilai, sikap dan kepercayaan yang menjadi ciri khas dari masing-masing etnik tetap melekat. Bahkan bisa saja semakin menguat karena perasaan senasib, atau semakin emosional untuk mempertahankannya, jika batas nilai-nilai etnik merasa terganggu oleh keberadaan kelompok budaya lain yang berbeda.

Menguatnya ciri etnik dalam situasi keanekaragaman dapat berpengaruh pada perasaan satu kelompok, dan bukan kelompoknya sebagaimana dikemukakan oleh Alo Liliweri (1994:5), bahwa, “kehidupan bersama etnik-etnik memberi warna khusus pada struktur-struktur masyarakat majemuk yang dapat berpengaruh pada proses komunikasi antar etnik atau antar budaya, yaitu kecenderungan semakin kuatnya etnisitas setiap etnik melalui perasaan *ingroup* atau *outgroup*”. Berkembangnya perasaan *ingroup* dan *outgroup* disebabkan oleh nilai dan kepercayaan yang melekat pada masing-masing etnik, sehingga mereka sadar bahwa, ada hal-hal yang tidak sejalan dengan pola budaya yang dimiliki dan dianut secara terus-menerus oleh kelompok etniknya. Pada akhirnya, pengaruh budaya akan selalu terbawa pada saat mereka berinteraksi dan berkomunikasi dengan kelompok-kelompok lain.

Pendapat yang senada, dikemukakan oleh Samovar dan Porter (dalam Samovar & Porter.ed., 1988:20), budaya dan komunikasi tidak dapat dipisahkan, karena budaya tidak hanya menentukan siapa bicara dengan siapa, tentang apa dan bagaimana komunikasi berlangsung, tetapi budaya juga turut menentukan bagaimana orang menyandi pesan,

makna yang ia miliki untuk suatu pesan, dan kondisi untuk mengirim, memperhatikan dan menafsirkan pesan. Selanjutnya ditambahkan pula oleh Samovar et.al. (1988:21), “sebenarnya seluruh perbendaharaan perilaku kita sangat bergantung pada budaya tempat kita dibesarkan. Konsekuensinya, budaya merupakan landasan komunikasi”. Bila budaya beraneka ragam, maka beraneka ragam pula praktek-praktek komunikasi sosial-budaya, politik dan ekonomi.

Dalam pembahasan yang lebih mendalam tentang komunikasi dan budaya, Samovar, Porter & Jain (1981:36-47) menghubungkan antara budaya, dengan praktek dan perilaku komunikasi yang menghasilkan komunikasi antarbudaya. Dalam komunikasi antar budaya yang ideal, diharapkan mampu membentuk persamaan pengalaman dan persepsi. Tetapi kondisi itu sulit tercapai karena budaya cenderung memeberikan pengalaman yang berbeda karena membawa persepsi yang tidak sama terhadap suatu objek eksternal. Peranan persepsi yang begitu kuat dalam perilaku komunikasi, dipengaruhi oleh unsur sosial budaya seperti kepercayaan, nilai dan sikap yang melekat pada setiap individu. Demikian pula faktor-faktor bagaimana cara individu memandang dunia (*worldview*) dan organisasi sosial dimana individu bernaung, adalah unsur yang kuat dalam membentuk persepsi dalam hubungan antar manusia maupun dengan lingkungan sekitarnya.

Persepsi individual yang sudah dipengaruhi oleh unsur-unsur sosial budaya dalam penelaahan Samovar, Porter dan Jain (1981:121), menciptakan stereotip (*stereotype*), yaitu penggeneralisasian terhadap suatu objek yang terlalu luas, dan prasangka (*prejudice*) yang sarat dengan emosi, kaku dan sulit untuk diubah. Dua faktor yang berhubungan dengan persepsi, selalu muncul dalam interaksi sosial budaya di lingkungan masyarakat yang berbeda etnik.

Stereotip dan prasangka, mempunyai aspek-aspek yang positif maupun negatif, tetapi pada umumnya perwujudan sikap yang menonjol dalam memberikan penilaian terhadap kelompok diluar etniknya lebih bersifat negatif. Unsur-unsur negatif inilah sebagai salah satu hamabatan kepemimpinan di pedesaan yang berpenduduk multi etnik maupun perbedaan lain dalam lingkup status sosial ekonomi yang mengacu pada pendidikan, pekerjaan dan penghasilan serta berbagai diferensiasi yang rawan dengan konflik antar kelompok berbeda. Padahal sebagaimana dikemukakan oleh Wilbur Schramm (dalam Depari dan MacAndrew, 1988:43) agar dapat melaksanakan pembaharuan untuk mencapai kesejahteraan, penting sekali pengenalan budaya dengan baik serta pengertian terhadap pola-pola hidup tertentu sejalan dengan perubahan.

Selain faktor yang menghambat kepemimpinan Kepala desa dengan situasi perubahan kea rah modernisasi, tentu saja terdapat berbagai faktor yang mendukung peran kepemimpinan di lingkungan khalayaknya. Faktor utama yang dapat dipakai sebagai rujukan memberikan dukungan kepemimpinan terkait dengan kekuasaan formal dalam situsasi multi etnik, yang masih sangat kuat di lingkungan masyarakat desa. Di samping itu peranan penduduk yang asli berasal dari wilayah setempat, dalam segi tertentu masih



cukup menanamkan pengaruh kuat. Misalnya mereka sebagai orang yang mengetahui secara tepat proses sejarah perkembangan desa sejak awal terbentuknya berdasarkan informasi turun temurun.

Sebagai orang setempat, Kepala desa mampu menciptakan komunikasi yang homofili, sehingga pesan-pesan yang dikehendaki lebih dapat diterima. Walaupun bisa saja dapat terjadi menghasilkan komunikasi yang sebaliknya, jika pesan-pesan perubahan itu justru mengganggu eksistensi nilai-nilai warga asli pedesaan, dan menguntungkan kelompok-kelompok lain yang berbeda budaya dalam struktur sosial ekonomi dan politik.

Dalam konteks ini, upaya mengetahui lebih terinci tentang kepemimpinan Kepala desa sebagai agen modernisasi, yang memperkenalkan ide-ide pembaruan dalam hubungan antar etnik di lingkungan masyarakat desa, menjadi faktor krusial masyarakat majemuk yang heterogin dari segi sosial budaya.

Sampai dimana pola kepemimpinan itu bisa diterima oleh semua etnik di pedesaan yang dinamik karena perkembangan teknologi, hakikatnya berpijak kepada aspek yang tidak merugikan salah satu kelompok etnik. Dengan demikian dalam situasi kemajemukan akan tumbuh dukungan serta partisipasi terhadap program-program pemerintah yang disampaikan oleh Kepala Desa.

Partisipasi dan dukungan dari masyarakat berbagai kelompok etnik, selain dapat dilihat dari kegiatan-kegiatan yang nyata, juga tercermin dari pendapat yang dikemukakan oleh masyarakat terhadap pola kepemimpinan Kepala Desa sebagai agen modernisasi ataupun agen perubahan yang tidak membeda-bedakan keberadaan etnis di wilayahnya.

Pendapat masyarakat terhadap kepemimpinan agen modernisasi dipengaruhi oleh nilai budaya, jadi tidak serta merta seperti yang tampak dalam komunikasi verbal maupun non verbal ketika melakukan interaksi di masyarakat. Bernard Henessy (1980:105), menyatakan bahwa, "pendapat dibentuk oleh tradisi kultural, lembaga sosial dan kaidah kelompok masyarakat yang memposisikan setiap orang menjadi bagian yang tidak terpisahkan". Disamping itu masyarakat dalam memberikan pendapat tentang Kepala Desa, juga tidak terlepas posisi formal Kepala Desa sebagai orang yang paling berkuasa untuk melakukan perubahan di lingkungan organisasi pemerintahan Desa.

Tetapi secara faktual dalam koridor komunikasi, selain aspek budaya dan kekuasaan, perkembangan media massa sebagai entitas yang memberikan informasi, mempunyai kontribusi dalam menciptakan hambatan atau dukungan terhadap pesan-pesan Kepala Desa yang mengandung makna modernisasi untuk semua warga desa. Eksistensi media massa sebagai faktor yang menunjang perubahan sosial termasuk bergesernya sikap masyarakat yang menjadi lebih dinamis merupakan pertanda, bahwa media massa mampu memberikan informasi dan pengetahuan yang lebih luas kepada masyarakat.

Denis Mc Quail (1987:2) mendukung kenyataan itu, dengan menandakan “media-massa merupakan sumber kekuatan alat kontrol, manajemen dan inovasi dalam masyarakat yang didayagunakan sebagai pengganti kekuatan atau sumber daya lainnya”. Demikian juga apa yang dinyatakan oleh Daniel Lerner (1992:30), cepatnya penyebaran hasrat hidup baru, merupakan kekuatan dinamis bagi modernisasi, paling jelas tampak pada datangnya media massa yang memberikan informasi berbagai hal kepada khalayak pedesaan. Walaupun media massa mempunyai peranan yang besar di masyarakat, tetapi Rogers (1967:123) melihat terdapat aspek lain yang menonjol dalam perubahan di pedesaan dengan mengemukakan: “meskipun eksistensi media massa sangat penting dalam mengubah sikap masyarakat, tetapi komunikasi interpersonal di pedesaan masih mempunyai peranan menonjol dalam menciptakan perubahan”.

Berpangkal pada berbagai pendapat tersebut diatas, dapat disimpulkan bahwa media massa mempunyai kekuatan mempengaruhi khalayak atau masyarakat, tetapi saluran interpersonal mempunyai posisi yang demikian penting dalam menciptakan perubahan-perubahan di pedesaan. Tentu saja tidak dapat dinafikan, komunikasi interpersonal yang terjadi, tidak lepas dari sentuhan-sentuhan informasi yang juga didifusikan oleh media massa.

Pada hakikatnya, keanekaragaman etnik dan perubahan sosial-budaya, ekonomi dan politik yang terjadi di desa menimbulkan aneka persoalan, tetapi kehidupan masyarakat yang berbeda etnik berjalan terus. Walaupun terkadang muncul konflik kepentingan sebagai akibat modernisasi ataupun perubahan di lingkungan pedesaan. Dengan kata lain, kebersamaan pada suatu wilayah geografis tetap berjalan dengan baik seperti dilukiskan oleh Hildred Geertz (1981:86), “kesadaran akan variasi kebudayaan amat menonjol dan terdapat dimana-mana di kalangan rakyat Indonesia, karena mereka telah hidup dengan kebhinekaan etnis selama ribuan tahun lamanya”. Kehidupan bersama dalam keanekaragaman etnis atau kebhinekaan etnis tersebut, dalam kapasitas masyarakat dan geografis yang lebih kecil, akan dijumpai pula di wilayah perkotaan, pedesaan maupun pinggiran kota (*suburb*) Indonesia.

Di Provinsi Jawa Barat, pada suatu daerah pedesaan di kawasan pantai utara (pantura) Pulau Jawa, sekitar Kabupaten Karawang dapat kita jumpai apa yang dikemukakan oleh Geertz, bahwa keanekaragaman etnik dalam suatu kawasan mewarnai dinamika interaksi dan komunikasi masyarakat. Pluralisme etnik di pedesaan tersebut tidak terlepas dari posisi geografis sebagai kawasan pinggiran kota yang dinamis di jalur jalan negara pantai utara dari Jakarta menuju ke wilayah Provinsi Jawa Tengah. Sebagian wilayah desa lokasi penelitian di pantura ini, dapat dikatakan terjadi aktivitas kerja, komunikasi dan interaksi antar manusia yang tidak pernah berhenti sepanjang hari selama duapuluh empat jam.

Sejalan dengan pertumbuhan kawasan pantura yang mudah diakses masyarakat karena tersedianya sarana transportasi memadai, maka pedesaan di pantura juga mengalami perubahan sosial ekonomi yang menarik perhatian. Tidak saja bagi

masyarakat setempat, tetapi orang-orang dari berbagai daerah lain dengan etnik yang berbeda seperti datangnya orang-orang Jawa, Batak, Minangkabau dan Orang Madura ke desa kawasan pantura. Kedatangan berbagai kelompok etnik di kawasan yang mengalami perubahan menjadi semakin dinamis jika dicermati dari komunikasi antarbudaya yang berbeda dalam karakter sosial, ekonomi maupun politik.

Pada umumnya kelompok-kelompok etnik pendatang mempunyai tujuan yang sama, yaitu mencari penghidupan dan mata pencarian yang lebih baik dibandingkan daerah yang ditinggalkannya. Karena itu desa kawasan pantura dinilai menjanjikan kehidupan lebih baik, dengan berkembangnya sektor industri maupun sektor-sektor kegiatan perekonomian lain yang menjadi tujuan membangun kehidupan yang lebih layak.

Secara substantif, heterogenitas pedesaan dilihat dari segi keanekaragaman etnik merupakan dampak langsung atau tidak langsung dari perkembangan teknologi komunikasi dan transportasi yang memberikan kemudahan mobilitas. Di pihak lain, pertumbuhan kawasan yang menjanjikan materi lebih layak menjadi penentu pula munculnya kemajemukan. Berbagai kelompok masyarakat meninggalkan daerah asalnya, demi mencari penghasilan memadai dari aspek ekonomi. Namun keanekaragaman etnik tidak hanya membawa implikasi keragaman budaya tetapi juga terbentuknya variasi sosial, ekonomi dan politik. Keragaman yang nampak menonjol dalam hubungan antar kelompok, merupakan salah satu ciri perubahan terbentuknya masyarakat yang semakin modern, lebih rasional serta efisien.

Karena itu, bukan hal yang aneh jika dikatakan, bahwa proses perkembangan masyarakat dan perubahan sosial menimbulkan permasalahan tersendiri bagi masyarakat desa, maupun bagi para elite di pedesaan. Kepala Desa sebagai elite kekuasaan negara yang langsung berinteraksi dengan masyarakat, dalam menerapkan kepemimpinan juga mengalami pergeseran-pergeseran peran di mata khalayaknya. Kepala desa tidak lagi semata-mata berinteraksi dan berkomunikasi dalam suasana homofili dengan orang yang satu etnik, tetapi juga menghadapi para pendatang di wilayahnya dalam bingkai keanekaragaman.

Upaya tetap menegakkan kebhinekaan dalam menangani berbagai problem potensial yang rawan konflik, merupakan tantangan bagi Kepala Desa sebagai pemimpin formal. Tidak ada pilihan bagi orang yang paling berkuasa di desa ini, selain harus menjalankan kekuasaan dengan komunikasi yang dapat menjadi rujukan berbagai kelompok etnik di wilayahnya.

Komunikasi & Gerakan Perubahan

# BAB 2

## KEPEMIMPINAN DALAM KOMUNIKASI ANTARBUDAYA

---

### A. Kredibilitas Kepemimpinan Opini

Pengertian tentang kepemimpinan sangat beragam, tetapi pada prinsipnya dalam perspektif komunikasi, merupakan suatu kegiatan komunikasi untuk mempengaruhi orang-orang supaya dapat bekerjasama dalam mencapai tujuan yang diinginkan. Haiman (dalam Stogdill, 1974:7), menyatakan, “kepemimpinan adalah kemampuan mempengaruhi dalam proses interaksi melalui pembicaraan ataupun melalui perilaku orang lain”. Sehaluan dengan itu, Keith Davis (1962:96) menegaskan, “kepemimpinan adalah suatu kemampuan untuk mempengaruhi orang lain melalui komunikasi dan aktivitas lainnya secara bersemangat dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditentukan”.

Sementara Ordway Ted (dalam S.R.Menta, 1972:3) berpendapat, “kepemimpinan sebagai suatu kepribadian dan akibat-akibatnya yang diwujudkan dalam bentuk aktivitas mempengaruhi orang-orang untuk bekerjasama mencapai beberapa tujuan yang ingin diperoleh”. Sejalan dengan dua pendapat tersebut adalah apa yang dikemukakan secara singkat oleh Everett M. Rogers (1969:223) bahwa “kepemimpinan sebagai kemampuan bertindak dan berkomunikasi untuk mempengaruhi orang lain sesuai dengan jalan yang diinginkan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan”.

Berdasarkan uraian tentang kepemimpinan, dapat disimpulkan bahwa unsur-unsur yang menonjol dalam kepemimpinan adalah kemampuan berkomunikasi untuk mempengaruhi individu maupun kelompok dalam masyarakat. Tetapi kegiatan mempengaruhi tidak mudah dilakukan, mengingat ada berbagai macam kendala yang melekat dalam menjalankan peran kepemimpinan di masyarakat. Oleh karena itu, seringkali pemimpin menggunakan kekuasaan formal dalam nuansa “memaksa” untuk mempengaruhi masyarakat pada umumnya.

Upaya untuk mempengaruhi orang lain dalam konteks penggunaan kekuasaan (*power*) menurut Laswell dan Kaplan (dalam Robert A.Dahl, 1978:47) berkaitan erat dengan otoritas yang melekat pada pemimpin. Kekuasaan pada konteks ini adalah

kemampuan pelaku untuk mempengaruhi tingkah laku pelaku lain sedemikian rupa, sehingga tingkah laku pelaku terakhir, menjadi sesuai dengan keinginan dari pelaku yang mempunyai kekuasaan. Selanjutnya jenis-jenis kekuasaan secara mendasar dikemukakan oleh Amitai Etzioni (dalam Robbin,1980:80) yang membagi kekuasaan menjadi dua jenis yaitu: *Position Power* dengan *otoritas formal* dan *personal power* yang timbul dari keteladanan kepribadian.

Mendiskusikan kepemimpinan dalam hubungannya dengan komunikasi tidak terlepas dari pendapat Robert Tanenbaum (dalam Widjaja,1985:63) yaitu bahwa kepemimpinan merupakan pengaruh luar, terlaksana dalam situasi diarahkan mencapai tujuan tertentu melalui proses komunikasi. Disini menunjukkan bahwa sebenarnya tercapainya suatu tujuan karena kemampuan pemimpin dalam berkomunikasi.

Pada hakikatnya tidak semua pemimpin mempunyai kemampuan untuk mempengaruhi, salah satu kegagalan dalam mempengaruhi disebabkan oleh ketidaktepatan dalam menerapkan gaya dan tipe kepemimpinan. Paul Hersey dan Kenneth Blanchard (dalam Myers & Myers,1998:194-195) menyatakan bahwa “pemimpin yang berhasil adalah mereka yang selain memiliki kemampuan pribadi tertentu, juga mampu membaca keadaan anak buah dan lingkungannya”. Model ini bertitik tolak dari pendekatan situasional, yang berpedoman pada tidak ada gaya kepemimpinan, yang selalu efektif untuk diterapkan dalam setiap situasi. Gaya kepemimpinan akan efektif jika disesuaikan dengan tingkat kematangan atau kemampuan anak buah.

Dari asumsi tersebut, Paul Hersey dan Kenneth Blanchard menetapkan empat gaya kepemimpinan yang merupakan paduan dari upaya penugasan (*task behavior*) dan upaya pendukung (*relationship behavior*) yaitu: 1. Gaya kepemimpinan penuntunan (*Telling*); 2. Gaya kepemimpinan penawaran (*Selling*); 3. Gaya kepemimpinan pengikut sertaan (*Participating*); 4. Gaya kepemimpinan pendelegasian (*Delegation*). Sebagaimana Hersey dan Blanchard, Wendel L. French (1978:98-99) menetapkan empat gaya kepemimpinan yaitu: gaya kepemimpinan otokratis, birokratis, demokratis dan gaya kepemimpinan bebas. Keempat gaya kepemimpinan ini, pada intinya mempunyai persamaan pengertian dengan apa yang dikemukakan oleh pakar-pakar dibidang kepemimpinan.

Selain berbagai tipe dan gaya kepemimpinan tersebut di atas, ditinjau dari aspek sosiologis pada masyarakat tradisional yang agraris menurut Soerjono Soekanto (1981:182-183), “kepemimpinan seseorang (pemimpin) harus mempunyai sandaran-sandaran kemasyarakatan atau *social basic*”. Pertama-tama kepemimpinan erat hubungannya dengan susunan masyarakat. Misalnya: dalam masyarakat yang agraris dimana belum ada spesialisasi, biasanya kepemimpinan meliputi semua bidang kehidupan.

Berbagai macam gaya kepemimpinan sebagaimana yang diterangkan di atas, tentu saja akan membentuk pola komunikasi tertentu seperti pendapat yang dikemukakan Astrid S Susanto dalam Prisma No: 3 (1974) yang menyebutkan, didalam pola komunikasi

linier sebagai akibat diterapkan komunikasi satu arah, amanat tersebut memang "arrived" sampai kepada komunikan, akan tetapi belum ada jaminan bahwa amanat tersebut "accepted" diterima dan dimengerti oleh penerima.

Pola komunikasi satu arah ini cenderung akan dilakukan oleh orang-orang yang mempunyai gaya kepemimpinan otokratis, yang memberikan kekuasaan besar kepada pemimpin. Berdasarkan hal itu, berarti gaya kepemimpinan akan tampak pula dalam pola-pola komunikasi yang dilakukan oleh seorang pemimpin.

Pemimpin dalam pengertian yang lebih spesifik dikaitkan dengan kemampuan berkomunikasi, tidak terlepas dari konsep tentang kepemimpinan pemuka pendapat (*opinion leadership*) yang menurut Rogers (1973:105) adalah, sebagai suatu kemampuan untuk mempengaruhi sikap atau perilaku seseorang secara informal, sesuai dengan kehendak si pemimpin melalui hubungan sosial yang dibina. Sebelumnya Rogers dan Shoemaker (1971:199) menyebutkan bahwa orang-orang yang memiliki kemampuan untuk mempengaruhi orang lain disebut tokoh masyarakat, pemuka pendapat ataupun sebutan lainnya yang senada. Kelompok-kelompok pemuka pendapat pedesaan terdiri dari para pendidik, teknisi-teknisi, spesialis maupun politisi. Sering juga terjadi kelompok pemuka pendapat tersebut merupakan kader partai yang sedang berkuasa (Syed A.Rahim dalam Schramm dan Leaner,1976).

Dihubungkan dengan karakteristik yang melekat, Rogers (1969:227) menyatakan, biasanya pemuka pendapat mempunyai frekuensi berhubungan dengan media massa lebih besar dibandingkan dengan masyarakat lainnya, sehingga mereka mempunyai pengetahuan yang luas yang dapat dipakai sebagai salah satu kekuatan untuk dipercaya oleh masyarakat dalam menyampaikan pesan-pesan untuk tujuan yang dikehendaki.

Dalam perkembangannya, Van Den Ban (1981:293) menyatakan pemimpin-pemimpin opini mempunyai sejumlah atribut yang membedakan mereka dari orang-orang lain dari komunitasnya. Mereka memiliki status sosial ekonomi yang lebih tinggi, dan lebih banyak berhubungan dengan penyuluh. Disamping itu mereka lebih banyak menggunakan media massa dan memiliki lebih banyak hubungan/relasi dengan orang-orang ataupun lembaga-lembaga yang terdapat diluar komunitasnya. Atribut ini dikenal juga sebagai kekosmopolitan (*cosmopolitaness*). Perbedaan atau kelebihan-kelebihan yang dipunyai seorang pemuka pendapat, merupakan bentuk kekuatan yang dapat dipakai untuk membangun kepercayaan (kredibilitas) ataupun mempengaruhi orang atau kelompok masyarakat lain.

Tetapi upaya dipercaya dan mempercayai bukan suatu tindakan yang mudah dibentuk, sebab banyak faktor lain yang sangat kompleks. Salah satunya adalah faktor etnik dan budaya yang lebih kuat menanamkan pengaruh kepada seseorang untuk bersikap mempercayai isi pesan maupun sumber pesan. Dikatakan oleh Kincaid dan Schramm (1987:111) "mempercayai berarti menerima ketulusan orang yang menggunakan

informasi bersama-sama, dengan begitu terdapat dua jenis hal yang dipercayai yaitu pesan (informasi) yang disampaikan atau sumber pesan”.

Jauh sebelum pendapat ini dikemukakan; Rogers (1969:164) menyatakan “kredibilitas adalah tingkatan dimana sumber komunikasi atau saluran komunikasi dapat dipercaya dan kompeten oleh penerimanya”. Penerapannya di masyarakat menurut Rogers dan Kincaid (1981:36), bisa bergeser ke arah yang lebih tinggi ataupun lebih rendah. Artinya kredibilitas seorang pemimpin tidak bersifat permanen. Terlebih lagi dalam lingkungan masyarakat heterogin dari segi etnisitas yang memiliki nilai-nilai sosial budaya berbeda.

Dalam pandangan Kincaid dan Schramm (1987:112), umumnya ukuran untuk menilai dipercayai atau tidaknya sumber pesan adalah: percakapan dan kompetensinya mengenai persoalan yang bersangkutan dengan masalah pedesaan. Sampai seberapa jauh sumber itu dapat dipercayai untuk mengatakan kebenaran dan kadang-kadang dinilai kedinamisan sumber tersebut, juga dinilai semangat dan sikap ketulusan yang nampak pada saat informasi digunakan bersama kita.

Pendapat senada muncul dari Jalaluddin Rakhmat (1985:64) yang menegaskan, bahwa faktor yang berhubungan dengan sikap dapat dipercaya pada intinya adalah: 1. karakteristik kemampuan; 2. adanya hubungan kekuasaan; 3. sifat dan kualitas komunikasi, dalam artian bila komunikasi bersifat terbuka, bila maksud dan tujuan sudah jelas, bila ekspektasi sudah dinyatakan, maka akan tumbuh sikap percaya.

Sikap percaya dan sifat dapat dipercaya menurut Ray (1973:147) dibedakan dalam tiga zona yaitu: 1. penerimaan, 2. nonkomitmen dan 3. penolakan. Isu yang sesuai dengan pengetahuan yang telah ada mungkin diterima, sedangkan isi yang berada diluar ruangan kehidupan seseorang akan ditolak. Isu yang terdapat diantara kedua ekstrem ini, akan jatuh di zona nonkomitmen. Isu semacam ini biasanya ialah isu yang keterlibatannya rendah, dan tidak banyak menarik perhatian partisipan dalam suatu situasi komunikasi.

Jika hubungan kekuasaan merupakan salah satu dasar kepercayaan berarti Kepala Desa sebagai penguasa formal paling tidak mempunyai salah satu komponen untuk dipercaya. Kepala Desa merupakan figur pemimpin formal tetapi mengingat tugasnya yang sangat luas dan berhubungan langsung dengan masyarakatnya, maka tidak jarang aspek informal dalam pola kepemimpinan menjadi perhatian. Taliziduhu Ndraha (1982:27) menyebutkan bahwa Kepala Desa adalah kepala organisasi pemerintahan desa yang berkedudukan strategis dan mempunyai tanggung jawab yang luas. Keluasan tanggung jawab mencakup tugas pemerintahan Desa dalam urusan dekonsentratif dari pemerintah yang lebih atas dan urusan partisipatif yang pelaksanaannya diserahkan kepada masyarakat desa. (Ndraha,1991:65-66).

Dalam konteks yang lebih aplikatif adalah pandangan Theodore M. Smith (dalam Kuncaraningrat, 1984:197) yang menyatakan, kebanyakan masyarakat menunggu



bimbingan Kepala Desa, bahkan untuk daerah-daerah tertentu Kepala Desa dianggap sebagai raja kecil. Disamping itu Kepala Desa mempunyai posisi yang kuat sebagai wakil pemerintah di Desa.

Mengingat peran yang demikian besar Priyono Tjiptoherijanto dan Rony Munir (1981:56) menyatakan, dari aspek formal, Kepala Desa mempunyai wewenang untuk mengatur pemerintahan desa, maka secara formal hendaknya dia juga diterima penduduk desa sebagai seorang yang pantas menjadi pemimpin mereka atau masyarakat, sehingga dengan demikian Kepala Desa benar-benar dan bersifat sebagai *agent of development* dari desa yang dipimpinnya.

Jika kita mengacu pada aturan formal tentang tugas Kepala Desa adalah sebagaimana dalam Undang-Undang No 5 Tahun 1979, tentang Pemerintahan Desa. Disebutkan Kepala Desa menjalankan hak, wewenang dan kewajiban pimpinan pemerintah desa yaitu menyelenggarakan rumah tangganya sendiri, dan merupakan penyelenggara dan penanggung jawab, terutama dibidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintah desa, urusan pemerintahan umum, termasuk pembinaan ketentraman dan ketertiban sesuai dengan peraturan yang berlaku, dan menumbuhkan serta mengembangkan jiwa gotong royong masyarakat, sebagai sendi utama pelaksanaan pemerintahan desa.

Keterkaitan antara pemimpin dengan pembangunan akan tampak menonjol sebagaimana menurut Bintoro (1974:226-227) yang pada intinya mengatakan, unsur pertama dari proses pengendalian usaha dalam pembangunan, ditentukan sekali oleh kualitas kepemimpinan. Pemimpin mempunyai atau menerima gagasan-gagasan pembaharuan dan pembangunan, dan mampu berkomunikasi melalui otoritasnya untuk meyakinkan, dan selanjutnya menerjemahkan dalam pengendalian usaha yang menyeluruh terselenggaranya proses pembangunan tersebut.

Ditambahkan oleh Bintoro, bahwa karena peran-peran itulah maka terjadi pula kecenderungan perubahan dalam pola kepemimpinan atau proses terbentuknya pemimpin. Dari dan pada mulanya didasarkan oleh ikatan-ikatan primordial, kepemimpinan bergeser dengan berdasarkan pada kecakapan dan kemampuan yang dimiliki oleh calon pemimpin. (Dawam Rahardjo dalam Bintoro T,1980).

Berdasarkan pendapat tersebut, dapat diartikan pula bahwa pemimpin adalah agen perubahan, dan sebagaimana dikemukakan oleh Rogers dan Shoemaker (1971:97) bahwa, perubahan yang terjadi pada masyarakat bukanlah sesuatu yang kebetulan tetapi hasil tindakan yang direncanakan atau diprakarsai oleh agen pembaharu, mereka itulah arsitek perubahan sosial.

## **B. Perubahan dan Eksistensi Media Massa**

Pemimpin dalam konstelasi perubahan di lingkungan masyarakat heterogin, menghadapi beragam tantangan yang berhubungan dengan tuntutan masyarakat terhadap kehidupan yang lebih sejahtera. Perubahan sosial, ekonomi dan politik di suatu kawasan, lazimnya dipicu oleh berbagai faktor yang berhubungan erat dengan tuntutan masyarakat untuk memperoleh kesejahteraan yang lebih baik dibandingkan sebelumnya.

Secara substantif, Huntington (dalam Cyril E.Black,1976:30) menetapkan lima kerangka teoritis tentang modernisasi yang didasarkan pada berbagai macam pengertian dan studi-studi tentang modernisasi yaitu: (1). Modernisasi merupakan proses bertahap dari tatanan yang primitif dan sederhana menuju tatanan yang maju dan kompleks; (2). Modernisasi juga dapat dikatakan sebagai proses homogenisasi, dengan tendensi dan struktur serupa; (3). Modernisasi terkadang terwujud dalam bentuk lahirnya sebagai proses Eropanisasi dan Amerikanisasi atau dalam bentuk yang lebih konkrit adalah kebijaksanaan untuk melakukan industrialisasi dan model politik demokratis negara dunia ketiga sepenuhnya mencontoh pengalaman negara maju tanpa mengindahkan sejarah lokal masing-masing negara ketiga; (4). Modernisasi juga dilihat sebagai proses yang tidak bergerak mundur dan tidak bisa dihentikan; (5). Modernisasi merupakan perubahan progresif, sekalipun akibat samping maupun korban modernisasi beraneka macam dan kadang-kadang di luar batas kemanusiaan dan moral universal.

Dalam pengertian yang mengandung arti perubahan, teori modernisasi sehaluan dengan pemikiran dan konsep-konsep pembangunan maupun pembaharuan di segala bidang kehidupan manusia. Teori yang membahas tentang modernisasi selalu mengacu pada bentuk perubahan menuju ke arah yang lebih baik dari keadaan sebelumnya. Meskipun demikian akibat yang ditimbulkan oleh modernisasi, dapat pula merugikan kelompok-kelompok masyarakat yang tidak mampu bersaing dengan kecepatan perkembangan berbagai sektor sebagai intisari dari kecepatan perubahan dalam modernisasi.

Akibat modernisasi yang positif maupun negatif itu, menandakan bahwa modernisasi bersifat sangat relatif jika ditinjau dari kepentingan masyarakat pada umumnya. Dikemukakan oleh J.W Schoorl (1982:4) bahwa, "modernisasi adalah suatu istilah yang mengandung sifat relatif karena menyangkut masalah pertumbuhan dan suatu proses dari keadaan lama berkembang menuju kepada keadaan baru". Tentu saja pendapat Schrool ini mempunyai makna yang sangat kompleks, sebab modernisasi bukan sesuatu yang pasti bisa dinikmati oleh semua lapisan masyarakat.

Hakikatnya teori modernisasi yang sehaluan dengan paradigma pembangunan didukung oleh Joe F. Black (1979:3) yang menyatakan, kebanyakan teori tentang pembangunan yaitu modernisasi, pada umumnya istilah ini dianggap sebagai istilah yang positif, sebab modernisasi selalu dipuja-puja dan tiap rencana pembangunan ditujukan

untuk mencapai modernisasi. Pendapat lain yang senada, mengkaitkan dengan pola hidup masyarakat, seperti dikemukakan oleh Tehranian (1979:119), bahwa kemajuan, pembangunan dan modernisasi sebagai suatu fenomena historis yang sama yaitu transisi dari masyarakat yang agraris ke masyarakatan industrial. Sementara itu, Smelser (1977:387) memberikan batasan terhadap istilah modernisasi sebagai suatu konsep yang sekeluarga dengan pembangunan ekonomi, tetapi lebih luas jangkauannya, dan menunjukkan pada perubahan-perubahan teknologi, ekonomi dan ekologi berlangsung dalam keseluruhan jaringan sosial budaya.

Berpijak pada pendapat-pendapat tersebut di atas, berarti modernisasi mengandung pengertian upaya perubahan, pembaharuan maupun pembangunan yang dilakukan oleh negara-negara yang sedang berkembang dan terbelakang. Unsur-unsur yang sama diantara ketiga hal tersebut, terdapat dalam satu terminologi “pembangunan menunjuk pada proses yang menyebabkan negara-negara miskin menjadi kaya, atau berusaha menjadi lebih kaya, dan juga proses yang menyebabkan negara kaya bertambah kaya. Dengan demikian secara sederhana didefinisikan, pembangunan sebagai perbaikan menyeluruh dalam kesejahteraan penduduk yang dicapai melalui pertumbuhan yang baik dan modernisasi yang dikehendaki. Sedangkan istilah modernisasi itu sendiri adalah perubahan kelembagaan dan kebudayaan yang menyertai pertumbuhan. Modernisasi adalah sesuatu yang bebas nilai, sedangkan pembangunan akan diartikan sebagai kategori politis dan tidak bebas nilai.

Konsepsi tentang pembangunan juga dikemukakan oleh Rostow (1960:57) yang menyatakan bahwa “pembangunan adalah sesuatu yang terus maju, dari suatu tahap yang primitif ke tahap yang lebih maju”. Selain itu, Tehranian (dalam Nasution,1979:85-86) menetapkan tiga faktor teoritis yang berhubungan dengan pembangunan yaitu: (1). Pembangunan semata-mata sebagai proses pluralisasi masyarakat, politik dan ekonomi dari suatu bangsa yang melakukan pembangunan; (2). Rasionalisasi sebagai unsur kunci dalam proses pembangunan; (3). Pemikiran yang lahir dari kesadaran diri masyarakat di dunia ketiga.

Unsur-unsur pembangunan yang dikaitkan dengan upaya negara-negara dunia ketiga dilukiskan oleh Rogers (dalam Dasmur Nurdin,1985:14) bahwa pembangunan dianggap perlu memiliki unsur-unsur: (1) Pemerataan penyebaran informasi keuntungan sosial ekonomi dan sebagainya; (2). Partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan yang dicerminkan oleh disentralisasi kegiatan-kegiatan tertentu di daerah pedesaan; (3). Bersifat mandiri dalam pembangunan dengan mengandalkan potensi sumberdaya setempat; dan (4). Memadukan sistem tradisional dan modern untuk menimbulkan sinkretisasi pemikiran lama dan baru, dengan pertimbangan yang berbeda di setiap daerah.

Selanjutnya Schoorl menambahkan, masyarakat modern secara umum adalah mereka yang menerapkan pengetahuan ilmiah, kepada semua aktivitas, semua bidang

kehidupan, atau kepada semua aspek yang terdapat dalam kehidupan masyarakat. Mirip dengan batasan singkat Schoorl, adalah pendapat dari oleh Cyril E.Black (1976:30) yang mengatakan: masyarakat modern ditandai oleh pertumbuhan ilmu pengetahuan baru dan meningkatnya kemampuan memahami rahasia-rahasia alam serta menerapkannya dalam berbagai kegiatan manusia. Dari sini kita dapat mengambil kesimpulan, manusia modern adalah mereka yang rasional dan mampu menerapkan aspek-aspek ilmiah dalam berbagai bidang kehidupan. Tanpa secara eksplisit mengkaitkan dengan ilmu komunikasi, ciri manusia modern yaitu:

1. Kesiediaan menerima pengalaman-pengalaman baru dan keterbukaan bagi pembaharuan dan perubahan
2. Mempunyai kesanggupan untuk membentuk atau mempunyai pendapat mengenai sejumlah persoalan-persoalan dan hal-hal yang tidak saja timbul disekitarnya tapi juga diluar lingkungannya
3. Mempunyai pandangan masa kini dan yang akan datang, mempunyai rencana, sadar terhadap harga diri orang lain dan percaya keadilan dalam pembagian.

Ukuran-ukuran untuk masyarakat modern, yang lebih dititik beratkan pada level kenegaraan dan kebebasan komunikasi dikemukakan oleh Smelser (1964,268-284) yang mengemukakan, masyarakat modern adalah mereka yang: (1).Mempunyai suatu ukuran partisipasi masyarakat umum dalam politik setidaknya dalam bentuk perwakilan dan merumuskan dan memiliki alternatif kebijaksanaan nasional; (2). Mempunyai suatu penyebaran (difusi) norma-norma sosial sekunder dalam kebudayaan; (3). Memiliki suatu pertumbuhan mobilitas dalam masyarakat yang diartika sebagai kebebasan pribadi, fisik, psikis dan sosial.

Jauh sebelum pendapat-pendapat ini muncul, penetapan ciri manusia modern secara terinci adalah pendapat Inkeles (dalam Etzioni,1964:342-361) yang pada intinya bahwa manusia modern mempunyai berbagai karakteristik pokok yaitu:

1. Terbuka terhadap pengalaman baru. Ini berarti bahwa manusia modern selalu berkeinginan untuk mencari sesuatu yang baru;
2. Manusia modern akan memiliki sikap untuk semakin independen terhadap berbagai otoritas tradisional seperti orang tua, kepala suku (etnis), dan raja;
3. Manusia modern percaya terhadap ilmu pengetahuan, termasuk percayakan kemampuannya untuk menundukkan alam semesta;
4. Manusia modern mempunyai orientasi mobilitas dan ambisi hidup yang tinggi, mereka berkehendak meniti tangga jenjang pekerjaannya;
5. Manusia modern memiliki rencana jangka panjang;
6. Manusia modern aktif terlibat dalam peraturan politik.

Dari pengertian modernisasi dan ciri-ciri manusia modern, dapat disimpulkan bahwa keduanya sangat tegas mengupayakan rasionalisasi dan pandangan jauh ke depan dalam semua kegiatan yang tidak sejalan, atau paling tidak menghambat nilai-nilai tradisional tertentu yang dianut oleh masyarakat. Pembahasan tentang perubahan dan pembaharuan dalam pembangunan, tidak dapat dilepaskan dari peranan komunikasi dalam menyebarkan pesan pembangunan kepada masyarakat, atau secara khusus pesan-pesan pembangunan tersebut dilakukan melalui media massa ataupun komunikasi antar pribadi.

Schramm (1964) mengatakan peranan massa media dalam pembangunan nasional adalah sebagai agen pembaharu (*agent of social change*). Letak peranannya adalah dalam hal membantu mempercepat proses peralihan masyarakat yang tradisional, menjadi masyarakat yang modern. Berpangkal pada pendapat ini, media-massa memiliki peran penting dalam perubahan. Sedangkan faktor-faktor lainnya yang berpengaruh terhadap perubahan tentunya sangat beragam menyangkut berbagai segi kehidupan. Salah satu aspek yang menjadikan perubahan semakin kompleks, dikemukakan oleh Schramm:

*”Perubahan sosial harus memperhitungkan hubungan antar kelompok yang berinteraksi. Sekalipun yang harus berubah adalah individu-individu, namun individu-individu ini hidup dalam kelompok, umumnya kepercayaan dan nilai-nilai yang dianut adalah norma-norma kelompoknya yang dipertahankan secara bersama-sama.* (Schramm dalam Depari, et. All., 1988:47)

Tetapi De Fleur tidak membedakan perubahan yang terjadi pada level individu maupun kelompok, dengan menyatakan bahwa pengaruh media terhadap individu maupun kelompok telah berhasil menumbuhkan pembaharuan-pembaharuan yang berjalan pesat. Pembaharuan yang berwujud perubahan (*change*) maupun pembangunan (*development*) pada umumnya merupakan suatu proses berlanjut yang menyangkut hubungan antara media massa (Melvin De Fleur, dalam Depari dan MacAndrew, 1988:4).

Dalam upaya pembaharuan, McQuail (1987:97) menyatakan, media paling baik digunakan secara terencana untuk menimbulkan perubahan dengan menerapkannya dalam program pembangunan berskala besar. Selanjutnya dikatakan pula bahwa kebanyakan teori tentang pengaruh media ini, tidak membahas dampak langsung dari media, tetapi sebenarnya keterlibatannya media dengan jaringan atau saluran pengaruh lainnya. Dengan demikian pendapat McQuail ini sejalan dengan pendapat Daniel Lerner yang menggaris bawahi pula pengaruh-pengaruh lain dalam perubahan yang diakibatkan oleh media-massa.

Abdul Muis (1983:92-100) dalam penelitiannya di Sulawesi Selatan melaporkan, “pemuda-pemudi Bugis dan Makassar yang telah dijamah oleh televisi sudah lebih bebas”. Hal ini menunjukkan, bahwa keterdedahan penduduk pedesaan di Sulawesi Selatan pada televisi, menimbulkan perilaku komunikasi yang bebas, yang disertai dengan keberanian

mereka untuk mengkritik orang-orang yang dalam posisi kepemimpinan. Selama ini komunikasi diantara pemimpin dan penduduk desa bersifat linier satu arah, dari pimpinan penduduk desa tanpa memberikan hak untuk membantah atau berbeda pendapat.

Keberanian untuk mengkritik yang muncul mungkin juga sebagai perwujudan dari khalayak untuk membandingkan dengan apa yang dialami dengan kejadian yang mereka lihat atau dengarkan dari media-massa. Sebagaimana dikemukakan oleh Lippmann (1960:468) yang mengatakan, respon khalayak bukan hanya pada peristiwa-peristiwa aktual yang dialami saja melainkan juga pada *pseudo environment*, gambaran *pseudo environment* yang menimbulkan khalayak itu disebut sebagai *public opinion*, dan *public opinion* terbentuk oleh media.

Berdasarkan pendapat Lippman, tampak bahwa media massa sangat berperan dalam penyebaran informasi, sekaligus dapat membentuk persepsi khalayaknya, sehingga melalui media massa seperti surat kabar, radio dan televisi, masyarakat dapat mengetahui peristiwa yang terjadi disekitarnya maupun yang terjadi di tempat lain. Bahkan secara tegas C.Wright Mills (1968:32) menyatakan, kita masih belum percaya terhadap informasi, sampai kita membaca atau mendengarkannya dari radio. Dengan kata lain, media dianggap sebagai sarana pembenaran terhadap informasi yang telah diterima tersebut.

Media yang paling baik untuk menyebarkan informasi menurut Schramm (1997) ada dua macam media siaran, yang memiliki potensi besar untuk mendukung pembangunan pedesaan didunia ketiga adalah radio dan televisi, kedua media elektronik ini, memiliki kemampuan yang besar sekali untuk mengantarkan dan menyebarkan pesan-pesan pembangunan kepada massa, yang berada di tempat terpencar dan tersebar luas, seperti daerah pedesaan secara serentak dengan kecepatan yang tinggi. (Amri Jahi,1988: 126).

Alasan terinci lainnya bahwa radio dan televisi mampu menciptakan perubahan dikaitkan dengan fungsi pendidikan dan pengajaran yaitu: (1). Mereformasi pendidikan nasional, (2). Mensuplemen pengajaran di sekolah, (3). Memperluas jangkauan pendidikan formal ke segmen-segmen masyarakat yang memiliki kesempatan terbatas untuk mengikuti pendidikan formal, (4). Memperluas jangkauan pendidikan nonformal ke segala segmen masyarakat yang membutuhkan. (Schramm dalam Amri Jahi,1988:126).

Meskipun media dianggap sebagai saluran yang paling berperan dalam pembangunan dan pembaharuan, tetapi Rogers,et. al, (19985:145) melihat kurang efektifan media massa, karena sangat mengutamakan hiburan dan iklan. Isi media massa yang seperti itu memotivasi penduduk pedesaan untuk mendapatkan gambaran yang ada di media massa, akan tetapi mereka tidak memiliki kemampuan yang efektif untuk mencapai cita-cita itu. Pendapat Rogers disini lebih diarahkan bahwa media-massa hanya semata-mata memberikan gambaran-gambaran yang menyenangkan kepada khalayak, tetapi khalayak

sendiri sulit untuk mencapainya, karena dengan keterbatasan yang khas dari sebagian besar masyarakat pedesaan.

Tentu saja tidak semua media-massa seperti yang digambarkan oleh Rogers, banyak pendapat yang masih mengharapkan peran media massa dalam pembangunan pedesaan, seperti yang dikemukakan oleh Amri Jahi (1988:111), “apabila kesejahteraan masyarakat dalam pembangunan pedesaan itu harus dicapai secara partisipatif, maka media massa patut diberi peranan yang berarti dalam proses, mencapai tujuan pembangunan itu”. Pembangunan yang partisipatif berdasarkan pendapat dari Rogers dan Adhikarya (1978:3-9) pada intinya adalah sebagai berikut: dalam pembangunan yang partisipatif, partisipan harus mampu mengekspresikan kebutuhan mereka dan memiliki kesempatan untuk mendapatkan informasi yang mereka butuhkan melalui saluran-saluran komunikasi yang tersedia. Jika hal semacam ini terjadi, maka agen-agen pembangunan dapat lebih responsif dalam memenuhi kebutuhan spesifik mereka, dan mungkin dapat mempersempit kesenjangan manfaat sosial ekonomi yang selama ini dirisaukan. Dari pendapat tersebut dapat diintisarikan, saluran komunikasi sangat diperlukan oleh masyarakat sebagai partisipan pembangunan, dan juga oleh para agen pembangunan sebagai orang yang mengantisipasi kebutuhan perubahan ke arah yang lebih baik.

Berpedoman pada perubahan yang terjadi karena terpaan media-massa, maka perlu dipahami, bagaimana sebenarnya peran dan fungsi media-massa dalam menunjang pembangunan, perubahan atau pembaharuan. Untuk itulah Schramm (dalam Hasan,1983:75-78) menetapkan tiga fungsi media massa dalam pembangunan yaitu:

1. Memberi tahu rakyat tentang pembangunan nasional dengan memusatkan perhatian mereka pada kebutuhan untuk berubah, kesempatan untuk menimbulkan perubahan, metode dan cara menimbulkan perubahan, dan jika mungkin meningkatkan aspirasi; Membantu rakyat berpartisipasi dalam proses pembuatan keputusan, memperluas dialog dan menjaga agar informasi mengalir baik ke atas maupun ke bawah
2. Mendidik rakyat agar mempunyai kemampuan.

Ketiga fungsi media massa yang dikemukakan Schramm itu, tampaknya sepadan dengan tiga peranan media massa dalam pembangunan yang diungkapkan oleh Chalkley (dalam Medis,1980), bahwa dalam pembangunan, media massa dapat berperan untuk: (1). Memberi tahu masyarakat tentang fakta kehidupan ekonomi mereka; (2). Menginterpretasikan fakta tersebut agar dapat dipahami oleh masyarakat; (3). Mempromosikan hal tersebut agar masyarakat menyadari betapa serius masalah pembangunan yang mereka hadapi dan memikirkan lebih lanjut masalah itu serta menyadarkan mereka pada solusi yang mungkin ditempuh.

Bila pengertian fungsi dan peran media-massa tersebut di atas kita kaitkan dengan masalah-masalah pembangunan yang terdapat di dunia ketiga, tentu tidak akan terlepas

dari teori media pembangunan. Prinsip utama teori ini menurut Denis McQuail (1987:119-120) adalah sebagai berikut:

1. Media seyogyanya menerima dan melaksanakan tugas pembangunan positif sejalan dengan kebijaksanaan yang ditetapkan secara nasional.
2. Kebebasan media seyogyanya dibatasi sesuai dengan prioritas ekonomi dan kebutuhan pembangunan masyarakat.
3. Media perlu memprioritaskan isi dan bahas nasional.
4. Media hendaknya memprioritaskan berita dan informasinya pada negara sedang berkembang lainnya yang erat kaitannya secara geografis, kebudayaan atau politik
5. Para wartawan dan karyawan media lainnya memiliki tanggung jawab serta kebebasan dalam tugas mengumpulkan informasi dan penyebarluasannya.
6. Bagi kepentingan tujuan pembangunan, negara memiliki hak untuk campur tangan dalam, atau membatasi, pengoperasian media serta sarana penyensoran, subsidi, dan pengendalian langsung dapat dibenarkan.

Walaupun prinsip-prinsip utama teori media pembangunan ini kemungkinan tidak semuanya sesuai dengan kondisi dalam suatu negara berkembang, tetapi paling tidak memperkuat anggapan bahwa peranan media massa memang sangat kuat dalam menciptakan perubahan melalui penyebaran-penyebaran informasinya. Disamping itu media-massa diperlukan bukan semata-mata oleh masyarakat, tetapi penguasa atau pemerintah mempunyai kepentingan yang sangat besar terhadap media-massa. Bahkan dampak media-massa terhadap pemerintah, ataupun sebaliknya yaitu dampak pemerintah terhadap media-massa, diulas secara lebih mendalam dalam komunikasi politik.

Kajian komunikasi politik oleh Rivers,et.al. (dalam Wright,1975: 81-85) menetapkan, empat wilayah penelitian komunikasi politik yaitu: (1). Dampak pemerintah terhadap media; (2). Sistem informasi pemerintah yang meliputi saluran informasi formal dan informal, dan informasi mengenai personil pemerintahan; (3). Dampak media terhadap pemerintahan meliputi penggunaan media-massa oleh para pejabat, dampak pemberitaan terhadap perilaku pejabat dan sebagainya; (4). Aspek-aspek dari media-massa seperti isi berita,setting kelembagaan,struktur sosial dan lain-lainnya yang berhubungan dengan analisis isi.

Dari studi komunikasi politik itu, peran media-massa bersentuhan dengan masyarakat, penguasa ataupun pemerintah. Namun yang menarik untuk ditelaah lebih detil adalah keberadaan media massa dalam hubungannya dengan perubahan di lingkungan masyarakat tradisional, maupun warga pedesaan yang belum sepenuhnya mampu memahami pesan-pesan yang disebarkan oleh media massa.



Dalam perubahan di pedesaan, selain peran pemimpin, pemuka pendapat dan media-massa, terdapat juga seorang agen pembaharuan, yang mempunyai peran penting dalam memberikan tuntunan ataupun membantu menafsirkan isi media, supaya lebih mudah dipahami oleh masyarakat. Menurut Rogers dan Shoemaker (1983:313-314) agen pembaharuan atau agen perubahan (*change agent*) adalah pekerja profesional yang berusaha mempengaruhi atau mengarahkan keputusan inovasi orang lain, selaras dengan yang diinginkan oleh lembaga pembaharuan dimana ia bekerja, atau menjadi anak buahnya. Para guru, penyuluh lapangan, pekerja sosial, juru dakwah dan missionaries, adalah agen pembaharu. Begitu pula penjaja dagangan, kader partai di desa, juru penerang, konsultan asing atau siapa saja berusaha menawarkan gagasan -gagasan baru atau tindakan baru (inovasi) kepada anggota masyarakat, dan berusaha agar orang-orang itu mengadopsi inovasi yang ditawarkan, mereka termasuk agen perubahan atau pembaharuan.

Fungsi utama agen pembaharu menjadi mata rantai penghubung antara dua sistem atau lebih. Agen pembaharu tidak selalu orang pemerintah, bisa juga orang swasta atau pekerja sukarela di masyarakat. Secara esensial, dalam diri agen perubahan melekat tindakan-tindakan baru yang harus disebar kepada masyarakat demi untuk mencapai kesejahteraan. Terdapat tujuh peran agen perubahan dalam melaksanakan tindakan inovasi yaitu:

1. Membangkitkan kebutuhan masyarakat untuk berubah.
2. Mengadakan hubungan dalam rangka perubahan.
3. Mendiagnosa permasalahan yang dihadapi masyarakat.
4. Menciptakan keinginan perubahan dikalangan klien.
5. Merencanakan tindakan perubahan.
6. Memelihara program pembaharuan&mencegah dari kemacetan
7. Mencapai suatu terminal hubungan. (Rogers &Shoemaker,1983:315-316)

Sedangkan Havelock (1973:7) menyebutkan, peran utama agen perubahan adalah: (1). Sebagai katalisator, menggerakkan masyarakat untuk mau melaksanakan perubahan; (2). Sebagai pemberi pemecahan persoalan; (3). Sebagai pembantu proses perubahan, membantu dalam proses pemecahan masalah dan penyebaran informasi berbagai hal; (4). Sebagai penghubung dengan sumber-sumber yang diperlukan untuk memecahkan masalah.

Mengingat tugas dan peran yang begitu luas dari seorang agen perubahan Ducan dan Zaltman (dalam Nasution,1988:68) menetapkan persyaratan minimal yang harus dimiliki oleh seorang agen perubahan yaitu:

1. Kualifikasi teknis yaitu kompetensi teknis dalam tugas spesifik dari proyek perubahan yang bersangkutan;Kemampuan administratif yang mencakup kemampuan

administratif yang paling dasar yakni kemampuan untuk mengalokasikan waktu menghadapi persoalan-persoalan yang relatif rumit;

2. Hubungan antar pribadi, suatu sifat yang amat penting adalah empati yaitu kemampuan seseorang untuk mengidentifikasi diri dengan orang lain.

Walaupun prasyarat minimal tersebut telah dipunyai oleh agen perubahan tetapi mengingat berbagai keterbatasan tenaga dan waktu, biasanya ia mengarahkan komunikasinya atau memusatkan usahanya untuk mempengaruhi tokoh masyarakat dalam sistem sosial itu. Dengan menggunakan tangan tokoh masyarakat, agen perubahan dapat melindungi ide-idenya dari tantangan yang mungkin timbul dalam sistem sosial.

### **C. Komunikasi Antarbudaya Untuk Meminimalisir Perbedaan**

Komunikasi melekat dalam interaksi antar manusia di setiap kegiatan yang dilakukan secara individual maupun kelompok. Dikemukakan oleh Bowers dan Bradac dalam *Communications Year Book 5* (1982:2), komunikasi merupakan hubungan antara berbagai tingkah laku, atau komunikasi merupakan gambaran yang muncul dari tingkah laku dua pihak, maka dalam komunikasi antarbudaya dua pihak yang terlibat dalam interaksi tersebut adalah mereka yang satu sama lain, mempunyai perbedaan budaya, sehingga komunikasi yang terjadipun akan mewarnai oleh unsur dua budaya yang berbeda.

Samovar dan Porter (1991:51) menyebutkan budaya merupakan deposit atau kumpulan pengetahuan, pengalaman, kepercayaan, nilai-nilai, sikap, makna, hirarki, agama, dugaan waktu, peranan, hubungan tempat, konsep universal, objek material yang diperoleh sekompok besar orang dari generasi ke generasi melalui usaha individual dan kelompok. Pengertian yang dapat disimpulkan dari definisi ini, kebudayaan mempunyai wawasan yang sangat luas, mencakup seluruh sendi kehidupan manusia. Budaya merupakan bentuk kegiatan dan perilaku yang berfungsi sebagai model-model bagi tindakan penyesuaian diri, dan gaya komunikasi dalam masyarakat yang dapat bertahan dari waktu ke waktu.

Eksistensi budaya sangat tergantung dari pengikut-pengikutnya. Untuk melestarikan semua nilai yang terkandung didalam budaya, menurut Myron W. Lustig (dalam Samovar et al, 1988:55), budaya yang akan eksis disebabkan oleh pengikut-pengikutnya, yang berupaya untuk selalu melaksanakan apa yang terkandung didalamnya melalui pola-pola kebiasaan dalam kehidupan sehari-hari. Artikel Porter dan Samovar berjudul *Approaching Intercultural Communication* (Samovar & Porter, ed, 1988:99-22) antara lain menyebutkan, budaya juga berkenaan dengan sifat dari objek material yang memegang peranan penting dalam kehidupan sehari-hari, berkesinambungan, dan hadir dimanapun juga, meliputi penetapan semua perilaku dari generasi ke generasi. Sebagian besar pengaruh budaya dalam kehidupan kita, tidak disadari. Padahal secara pasti mempengaruhi kita sejak lahir hingga mati. Bahkan setelah mati penguburanpun dilakukan tidak terlepas dari budaya.

Selanjutnya ditambahkan, dalam konteks komunikasi, kebudayaan menentukan cara komunikasi, komponen-komponen komunikasi berkaitan dengan komunikasi antarbudaya terutama jika dilihat dari sumber dan penerimanya berasal dari budaya yang berbeda. Pola komunikasi sebenarnya merupakan bagian dari pola budaya masyarakat itu sendiri, sehingga komunikasi yang terjadi sangat mencerminkan dan selaras dengan budaya yang dimilikinya, tetapi dalam interaksi antarbudaya, akan muncul persoalan karena pesan yang disampaikan dalam satu budaya belum tentu diketahui maknanya oleh budaya lain.

Komunikasi antarbudaya dalam praktek yang positif, dimaksudkan untuk memahami perbedaan-perbedaan budaya melalui interaksi dengan berbagai kelompok etnik. Batasan-batasan komunikasi antarbudaya yang dikutip oleh Tullsi B.Saral dari berbagai pakar komunikasi (1977:389) antara lain adalah, menurut Sitaram, komunikasi antarbudaya sebagai seni memahami, dan dipahami oleh khalayak penerima dari asal kebudayaan lain. Sedangkan menurut Rich (1974), komunikasi sebagai antarbudaya, apabila terjadi antar orang-orang dari budaya yang berbeda. Selain itu menurut Stewart (1974), komunikasi antarbudaya sebagai komunikasi yang terjadi pada kondisi budaya yang berbeda seperti bahasa, nilai, adat-istiadat, dan kekuasaan yang berbeda.

Perbedaan budaya dalam definisi-definisi komunikasi antarbudaya antara lain bermuara pada perbedaan budaya yang terdapat pada kelompok etnik yang terlibat dalam proses komunikasi. Fredrik Barth (1988:11) memperkuat pendapat tentang masing-masing kelompok etnik mempunyai budaya sendiri dengan menyatakan, bahwa kelompok etnik dikenal sebagai populasi dengan ciri-ciri sebagai berikut:

1. Secara biologis mampu berkembang biak dan bertahan;
2. Mempunyai nilai-nilai budaya yang sama dan sadar akan rasa kebersamaan dalam satu bentuk budaya;
3. Membentuk jaringan komunikasi dan interaksi sendiri,
4. Menentukan ciri kelompoknya sendiri yang diterima oleh kelompok lain dan dapat dibedakan dari kelompok populasi lain.

Dengan titik berat pada perbedaan-perbedaan yang muncul dalam komunikasi antarbudaya, maka pesan yang disampaikan oleh sumber pesan, belum tentu di pahami oleh penerima pesan dalam suatu interaksi. Faktor yang terkait dengan ketidaksamaan makna terhadap pesan ini, memicu munculnya persoalan yang kompleks dalam interaksi antar manusia yang memiliki kebudayaan berbeda. Dalam konteks komunikasi yang efektif diantara budaya yang berbeda, sumber pesan dan penerima pesan tentu mengharapkan kesamaan makna dalam berbagai aspek. Misalnya pengalaman dan persepsi seseorang yang berlainan satu sama lain. Memang karakter budaya, cenderung memberikan kepada seseorang pengalaman yang tidak sama. Karena itu, dapat membawa akibat terhadap pendapat dan pandangan yang tidak sama ketika menilai suatu objek yang menjadi pengamatan bersama.

Perbedaan budaya justru tampak masih menonjol apabila terjadi komunikasi dengan budaya lain. Masing-masing anggota budaya kadang-kadang mempunyai kecenderungan untuk tidak memahami budaya lawan interaksinya, karena mereka berpedoman bahwa nilai-nilai budayanya lebih baik dibanding budaya lainnya. Sikap ini adalah perwujudan dari etnosentrisme (*ethnocentrism*) dan menghambat kelancaran komunikasi diantara pihak-pihak yang berinteraksi.

Etnosentrisme menurut Lustig (dalam Samovar dan Porter, 1988:55) adalah kepercayaan bahwa adat, tindakan dan nilai-nilai budaya diri sendiri adalah yang paling baik (*superior*) dibandingkan dengan budaya lainnya. Penekanan pada superioritas budaya sendiri, merupakan upaya untuk memelihara tatanan nilai budaya dan stabilitas budaya yang diikutinya. Dengan demikian sikap etnosentrisme cenderung melihat budaya lain dari sisi negatif, sehingga menguatkan kepercayaan pada kekuatan budaya sendiri dalam kehidupan sosial.

Samovar, Porter dan Jain (1988:195) melihat, penilaian terhadap budaya lain ini dilakukan secara tidak sadar, karena kelompok kita menggunakan nilai dan kebiasaan kita sendiri sebagai kriteria untuk segala penilaian. Apabila nilai budaya terdapat kesamaan-kesamaan, maka akan semakin dekat dalam melakukan interaksi. Sedangkan ketidaksamaan nilai budaya yang semakin besar, akan berpengaruh terhadap hubungan yang semakin jauh dan selanjutnya akan menghambat komunikasi antarbudaya. Masalah yang sering menghambat dalam komunikasi antarbudaya disebabkan oleh aspek-aspek potensial yang mendasarinya, sebagaimana diuraikan oleh Samovar, Porter dan Jain (1981:192-200) mencakup tujuh permasalahan yaitu: (1) Perbedaan tujuan berkomunikasi, (2) Etnosentrisme, (3) Ketidakpercayaan (*Lack of trust*), (4) Penarikan Diri (*Withdrawal*), (5) Ketiadaan Empati, (6) Stereotip (*Stereotypes*), (7) Kekuasaan.

Selain ketujuh hal tersebut sebagai problem potensial dalam komunikasi antarbudaya, masalah agama dan kepercayaan juga sebagai salah satu aspek sensitif dalam komunikasi antarbudaya, sebagaimana pendapat Smart (dalam Samovar dan Porter, 1991:75) yang menyebutkan, agama adalah sebagai aspek yang mempengaruhi budaya maupun komunikasi, dan juga menjadi salah satu masalah sensitif dalam komunikasi antar etnik jika tidak dilakukan pemahaman bersama dengan baik.

Dari problem potensial komunikasi antar etnik, faktor stereotip yang biasanya dikaitkan dengan prasangka (*predujice*) merupakan aspek yang mudah muncul, dan pengaruhnya terasa sekali dalam lingkungan masyarakat majemuk. Stereotip merupakan penggeneralisasian yang terlalu luas, terlalu disederhanakan atau dilebih-lebihkan mengenai sebuah kategori terhadap sekelompok orang. Penggeneralisasian kepercayaan lebih didasarkan pada emosi, dimensi stereotip meliputi aspek negatif dan positif. (Samovar, Porter dan Jain, 1991:121). Sedangkan menurut *Encyclopedia of internasional Social Science*, stereotip sebagai imajinasi yang terlalu disederhanakan, atau pengertian yang agak luas adalah sebagaimana tercantum dalam *Dictionary of Modern Thought* (New

York Harper And Row,1977) stereotip adalah suatu image yang disederhanakan dari beberapa kategori orang, lembaga atau kejadian yang terbagi atas ciri-ciri yang esensial oleh sejumlah orang.

Seperti halnya yang telah disebutkan terdahulu, stereotip berhubungan dengan prasangka. Pendapat ini didukung pula oleh pernyataan Scott dan Power (1978:122), bahwa stereotip dengan cepat mengantarkan *prejudice* untuk mendukung atau melawan individu. Demikian pula dikatakan oleh Samovar,et. al. (1981:122), seseorang yang mempunyai stereotip terhadap suatu kelompok, juga cenderung mempunyai beberapa *prejudice* ke arah kelompok tersebut. Menurut Samovar, Porter dan Jain (1991:123) *prejudice* adalah sebagai sikap kaku terhadap suatu kelompok, yang didasarkan pada sistem kepercayaan dan prakonsepsi yang keliru.

Prasangka ini dapat meliputi sejumlah kepercayaan atau sistem kepercayaan yang membentuk kelompok yang saling berkaitan secara relatif yang menghasilkan sikap prasangka tertentu terhadap kelompok lain. Perwujudan sikap dari prasangka adalah (1). *Antilocution* yaitu mendiskusikan kelompok lain dari segi negatifnya; (2).*Avoidance* sebagai upaya menghindar dari kelompok yang tidak disukainya; (3).*Discrimination* dengan mengucilkan, setelah emosi meningkat; (5). *Extermination* sebagai upaya pemusnahan secara satu persatu atau missal. (Samovar,Porter dan Jain,1981:124).

Stereotip dan prasangka dipelajari dari (1). Orangnya, keluarga, saudara dan lain-lainnya, (2). Pengalaman pribadi dengan satu orang maupun kelompok, (3). Melalui media massa seperti televisi, radio, surat kabar, buku-buku dan lain-lainnya. Dengan kata lain stereotip dan prasangka, dibentuk oleh berbagai sumber yang dominan dalam kehidupan bermasyarakat.

Permasalahan dalam komunikasi antarbudaya bisa pula muncul dalam konteks intreraksi antar individu sebagaimana asumsi bahwa pada umumnya kesamaan budaya akan membuka jalur komunikasi yang lebih lancar, sedangkan ketidaksamaan budaya akan berakibat pada komunikasi yang kurang lancar.

Pernyataan itu selaras dengan pendapat yang dikutip oleh William B.Gudykunst dalam *Communication Yearbook 12* (1982:333-334) antara lain, yaitu menurut Bishop (1979), bahwa persepsi yang sama berpengaruh terhadap hubungan antar pribadi yang lebih lancar. Sedangkan ketidaksamaan dalam budaya menyebabkan hubungan yang kurang akrab, kesamaan budaya dapat diwujudkan dalam persamaan persepsi yang akan meningkatkan kualitas hubungan pada level intimasi.

Menurut Altman dan Taylor (1973) maupun Miller dan Steinbergs (1975) pada intinya mengungkapkan bahwa perbedaan maupun persamaan budaya akan berpengaruh dalam membangun hubungan diantara individu yang berinteraksi. Demikian pula yang dinyatakan oleh Miftah Toha (1974:95) bahwa latar belakang yang sama merupakan salah satu faktor penentu dari proses daya tarik individu untuk berinteraksi satu sama lainnya.

Permasalahan yang potensial dalam komunikasi antarbudaya ataupun antar kelompok di lingkungan masyarakat pedesaan, tentu saja akan berdampak pula dalam penerapan kepemimpinan di lingkungan masyarakat majemuk. Pimpinan disatu pihak mempunyai budaya sendiri termasuk budaya kekuasaan, sementara itu di pihak lain, adalah masyarakat multi etnik juga mempunyai budaya sendiri. Interaksi antara pimpinan dengan masyarakat atau interaksi diantara sesama anggota masyarakat, merupakan dinamika didalam menanggapi aspek kepemimpinan yang berupaya melakukan pembaharuan.

Untuk menciptakan komunikasi diantara etnik yang berlainan, pemahaman budaya dari masing-masing pihak perlu dilakukan, Alwi Dahlan (1988:1) menjelaskan, komunikasi selain menentukan siapa berbicara dengan siapa, tentang siapa, dalam keadaan apa dan bagaimana komunikasi berlangsung, juga turut menetapkan pemahaman-pemahaman orang tentang informasi. Singkatnya kebudayaan merupakan dasar dari komunikasi. Aspek paling penting disini adalah bahwa pemahaman terhadap budaya sangat diperlukan dalam melakukan komunikasi. Sementara itu Brent D. Ruben (dalam Samovar dan Porter, 1988:331) menyarankan supaya komunikasi dengan budaya tuan rumah lancar, maka agar dilakukan: (1). Menciptakan kapasitas yang menghargai budaya lain, (2). Tidak memaksakan pendapat, (3). Pengetahuan pribadi yang mampu memahami orang lain, (4). Melakukan empati, (5). Bersikap fleksibel; (6). Menjaga hubungan; (7). Mengembangkan sikap toleransi.

Saran yang tidak jauh berbeda untuk meningkatkan efektivitas komunikasi antarbudaya diberikan oleh Samovar, Porter dan Jain (1981:202-210) yaitu: (1). Pahamiilah diri kita sendiri (*know yourself*), (2). Penggunaan bahasa yang sama, (3). Sediakan waktu (*take time*), (4). Perhitungan *setting*, (5). Tingkatkan kemampuan berkomunikasi (*communication style*), (6). Tumbuhkan Umpan Balik (*feedback*), (7). Kembangkan empati, (8). Perhatikan kesamaan dari budaya yang berbeda; (9). Tanggung jawab etis.

Kesembilan saran untuk mengefektifkan komunikasi budaya tersebut, barangkali tidak bisa dilakukan bersama-sama dalam satu kesempatan komunikasi, tetapi paling tidak dalam situasi komunikasi tertentu, dapat dipakai beberapa butir strategi yang disarankan oleh Samovar, Porter dan Jain. Namun komunikasi diantara kelompok yang berbeda budaya, memang harus memperhatikan sembilan faktor tersebut demi untuk membangun komunikasi efektif yang berujung kepada pemahaman makna bersama dalam interaksi dan komunikasi antarbudaya.

Ukuran efektivitas komunikasi antarbudaya itu sendiri menurut Alo Liliweri (dalam Prisma, 1994:8) menyatakan bahwa, untuk mengukur variabel efektivitas komunikasi antar etnik ditentukan oleh tingkat efektivitas komunikasi antar pribadi komunikator suatu etnik dengan komunikan dari etnik lain melalui media komunikasi tatap muka, misal terciptanya suasana komunikasi yang: (1). terbuka, (2).empati,(3) perasaan positif,

(4). saling memberikan dukungan dan, (5) memelihara keseimbangan terhadap pesan-pesan stereotip, jarak sosial dan sikap diskriminasi.

Dari penelaahan pada berbagai aspek komunikasi antarbudaya yang berhubungan dengan permasalahan potensial, dan cara meningkatkan efektivitasnya, maka faktor-faktor penghambat komunikasi antarbudaya ada dalam pola kepemimpinan tokoh masyarakat, atau elite pedesaan yang memiliki otoritas di lingkungannya. Masalah potensial dalam hubungan antar etnik, ataupun kelompok yang berbeda dapat menghambat kepemimpinan yang dijalankan. Sedangkan strategi untuk meningkatkan efektivitas komunikasi antarbudaya, jika dilakukan dengan baik dapat dimanfaatkan sebagai faktor-faktor yang menunjang dalam pola kepemimpinan.

Dalam kaitannya dengan relasi antar etnik, apabila muncul pendapat yang dikemukakan oleh masing-masing etnik atau kelompok, akan muncul pula makna yang bervariasi dalam menilai salah satu kegiatan sebagai salah satu objek yang perlu dikomentari. Sering terjadi pendapat yang satu akan mendukung pendapat kelompok lainnya, atau bahkan bertentangan atau bertolak belakang. Faktor-faktor yang menyebabkan perbedaan atau persamaan dari munculnya pendapat, sebenarnya tidak terlepas dari pengertian pendapat itu sendiri dalam konteks komunikasi.

Opini atau pendapat menurut Dan Nimmo (1993:11-12) merupakan tindakan mengungkapkan apa yang dipercayai, dinilai dan diharapkan seseorang dari objek-objek dan situasi tertentu. Jadi tindakan apapun yang bermakna adalah ungkapan opini. Kepercayaan mengacu kepada apa yang diterima sebagai benar atau tidak benar tentang sesuatu, ia didasarkan atas pengalaman masa lalu, pengetahuan dan informasi sekarang, persepsi yang berkesinambungan, nilai yang melibatkan kesukaan dan ketidaksukaan, cinta, kebencian dan lain-lainnya. Sedangkan pengharapan mengandung citra seseorang tentang akan seperti apa keadaannya setelah dilakukan perbuatan tertentu.

Bertitik tolak dari penjelasan itu, pendapat mempunyai hubungan pula dengan persepsi sebagai salah satu unsur dari kepercayaan. Walaupun dalam konteks dengan media massa, dapat dipahami dari pernyataan Harsono Suwardi (1993:17), yang menunjukkan ada hubungan yang kuat antara pendapat dengan persepsi yaitu: terbentuknya pendapat bisa dilihat dari persepsi seseorang terhadap media, sebagai bentuk aktif dari realita politik yang ada. Dalam kaitannya dengan komunikasi Redfield (dalam Miftah Toha, 1991:166) menyatakan bahwa komunikasi adalah pertukaran kejadian-kejadian dan pendapat-pendapat. Dengan demikian, pendapat sangat erat berhubungan dengan tindakan dan komunikasi.

Menurut Samovar, Porter dan Jain (1988:37) persepsi adalah proses internal yang kita lakukan untuk memilih, mengevaluasi dan mengorganisasikan rangsangan dari lingkungan eksternal. Dengan kata lain, persepsi ialah cara mengubah energi fisik lingkungan kita menjadi pengalaman yang bermakna. Selanjutnya tiga unsur sosial



budaya yang berpengaruh terhadap persepsi seseorang adalah, pertama sistem-sistem kepercayaan (*belief*), nilai (*value*) dan sikap (*attidute*). Kedua: cara pandang dunia (*worldview*) dan ketiga: organisasi sosial (*social organization*). Semua unsur utama itu mempengaruhi makna persepsi yang bersifat pribadi dan subjektif. Dalam memberikan makna terhadap suatu objek, bisa saja antara individu yang satu dengan yang lain karena berbeda nilai dan kepercayaan, maka akan menghasilkan pula makna yang tidak sama bahkan bisa saja bertentangan.

Kepercayaan sebagai suatu kemungkinan-kemungkinan subjektif yang diyakini individu dimana budaya memainkan peranan penting dalam pembentukannya. Di sisi lain, nilai mengandung aspek normatif yang dipakai sebagai rujukan oleh anggota budaya untuk menyatakan apa yang dianggap baik atau buruk. Kepercayaan dan nilai memberikan kontribusi bagi pengembangan isi sikap. Sementara itu, *worldview* lebih menekankan pada orientasi budaya terhadap konsep-konsep filosofis seperti ketuhanan, alam semesta dan lain-lainnya, dan perwujudan dari organisasi sosial adalah keluarga dan sekolah.

Dari uraian tentang persepsi, dapat disimpulkan bahwa persepsi seseorang dipengaruhi oleh berbagai macam unsur sosial budaya yang melingkupinya dalam skala sempit maupun luas. Budaya secara singkat didefinisikan oleh Paul Horton dan Charles L.Hunt (1980:60) merupakan segala sesuatu yang diperoleh manusia sebagai hasil dari proses belajar dan pengalaman. Pendapat lain dikemukakan oleh Barth (1988:9-10), budaya merupakan hasil interaksi antar etnik tertentu, perbedaan budaya justru akan bertahan walaupun terjadi hubungan dan saling ketergantungan antar etnik. Pendapat Kroeber dan Kluckhohn (dalam A. Hardjana, 1994:4) menyebutkan kebudayaan hidup dari generasi ke generasi, dan berkembang sejalan dengan perkembangan generasi.

Meskipun demikian De Vos dan Lola (1982:24) tidak sependapat bahwa budaya akan terus bertahan dari generasi ke generasi, dengan alasan bahwa ciri-ciri budaya kelompok tertentu, termasuk suku bangsa dapat saja larut kedalam kebudayaan dominan yang dijadikan kerangka acuan bagi masyarakat yang bersangkutan. Tetapi barangkali ide De Vos dan Lola ini lebih mirip dengan konteks akulturasi sebagaimana pendapat dari Young Yum Kim (1979:436), dalam perkembangannya imigran mulai mengetahui pola-pola interaksi sosial dari masyarakat setempat, sehingga mereka mulai mengambil beberapa norma dan nilai-nilai budaya dari masyarakat setempat, untuk dipadukan dengan nilai yang dipunyai, disini terjadi akulturasi dimana budaya asli imigran menjadi berubah.

Tetapi selanjutnya Kim (1988:344) menyatakan, kekuatan dominan masyarakat pribumi dalam mengontrol beberapa sumber dayanya mengakibatkan lebih banyak perubahan pada budaya imigran, oleh karena itu kebutuhan imigran untuk beradaptasi dengan sistem sosial budaya pribumi akan lebih besar daripada kebutuhan masyarakat pribumi untuk memasukan budaya imigran ke dalam budaya mereka. Dengan demikian, hakikatnya perubahan budaya imigran ini sebagai suatu kesadaran dan keterpaksaan dilingkungan sosial budaya yang baru.



## BAB 2: Kepemimpinan Dalam Komunikasi Antarbudaya

Merujuk pada uraian di atas, maka pendapat mempunyai aspek nilai, harapan dan kepercayaan, dimana salah satu unsurnya adalah persepsi. Dengan demikian pendapat seseorang akan dipengaruhi oleh latar belakang budayanya, sehingga pendapat seseorang dari kelompok etnik tertentu dalam menilai suatu objek, akan berbeda dengan orang dari kelompok etnik lainnya karena adanya persepsi dan nilai yang berbeda pula.



# BAB 3

## MENGGALI INFORMASI KEMAJEMUKAN ETNIK

---

### A. Transportasi, Industri dan Kompleksitas Komunikasi

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, yaitu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif seperti ucapan atau tulisan dan perilaku yang dapat diamati dari orang-orang (subjek) itu sendiri. (Bogdan dan Taylor, 1975:5). Sedangkan Kirk dan Miller (dalam Moleong, 1993:3) menyebutkan bahwa penelitian kualitatif adalah tradisi tertentu dalam ilmu pengetahuan sosial yang secara fundamental bergantung kepada pengamatan terhadap manusia dalam kawasannya sendiri, dan berhubungan dengan orang-orang tersebut dalam bahasa dan dalam peristilahannya.

Berdasarkan pendapat itu, maka pada dasarnya penelitian kualitatif bersifat deskriptif yaitu suatu penelitian yang biasanya untuk menjawab apa penjelasan yang lebih terinci mengenai gejala sosial yang dimaksudkan dalam suatu permasalahan penelitian. (Manasse Malo & Sri Trisnoningtias, 1993:28). Sedangkan menurut Singarimbun (1989:4), penelitian deskriptif dimaksudkan untuk pengukuran yang cermat terhadap fenomena sosial tertentu.

Dengan metode kualitatif diharapkan mampu mengetahui lebih mendalam terhadap fokus penelitian yang diamati. Karena penulis melibatkan diri secara langsung dalam kehidupan subjek sehingga dapat melihat dan mengamati kehidupan mereka sehari-hari, mendengar mereka berbicara tentang dirinya dan pengalaman mereka sendiri. Penulis juga berpedoman, bahwa setiap subjek di dalam lingkungan kejadian (*setting*) itu dipandang mempunyai kedudukan yang sama dengan yang lain, tanpa pengecualian bahwa informasi yang diberikan bersifat negatif ataupun positif. Berpijak pada pedoman tersebut, berarti setiap kelompok etnik melalui informan mempunyai kedudukan yang sama dalam memberikan informasi tentang kepemimpinan Kepala Desa sebagai agen modernisasi yang berperan dalam melakukan perubahan kearah lebih baik.

Lokasi penelitian ini adalah, desa di kawasan tumbuhnya pabrik-pabrik, pada salah satu kecamatan Kabupaten Karawang Provinsi Jawa Barat. Dengan pertimbangan, wilayah

desa yang dibelah oleh jalan raya Jakarta-Cirebon menimbulkan aktivitas beragam dalam menunjang kelancaran perjalanan, seperti munculnya rumah makan, warung kelontong, tukang tambal ban, tukang ngamen dan aktivitas sosial-ekonomi lainnya.

Desa yang sudah ramai dengan beragam aktivitas, semakin berkembang dengan dibangunnya jalan tol Jakarta-Cikampek pada tahun 1987. Kemudahan transportasi membuat desa ini menjadi pilihan pengusaha, untuk menanamkan modal dengan mendirikan pabrik. Kondisi inipun diantisipasi oleh Pemerintah Daerah setempat maupun Pemerintah Pusat, yang menetapkan wilayah-wilayah strategis dan mudah dijangkau ini sebagai kawasan industri yang dapat menopang perekonomian nasional yang juga diharapkan mampu memberikan kesejahteraan bagi warga sekitarnya.

Munculnya industri di desa, membuat semakin banyak orang dari luar desa untuk mencari penghasilan yang lebih baik. Penduduk asli desa sendiri lebih banyak berusaha di sektor pertanian, baik sebagai petani penggarap maupun pemilik tanah. Berkumpulnya berbagai kelompok etnik dengan kemajemukan budaya dalam satu kawasan, mengakibatkan pola komunikasi dalam interaksipun menjadi beragam. Mereka masing-masing berupaya untuk dapat menyesuaikan diri dengan kelompok etnik lain, atau dalam situasi tertentu justru akan semakin menonjolkan ciri khas dari kelompok etniknya.

Ditunjang tersedianya transportasi memadai, dan jarak yang tidak begitu jauh dari Jakarta, media cetak dan media elektronik mudah untuk diperoleh maupun diakses dari desa pantura ini. Interaksi antar etnik dan terpaan media massa di kawasan itu, pada akhirnya membawa pula perubahan sosial dan budaya di lingkungan penduduk asli maupun diantara para pendatang.

Karakteristik penduduk desa yang majemuk dari segi etnik inilah yang dianggap cocok untuk dijadikan rujukan dalam mengeksplorasi interaksi dan komunikasi antarbudaya, dengan penelaahan pada kepemimpinan Kepala Desa sebagai agen modernisasi, yang menitik beratkan pada kendala dan faktor-faktor yang mendukung kepemimpinan dalam hubungan antar etnik di pedesaan yang sedang mengalami perubahan.

## **B. Menjalin Hubungan Dalam Kemajemukan**

Dalam penelitian kualitatif, meskipun metode pengumpulan data yang dilakukan dengan wawancara tidak berstruktur serta mendalam, tetapi tidak terlepas dari inti permasalahan penelitian, atau menurut Kuncaraningrat (1993:139), sebagai *focus interview* terdiri dari pertanyaan yang tidak mempunyai struktur tertentu, namun selalu tertuju pada pokok masalah tertentu. Atau dalam kamus sosiologi sebagai wawancara yang memusatkan pada aspek-aspek khusus dari suatu peristiwa atau situasi yang dialami oleh responden. (Soerjono Soekanto, 1995:172).

Menurut Guba dan Lincoln, pertanyaan biasanya tidak disusun terlebih dulu, malah disesuaikan dengan keadaan dan ciri unik dari responden. Pelaksanaan tanya jawab

mengalir seperti dalam percakapan sehari-hari, wawancara biasanya berjalan lama, dan seringkali dilanjutkan dalam kesempatan berikutnya. (Moleong, 1993:139). Berdasarkan pendapat tersebut, wawancara yang dilakukan adalah dengan memusatkan perhatian pada topik penelitian dengan tetap memperhatikan kondisi setempat yang berlangsung.

Untuk memperoleh data secara langsung di lokasi penelitian dilakukan “partisipasi observasi” yaitu dengan mengamati secara langsung, dan sekaligus melibatkan diri pada situasi sosial tertentu. (Sanapiah Faisal, 1990). Atau menurut Bogdan dan Taylor (dalam Furchan, 1993: 22), dengan istilah pengamatan peserta (*participant observation*), yaitu penelitian yang bercirikan suatu periode interaksi sosial yang intensif antara peneliti dengan subjeknya. Selama periode ini, data dikumpulkan secara sistematis dan tidak menyolok. Pengamatan peserta yang sistematis dan analitis tergantung kepada catatan lapangan yang lengkap, akurat dan terinci.

Faktor-faktor menguntungkan dalam pengamatan peserta yang dihubungkan dengan penelitian kualitatif, dikemukakan oleh Herbert Blumer (1967:148) yang menyatakan, bahwa dalam penelitian kualitatif, pengamat menenggelamkan diri dalam kehidupan orang-orang dan situasi yang ingin dimengerti (diselidiki). Ia berbicara bergurau, bersatu rasa (*emphaty*) dengan mereka, dan ikut menghayati kehidupan serta pengalaman mereka. Kontak yang berlangsung lama ditempat itu, memungkinkan pengamat melihat dinamika konflik dan perubahan, sehingga ia dapat melihat susunann hubungan serta definisi kelompok dan individu yang sedang berkembang.

Sedangkan untuk memperoleh data supaya representatif, penulis berupaya menjalin hubungan (*rapport*) dengan subjek penelitian, sehingga kehadiran penulis di lokasi penelitian tidak berpengaruh atau paling tidak memperkecil pengaruh terhadap subjek penelitian. Dengan demikian kejadian-kejadian yang berlangsung pada waktu dilakukan pengamatan, tidak jauh berbeda dengan kejadian-kejadian yang terjadi pada waktu penulis tidak berada disana. Menjalिन hubungan ini, sebagaimana disarankan oleh Bogdan dan Taylor (dalam Furchan, 1993:25) harus berusaha berinteraksi dengan subjek penelitian secara alamiah, tidak menonjol, dan tidak memaksa. Selanjutnya disarankan pula, untuk menciptakan hubungan baik adalah dengan ikut serta berbagai kegiatan subjek. Dengan berpartisipasi langsung, peneliti akan merasakan situasi lingkungan itu dan mengerti bagaimana mereka akan menerima keikutsertaanya. (Bogdan dan Taylor, dalam Furchan, 1993:85).

Dalam upaya memperkuat penelaahan penelitian, dilakukan studi kepustakaan untuk memperoleh data penunjang yang diperlukan dalam penelitian. Irawati Singarimbun (dalam Singarimbun, 1989:70-71) menyatakan, manfaat yang diperoleh dari penelusuran kepustakaan ialah menggali konsep dasar dan teori-teori yang ditemukan oleh ahli terdahulu, mengikuti perkembangan penelitian dalam bidang yang akan diteliti, memperoleh orientasi yang lebih luas mengenai topik yang dipilih, memanfaatkan data sekunder dan menghindari duplikasi penelitian.

Menyangkut data primer, ditetapkan pula informan yang dapat memberikan informasi komprehensif sesuai dengan masalah yang ditelaah. Informan yang dipilih adalah orang-orang yang mengetahui permasalahan-permasalahan desa, atau menurut Moleong (1993:90), informan adalah orang dalam latar penelitian yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar penelitian. Mengingat kepentingan terhadap berbagai sumber informasi, maka pada penelitian kualitatif tidak ada sampel acak, tetapi sampel bertujuan dengan ciri-ciri: (1). Rancangan sampel yang muncul tidak dapat ditentukan lebih dulu, (2). Pemilihan sampel secara berurutan untuk memperoleh variasi sebanyak-banyaknya dengan teknik sampling bola salju, (3). Semakin banyak informasi yang masuk makin dipilih sesuai fokus, (4). Pemilihan berakhir jika sudah terjadi pengulangan informasi, dan selanjutnya penarikan sampel. (Moleong, 1993:165-166).

Petapan informan dilakukan secara purposif, dengan mempertimbangkan aspek kelompok etnik, dan kedudukan-kedudukan sosial tertentu dalam masyarakat maupun dalam kelompok etniknya saja, seperti halnya sebagai pemuka pendapat di lingkungannya. Informan terbagi dalam dua kelompok. Pertama adalah informan penduduk asli desa etnik Sunda, yang kedua adalah informan yang berasal dari kelompok etnik pendatang, terdiri dari kelompok etnik Jawa, Batak, Minangkabau dan Madura. Identifikasi etnik tidak semata-mata didasarkan dari garis keturunan sesuai adat dan tradisi yang berlaku, tetapi juga tergantung pada sampai sejauh mana, yang bersangkutan mengidentifikasi diri dalam kelompok etnik yang diakuinya. Selain itu, informan dipertimbangkan juga antara lain: usia, dan lama tinggal di desa lokasi penelitian kawasan pantai utara Kabupaten Karawang Provinsi Jawa Barat.

Meskipun terdapat pula kelompok etnik Sunda dalam status sebagai pendatang di desa wilayah penelitian, tetapi mereka tidak dipakai sebagai informan dalam kelompok pendatang. Pertimbangannya, pendatang dengan etnik yang sama dengan penduduk asli, mempunyai persamaan nilai budaya yang dianut, sehingga ada kemungkinan pendapatnya, mempunyai banyak titik pertemuan diantara mereka dalam satu alur kebudayaan. Alasan lain adalah, berdasarkan pada pengamatan-pengamatan awal, pendatang suku Sunda berasal dari wilayah geografis yang relatif dekat dengan desa lokasi penelitian, sehingga tidak ada spesifikasi khusus untuk dikaitkan dengan komunikasi antarbudaya, antara penduduk asli dengan pendatang etnik Sunda di desa ini.

Alasan terinci terhadap pemilihan aspek-aspek yang terdapat pada informan tersebut adalah sebagai berikut: (1) Batasan usia informan adalah minimal 17 tahun, atau mereka yang sudah atau pernah menikah. (2) Lama tinggal di wilayah administratif desa tersebut, adalah minimal dua tahun, dengan alasan mengacu pada Pasal 4 huruf g, Undang-undang No. 5 Tahun 1979, tentang persyaratan yang dapat dipilih menjadi Kepala Desa yaitu: terdaftar sebagai penduduk, dan bertempat tinggal tetap di desa yang bersangkutan sekurang-kurangnya selama dua tahun terakhir, dengan tidak terputus-

putus, kecuali bagi putera desa yang berada di luar desa yang bersangkutan. Lama tinggal dua tahun, dianggap sudah melihat langsung segala aspek kehidupan yang ada di desa ini, sehingga informan diharapkan mampu memberikan informasi yang berhubungan dengan permasalahan penelitian.

Pemilihan etnik-etnik tersebut sebagai informan, didasarkan pada jumlah yang cukup banyak, kemenonjolan dalam kualitas hidup, dan spesifikasi sosial budaya yang kuat di desa. Pertimbangan selanjutnya dalam pemilihan etnik sebagai informan, didasarkan pada pendapat pakar ilmu sosial dan kebudayaan. Untuk etnik Jawa dilihat dari kuantitas yang besar dan penyebarannya yang sangat luas atau mewakili mayoritas nasional (Margarete Schweizer, 1993:182). Untuk etnik Batak dan Minangkabau, sebagaimana dikemukakan oleh Hildred Geertz (1981:71), bahwa orang Minangkabau dan Orang Batak Toba mendiami lembah-lembah yang tinggi di pedalaman Pulau Sumatera: tetapi kedua masyarakatnya merupakan masyarakat yang amat menyebar ke luar (*centrifugal*) dimana orang-orangnya yang penuh daya itu terdapat di semua kepulauan Indonesia.

Dalam penelitian ini yang dimaksud etnik Batak atau suku bangsa Batak adalah terdiri dari enam sub-etnik suku bangsa yaitu: (1). Toba yang mendiami sekitar wilayah Tapanuli Utara, (2). Simalungun disekitar wilayah Kabupaten Simalungun, (3). Angkola yang mendiami sekitar wilayah Kabupaten Tapanuli Tengah termasuk Sipirok, (4). Mandailing disekitar wilayah Kabupaten Tapanuli Selatan, (5). Karo diseputar wilayah Kabupaten Karo dan (6). Pakpak di Kabupaten Dairi. (Batara Sangti dalam Ulert, 1989:75). Berdasarkan pengelompokan tersebut, peneliti tidak membatasi semata-mata pada sub etnik Batak Toba saja, tetapi suku Batak termasuk enam sub etniknya. Walaupun berbeda-beda bahasanya diantara sub-etnik, tetapi mayoritas anggota masyarakat Batak mengerti Bahasa Batak Toba (Ulert, 1989:75).

Penetapan Etnik Madura sebagai informan, mengacu pada pendapat Edi S. Ekadjati (1984:13-14), bahwa masyarakat suku bangsa Sunda termasuk kedua terbesar dari kira-kira 300 kelompok suku bangsa yang ada di Indonesia, sedangkan kelompok suku bangsa Madura adalah terbesar ketiga setelah suku bangsa Jawa dan Sunda.

Kelompok-kelompok etnik yang dijadikan sasaran penelitian, masing-masing mempunyai stereotip dan *prejudice* sehingga dalam interaksi diantara mereka atau dengan Kepala Desa, akan menciptakan pola-pola komunikasi tertentu yang bersifat sebagai kendala ataupun pendukung kepemimpinan.

Dalam menetapkan pemuka pendapat (*opinion leader*) sebagai informan, terdapat tiga cara menurut Rogers (1969:215) yaitu: (1). *Sociometric Method* dengan menanyakan masyarakat, kepada siapa mereka meminta informasi atau nasehat; (2). *Informant's Rating*, dengan mengajukan pertanyaan tertentu kepada responden: siapa pemimpin yang sesuai dalam pandangan mereka; (3). *Self Designating Method* yang menayangkan seberapa jauh seorang responden menyatakan diri sebagai pemimpin.

Dari ketiga metode tersebut, yang dipakai dalam penelitian ini adalah metode *informant's rating* dalam konteks sampling bola salju. Dengan alasan *informant's rating* tidak menunjukkan dirinya lebih dari orang lain yang biasanya tidak dikemukakan oleh masyarakat desa sebagaimana dalam *Self Designating Method*, yang mengklaim diri sendiri sebagai pemimpin. Atau *Sociometric Method* juga tidak dipakai dalam penelitian ini, mengingat tidak semua anggota kelompok selalu meminta nasehat dan informasi kepada pemimpin, mengingat berbagai informasi dapat diperoleh dari berbagai saluran yang tersedia.

Untuk memulai sampling bola salju, terlebih dahulu dilakukan pengamatan terhadap kelompok-kelompok etnik dalam berinteraksi dengan kelompok etniknya maupun di luar etniknya. Penetapan sampling bola salju ini juga tidak semata-mata terbatas mencari informasi dari kelompok etnik yang sama tetapi juga mencakup etnik lain yang terkait dengan topik penelitian.

### **C. Menelaah Karakteristik Keanekaragaman**

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini bersifat kualitatif, dimana analisa itu sendiri diartikan sebagai teknik-teknik yang dapat digunakan untuk memberi arti kepada beratus-ratus atau bahkan beribu-ribu, lembar catatan dan perilaku dalam catatan-catatan peneliti. (Fred Davis dalam Bogdan & Taylor, 1992:137). Sebelum dilakukan analisa data untuk melihat validitas dan reliabilitas data, maka keandalan data diarahkan pada ketepatan dan kecukupan data. Reliabilitas menurut pengertian kualitatif tidak lain daripada kesesuaian apa yang dicatat sebagai data, dan apa yang sebenarnya terjadi pada latar yang sedang diteliti. Secara terinci Lexi Moleong mengemukakan empat kriteria yang digunakan untuk menggantikan konsep validitas dan reliabilitas yaitu:

1. Derajat kepercayaan (*credibility*), yang menggantikan konsep validitas internal berpedoman bahwa pelaksanaan penelitian harus sedemikian rupa sehingga tingkat kepercayaan penemuannya dapat dicapai, hal ini dapat dicapai antara lain melalui perpanjangan partisipasi observasi, kecukupan referensial dan lain-lainnya.
2. Keteralihan (*transferability*) adalah persoalan empiris bergantung pada kesamaan antara konteks pengirim dan penerima. Untuk melakukan pengalihan peneliti hendaknya mengumpulkan kejadian empiris tentang kesamaan konteks.
3. Kebergantungan (*dependability*) merupakan substitusi istilah reliabilitas dengan cara melakukan audit terhadap catatan-catatan keseluruhan proses penelitian dan hasil studi.
4. Kepastian (*confirmability*) sebagai pengganti objektivitas yaitu dengan menyeleksi terhadap data yang diperoleh dapat dipercaya, faktual dan dapat dipastikan (Moleong, 1993:173-175)



Sementara itu David Silverman (1993:146) menyatakan, intinya reliabilitas dapat dipakai dalam penelitian kualitatif melalui observasi, analisis tekstual, interview, dan catatan asli dari pembicaraan spontan. Validitas dalam penelitian kualitatif adalah menyangkut sesuatu hal yang masuk akal (*plausibility*) berdasarkan eksistensi dari ilmu pengetahuan dan kepercayaan (*credibility*) terhadap fenomena alamiah yang terjadi. Apabila kondisi tersebut telah dicapai, dan data terkumpul maka tahap berikutnya adalah mengatur data demikian rupa, sehingga dapat diadakan suatu analisa. Pengaturan data sedemikian dinamakan klasifikasi, yaitu kita merumuskan kategori-kategori (kelas-kelas) yang terdiri dari gejala yang sama atau yang dianggap sama (J.Vredenberg, 1980:125).

Sedangkan menurut Moleong (1993:190), sebelum sampai ada tahap klasifikasi dilakukan reduksi data, dan menyusunnya dalam satuan-satuan informasi. Tahap selanjutnya adalah pembuatan koding, dan melakukan penelitian terhadap keabsahan data yang diperoleh dari lapangan. Apabila langkah-langkah tersebut telah dilakukan, maka pada hakikatnya analisa data bersifat menyeluruh, seperti apa yang dikemukakan oleh Faisal (1990:1991) sebagai analisa domain, yang sifatnya umum dan relatif menyeluruh mengenai pokok permasalahan yang diteliti.

Keterbatasan dan kelemahan penelitian ini antara lain sebagai berikut: Pertama, Informan dari kelompok etnik yang dijadikan sampel tidak ada kaitannya dari asal geografis etnik asli. Misalnya: orang-orang Minangkabau yang tinggal di daerah penelitian, bukan berasal dari wilayah Sumatera Barat. Orang tersebut lahir dan dewasa di luar wilayah Sumatera Barat, sehingga walaupun karakteristik etniknya masih melekat, tetapi kemungkinan telah terjadi akulturasi tetap ada. Disamping itu terdapat variasi-variasi lain dalam migrasi dan proses sosialisasi sejak mereka lahir sampai dewasa, dikaitkan dengan wilayah geografis, sehingga batasan terhadap karakteristik kelompok etnik bisa menjadi kabur.

Kedua, keberaksian (*reactivity*) yang dikenal pula sebagai *Hawthorne Effect* dalam pelaksanaan pengumpulan data penelitian. Maksudnya bahwa data yang hendak dikumpulkan tidaklah sebagaimana yang dimaksudkan dalam permasalahan penelitian yang bersangkutan (Malo et. al. 1991:24-25). Keberaksian dalam penelitian ini, berhubungan dengan permasalahan penelitian yang menyangkut wilayah kekuasaan Kepala Desa sebagai orang nomor satu di wilayahnya. Responden kemungkinan akan menghindari untuk memberikan pendapat yang negatif, karena kekhawatiran terhadap dampak kurang menguntungkan secara pribadi maupun kelompok.



# BAB 4

## KAWASAN KOMUNIKASI MULTI ETNIK

---

### A. Interaksi dan Komunikasi Dalam Pembangunan

Desa lokasi penelitian di kawasan pantai utara Kabupaten Karawang ini merupakan desa asli. Secara historis, desa asli sudah ada sejak zaman Hindia Belanda berdasarkan *Inlandse Gemeente Ordonnantie/IGO*. (Ndraha,1991: 6). Tahun 1979, desa diatur dan ditetapkan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa. Dalam aspek legal, Desa adalah suatu wilayah yang ditempati oleh sejumlah penduduk sebagai kesatuan masyarakat, termasuk didalamnya kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai organisasi pemerintahan terendah langsung di bawah Camat dan berhak menyelenggarakan rumah tangganya sendiri dalam ikatan Negara Kesatuan Republik.

Desa dipimpin oleh Kepala Desa, yang diharapkan oleh pemerintah dapat menguasai aktivitas-aktivitas yang ada dimasyarakat, untuk menunjang pembangunan pedesaan. Buddy Prasadja (1980:51) menyebutkan pelaksanaan pembangunan desa sangat tergantung pada upaya mendinamiskan masyarakatnya, sedangkan kemampuan pemerintah dalam menyediakan dana maupun tenaga ahli untuk melancarkan pembangunan tersebut sangat terbatas, dengan demikian pelaksanaan pembangunan harus dilaksanakan oleh pemerintah setempat.

Pendapat tersebut menunjukkan, bahwa Kepala Desa lebih banyak terlibat dalam urusan partisipatif, yaitu urusan-urusan yang ditetapkan oleh pemerintah, tetapi pelaksanaannya diserahkan kepada masyarakat desa yang bersangkutan. Padahal urusan rumah tangga desa, dalam bentuk otonomi desa yang sudah melekat berdasarkan hukum adat setempat, jauh lebih luas dibandingkan dengan peran formal sebagai alat Pemerintahan Pusat.

Tetapi kenyataannya, bahwa otonomi desa semakin berkurang perannya. Menurut Ndraha (1991:7) bahwa aspek mengatur yang dimiliki Desa dalam bentuk otonomi sudah semakin merosot, karena satu persatu diatur oleh pemerintahan yang lebih tinggi. Hak dan wewenang sebagai masyarakat hukum adat tidak berfungsi lagi dan diganti dengan peraturan pemerintah, ini disebabkan antara lain oleh semakin heteroginnya penduduk desa sehingga sulit ditentukan hukum adat mana yang berlaku, dan sumber-sumber pendapatan desa banyak yang diambil alih oleh pemerintahan di atasnya.

Kepentingan mengandalkan dukungan masyarakat desa melalui Kepala Desanya, dengan mengajak untuk partisipasi warga dalam program pembangunan tidak mudah, karena akan berhadapan dengan kelompok kepentingan lain, yang mempunyai pemimpin dengan pengaruh otoritas tradisional yang sangat kuat. Jika kekuatan formal tidak sejalan dengan otoritas tradisional, maka akan melemahkan kekuatan desa dalam semangat gotong-royong yang didukung oleh nilai solidaritas lain.

Akibatnya, Kepala Desa sulit mencari dukungan partisipatif dalam melaksanakan program pembangunan. Berdasarkan hal tersebut, Kepala Desa seyogianya bukan mengandalkan otoritas formal saja, tetapi juga pendekatan non formal kepada masyarakat dan pemuka masyarakat di pedesaan.

Pemuka masyarakat dilingkungan desa lokasi penelitian didominasi oleh penduduk asli desa. Mereka adalah tokoh-tokoh formal dalam struktur pemerintah, tokoh pemilik informasi seperti ulama, pemukapat, orang pintar-pintar dalam konteks tradisional dan magis. Sejalan dengan perkembangan desa, tokoh masyarakat yang sekarang muncul adalah orang-orang yang mempunyai akses komunikasi lebih lancar kepada pemerintah dan kepada pengusaha di wilayah desa dan sekitarnya. Masyarakat menganggapnya mereka mempunyai peran besar, karena menguasai informasi lebih awal dalam bursa tenaga kerja di pabrik-pabrik dan rencana-rencana pemerintah dalam pembangunan industri di pedesaan.

Perubahan pandangan terhadap pemuka masyarakat yang terjadi di desa, melemahkan tradisi sosial dan menguatnya orientasi material, sehingga orang-orang yang mempunyai saluran dalam budaya material bisa menggeser pemimpin tradisional. Tokoh baru ini pada umumnya bukan penduduk asli, tetapi pendatang-pendatang dari berbagai kelompok etnik. Tokoh ini lebih universal dalam hal pengaruh di masyarakat. Dengan kata lain, setiap kelompok masyarakat di pedesaan menganggap bahwa dia salah seorang tokoh yang ada didesanya.

Falsafah hidup penduduk asli desa lokasi penelitian adalah berbuat baik terhadap sesama manusia, menghormati orang lain serta meneladani dan memelihara nilai-nilai luhur tradisi para pendahulunya. Pemeliharaan nilai tradisional dari para leluhurnya ini masih tampak pada setiap tanggal 1 Muharram atau Tahun Baru Hijriah. Seluruh warga desa yang mempunyai pusaka-pusaka peninggalan nenek moyang mereka, akan dibersihkan. Benda yang dikeramatkan dicuci dengan air bunga yang sudah diberi doa-doa ritual oleh para pemuka adat.

Sikap hidup dan perilaku penduduk asli masih tampak jelas, walaupun sudah semakin memudar maknanya. Antara lain adalah kegiatan candak kulak dalam konteks gotong royong model pedesaan Jawa Barat, yang pada intinya bahwa semua pekerjaan ditanggung bersama oleh saudara maupun kerabat desa. Menurut Koentjaraningrat (1977:16), "konsep gotong royong dibedakan antara gotong-royong sebagai suatu system, nilai yang

menjiwai kebudayaan”. Gotong-royong di desa mengandung makna ketiganya, perilaku, pemeliharaan sistem dan budaya dalam bentuk konkrit. Misalnya penyelenggaraan perkawinan, khitanan, kelahiran bayi, pembangunan rumah, pengolahan sawah dan lain-lainnya.

Berkaitan dengan falsafah hidup, salah satu dasar falsafah masyarakat Sunda yang banyak dianut dan diajarkan sejak abad ke 19 adalah, tentang susunan orang yang harus dihormati dengan urutan pertama guru, memperoleh tempat yang paling tinggi, kemudian baru Ratu, sementara Orang Tua berada dalam tingkatan paling akhir. Sedangkan perkataan guru itu sendiri, ditafsirkan dengan “orang yang harus digugu dan ditiru” yaitu yang setiap perbuatannya harus menjadi contoh tauladan orang lain. (Ayib Rosidi dalam Edi S. Ekadjati, 1985:157).

Dilingkungan kelompok etnik pendatang di desa lokasi penelitian, mereka yang dianggap pemuka masyarakat di komunitasnya adalah yang dituakan, dan para perintis yang jauh lebih awal bertempat tinggal di desa lokasi penelitian. Secara ekonomis, orang-orang ini keadaannya lebih maju dibandingkan dengan anggota-anggota kelompoknya. Bahkan lebih sejahtera dibandingkan dengan masyarakat asli setempat, yang memahami kondisi desa dalam aspek historis.

Falsafah hidup kelompok-kelompok etnik pendatang, umumnya masih memelihara nilai-nilai tradisional dari daerah asal. Tetapi dalam kadar yang berbeda-beda karena berbagai aspek yang mempengaruhinya. Misalnya dari segi umur, lama tinggal di wilayah itu dan tempat terakhir mereka tinggal sebelum pindah ke desa di kawasan pantai utara lokasi penelitian.

Bahasa yang dipergunakan masyarakat desa penduduk asli, adalah bahasa Sunda dialek Karawang, yang dipengaruhi oleh bahasa Sunda Cirebon, dan logat-logat Jakarta. Komunikasi dalam bahasa Indonesia dipakai diantara sesama pendatang dari kelompok etnik yang berbeda. Kendati demikian, bahasa daerah asal etnik, tetap digunakan dalam komunikasi diantara mereka yang sesama etnik. Bahkan terhadap anak-anak dari kelompok etnik Jawa, Batak dan Madura yang lahir di desa, mereka tetap berkomunikasi dalam bahasa daerah.

Desa lokasi penelitian ini, terletak dipinggir jalan raya pantai utara Jakarta-Cirebon, atau jalan arteri primer (istilah dalam Rencana Umum Tata Ruang Kota/RUTRK) yang membelah desa menjadi dua kawasan, yaitu Utara dan Selatan. Sebelah Utara, sebagian besar terdiri dari tanah pertanian, kebun dan tegalan. Sedangkan disebelah Selatan yang semula dipakai sebagai tanah pertanian, berubah pula sebagai tanah kawasan industri.

Desa ini dapat dicapai dengan mudah memakai kendaraan pribadi maupun kendaraan umum seperti bus, minibus, oplet dan berbagai maupun berbagai angkutan umum lainnya termasuk becak, yang dipergunakan untuk menempuh jarak yang dekat seputar kota kecamatan. Tersedianya jalan sampai ke pelosok pedesaan tersebut menurut

Rogers dan Svenning (1969:247) sebagai salah satu karakteristik desa yang bergerak menuju desa modern.

Untuk mencapai wilayah pedesaan di pedalaman, atau ke dusun-dusun, dapat dilakukan dengan memanfaatkan jasa ojek sepeda motor. Ojek berpangkalan di kawasan yang ramai disisi Utara dan Selatan jalan Daendels. Jarak dari desa lokasi penelitian ke Bandung, Ibu Kota Provinsi Jawa Barat, kurang lebih 95 Kilometer. Sedangkan jarak tempuh ke Jakarta melalui jalan pantai utara diperkirakan sekitar 85 kilometer.

## **B. Komunikasi Dalam Kemajemukan Etnik**

Pemukiman penduduk terdistribusi tidak merata, karena terkonsentrasi pada sisi Selatan dan Utara jalan negara yang membelah desa. Sekitar 25 persen sampai 30 persen dari populasi penduduk yang tercatat di administrasi desa, adalah bukan penduduk asli desa. Umumnya mereka berada di pinggir jalan raya pantia utara. Para pendatang tersebut berasal dari berbagai kelompok etnik yang ada di wilayah Indonesia, seperti kelompok etnik Jawa, Minangkabau yang oleh masyarakat setempat disebut orang Minang atau orang Padang, kelompok etnik Batak, Orang Madura, dan berbagai etnik lain yang datang ke pedesaan untuk mencari kehidupan yang lebih baik.

Mata pencaharian penduduk desa pada umumnya petani pemilik, petani penggarap, buruh tani, buruh pabrik, buruh bangunan dan mata pencaharian di sektor formal maupun informal lainnya. Didasarkan pada pengelompokan etnik, petani pemilik, petani penggarap maupun buruh tani, sebagian besar terdiri dari penduduk asli desa. Terdapat sejumlah Orang Jawa, sebagai petani pemilik. Mereka yang berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil bekerja di Kantor Pos, Jaringan Induk Perusahaan Listrik Negara (PLN), Sekolah Dasar Negeri, Madrasah Ibtidaiyah Negeri dan kantor pemerintah lainnya. Pegawai Negeri ini sebagian besar adalah pendatang dari berbagai kelompok etnik, tetapi khusus Pegawai Negeri Sipil yang berprofesi sebagai guru Sekolah Dasar, dan Madrasah Ibtidaiyah, sebagian besar adalah penduduk asli desa.

Petani di desa, kecuali petani-petani pemilik, umumnya tidak sepenuhnya bermata pencaharian di sektor pertanian. Sebab dalam waktu-waktu tertentu dimana lahan pertanian tidak banyak memerlukan tenaga kerja, mereka akan bekerja di sektor-sektor lain sebagai buruh bangunan, tukang ojek dan lain-lainnya. Jumlah karyawan pabrik jauh lebih banyak, tetapi mereka sebagian besar adalah pendatang yang tidak tercatat dalam administrasi pemerintahan desa.

Masyarakat desa yang sampai tahun 1996 masih mengandalkan sektor pertanian, berubah haluan ketika muncul pabrik-pabrik dan usaha-usaha industri lain di sekitar desa. Meningkatnya jumlah karyawan pabrik, sejalan dengan tumbuhnya usaha sektor industri. Sedangkan perkembangan industri, merupakan akibat sarana transportasi yang

semakin mudah, dan waktu tempuh yang singkat dengan dibangunnya jalan tol Jakarta-Cikampek.

Tumbuhnya pabrik-pabrik di wilayah desa ini dan sekitarnya, menciptakan pola konsumen baru, yang semula tidak dikenal di lingkungan desa. Tuntutan konsumen yang bekerja di pabrik, menciptakan jenis-jenis usaha yang bervariasi dengan munculnya toko dan warung, foto studio, foto copy, pedagang barang bekas, tukang ojek, tukang tambal ban motor/mobil, pemulung, pedagang asongan, rumah makan besar yang dibuka sepanjang hari, dan usaha lainnya yang menunjang para pekerja sektor industri.

Terbukanya peluang di luar sektor agraris ini, menarik banyak tenaga kerja pertanian yang terampil untuk bekerja di luar bidang yang selama ini digeluti. Pemerintah Daerah setempat mengkhawatirkan terjadinya pergeseran penduduk, dari sektor agraris ke sektor perdagangan dan jasa yang berdampak kepada berkurangnya lahan pertanian, dan tenaga potensial di sektor pertanian, khususnya sawah padi menjadi berkurang.

Di lain pihak, kekhawatiran muncul pula dari para tokoh dan elite pedesaan, sebab sebagian besar lahan-lahan pertanian tegalan yang mereka miliki selalu terancam oleh penggusuran mendadak. Mereka telah mengalami akibat buruk dalam pendirian dan perluasan perusahaan, yang merusak lingkungan khususnya dalam penyediaan air tanah, maupun kesuburan tanah pertanian. Bahkan dalam perkembangannya masyarakat menjadi semakin khawatir, ketika salah satu perkebunan berubah fungsinya menjadi perumahan mewah, yang harganya tidak terjangkau oleh kebanyakan masyarakat di sekitarnya.

Sebagai kawasan yang subur, desa ini juga dinamis dalam hal perdagangan antar masyarakat. Jenis perdagangan berdasarkan kondisi tahun 1996 di desa, meliputi perdagangan eceran semua jenis komoditi, dari pangan, sandang dan kebutuhan lain yang berhubungan dengan pertanian seperti pupuk, obat penyemprotan hama tanaman, penjualan suku cadang kendaraan bermotor, bensin, solar eceran dan oli. Terdapat pula toko-toko kelontong yang menyediakan keperluan kantor, rumah tangga maupun kebutuhan fisik perlengkapan rumah tangga.

Sesuai dengan kebijaksanaan pemerintah daerah, desa ini sebagai salah satu pusat koleksi dan distribusi barang dan jasa hasil pertanian. Tetap ironisnya melimpahnya hasil pertanian, tidak tampak dalam kehidupan sehari-hari, kecuali pada saat panen padi dan palawija. Hasil ikan dari empang masyarakat tidak menonjol, karena sekadar untuk memenuhi kebutuhan masing-masing pemiliknya, atau dijual di pasar kecamatan.

Usaha pertanian di desa kawasan industri ini, semakin tidak populer dengan munculnya pabrik-pabrik yang secara langsung, atau tidak langsung, mengurangi produktivitas pertanian. Kondisi ini akibat kerusakan lingkungan, yang menghilangkan kesuburan tanah, maupun terserapnya tenaga kerja pertanian di pabrik-pabrik yang tumbuh subur di pedesaan.

### **C. Komunikasi dan Interaksi Sosial Sebagai Ikatan Harmoni**

Masyarakat di desa lokasi penelitian ini, sebagian besar beragam Islam, agama lain yang dipeluk warga desa yang umumnya warga pendatang adalah Katolik, dan Kristen Protestan. Sedangkan yang beragama Budha umumnya adalah warga keturunan Tionghoa, yang tinggal di pusat-pusat keramaian jalan negara. Kehidupan beragama di kawasan desa ini berjalan dengan baik dan penuh toleransi. Dengan demikian tidak pernah muncul keributan ataupun konflik antar agama dan kepercayaan. Nilai-nilai toleransi banyak diajarkan oleh para tokoh masyarakat desa yang berasal dari penduduk asli maupun pendatang.

Sebagai sarana ibadah bagi umat Islam, terdapat Mesjid Jami yang secara sosiologis melekat pada Nahdatul Ulama (NU). Sedangkan Masjid maupun Mushola yang menurut mereka sebagai Mesjid Muhammadiyah tidak ada. Namun sesungguhnya, warga desa bersikap tidak kaku dalam melaksanakan ibadah tanpa membedakan aliran keagamaan di masyarakat. Selain Masjid Jami, terdapat banyak Mushola (langgar) yang tersebar di wilayah pedusunan, dan 5 buah Majelis Taklim. Masjid, Mushola dan Majelis Taklim ini dipakai juga oleh masyarakat untuk bermusyawarah dalam kegiatan sosial keagamaan. Dengan demikian tokoh-tokoh agama ataupun aktivis Masjid dan Mushola disegani oleh masyarakat, karena dianggap selain menguasai bidang keagamaan, juga mampu menangani permasalahan sosial yang timbul di pedesaan.

Dalam Kehidupan beragama, dilakukan pengajian seminggu sekali pada setiap dusun. Sedangkan pada hari besar keagamaan seperti halnya Maulid Nabi dan Isra Miraj, dilaksanakan ditingkat Desa oleh LKMD maupun Majelis Ulama Desa. Peringatan hari besar keagamaan juga dilakukan juga oleh mereka yang dalam struktur ekonomi tergolong mampu, dengan mengundang kelompok pengajian di lingkungannya. Dalam kegiatan keagamaan, sebagian besar diikuti oleh penduduk asli. Sementara para pendatang yang mengikuti, kebanyakan orang dari etnik Jawa yang sudah lama tinggal di desa ini. Kendati demikian, kegiatan keagamaan yang diselenggarakan oleh Karang Taruna, pesertanya terdiri dari multi etnik. Jadi tidak terbatas pada penduduk asli dan Orang Jawa saja tetapi ada dari etnik Madura dan etnik lainnya.

Aliran-aliran kepercayaan dalam wujud yang faktual terikat dalam kelompok maupun komunitas tidak dijumpai desa ini. Tetapi pada sebagian individu, masih ada dalam jumlah yang terbatas, dan tetap dalam konteks mengidentifikasi diri dalam agama Islam. Walaupun demikian, masyarakat desa beranggapan, yang berusia di atas 50 tahun dan tinggal di desa ini, cenderung masih mempunyai tradisi yang sejalan dengan kepercayaan kuat dan berorientasi pada kebudayaan leluhur. Pemerintah Desa tidak mencantumkan adanya aliran kepercayaan dalam berbagai laporan administrasi desa secara formal. Mereka diadministrasikan dalam agama yang dipeluknya seperti pada Kartu Tanda Penduduk, yang memuat agama-agama yang diakui di Indonesia.



Sebagian besar penduduk asli berpendidikan rendah, yaitu rata-rata lulusan Sekolah Dasar, disusul lulusan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP), dan paling sedikit lulusan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA). Orang-orang tua yang berumur di atas 50 tahun, umumnya tidak tamat Sekolah Dasar, tidak pernah sekolah formal, tetapi mereka belajar pada madrasah atau mengikuti Program Kelompok Belajar Paket A yang diselenggarakan oleh pemerintah, agar mereka tidak buta huruf. Dalam Monografi Desa Tahun 1995, tercantum tidak ada satu orangpun, yang buta huruf di desa lokasi penelitian di desa kawasan pantai utara Kabupaten Karawang Jawa Barat.

Kondisi pendidikan penduduk asli, tampaknya jauh berbeda dengan para pendatang di desa lokasi penelitian ini. Berdasarkan pengamatan pendidikan para pendatang yang bekerja di pabrik rata-rata lulusan SLTA, beberapa lulusan akademi maupun lulusan jenjang sarjana strata satu. Namun laporan yang tertera dalam Monografi Kecamatan maupun desa setempat tahun 1995, tidak ada satu orangpun yang berpendidikan sarjana atau sarjana muda. Memang mereka pada umumnya bekerja di perusahaan dan sebagai pegawai negeri di instansi pemerintah di desa ini yang tidak tercatat dalam administrasi pemerintahan desa.

Di lingkungan aparat desa yang semuanya adalah penduduk asli, Kepala Desa mempunyai pendidikan hanya pada tingkat Sekolah Dasar, Sekretaris Desa berpendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA), Kepala Urusan (Kaur) Urusan Pemerintahan, Kaur Ekonomi Pembangunan, Kaur Kesejahteraan Rakyat dan Keuangan berpendidikan SLTA. Sedangkan Kepala Urusan Umum berpendidikan Sekolah Dasar.

Menyangkut pendidikan Kepala Desa, berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa, sekurang berpengetahuan/berpengalaman yang sederajat. Persyaratan pendidikan formal dengan pengetahuan dan pengalaman yang sederajat mengandung subjektivitas penilaian. Karena itu tidak mengherankan jika Kepala Desa di lokasi penelitian berpendidikan lebih rendah dari yang dipersyaratkan, tetapi sudah barang tentu memiliki pengalaman yang sederajat dengan pendidikan SLTP.

Sarana pendidikan yang terdapat di desa adalah, Taman Kanak-Kanak (Islam) Mutiara, dengan jumlah murid 32 orang. Terdapat 4 (empat) buah/Unit Sekolah Dasar dengan jumlah murid 978 orang. Lembaga pendidikan yang setingkat dengan SD adalah 2 Unit Madrasah Ibtidaiyah (MI) dengan jumlah murid 215 orang. Pendidikan setingkat Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) dan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA) tidak terdapat di desa ini. Bahkan di Kecamatan hanya ada dua buah SLTP, satu buah Madrasah Tsanawiyah dan satu buah SLTA Negeri.

Selain sekolah-sekolah formal tersebut, terdapat Lembaga pendidikan masyarakat "LAI" yang mempunyai ijin dari pemerintah untuk menyelenggarakan kursus-kursus, seperti: Komputer, Akuntansi dan Bahasa Inggris. Lembaga ini juga menerima siswa-siswa yang akan mengikuti Ujian Persamaan SLTP dan SLTA pada Tingkat Kabupaten Karawang

Di desa ini, terdapat sarana olah raga, sebagai pusat komunikasi dan interaksi di desa, yaitu lapangan sepak bola, yang berfungsi sebagai tempat olah raga tingkat kecamatan. Ada tiga lapangan sepak bola tidak permanen, yang memakai tanah kosong dan sewaktu-waktu bisa digusur oleh pemiliknya. Lapangan bola Volley juga tidak permanen, menempati tanah kosong milik perorangan yang belum dimanfaatkan peruntukannya. Sarana olah raga yang permanen dan terawat dengan baik adalah lapangan bulu tangkis. Terletak di lingkungan Kantor Kepala Desa, dan ini berfungsi pula sebagai pusat olah raga tingkat kecamatan.

Dengan fasilitas olah raga yang ala kadarnya, ternyata tidak mengurangi niat masyarakat untuk mendirikan perkumpulan olah raga dengan membentuk kelompok, grup atau klub olah raga. Di desa lokasi penelitian terdapat, perkumpulan Sepak bola berjumlah 2 kesebelasan, Volley Ball 3 Club, Tenis Meja 3 Club, Bulu Tangkis 3 Club, Catur 3 Club. Selain itu, banyak perkumpulan yang secara insidental dibentuk untuk kepentingan kompetisi. Perkumpulan-perkumpulan ini beranggotakan multi etnik, bahkan penduduk asli bukan merupakan mayoritas di dalamnya.

#### **D. Media Komunikasi dan Interaksi Antar Kelompok Etnik**

Media komunikasi dalam interaksi antar etnik di desa adalah telepon. Jaringan telpon menurut Redfield (dalam Miftah Toha,1991) merupakan salah satu teknologi untuk berkomunikasi. Telepon sudah terpasang sejak tahun 1990 khususnya di kantor perusahaan yang terdapat di wilayah desa, kantor Kepala Desa, kantor Gardu Induk PLN, Kantor Pos. Telepon perorangan hanya dimiliki oleh beberapa warga desa, sedangkan sambungan telpon umum yang tersedia di wilayah desa berjumlah 4 sambungan.

Telepon umum yang pertama terletak di Kantor Pos dan Giro. Telepon umum kedua terletak di dusun sebelah utara jalan negara pantai utara, kurang lebih 500 meter dari Kantor Kepala Desa ke arah Selatan. Telepon umum yang ketiga, terdapat disebelah Utara simpang pusate desa yang ramai. Sementara telepon umum keempat, ada di jalan kabupaten pada salah satu dusun. Pada umumnya telepon-telepon umum itu terawat dengan baik, dan berfungsi sebagaimana mestinya, kecuali yang terdapat di Kantor Pos dalam keadaan tidak berfungsi seperti tidak terawat.

Telepon umum yang ada di wilayah desa penelitian, digunakan oleh sejumlah kecil warga desa khususnya anak-anak muda, pedagang dan pemilik-pemilik toko kelontong untuk kepentingan menghubungi orang-orang di luar desa yang jaraknya cukup jauh. Telepon juga dipakai untuk berkomunikasi dengan sama warga desa, termasuk yang mempunyai telepon pribadi. Kendati demikian, ternyata warga desa penduduk asli lebih mengandalkan dalam komunikasi antar pribadi, dengan bertatap muka secara langsung atau dengan menitipkan pesan melalui orang ketiga.

Komunikasi secara langsung antara pemberi informasi dan menerima informasi masih diandalkan di desa. Bahkan undangan segala bentuk hajatan keluarga, walaupun sudah tertulis tetapi pesan-pesan disampaikan pula secara langsung oleh komunikator yang ditugaskan. Misalnya sambil menyerahkan undangan komunikator mengatakan: salam dari Bapak atau Ibu yang punya hajatan, Bapak dan Ibu dimohon datang pada hari dan jam yang telah ditentukan. Khusus penyampaian waktu dalam komunikasi tatap muka, biasanya memakai padanan waktu shalat bagi umat Islam. Seperti sehabis shalat dzuhur, asyar maupun isya, atau dalam terminologi waktu hajatan dikatakan bakdal, dzuhur, bakdal asyar maupun bakdal isya.

Dengan mengandalkan komunikasi secara langsung, maka sebagian besar masyarakat desa hampir tidak pernah memanfaatkan telpon umum sebagai salah satu teknologi komunikasi yang terdapat di desanya. Sejalan dengan keadaan ini adalah pendapat Sasa D. Sendjaja (1991:147) bahwa penggunaan produk teknologi, komunikasi tidak semata-mata menyangkut aspek fisik teknologi dan ekonomi tetapi juga melibatkan faktor-faktor sosial kultural.

Berdasarkan pendapat itu, masyarakat desa khususnya orang tua mempunyai berbagai macam alasan untuk tidak menggunakan telepon. Antara lain: tidak mengetahui cara memakainya, kurang sopan untuk menghubungi orang tertentu dan jumlah pemilik telepon masih terbatas. Pada intinya, telepon masih kurang dianggap penting dibandingkan dengan interaksi secara langsung dalam komunikasi antar pribadi. Dengan demikian mereka beranggapan bahwa telepon umum di desa lokasi penelitian, sebenarnya diperuntukkan bagi kelancaran komunikasi dan informasi dalam industri, perdagangan dan pemakai jalan raya pantai utara, bukan untuk warga desa penduduk asli.

Sebagian warga desa memperoleh informasi dari televisi dan radio. Dua jenis media elektronik tersebut dalam kualitas sederhana, yaitu televisi hitam putih ukuran sekitar 14 inchi, atau radio transistor. Di desa ini tidak terdapat televisi umum, termasuk di kantor Kepala Desa atau Balai Desa yang biasanya ada televisi umum. Televisi umum terpasang di kantor kecamatan dan banyak ditonton warga sekitarnya.

Sebenarnya televisi umum dibutuhkan oleh masyarakat desa, bukan semata-mata sebagai salah satu sumber informasi dan hiburan, tetapi juga sebagai tempat untuk bersosialisasi sesama warga desa, sambil menikmati hiburan umum gratis. Sarana hiburan umum seperti halnya bioskop belum ada, walaupun sudah lama direncanakan keberadaannya di dekat kantor kecamatan yang selalu tamai sepanjang hari.

Masyarakat desa, pada umumnya menonton televisi mulai pukul 17.00 WIB, dan akan mnghentikan kegiatannya sejenak pada saat shalat maghrib. Siaran-siaran pagi kurang diminati, karena sebagian besar masyarakat bekerja. Kalaupun tidak bekerja, waktu mereka habiskan untuk membersihkan kebun, mengerjakan urusan-urusan rumah tangga atau sekedar berkumpul dengan tetangga.

Pertimbangan lain tidak menonton televisi pada pagi hari adalah mahalnya biaya listrik. Oleh karena itu siaran televisi pagi dan siang hari, lebih banyak dinikmati oleh ibu rumah tangga dan anak-anak dengan kondisi ekonominya cukup mampu. Walaupun demikian pada acara tertentu yang digemari pada pagi dan siang hari, ibu-ibu rumah tangga menonton televisi bersama, memberi komentar dan mendiskusikannya dengan bersemangat.

Kegiatan menonton televisi di lingkungan rumah tangga, tanpa terkecuali orang tua dan anak-anak, rata-rata akan berakhir pukul 22.00 WIB. Orang tua tidak memberikan batasan pada anak-anak tentang mana yang boleh ditonton dan tidak boleh ditonton. Akibatnya acara televisi yang sebenarnya diperuntukkan bagi orang dewasa, juga ditonton oleh anak-anak dalam waktu yang bersamaan. Selain itu, sudah lazim jika orang tua tidak memperdulikan atau memberi penjelasan terhadap adegan yang bukan konsumsi anak-anak tersebut.

Televisi yang dipasang di warung kopi, rumah makan atau tempat usaha lain berlangsung sampai siaran televisi berakhir, sehingga tempat yang menyajikan televisi sampai acara berakhir, dipakai pula sebagai arena berkumpul masyarakat, misalnya anak muda desa setempat, tukang ojek, pedagang asongan, sopir-sopir angkutan umum, pekerja pabrik dan lain-lainnya. Dengan semakin lamanya jam siaran televisi, dan kepadatan lalu lintas, maka jalan raya yang membelah desa menjadi semakin ramai. Kondisi ini diantisipasi oleh para pendatang pemilik rumah makan, kedai kopi, pedagang asongan, tukang tambal ban dan lain-lainnya untuk melakukan kegiatan sampai dinihari.

Radio biasa didengarkan oleh masyarakat desa setiap saat, tanpa batasan waktu. Sebagian besar radio swasta yang ditangkap siarannya adalah radio swasta dari Kota Karawang, Cikampek dan Purwakarta. Acara-acara dari radio-radio tersebut, pada umumnya berlangsung sampai dengan pukul 24.00 WIB. Selanjutnya bagi pekerja shift yang berusia tua, kurang lebih di atas 40 tahun akan mendengarkan Radio Republik Indonesia Stasiun Cirebon ataupun Stasiun Bandung yang menyiarkan acara tradisional Sunda, seperti Wayang Golek dan lagu-lagu khas Jawa Barat, misalnya degung, calung dan lainnya termasuk lagu-lagu irama dangdut berbahasa daerah. Sementara itu, pada saat yang sama anak-anak muda cenderung mencari pemancar radio FM (*Frequency Modulation*), dari Kota Karawang seperti Radio Historis, Virgin, Pangkal Perjuangan, Swadaya dan Primadona Cikampek yang menyiarkan lagu populer Indonesia maupun Barat, sampai dini hari pukul 01.00-03.00 WIB.

Surat Kabar mudah dijumpai di desa ini, dan banyak dijual di kios sepanjang jalan negara. Tetapi tidak ada agen yang melayani langganan bulanan. Surat kabar juga diajakan segenap pelosok desa. Surat kabar yang beredar antara lain adalah Pos Kota, Media Indonesia, Republika, Kompas, Suara Pembaruan, Pikiran Rakyat, dan Kujang surat kabar pedesaan berbahasa Sunda. Selain media-media cetak ini, terdapat surat kabar Suara Karya yang selalu tersedia dan dapat dibaca di kantor Kepala Desa, di lingkungan instansi

pemerintahan yang tentu saja dibaca oleh sebagian besar pegawai negeri di kantor. Majalah sulit ditemui di desa ini, termasuk yang dijajakan oleh kios-kios di sepanjang jalan negara, tetapi tabloid *Dang Dut* banyak dibaca orang-orang di sekitar jalan negara dan dijajakan bersama surat kabar.

Diantara bermacam-macam surat kabar, sebagian besar warga desa pinggir jalan raya pantai utara mengenal sekali *Pos Kota* sebagai surat kabar utama di desa. Sedangkan surat kabar lain, yang dibaca oleh sebagian kecil penduduk desa atau pegawai perusahaan di desa ini adalah *Pikiran Rakyat Bandung* dan surat kabar berbahasa daerah terbitan Bandung "*Kujang*". Sebagai koran pedesaan khas Jawa Barat, *Kujang* ternyata hampir tidak dikenal oleh warga desa kecuali pegawai Kantor Kepala Desa yang mengetahui dan selalu membaca beragam informasi di dalamnya.

### **E. Media Tradisional Pemelihara Nilai Budaya**

Salah satu media tradisional di Indonesia yang populer adalah dongeng (Gunardi dalam Amri Jahi, 1988:100). Dongeng sebagai media tradisional di desa yang sangat populer, semakin memudar terdesak oleh media massa modern seperti radio dan televisi. Padahal dongeng diandalkan untuk menanamkan nilai-nilai positif yang dimiliki oleh Orang Sunda, khususnya orang Karawang. Misalnya cerita Singa Perbangsa, pahlawan dan Bupati Karawang yang pertama, Syekh Kuro seorang ulama besar yang dipercaya masyarakat Karawang dan sekitarnya sebagai Wali Islam yang pertama di Pulau Jawa, serta cerita-cerita Sunda lain yang positif. Dongeng Sunda asli sebagaimana dikemukakan oleh Ayib Rosidi dalam cerita *Ciung Wanara* meskipun masih populer, tetapi bisa saja suatau ketika akan memudar karena terdesak oleh perkembangan media lain. Dongeng ini mengisahkan dua Saudara *Ciung Wanara* dan *Hariang Banga*. Mereka menceritakan tentang asal usul terpisahnya Orang Sunda dan Jawa, *Lutung Kasarung* mengisahkan cara berladang. (Ayib Rosidi dalam Edi S. Ekadjati, 1984:143).

Media tradisional dikenal pula sebagai media rakyat, dalam pengertian yang sempit dan berfungsi sebagai pemelihara nilai-nilai sosial budaya masyarakat tradisional. Media ini juga sering disebut sebagai kesenian rakyat. Costeng (dalam Jahi, 1988) mengemukakan, media tradisional sebagai bentuk-bentuk verbal, gerakan lisan dan visual yang dikenal atau diakrabi rakyat, diterima oleh mereka, dan diperdengarkan atau dipertunjukkan oleh, dan atau untuk mereka dengan maksud menghibur, memaklumkan, menjelaskan, mengajar dan mendidik. Sejalan dengan pemikiran itu, Clevel menyatakan bahwa media rakyat tampil dalam bentuk nyanyian, tarian rakyat, musik instrumentalia rakyat, drama rakyat, pidato-pidato rakyat, ataupun semua kesenian rakyat yang berupa produk sastra, visual ataupun pertunjukkan dari generasi ke generasi selanjutnya (Gunardi dalam Jahi, 1988:101).

Di desa ini, media tradisional yang masih menarik perhatian masyarakat adalah kesenian-kesenian tradisional khas daerah setempat. Terdapat beberapa group kesenian

tradisional yaitu: Wayang Golek 2(dua) Group, Qasidahan 2(dua) group, Jaipongan 1(satu) group dan Pancak Silat 1(satu) group. Kesenian-kesenian tradisional tersebut, melakukan kegiatan atau pertunjukan pada saat kelompok mereka diundang untuk ikut memeriahkan perayaan perkawinan, khitanan, selamatan panen padi, dan berbagai acara-acara sosial lainnya untuk menghibur masyarakat desa.

Di desa kawasan industri ini, mereka mempunyai perkumpulan yang tidak resmi, yaitu wayang orang dan wayang kulit. Dikatakan sebagai tidak resmi, karena kelompok mereka memang bukan suatu perkumpulan yang terorganisasi dan terdaftar di pemerintahan desa. Kegiatan kelompok wayang orang ini, biasanya secara spontan dilakukan dalam rangka acara-acara tradisional yang diselenggarakan di desa kawasan berdirinya pabrik-pabrik, yang merasa rindu kampung halaman.

Walaupun media elektronik sudah menyebar ke pelosok desa dan sangat disenangi oleh seluruh lapisan masyarakat, tetapi jika kesenian rakyat diundang warga desa dan mengadakan pertunjukan dalam salah satu kegiatan keluarga maupun kegiatan desa, penontonpun akan memadati arena pertunjukan. Pada saat ada pementasan kesenian tradisional, khususnya wayang golek dan jaipong, terasa sekali suasana sosial pedesaan Jawa Barat. Oleh sebab itu Kepala Desa maupun aparat pemerintahan yang lebih tinggi, selalu memanfaatkan media tradisional untuk menyampaikan pesan pembangunan kepada masyarakat. Menyoroti pesan pembangunan Chaedar Alwasilah (dalam Ummat,1996) menyebutkan, bahwa pesan pembangunan yang syarat akronim lebih bernuansa propaganda ketimbang kejujuran pesan.

Harapan Kepala Desa tidak sebatas pada apa yang disampaikan secara langsung, tetapi skenario pertunjukan juga diisi dengan berbagai macam pesan pembangunan yang mengarahkan masyarakat untuk melakukan kegiatan yang dikehendaki oleh pemerintahan desa sebagai alat pemerintah pusat. Selain itu, diterapkan pula pemberian pengarahan terhadap perorangan atau lembaga yang minta ijin keramaian, (peminta ijin keramaian dengan hiburan sebanyak 30 kali dalam tahun 1995). Berarti melalui media komunikasi tradisional, masyarakat hampir sebulan dua kali, mendengarkan pesan pembangunan dari pemerintah melalui elite dalam kekuasaan pemerintahan desa. Frekuensi ini diluar pertunjukan yang diselenggarakan oleh pemerintahan desa, pada setiap hari-hari besar nasional, keagamaan maupun peringatan peristiwa historis.

Selain jenis-jenis kesenian tradisional tersebut di atas, dan tidak tercatat pula dalam administrasi desa, muncul pada sekitar tahun 1990 an adalah group kesenian paduan antara media elektronik dengan kesenian tradisional, yaitu karaoke audio. Karaoke ini tidak ada bedanya dengan karaoke lain sebagai pengiring lagu, tetapi disini penyanyinya tampil di panggung, dalam kostum dan gaya yang sensorok. Lagu-lagu yang didendangkan sebagian besar adalah lagu dang-dut, dengan lirik bahasa daerah Jawa Barat. Satu group karaoke kurang lebih terdiri dari 5 (lima) orang, terdiri dari 3(tiga) orang biduan/ penyanyi, satu orang operator merangkap menjadi pembawa acara, dan satu orang

lainnya adalah sebagai komunikator untuk menyampaikan pesan-pesan pembangunan yang berhubungan dengan kegiatan Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa, maupun Karang Taruna yang berperan sebagai sub-ordinat kekuatan politik pemerintahan desa.

Selain bentuk-bentuk kesenian rakyat tersebut di atas, media komunikasi tradisional sebagaimana disebutkan oleh A. Muis (1954:203) tampil dalam berbagai bentuk dan sifat sejalan dengan variasi kebudayaan yang ada di daerah-daerah itu. Media komunikasi tradisional di desa, sebagai salah satu pusat penghasil padi Jawa Barat ini, dalam bentuk kumpul-kumpul bersama menyambut kelahiran bayi, *nurunkeun* (turun tanah) bagi bayi, kekah (memotong kambing untuk kelahiran bayi), Kekebak (upacara tujuh bulan kehamilan bagi anak pertama) dan acara-acara tradisional lainnya dalam masyarakat yang masih dipelihara dengan baik.

Dalam upacara tradisional tersebut, biasanya Kepala Desa diminta memberikan sambutan dan wejangan-wejangan. Disini meskipun dalam konteks acara keluarga, tetapi orang nomor satu di desa juga memberikan pesan-pesan yang berisi pengarahan-pengarahan kepada warga untuk menunjang program pemerintah yang dikaitkan pula dengan kondisi wilayah. Pidato Kepala Desa, lazimnya juga berisi wejangan-wejangan yang bersifat amat standar versi kekuasaan negara, tentang harmonisasi hidup berdampingan tanpa mempersoalkan suku bangsa, agama maupun golongan.

Acara tradisional juga dilakukan, antara lain *selapanan* sebagai peringatan hari ke 35 kelahiran bayi, *tingkepan* (acara tujuh bulan saat kehamilan pertama), *tedak sisten* atau *udun-udunan* (turun tanah bagi bayi umur tujuh bulan) dan acara lain yang khas. Bentuk media komunikasi tradisional dari etnik lain sudah jarang dilakukan di desa lokasi penelitian, bahkan berdasarkan pengamatan tidak pernah dilakukan. Tetapi mereka mengakui bahwa acara tradisional dilaksanakan pada saat pulang ke kampung halamannya. Kegiatan sosial-ekonomi dalam nuansa kebersamaan yang menonjol pada semua etnik pendatang adalah arisan. Walaupun bukan media tradisional tetapi karena didalamnya yang tampak adalah keseragaman atau homogenitas etnik, maka diandalkan sebagai media komunikasi diantara kelompok-kelompok etnik pendatang, untuk saling memberikan informasi yang berguna untuk kepentingan kelompok etniknya.

## **F. Pemerintahan Sebagai Pengendali Komunikasi**

Aparatur Pemerintahan Desa, tersirat maupun tersurat merupakan elite-elite pedesaan yang memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai sub-ordinat kekuasaan pemerintah pusat. Dalam perspektif komunikasi, mereka juga sebagai pengendali komunikasi dan informasi yang beredar dan didifusikan. Pada sisi lain, aparatur desa juga mengklaim sebagai penyeimbang dan penjaga harmonisasi komunikasi dan interaksi masyarakat pedesaan supaya tidak terjadi pertikaian yang membahayakan rasa persatuan di pedesaan.



Struktur pemerintahan desa terdiri dari: Kepala Desa, Sekretaris Desa dan Kepala-kepala Urusan yaitu: Urusan Pemerintahan, Ekonomi Pembangunan (Ekbang), Kesejahteraan Rakyat (Kesra), Umum dan Keuangan. Selain itu terdapat pula Bendaharawan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Di bawah struktur pemerintahan desa kawasan pantura ini, terdapat 5 (lima) dusun yang masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Dusun. Pada setiap dusun dilengkapi dengan pamong desa, seperti Amil atau Lebe yaitu petugas pencatat nikah dan Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A) Mitra Cai yang memiliki peran penting dalam pengelolaan air sawah di desa.

Lembaga-lembaga yang terdapat dalam pemerintahan desa lokasi penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa (LKMD) merupakan lembaga yang mengurus keamanan desa dalam aspek kehidupan sosial, ekonomi dan pertahanan keamanan Desa
2. Majelis Ulama Desa (MU) yaitu lembaga keagamaan (Islam) yang membina kehidupan beragama.
3. Lembaga Musyawarah Desa (LMD) yaitu lembaga permusyawaratan/pemufakatan yang beranggotakannya terdiri dari Kepala-Kepala Dusun, pimpinan lembaga-lembaga kemasyarakatan dan pemuka-pemuka masyarakat di Desa.(Pasal 17 ayat 1 Undang-undang No 5 Tahun 1979).
4. Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK), lembaga ini merupakan wadah bagi wanita dan ibu rumah tangga supaya mereka aktif dalam menunjang kegiatan pemerintahan desa dalam menciptakan kesejahteraan keluarga yang meliputi pendidikan, gotong royong, kesehatan dan pelaksanaan P4.

Selain lembaga-lembaga tersebut di atas terdapat pula lembaga-lembaga yang dibentuk oleh instansi vertikal di luar Pemerintahan Daerah setempat seperti Kelompok Keluarga Berencana Lestari, Keluarga Berencana Mandiri, Karang Taruna Karya, Kelompok Simulasi P4, Kelompok Tani dan lain-lainnya kelompok masyarakat yang dibentuk untuk mendukung program pembangunan pedesaan. Kelompok-kelompok ini pada umumnya dipegang dan dikendalikan oleh penduduk asli etnik Sunda, maupun pendatang berstatus Pegawai Negeri Sipil pada kantor pemerintahan yang ada di desa. Misalnya Kantor Pos dan Giro, Kantor Gardu Induk PLN, Badan Perkreditan Desa, Sekolah Dasar Negeri, Balai Kesehatan Desa dan Kantor Kecamatan. Selain mereka yang umumnya elite desa dan PNS, terdapat juga aktivis yang berasal dari unsur pemerintahan desa, lembaga-lembaga desa, dan lembaga lain yang mempunyai ketergantungan besar terhadap pemerintahan di desa, seperti halnya Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) Kesehatan, dan klinik pengobatan milik yayasan swasta.

Dengan keanggotaan seperti tersebut di atas, Kepala Desa mempunyai partner yang diandalkan dalam mengorganisasikan dan menyampaikan pesan pembangunan



#### *BAB 4: Kawasan Komunikasi Multi Etnik*

kepada masyarakat. Selain itu Kepala Desa beserta aparaturnya yang terkait sebagai poros komunikasi, bisa mengendalikan dan mengatur berbagai pesan pembangunan sesuai dengan apa yang telah ditetapkan oleh pemerintahan kecamatan maupun kabupaten.



# BAB 5

## INTERAKSI DAN KOMUNIKASI BERBASIS ETNISITAS

---

Agen modernisasi atau agen pembaharuan, merupakan suatu profesi yang berupaya untuk mempengaruhi atau mengarahkan inovasi orang lain melalui strategi komunikasi yang adaptif. Dalam arti dapat diterima oleh semua lapisan sosial, budaya, ekonomi dan politik yang berbeda pada kondisi heteroginitas etnik di pedesaan.

Agen modernisasi diperlukan untuk mengintrodusir ide-ide baru dan memberikan umpan balik yang berasal dari masyarakat kepada perencana pembangunan di pedesaan. Sebagai kepanjangan tangan dari lembaga yang berorientasi pada pembaharuan biasanya mempunyai berbagai macam perbedaan dengan masyarakat misalnya dalam status sosial ekonomi, kemampuan administratif atau teknis dan lain-lainnya yang menyebabkan terjadinya konflik dan kesulitan berkomunikasi. Oleh karena itu sebagaimana pendapat Rogers dan Svenning (1969:101), agen modernisasi diharapkan sebagai orang marginal yang sebelah kakinya berada di lembaga pembaharu, dan sebelah kaki lainnya diletakkan pada sistem kliennya.

Di kawasan pedesaan ini, Kepala Desa sebagai agen modernisasi di lingkungan desa yang transisional. Dari desa tradisional menuju kearah desa modern, yang menghadapi banyak masalah pelik sebagai akibat langsung, maupun tidak langsung dari perkembangan teknologi komunikasi dan informasi di desa

Dari asumsi tersebut di atas penelaahan terhadap agen modernisasi di lingkungan keanekaragaman etnik di desa kawasan jalan Daendels ini, akan mencakup pada karakteristik orang-orang yang memberikan informasi sesuai dengan inti permasalahan yang dieksplorasi. Informan dari desa terdiri dari kelompok etnik Sunda, penduduk asli desa lokasi penelitian dan kelompok etnik pendatang. Pengamatan terhadap interaksi dan komunikasi kelompok-kelompok etnik yang ada di desa, dan posisi kepemimpinan Kepala Desa sebagai agen modernisasi, menitik beratkan pada kelayakan Kepala Desa sebagai agen modernisasi berdasarkan pandangan kelompok-kelompok etnik, dan kendala serta faktor-faktor pendukung peran sebagai agen modernisasi di pedesaan.

Informan yang ditetapkan dalam penelitian ini terdiri dari dua kategori, pertama adalah informan yang berasal dari kelompok etnik Sunda penduduk asli desa lokasi penelitian, yang kedua kelompok etnik pendatang, terdiri dari etnik Jawa, Batak, Minangkabau dan kelompok etnik Madura. Jumlah informan pada masing-masing kelompok etnik tidak sama, bukan berarti mengabaikan keseimbangan komposisi informan, tetapi jumlah yang berbeda didasarkan kepada kecukupan informasi yang dapat diperoleh dari para informan. Selain itu, untuk menunjukkan kesetaraan posisi sebagai orang yang dapat memberikan informasi terkait dengan penelitian komunikasi antar budaya dalam bingkai politik pedesaan, upaya mengeksplorasi karakter informan dilakukan secara tersendiri dalam satu sub bahasan untuk satu kelompok etnik. Informan yang dipilih, sebelumnya diamati secara mendalam, melalui interaksi dan komunikasi secara langsung maupun tidak langsung melalui pihak ketiga yang dipercaya oleh peneliti.

Mereka sebagai pihak-pihak yang dipercaya membantu proses penelitian ini berasal dari lingkungan pemerintah maupun masyarakat yang sangat memahami masalah sosial, ekonomi dan politik Kabupaten Karawang. Setiap informan masing-masing mempunyai karakteristik yang berbeda dalam status sosial ekonomi, mobilitas dan hubungannya dengan media massa. Informan mencakup masyarakat pada umumnya dan orang yang dipandang oleh masyarakat desa sebagai pemuka pendapat atau tokoh masyarakat oleh kelompok etniknya. Secara esensial, pemaparan karakteristik informan ini, bukan sekadar untuk memperkenalkan lebih awal sikap dan perilaku mereka, tetapi dapat dipakai juga sebagai gambaran umum tentang kompleksitas dari suatu keanekaragaman masyarakat di desa yang mengalami perubahan karena dipicu oleh kemudahan akses transportasi.

Sudah barang tentu, pemaparan konstelasi sosial ekonomi dan politik yang melekat pada setiap kelompok etnik, merupakan upaya untuk menunjukkan substansi keanekaragaman yang terjadi di desa. Dengan melihat eksistensi interaksi dan komunikasi informan dengan lingkungan sekitarnya yang plural, maka komunikasi antar budaya semakin faktual di pedesaan yang sedang berubah dan selalu dalam kontrol kekuasaan negara.

Keanekaragaman penduduk desa lokasi penelitian ini, bukan gambaran umum kondisi desa tradisional di berbagai pelosok tanah air, yang pada umumnya justru dalam homogenitas nilai, sikap dan keyakinan dasar suatu norma sosial -budaya yang dianut bersama. Hanya desa dan kawasan tertentu saja, yang penduduknya multi etnik, dengan nilai dan norma yang plural menjadi kesepakatan diantara mereka. Keanekaragaman membentuk kultur bersama yang satu sama lain saling menghargai hidup berdampingan dalam keragaman etnik juga membuahkan asimiliasi, percampuran dan ikatan kekerabatan baru yang memperkuat persatuan diantara warga desa. Namun, sebaliknya, keanekaragaman bukan mustahil jika tidak dikelola dengan baik melalui kesepakatan bersama, justru mendorong munculnya konflik yang sewaktu-waktu berubah menjadi

penyerangan fisik yang dan berujung pada sentimen dan prasangka negatif yang dilembagakan.

## **A. Penjaga Nilai-Nilai Sosial Tanah Kelahiran**

### **1. Informan I**

Berusia sekitar 69 tahun, merupakan orang yang disegani di desa lokasi penelitian. Gaya bicaranya sangat berwibawa dan tidak panjang lebar, setiap kata penuh dengan arti yang dalam. Sebagai pensiunan Pegawai Negeri Sipil memang pintar dalam berkomunikasi dengan berbagai kelompok masyarakat, karena itu sangat wajar jika informan yang pada usia tersebut tetap tampak bugar ini dihormati masyarakat sekitarnya. Menghabiskan waktu dengan kegiatan di sekitar desa demi menjaga tanah kelahiran, hubungan baik dengan masyarakat dan menjaga kesehatan. Setiap hari menonton televisi, acara yang paling disukai adalah program berita dari Anteve Sedangkan acara radio yang disukai adalah wayang dan kesenian Sunda dari Radio Republik Indonesia Stasiun Cirebon.

Dalam komunikasi tidak suka menceritakan aktivitasnya semasa aktif sebagai pegawai pemerintah. Namun sangat bersemangat memberikan berbagai informasi yang berkaitan dengan pembangunan pedesaan dan berbagai kehidupan sosial-budaya, ekonomi, politik dan kekuasaan pemerintahan desa.

### **2. Informan II**

Berpenampilan sangat dinamik, berumur sekitar 35 tahun. Lahir di desa setempat dan belum pernah bekerja di luar desa. Walaupun sering berurusan ke Kota Karawang, dan beberapa kali ke kota Bandung dan Jakarta dalam urusan keluarga, tetapi dia menganggap bahwa desa tempat dia bermukim adalah tempat tinggal yang tepat untuk mencari mata pencaharian.

Sejak Tahun 1991 yang bersangkutan meninggalkan pekerjaan sebagai petani dan beralih sebagai karyawan salah satu perusahaan di desa. Tetapi bukan berarti terputus dari masalah yang dihadapi warga desanya, sebab nalurinya sebagai petani masih melekat. Disamping itu yang bersangkutan berkepentingan terhadap tanah pertanian yang dikerjakan pada saat tidak bekerja di pabrik.

Suka mendengarkan radio transistor yang memutar lagu-lagu dangdut, maupun lagu-lagu Sunda pada saat bekerja di sawah. Waktu senggang di rumah dipakai menonton televisi bersama keluarga dan tetangganya. Acara televisi yang disukai adalah yang program bersifat hiburan seperti film Indonesia, film India, musik Dangdut dan berita lokal dari TV swasta misalnya, Seputar Indonesia dari RCTI/SCTV, Cakrawala dari Anteve dan acara-acara sejenis dari televisi swasta yang tidak diingat lagi judul mata acaranya.

### **3. Informan III**

Seorang alim ulama yang ahli berkomunikasi dengan khalayak, berumur sekitar 72 tahun. Pada sekitar tahun 1981 bersama istrinya yang masih tergolong kerabat menunaikan ibadah haji. Mempunyai tiga orang anak yang semuanya sudah menikah. Dua anaknya tinggal di luar desa tetapi masih dalam wilayah kecamatan yang sama dengan desa lokasi penelitian. Sedangkan satu anaknya tinggal di luar Kota Karawang sebagai pegawai swasta di Bandung.

Mempunyai status ekonomi yang cukup tinggi jika dilihat dari keadaan rumahnya. Mempunyai televisi berwarna ukuran 21 inchi, video, taperecorder dan radio. Informan ini tidak pernah membaca surat kabar, kurang menyukai acara-acara televisi maupun radio, kecuali yang berhubungan dengan dakwah Islam, warta berita dan siaran pedesaan.

Tercatat sebagai pengurus Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa (LKMD) desa setempat dengan jabatan Ketua Seksi Agama. Sebagian besar waktunya digunakan berdakwah dalam satu pengajian ke pengajian lain di lingkungan desa maupun di luar desa. Bahkan kadang-kadang sampai ke kota Karawang dan sekitarnya. Kegiatan dalam berbagai dakwah, disadarinya sebagai amal tanpa harapan materi.

### **4. Informan IV**

Informan IV adalah guru salah satu madrasah di desa, berumur sekitar 56 tahun, pendidikan terakhir adalah lulusan Madrasah Aliyah. Beristrikan wanita dari tetangga desa, mempunyai anak empat orang. Tiga wanita sudah menikah, sedangkan yang laki-laki masih sekolah di Madrasah Tsanawiyah setingkat SLTP di desa lokasi penelitian. Aktivistis Majelis Ulama Desa ini disegani karena objektif dalam menanggapi permasalahan desa, dan tidak mengikuti opini yang dibentuk oleh aparat pemerintah ataupun pengusaha yang memiliki bisnis dan menanamkan modal di pedesaan.

Informan ini mempunyai sikap yang tegas untuk menjunjung tinggi nilai positif tradisi desa. Sebagai guru yang merasa perlu terus menambah pengetahuan, yang bersangkutan setiap hari membaca surat kabar terbitan Jakarta yang berbeda-beda, dibeli secara eceran dari tukang koran keliling maupun kios di pinggir jalan negara. Televisi ditonton hanya sore sampai dengan malam hari, khususnya yang menyangkut informasi dari dalam negeri dan hiburan.

### **5. Informan V**

Informan ini adalah ibu rumah tangga berumur 41 tahun, bersuamikan seorang warga desa asli. Ibu yang cukup pandai berkomunikasi ini, jarang bepergian ke luar kota kecuali ke kota Karawang. Pernah ke Jakarta satu kali dalam rangka mengantar kerabat yang berangkat menunaikan ibadah haji. Informan ini aktif dalam berbagai pengajian yang diselenggarakan di desa sendiri maupun tetangga desa yang tidak berjauhan.

Ibu rumah tangga yang energik ini bersuamikan buruh bangunan, bekerja di tanah miliknya sendiri, yang ditanami sayuran dan palawija. Jika tidak bekerja di ladang, yang bersangkutan mengurus rumah tangga atau sekedar berkumpul bersama tetangga. Menonton televisi dilakukan setiap hari ketika senggang tidak bekerja di ladang yang dia dimiliki. Meskipun mengaku ladangnya tidak terlalu luas, tetapi mampu untuk menopang kehidupan sehari-hari dari hasil ladang yang berupa, ubi, sayuran dan kacang-kacangan.

## **6. Informan VI**

Berumur sekitar 22 tahun, terkenal di lingkungan anak muda karena dialah yang selalu berada di Simpang Pusat Desa, dekat kantor Kepala Desa. Terkesan sebagai pemuda pemberani yang mengalami kekecewaan, karena keinginannya untuk kuliah tidak tercapai akibat keterbatasan biaya. Cara bicaranya tegas walaupun kadang-kadang dirinya sendiri kurang yakin terhadap apa yang diucapkan ketika menilai masalah yang ada di sekitar desa. Bekerja sebagai tenaga kerja serabutan, kadang-kadang menjadi makelar jual beli sepeda motor dan barang barang lain, tukang ojek maupun membantu warga desa yang mempunyai urusan ke kota Karawang, Bandung maupun Jakarta. Setiap hari menonton televisi, dan tidak mempersoalkan jenis acaranya, kadang-kadang membaca surat kabar Pos Kota.

Disegani berbagai kelompok yang ada di desa dan pendapatnya berpengaruh luas, khususnya di lingkungan anak muda penduduk asli. Tidak aktif dalam kegiatan-kegiatan organisasi kepemudaan di desa yang dibentuk oleh pemerintahan desa, tetapi aktif sebagai komandan suporter olah raga dalam aneka pertandingan-pertandingan bulu tangkis, sepak bola, bola voli dan lain-lain yang diadakan di desanya.

## **7. Informan VII**

Laki-laki penduduk desa setempat ini berumur 40 tahun, beristrikan wanita dari desa yang sama. Berpendidikan hanya pada tingkat Sekolah Dasar, bekerja sebagai buruh tani. Pada saat tidak ada pekerjaan di sektor pertanian, dia akan menjadi pedagang asongan makanan, minuman, buah-buahan maupun kue, yang dijajakan disepanjang jalan negara di wilayah desa yang sering terjadi kemacetan lalulintas.

Pada saat sebagai pengasong, waktu lebih banyak dihabiskan di jalan raya, sesekali menengok rumah yang dihuni oleh orang tua, adik-adik, istri dan beberapa anaknya. Di sela-sela mencari nafkah, yang bersangkutan selalu menjalankan shalat di mushola maupun masjid yang ada di seputar simpang desa yang ramai. Pada malam hari yang bersangkutan beristirahat di muka rumah makan Padang di jalan raya sambil menonton televisi bersama tukang ojek, tukang becak dan sopir angkutan kota.

Informan yang kurang suka untuk membicarakan masalah desa ini, lebih senang jika bicara tentang nilai-nilai religious dan mencari nafkah dengan halal. Sekali-kali yang bersangkutan ikut membaca surat kabar Pos Kota milik salah satu karyawan pabrik yang

sedang makan atau minum di kios-kios pinggir jalan negara. Biasanya sebatas dilihat foto yang menarik perhatian, gambar, komentar gambar dan judul berita yang mencolok, baginya itu sudah cukup untuk mendiskusikan berbagai masalah yang hangat di surat kabar.

## **8. Informan VIII**

Seorang pria berumur 35 tahun yang berpikiran moderat, berpendidikan pesantren di luar kota Karawang. Bekerja sebagai pedagang barang keliling, wilayah kerjanya sampai ke Cirebon dan Bandung. Oleh sebab itu Informan ini kadang-kadang sampai tiga malam tidak dirumah. Semula bukan orang yang kompromis, dan keras dalam pendirian terhadap berbagai masalah yang ada di desa. Pandangan yang fleksibel terhadap masalah pedesaan ditafsirkan oleh masyarakat setempat, khususnya penduduk asli desa sebagai sikap yang mendua, disatu sisi berpihak kepada kepentingan masyarakat dan disisi lainnya mendukung penguasa serta sebagian kecil kelompok kepentingan.

Dalam waktu senggang, informan yang memiliki hubungan dekat dengan orang pabrik ini, selalu menonton televisi di rumah. Acara yang disukainya adalah olah raga, khususnya siaran sepak bola dari luar negeri. Dunia dalam Berita, berita regional dari stasiun televisi swasta dan acara hiburan juga menjadi acara-acara yang disukai. Membaca surat kabar, majalah atau tabloid populer Dang Dut dilakukan tidak setiap hari, tetapi tergantung pada topik yang berkembang, dan ramai dibicarakan masyarakat. Kendati demikian yang bersangkutan juga kadang-kadang membeli Koran dan tabloid ketika memiliki kelebihan uang hasil kerja.

## **9. Informan IX**

Informan IX adalah pegawai negeri pada salah satu Instansi Pemerintah di Karawang, berumur 51 tahun memiliki pendidikan setingkat SLTA yaitu Madrasah Aliyah. Lahir di desa setempat, beristrikan orang yang masih satu desa. Dikarunia anak tiga orang yang masih bersekolah di SD, SLTP, dan SLTA. Informan ini mempunyai jalur komunikasi khusus dengan Kepala Desa, mempunyai banyak ide dalam kegiatan desa yang didasarkan pada pengalaman di kantor. Tetapi masyarakat desa setempat kurang bisa menerima ide-idenya, karena penduduk desa belum memiliki konsistensi kerja yang membudaya.

Sebagai salah satu tokoh masyarakat yang dipercaya oleh keluarganya, secara kelembagaan dia mendukung sepenuhnya kegiatan kepala Desa. Masalah pedesaan dibicarakan diantara Informan ini dan Kepala Desa, sebelum dibahas dalam rapat resmi yang melibatkan aparat pemerintah desa maupun lembaga-lembaga yang ada. Informan IX setiap hari membaca surat kabar yang berbeda-beda, tetapi yang frekuensinya tinggi adalah Pos kota dan Media Indonesia. Dalam waktu tertentu, yang bersangkutan menonton televisi bersama keluarga. Menyenangi acara informasi dari tanah air seperti Seputar Indonesia di RCTI dan Cakrawala di Anteve.



## **B. Adaptasi dan Kedekatan Hubungan**

### **1. Informan A**

Informan ini adalah tokoh masyarakat di lingkungan Orang Jawa di desa lokasi penelitian. Berasal dari salah satu kawasan di Provinsi Yogyakarta, umur 51 tahun, dan menamatkan Sekolah Dasar Negeri sampai pendidikan agama setingkat SLTA di kota kelahirannya. Dari istri yang masih tergolong satu daerah, dia memiliki tiga orang anak yang masih bersekolah. Tinggal dan menetap di desa kawasan desa di Karawang sejak tahun 1979. Pada mulanya, ketika pertama kali dan awal-awal tinggal di desa seringkali memperoleh tindakan yang kurang menyenangkan dari sekelompok anak-anak muda setempat yang dikenal kurang baik.

Selain sebagai Pegawai Negeri Sipil, yang bersangkutan mempunyai usaha yang dikelola istri dan keluarganya. Dengan aktivitas ekonomi tersebut yang bersangkutan termasuk berkecukupan dari segi material. Setiap hari menonton televisi dan mengaku tidak ada acara yang secara khusus digemari kecuali warta berita pukul 21.00. Suka membaca surat kabar Pos Kota di rumah atau Harian Suara Karya di sekolahnya. Semua berita yang menjadi pembicaraan hangat di masyarakat dibaca tanpa melihat jenis masalahnya.

Informan ini memiliki kedekatan dengan semua kelompok etnik di lokasi penelitian. Karena itu termasuk orang yang diperlukan pemikirannya bagi pemerintahan desa. Jabatan dalam Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa (LKMD) sebagai salah satu ketua seksi yang memiliki aktivitas menjaga kerukunan warga. Di lingkungan lembaga pedesaan, dia adalah pendatang yang paling aktif dalam kegiatan desa. Mempunyai mobilitas tinggi dalam urusan pekerjaan maupun urusan lain dalam kekerabatan. Sering berkunjung keluar kota untuk mengikuti berbagai pelatihan, penataran dan aneka penyegaran dalam meningkatkan kinerja sebagai PNS. Informan ini juga sering pulang ke kampung halamannya, walaupun tidak memiliki jadual tertentu yang dilakukan secara rutin.

### **2. Informan B**

Informan B lahir di salah satu kota di Jawa Tengah 52 tahun yang lalu, pensiun sebagai pegawai Badan Usaha Milik Negara ternama tahun 1989. Pada waktu berumur 45 tahun memilih pensiun dini dari tugas. Pendidikan Sekolah Dasar diselesaikan di kawasan selatan Jawa Tengah. Masa kerja yang terakhir di salah satu BUMN di Aceh tahun 1989. Beristrikan orang dari salah satu kabupaten di Jawa Tengah bagian Selatan, yang dikenalnya semasa bekerja pada BUMN tersebut di Sumatera Selatan. Mempunyai anak tiga orang, yang pertama laki-laki sudah meninggal. Kedua, juga laki-laki, sudah menikah dengan orang asli desa lokasi penelitian, sedangkan yang ketiga, perempuan masih sekolah di desa wilayah pantai utara.

Dilihat secara fisik keadaan rumahnya, yang bersangkutan adalah penedatang paling kaya di desa ini. Rumahnya besar dengan pekarangan yang luas dipenuhi kandang ayam dan burung yang beraneka jenis. Mempunyai sawah yang tidak dikerjakan sendiri, tetapi dengan sistem bagi hasil dengan famili dan warga asli desa setempat.

Dituakan oleh masyarakat di desa kawasan desa lokasi penelitian. Dikenal sebagai tokoh masyarakat yang memiliki ilmu kebatinan kuat, disamping menjalankan agama Islam yang dipeluknya. Kolektor benda pusaka khusus dari Jawa Tengah dan Jawa Timur dalam bentuk keris, tombak, golok, dan benda lain yang dianggap memiliki nilai supernatural. Setiap hari yang bersangkutan membaca surat kabar Pos Kota dan Koran lain yang menarik. Menonton televisi hampir dilakukan setiap saat ketika ada waktu senggang dan tapi tidak ada rubrik atau acara yang secara khusus digemari.

### **3. Informan C**

Lulusan Sekolah Teknologi Menengah Pembangunan di Jawa Tengah, berasal dari suatu kabupaten di Jawa Tengah bagian Utara. Karyawan salah satu perusahaan di desa, berumur kurang lebih 33 tahun, tinggal di desa ini sejak tahun 1990. Sebelumnya yang bersangkutan bekerja di perusahaan yang sama, tetapi berlokasi di kota kelahirannya. Mengontrak rumah bersama-sama dengan tiga orang teman sekerja dan empat orang teman sedaeraha.

Tidak mempunyai aktivitas secara khusus dalam organisasi di pedesaan. Waktu lebih banyak dihabiskan untuk menonton televisi, membaca surat kabar, dan sekali waktu menonton bioskop di kota Karawang. Sering pulang ke kampung halamannya yang berjarak kurang lebih 280 kilometer dari tempat tinggal di desa. Pernah berpacaran dengan gadis setempat tetapi putus di tengah jalan tanpa alasan yang jelas, sehingga tidak sampai ke jenjang pernikahan.

### **4. Informan D**

Seorang perempuan berumur 25 tahun, pendidikan SLTA berasal dari kabupaten yang berbatasan dengan Jawa Barat bagian Selatan. Bekerja pada salah satu perusahaan besar yang beroperasi di desa. Menikah dengan teman sekerjanya yang berasal dari salah satu kota di Jawa Tengah bagian Selatan. Tinggal di kawasan desa lokasi penelitian sejak tahun 1992. Kegiatan di perusahaan yang sangat padat, tidak memberikan kesempatan pada yang bersangkutan untuk berhubungan dengan masyarakat sekitarnya secara akrab, walaupun demikian saat senggang dia bergaul dengan tetangga sekitarnya sekadar berbagi informasi kehidupan sehari-hari.

Informan yang tampak mempunyai pengetahuan umum luas ini, tidak pernah secara khusus membaca surat kabar, tetapi sekali tempo membaca harian Pos Kota. Setiap hari menonton televisi sebagai satu-satunya hiburan di rumah, tidak ada acara yang khusus

digemari tetapi dia cenderung menyukai yang sifatnya hiburan dibanding sebagai media informasi lainnya.

## **5. Informan E**

Informan ini berpendidikan Sekolah Dasar, berusia 20 tahun berasal dari salah satu Kabupaten di Jawa Timur, tinggal di desa setempat sejak tahun 1993. Dengan pola tempat tinggal berpindah-pindah dari pondokan teman yang satu ke pondokan teman lainnya yang masih terdapat disekitar desa lokasi penelitian.

Sebagai pedagang asongan yang fisiknya masih kuat, informan ini dapat berdagang sampai ke Cikampek maupun Subang mengikuti bus-bus antar kota yang mengalami kemacetan lalulintas di jalan negara yang membelah desa. Saat kemacetan, Informan E naik ke dalam bus dan akan turun lagi pada waktu kendaraan berjalan perlahan-lahan karena macet atau menurunkan penumpang. Pekerjaan itu dilakukan setiap hari dengan naik turun pada bus yang melintas di jalan negara. Tempat istirahat Informan E didepan rumah makan Padang atau kios-kios sepanjang jalan raya yang selalu memasang televisi.

## **C. Menanamkan Semangat Wirausaha dalam Kemajemukan**

### **1. Informan I**

Berusia 51 tahun lahir di salah satu kabupaten di Provinsi Sumatera Barat, berpendidikan setingkat SLTP, beristrikan orang Minangkabau, dan mempunyai anak 3 orang. Pertama dan kedua sekolah di Jakarta, sedangkan yang ketiga sekolah di kota Karawang. Sejak tahun 1989 tinggal di desa kawasan pantai utara Karawang, setelah sebelumnya tinggal di Tanjung Pinang, Lampung dan terakhir di Jakarta tahun 1985 sampai dengan tahun 1989.

Informan ini membaca surat kabar setiap hari khususnya Pos kota, kadang-kadang Media Indonesia atau Republika. Semua berita tentang permasalahan yang hangat dibaca, dari soal politik, ekonomi maupun sosial. Sementara itu televisi juga disaksikan setiap saat, acara yang disukai adalah Seputar Indonesia di RCTI atau Cakrawala di Anteve.

Membuka rumah makan Padang di jalan negara pantai utara yang buka terus-menerus selama 24 jam. Informan ini mempekerjakan 5 orang, yang terdiri dari keluarga, dan orang asli desa. Tiga orang keluarganya yang melayani langsung pada pembeli, satu orang penduduk asli desa sebagai tukang cuci piring, gelas dan lain-lain. Sedangkan satu orang kerabat dalam fungsinya sebagai pembantu rumah makan ataupun di rumah tangganya.

Sebagai orang dianggap sukses yang merintis usaha dari pelayan rumah makan Padang, pedagang kaki lima atau pedagang keliling, yang bersangkutan sering menjadi tempat bertanya bagi orang-orang yang berasal dari kelompok etnik Minangkabau yang tinggal disepulur desa. Infoman ini merupakan sumber informasi tentang keadaan di desa setempat, maupun kejadian-kejadian lain di tempat asalnya Sumatera Barat, serta di kota-

kota lain yang banyak bermukim kenalan, saudara maupun kerabatnya. Dalam berbagai kesempatan bergaul dengan anak muda desa setempat selalu memberikan pandangan dan semangat perlunya berwirausaha untuk mencapai kesejahteraan.

## **2. Informan 2**

Laki-laki berumur 33 tahun, lahir di kawasan Padang Panjang Sumatera Barat, beristrikan wanita satu daerah asal yang berumur 24 tahun, dan mempunyai anak satu orang yang masih berumur 10 bulan. Membuka usaha photo studio sejak tahun 1994, pada waktu pertama kali datang di desa kawasan yang subur ini tahun 1991, yang bersangkutan menjadi tukang foto keliling dengan wilayah operasi seputar desa lokasi penelitian sampai Kecamatan Cikampek.

Sebelum tinggal di desa ini, informan ini mencari nafkah di Padang, dengan bekal ijazah Sekolah Menengah Pertama (SMP) bekerja sebagai buruh di salah satu pasar di kota itu. Tahun 1991 diajak keluarga untuk merantau ke Karawang sebagai tukang foto keliling selama beberapa bulan. Selanjutnya setelah memiliki pengalaman yang memadai, dan tahu potensi pasar maupun pelanggan terhadap jasa foto yang diberikan, laki-laki yang hampir sepanjang hari mendengarkan radio yang menyiarkan lagu populer dan dangdut di tokonya ini, melakukan usaha sendiri dengan membuka foto studio di jalan negara yang ramai selama 24 jam.

Jasa foto ini melayani keperluan foto “gaya bebas” dan pas foto orang-orang di sekitar desa untuk keperluan resmi dan para pegawai pabrik yang banyak beroperasi di sepanjang jalan negara. Selain itu, informan ini juga melayani foto panggilan untuk mengabadikan berbagai hajatan atau perhelatan keluarga di sekitar desa ataupun desa lain yang berdekatan. Usaha membuka foto studio termasuk sukses, ini dapat dilihat pelanggan yang hilir mudik mendatangi studionya yang terbilang sangat sederhana. Jasa semacam ini hanya satu-satunya di desa lokasi penelitian. Dengan demikian informan ini optimis jika usahanya akan mendapatkan penghasilan yang memadai.

## **3. Informan 3**

Informan ini berumur 27 tahun, belum menikah, pendidikannya hanya sampai Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama. Berprofesi sebagai penjahit dan membuka usaha menjahit bersama dua orang rekan yang semuanya berasal dari Sumatera Barat. Bertempat tinggal di desa ini sejak tahun 1990 setelah sebelumnya selama dua tahun menjahit di kawasan Cikarang Bekasi dan satu tahun di kota Karawang.

Sehari-hari sambil menjahit dia ngobrol-ngobrol dengan anak-anak muda yang biasa mangkal di depan kiosnya. Kadang-kadang yang bersangkutan mengutip berita dari televisi dan radio untuk diceritakan kepada orang-orang yang beristirahat ataupun sekadar berteduh di tempat usahanya. Mereka adalah tukang ojek, pedagang asongan,

sopir angkutan umum, gadis-gadis desa yang menunggu angkutan umum dan anak muda lain-lainnya.

Hubungan antara informan dengan mereka yang selalu berkumpul di kiosnya tampak akrab dan tidak berjarak. Mereka menggunakan bahasa Indonesia dengan dialek Jakarta. Kendati demikian, seringkali terdengar informan ini menggunakan bahasa daerah ketika berbicara dengan orang yang masih satu etnik, meskipun di dalam pembicaraan kelompok itu melibatkan orang-orang dari beragam etnik. Pola komunikasi semacam ini tentu saja biasa terjadi dalam percakapan di kios-kios sepanjang jalan negara yang membelah desa. Sebab dalam satu komunikasi kelompok yang melibatkan aneka ragam etnik, seringkali terdengar diantara orang-orang yang satu etnik berbicara bahasa daerah. Tetapi hal ini dinilai wajar oleh masing-masing etnik, sepanjang pesan-pesan yang disampaikan dalam bahasa daerah tersebut bukan dalam bentuk prasangka dan membicarakan dari sisi buruk agar tidak diketahui orang dari kelompok lain. Intinya, bahasa daerah yang digunakan dalam pembicaraan dilakukan spontan karena semata-mata kebiasaan.

Setiap hari informan ini menonton televisi, tidak menghiraukan siaran televisi tertentu, tetapi yang dipilih untuk ditonton yang bersifat hiburan. Alasannya simple, dengan bahwa sudah lelah bekerja perlu hiburan. Kadang-kadang ketika ada berita hangat yang disiarkan televisi atau radio, yang bersangkutan berusaha untuk membaca surat kabar Pos Kota yang dibeli dari tukang Koran keliling yang setiap hari lewat didepan kios jahitnya.

## **D. Kerja Keras Mewarnai Dinamika Kemajemukan**

### **1. Informan P**

Lahir di salah satu kabupaten yang masuk dalam wilayah Provinsi Sumatera Utara. Beragama Kristen Protestan, umur 38 tahun dan beristrikan orang satu daerah. Mempunyai dua anak yang masih belum sekolah berumur tiga tahun dan empat tahun. Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama di salah satu kecamatan di kota kelahirannya.

Bertempat tinggal di desa lokasi penelitian sejak tahun 1982, pada mulanya sebagai tukang tambal ban mobil dan motor yang berkembang, sehingga dengan keuletan bekerja mampu membuka kios di pinggir jalan raya Daendels yang strategis. Kios ini menyediakan suku cadang mobil berbagai merek dan suku cadang sepeda motor yang ringan-ringan dalam arti yang dapat dipasang sendiri oleh pemiliknya maupun bengkel-bengkel kecil dengan peralatan sederhana. Kios ini juga selalu hiruk pikuk dengan angkutan umum dan sepeda motor yang mengganti oli mesin, menambah minyak rem dan bermacam-macam servis yang ringan.

Dibantu oleh satu orang adik kandung dan seorang adik ipar, bengkel tersebut buka sepanjang hari selama 24 jam tanpa pernah tutup. Suasana bengkel pada malam hari terang benderang, meriah dan banyak orang-orang Batak dari sekitar desa, ataupun

kenalan yang kebetulan melewati kawasan jalan negara itu berkumpul, untuk sekadar bertukar pikiran, bercanda atau bermain-main sembari mendengarkan lagu-lagu daerah melalui *taperecorder* yang dihubungkan ke speaker besar dan disetel nyaring.

Informan ini dianggap sebagai tokoh masyarakat di lingkungan etnik Batak desa lokasi penelitian. Setiap hari membaca surat kabar Pos Kota yang dibeli secara eceran dari pedagang keliling. Secara berkala dia juga memperoleh surat kabar harian terbitan Medan, Sinar Indonesia Baru yang diperoleh dari sopir-sopir Bus Antar Kota yang asal Sumatera Utara yang melintas di jalan raya pantai utara Karawang. Informan ini juga menyaksikan televisi pada setiap waktu. Acara yang digemari adalah tayangan olah raga, film-film Barat khususnya film Amerika dan acara hiburan lainnya.

## **2. Informan Q**

Informan ini mempunyai tingkat pendidikan hanya sampai pada Sekolah Dasar yang ditempuhnya di Sumatera Utara, Berusia 28 tahun sudah menikah dengan wanita Batak juga, dan mempunyai seorang anak laki-laki berumur dua tahun. Membuka usaha tambal ban mobil dan motor di pinggir jalan raya, di bawah pohon besar dan beratapkan lembaran plastik untuk melindungi panas dan hujan.

Dengan semangat kerja yang tinggi, pada malam hari usaha tambal ban mobil dan motornya diterangi satu lampu petromak. Setiap malam beberapa orang berkumpul kadang-kadang diselingi makan dan minum dari warung seberang bengkel. Mereka yang berkumpul di tempat usahanya tidak selalu orang-orang beretnik Batak, tetapi berbagai etnik yang memiliki pekerjaan dan kegiatan di sekitar jalan negara. Pada umumnya mereka yang berkumpul dan tampak selalu bergembira itu berprofesi sebagai makelar, sopir, kernet angkutan umum, tukang ojek, dan orang-orang yang memiliki pekerjaan lain berhubungan dengan kegiatan dari pabrik-pabrik di desa.

## **3. Informan R**

Pegawai salah satu pabrik di desa lokasi penelitian, lulusan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA) di Jakarta. Menempuh pendidikan Sekolah Dasar dan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) di kawasan wisata Sumatera Utara. Berumur kurang lebih 32 tahun masih bujangan, beragama Kristen Protestan, dan setiap hari minggu pergi beribadah ke gereja di kota Karawang. Bertempat tinggal di desa ini sejak tahun 1991. Di tempat kost nya banyak teman-teman yang satu pekerjaan di pabrik berasal dari berbagai kelompok etnik khususnya dari Sumatera.

Setiap hari membaca surat kabar Kompas karena yang bersangkutan langganan bulanan, patungan bersama-sama dengan teman-teman yang satu kost. Kompas sebagai informasi utama, meskipun kadang-kadang membaca koran lain, seperti Media Indonesia, dan Pos Kota yang sangat mendominasi di kawasan jalan negara kawasan utara Karawang. Waktu luang se usai bekerja di pabrik dia memanfaatkan juga untuk menonton televisi

bersama-sama teman satu rumah. Waktu senggang lainnya atau hari-hari libur, dia gunakan untuk pergi ke Karawang atau mengunjungi kerabatnya di Jakarta.

## **E. Mencintai Tanah Kelahiran Menghormati Desa Perantauan**

### **1. Informan X**

Informan ini berumur 42 tahun, lahir di suatu kabupaten Pulau Madura. Isterinya berasal dari salah satu tetanggakabupaten di pulau yang sama. Mempunyai anak empat orang anak yang masih sekolah. Dua orang anak sekolah di daerah asalnya, sedangkan yang lainnya sekolah di kota Kecamatan desa setempat. Tinggal di wilayah desa lokasi penelitian sejak tahun 1978. Pria yang tampak agamis ini, berangkat haji ke tanah suci pada tahun 1989, dari kampung halamannya di Pulau Madura atau Pulau Garam.

Sebagai pedagang barang bekas/barang rongsokan yang sukses di kawasan pantau utara Karawang, yang bersangkutan menempati areal seluas 2500 m<sup>2</sup> dipinggir jalan raya strategis. Tanah dan bangunan untuk usaha maupun tempat tinggal tersebut adalah miliknya sendiri. Dibeli dari penduduk asli desa setempat beberapa tahun yang setelah usahanya mengalami kemajuan yang pesat. Sebelum menempati lahan di pinggir jalan milik sendiri itu, informan yang dikenal ramah ini mengontrak tanah dan bangunan sejak tahun 1978 sampai tahun 1986. Mempekerjakan lima orang pegawai, yang semuanya adalah orang sederhana di Pulau Madura. Hubungan kerja dan komunikasi diantara mereka sangat akrab bersifat kekeluargaan. Bahkan sepintas seperti tidak ada garis pemisah secara sosial kultural antara buruh dan juragan dalam hubungan kerja yang formal.

Bersikap selalu merendahkan diri, tidak mau dipanggil dengan Pak Haji sebagaimana lazimnya yang berlaku di desa lokasi penelitian untuk menghormati seseorang yang telah menunaikan ibadah haji. Sering berhubungan dengan aparat pemerintahan desa dalam urusan formal maupun nonformal sekadar untuk membina hubungan baik dalam bermasyarakat dan kelancaran usaha yang dimiliki.

Informan ini sangat mencintai tanah kelahirannya. Segala sesuatu yang dilakukan seringkali merujuk kepada kebiasaan yang dilakukan di lingkungan orang Sampang. Karena itu, tidak mengherankan jika informan yang berpenampilan rapih ini mempunyai jadwal setahun dua kali pulang ke kampung halaman, untuk menengok anaknya yang menempuh pendidikan pada salah satu pesantren di Madura. Kendati demikian, penghargaan terhadap desa sebagai tempat mencari nafkah selalu ditonjolkan.

Setiap hari yang bersangkutan membaca surat kabar Pos Kota yang dilanggan secara bulanan, kadang-kadang Republika atau sekali-kali Jawa Pos dari Surabaya untuk mengikuti perkembangan daerahnya. Semua koran yang dibaca diletakkan di ruang kerja yang merangkap sebagai tempat berkumpul pegawai maupun kolega yang berhubungan dalam bisnis barang bekas. Waktu luang digunakan untuk menonton televisi bersama anak dan istri serta karyawan yang juga tinggal disekitar rumahnya. Selain itu, berkumpul

untuk bertukar pikiran bersama kerabat dan kenalan yang berasal dari Madura merupakan kebiasaan yang secara rutin dilakukan di desa perantauan sebagaimana di kawasan pantai utara Kabupaten Karawang ini.

## **2. Informan Y**

Pedagang kayu ini berumur 37 tahun, lahir di Madura, beristrikan wanita umur 30 tahun dari kelompok etnik yang sama. Tinggal di desa ini sejak tahun 1976 dengan bekal ijazah Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, yang bersangkutan semula bekerja pada pangkalan kayu milik famili sampai belasan tahun. Setelah merasa cukup mampu, dia membuka pangkalan kayu sendiri dan berkat keuletannya, usaha semakin berkembang, sehingga dia melengkapi pula dengan penyediaan bahan-bahan bangunan lain.

Dengan jumlah pegawai tiga orang beretnik Madura, yang dua berasal dari kabupaten di kawasan tapal kuda Jawa Timur, sedangkan satu orang berasal dari Pulau Madura. Ketiga pegawai informan ini masih ada hubungan keluarga. Namun urusan pekerjaan ada perhitungan rinci dalam hal pengupahan, ataupun penggajian. Informan ini tidak tertarik dengan berita di surat kabar, karena itu tidak pernah membaca surat kabar. Kalaupun dalam satu kesempatan di tempat koleganya yang tersedia surat kabar, yang bersangkutan hanya melihat gambar atau foto menarik pada halaman depan. Bahkan teks dari foto dan gambar itu sama sekali tidak pernah dibaca. Jika ingin mengetahui lebih lengkap yang bersangkutan minta dijelaskan ke orang lain yang ada di sekelilingnya. Meskipun demikian, laki-laki yang tampak enerjik dalam bekerja ini, hampir tidak pernah melewatkan waktu untuk menonton televisi berwarna ukuran 14 inchi yang dimiliki. Program siaran yang disukai adalah yang bersifat menghibur seperti lagu-lagu, lawak dan film-film lepas khususnya film Indonesia yang mudah dipahami dibandingkan film dari negara lain khususnya film Amerika yang dinilai kadang-kadang terlampau sulit untuk dipahami.

## **3. Informan Z**

Informan ini berusia 36 tahun, berpendidikan Sekolah Dasar di Madura, beristri orang satu kampung. Mempunyai anak 3 (tiga) orang yang bersekolah di kota kecamatan. Dengan penampilan ramah, yang bersangkutan adalah orang paling terkemuka dan disegani serta sebagai sumber informasi bagi kelompoknya di desa lokasi penelitian dan sekitarnya.

Membuka usaha jual beli barang-barang rongsokan yang berlokasi beberapa puluh meter dari Gardu Induk PLN di jalan negara. Memiliki pegawai tiga orang yang diakuinya sebagai keluarga. Suasana di tempat tinggalnya yang merangkap sebagai tempat usaha tidak pernah sepi, karena disamping relasi bisnis yang datang silih berganti, tempat ini juga dijadikan berkumpul Orang-orang Madura yang ada di desa lokasi penelitian dan sekitarnya.



Informan ini setiap hari membaca surat kabar Pos Kota, kadang-kadang Republika atau Jawa Pos. Tidak ada berita tertentu yang disukai tetapi lebih menitik beratkan pada berita yang menjadi pembicaraan di masyarakat. Setiap saat sambil bekerja, yang bersangkutan menyaksikan televisi bersama-sama temannya, tidak ada acara khusus yang menarik perhatian, tetapi tayangan olah raga tinju, sepak bola dan bulu tangkis serta acara lawak maupun sandiwara yang lucu-lucu semacam Srimulat jarang dia lewatkan.

## F. Kemajemukan dalam Karakteristik Etnik

Gambaran umum yang terkait dengan nilai-nilai yang melekat, sikap dan perilaku para informan di desa lokasi penelitian kawasan pantai utara Jawa Barat, secara sederhana dapat dilihat dalam Tabel 1 di bawah ini:

**Tabel 1. Identitas Informan Etnik Sunda**

No	Nama	Pendidikan	Umur/Jenis Kelamin	Karakter Sosial-Kultural
1	Informan I	Tidak diketahui	69 tahun/Laki-Laki	Pensiunan Pegawai Negeri Sipil. Terhormat di masyarakat. Menyukai program berita dari Anteve. Acara radio yang disukai adalah wayang dan kesenian Sunda dari Radio Republik Indonesia Stasiun Cirebon. Dalam komunikasi tidak suka Bersemangat memberikan berbagai informasi yang berkaitan dengan pembangunan pedesaan, kehidupan sosio-budaya, ekonomi, politik dan kekuasaan pemerintahan desa.
2	Informan II	Tidak diketahui	35 tahun/Laki-Laki	Belum pernah bekerja di luar desa. Menganggap desa tempat dia bermukim adalah tempat tinggal yang tepat untuk mencari mata pencaharian. Sejak Tahun 1991 yang bersangkutan meninggalkan pekerjaan sebagai petani dan beralih sebagai karyawan salah satu perusahaan di desa. Menyukai tayangan film Indonesia, film India, Dangdut dan warta berita dari TV
3	Informan III	Tidak diketahui	72 tahun/Laki-Laki	Seorang alim ulama yang ahli berkomunikasi dengan khalayak, berumur sekitar 72 tahun. Status ekonomi cukup tinggi jika dilihat dari keadaan rumahnya. Pengurus Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa (LKMD) desa setempat dengan jabatan Ketua Seksi Agama.

Komunikasi & Gerakan Perubahan

4	Informan IV	Madrasah Aliyah (setingkat SMA)	56 tahun/Laki-Laki	Guru madrasah. Aktivistis Majelis Ulama Desa ini disegani karena objektif tegas menjunjung tinggi nilai positif tradisi desa. Setiap hari membaca surat kabar terbitan Jakarta yang berbeda-beda, dibeli secara eceran dari tukang Koran keliling maupun kios di pinggir jalan.
5	Informan V	Sekolah Menengah Pertama	41 tahun/Perempuan	Ibu rumah tangga, bersuamikan seorang warga desa asli. Pandai berkomunikasi ini, jarang bepergian ke luar kota kecuali ke kota Karawang. Bekerja di tanah miliknya sendiri yang ditanami sayuran dan palawija. Menonton televisi dilakukan setiap hari ketika senggang tidak bekerja.
6	Informan VI	Sekolah Menengah Atas	22 tahun/Laki-laki	Terkenal di lingkungan anak muda karena menguasai kawasan Simpang Pusat Desa, dekat kantor Kepala Desa. Mengalami kekecewaan, karena keinginannya untuk kuliah tidak tercapai akibat keterbatasan biaya. Bekerja sebagai tenaga kerja serabutan.
7	Informan VII	Sekolah Dasar	40 tahun/Laki-laki	Bekerja sebagai buruh tani. Pada saat tidak ada pekerjaan di sektor pertanian, dia akan menjadi pedagang asongan makanan, minuman, buah-buahan maupun kue, yang dijajakan disepanjang jalan pantura di wilayah desa yang sering terjadi kemacetan lalu lintas. Informan yang kurang suka untuk membicarakan masalah desa ini, lebih senang jika bicara tentang nilai-nilai religius dan mencari nafkah dengan halal.
8	Informan VIII	Pesantren	35 tahun/Laki-laki	Berpikiran moderat, berpendidikan pesantren di luar kota Karawang. Bekerja sebagai pedagang barang keliling. Wilayah kerjanya sampai ke Cirebon dan Bandung. Suka membaca surat kabar, majalah atau tabloid populer Dang Dut.

9	Informan IX	Madrasah Aliyah (setingkat SMA)	51 tahun/Laki-laki	Pegawai Negeri Sipil pada salah satu Instansi Pemerintah. Lahir di desa setempat, beristrikan orang yang masih satu desa. Mempunyai jalur komunikasi khusus dengan Kepala Desa, mempunyai banyak ide dalam kegiatan desa yang didasarkan pada pengalaman di kantor.
---	-------------	------------------------------------	--------------------	---

**Sumber:** Hasil Pengolahan Data

Informan etnik Sunda di desa lokasi penelitian memiliki satu kesamaan sikap dalam menjaga desa sebagai pusat kehidupan yang harmoni. Mereka bisa menerima perubahan yang dibawa oleh industrialisasi di desa, namun tetap berupaya keras menjaga nilai-nilai sosial-kultural setempat. Karena itu, meskipun secara faktual ada perbedaan umur, profesi, tingkat pendidikan dan perilaku kekinian menghadapi dinamika perubahan, tetapi Orang Sunda di desa ini memiliki kesepakatan untuk terus menjaga warisan sosial kultural leluhurnya. Tentu saja tidak dapat diabaikan, industrialisasi yang membawa budaya material berjalan bersama-sama dan bukan mustahil suatu ketika akan memarginalkan karakteristik ekonomi desa.

**Tabel 2. Identitas Informan Etnik Jawa**

No	Nama	Pendidikan	Umur/Jenis Kelamin	Karakter Sosial-Kultural
1	Informan A	Sekolah Menengah Atas	51 tahun/Laki-laki	Tokoh masyarakat di desa lokasi penelitian. Berasal dari kawasan Jawa Tengah bagian Selatan. Tinggal di desa kawasan pantai utara sejak tahun 1979. Selain sebagai Pegawai Negeri Sipil, yang bersangkutan mempunyai usaha yang dikelola istri dan keluarganya. Suka membaca surat kabar Pos Kota di rumah atau Harian Suara Karya di sekolahnya.
2	Informan B	Sekolah Dasar	52 tahun/Laki-laki	Pensiun Badan Usaha Milik Negara ternama tahun 1989. Pendatang paling kaya di desa ini. Rumahnya besar dengan pekarangan yang luas dipenuhi kandang ayam dan burung yang beraneka jenis. Mempunyai sawah yang tidak dikerjakan sendiri, tetapi dengan bagi hasil dengan famili dan warga asli desa setempat.

## Komunikasi & Gerakan Perubahan

3	Informan C	Sekolah Teknologi Menengah Pembangunan	33 tahun/Laki-laki	Karyawan salah satu perusahaan di desa lokasi penelitian. Tinggal di desa sejak tahun 1990. Sebelumnya bekerja di perusahaan yang sama, tetapi berlokasi di Jawa Tengah. Tidak mempunyai aktivitas secara khusus dalam organisasi di pedesaan. Waktu lebih banyak dihabiskan untuk menonton televisi, membaca surat kabar, dan sekali waktu menonton bioskop di kota Karawang.
4	Informan D		25 tahun/perempuan	Bekerja pada salah satu perusahaan di desa. Menikah dengan teman sekerjanya yang berasal dari salah satu kota di Jawa Tengah bagian Selatan. Mempunyai pengetahuan umum luas, tidak pernah secara khusus membaca surat kabar, tetapi sekali tempo membaca harian Pos Kota.
5	Informan E	Sekolah Dasar	20 tahun/laki-laki	Tinggal di desa sejak tahun 1993. Dengan pola tempat tinggal berpindah-pindah dari pondokan teman yang satu ke pondokan teman lain yang berada disekitar desa lokasi penelitian. Sebagai pedagang asongan yang fisiknya masih kuat, informan ini dapat berdagang sampai ke Cikampek maupun Subang mengikuti bus-bus antar kota yang mengalami kemacetan lalulintas di jalan yang membelah desa.

**Sumber:** Hasil Pengolahan Data

Melihat gambaran tersebut, Orang Jawa umumnya bekerja dalam sektor formal di kantor pemerintah, maupun perusahaan swasta yang ada di desa. Secara kuantitas jumlah yang mengidentifikasi diri sebagai Orang Jawa, tersebar sampai ke pelosok desa. Bahkan tidak hanya sebatas di pusat-pusat keramaian desa atau sepanjang jalan elevi pantai utara saja, tetapi sampai ke pedalaman desa di kawasan perkebunan rakyat maupun di sekitar persawahan penduduk setempat. Mereka bergaul dengan masyarakat desa tanpa ada jarak sosial kultural yang menonjol. Karena itu tidak sulit untuk bertemu dengan mereka di desa ini. Dalam konteks ini, yang mengidentifikasi diri sebagai Orang Jawa, pada umumnya berasal dari Provinsi Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta. Kendati demikian, sesungguhnya jika merujuk kepada sebaran etnisitas, kelompok etnik ini juga berada di sebagian wilayah Jawa Timur.

**Tabel 3. Identitas Informan Etnik Minangkabau**

No	Nama	Pendidikan	Umur/Jenis Kelamin	Karakter Sosial-Kultural
1	Informan 1	Sekolah Menengah Pertama	51 tahun/Laki-laki	Sejak tahun 1989 tinggal di desa lokasi penelitian, sebelumnya bermukim di Tanjung Pinang, Lampung dan terakhir di Jakarta tahun 1985 sampai dengan tahun 1989. Membaca surat kabar setiap hari khususnya Pos kota, kadang-kadang Media Indonesia atau Republika.
2	Informan 2	Sekolah Menengah Pertama	33 tahun/laki-laki	Membuka usaha photo studio sejak tahun 1994. Pertama kali tinggal di desa kawasan pantai utara tahun 1991, menjadi tukang foto keliling, dengan wilayah operasi seputar desa lokasi penelitian. Jasa foto melayani keperluan foto "gaya bebas" dan pas foto untuk keperluan resmi pegawai pabrik yang banyak beroperasi di sepanjang jalan Negara.
3	Informan 3	Sekolah Menengah Pertama	27 tahun/Laki-laki	Berprofesi sebagai penjahit dan membuka usaha menjahit bersama dua orang rekan yang semuanya berasal dari Sumatera Barat. Sehari-hari menjahit dia ngobrol-ngobrol dengan anak-anak muda yang biasa mangkal di depan kiosnya. Kadang mengutip berita dari televisi dan radio untuk diceritakan kepada orang-orang yang beristirahat ataupun sekadar berteduh di tempat usahanya.

**Sumber:** Hasil Pengolahan Data

Salah satu aspek yang menonjol kehidupan kelompok etnik Minangkabau di desa lokasi penelitian kawasan pantai utara, adalah jiwa berdagang yang melekat. Orang-orang Padang sebutan umumnya, adalah orang yang sukses dalam berusaha di sepanjang jalan raya negara yang menghubungkan Jawa Barat dengan Jawa Tengah. Beragam usaha dikelola dengan baik oleh orang-orang dari Sumatera Barat. Usaha rumah makan

menengah ke atas yang berada di kawasan yang hidup selama duapuluh empat jam itu diwarnai keberadaan rumah makan Padang. Paling tidak rumah makan Padang yang ada di sekitar jalan negara identik dengan orang-orang Minang yang sukses dalam berdagang di perantauan.

**Tabel 4. Identitas Informan Etnik Batak**

No	Nama	Pendidikan	Umur/Jenis Kelamin	Karakter Sosial-Kultural
1	Informan P	Sekolah Menengah Pertama	38 tahun/laki-laki	Bertempat tinggal di desa lokasi penelitian sejak tahun 1982. Sebagai tokoh masyarakat di lingkungan etnik Batak desa lokasi penelitian. Setiap hari membaca surat kabar Pos Kota yang dibeli secara eceran dari pedagang keliling. Secara berkala dia juga memperoleh surat kabar harian terbitan Medan, Sinar Indonesia Baru yang diperoleh dari sopir-sopir Bus Antar Kota yang asal Sumatera Utara yang melintas di jalan raya pantai utara Karawang.
2	Informan Q	Sekolah Dasar	28 tahun/Laki-aki	Membuka usaha tambal ban mobil dan motor di pinggir jalan raya, di bawah pohon besar dan beratapkan lembaran terpal untuk melindungi panas dan hujan. Pada malam hari usaha tambal ban mobil dan motornya diterangi satu lampu petromak. Mereka yang berkumpul di tempat usahanya tidak selalu orang-orang Batak, tetapi berbagai etnik yang memiliki pekerjaan dan kegiatan di sekitar jalan raya pantura.

3	Informan R	S e k o l a h Menengah Atas	32 tahun/Laki-laki	Pegawai salah satu pabrik di desa lokasi penelitian. Menempuh pendidikan Sekolah Dasar dan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) dan SMA di kota kelahirannya kawasan wisata Sumatera Utara. Setiap hari membaca surat kabar Kompas karena yang bersangkutan langganan bulanan, patungan bersama-sama dengan teman-teman yang satu kost. Kompas sebagai informasi utama, meskipun kadang-kadang membaca Koran lain seperti Media Indonesia, dan Pos Kota yang sangat mendominasi di kawasan jalan negara.
---	------------	--------------------------------	--------------------	---

**Sumber:** Hasil Pengolahan Data

Salah satu aspek menonjol yang melekat pada Orang Batak di desa ini adalah kekentalan logat yang khas meskipun sudah merantau dari tanah kelahirannya puluhan tahun. Namun justru pola komunikasi Orang Batak tersebut seringkali diikuti oleh anak-anak muda desa, khususnya yang sering bergaul ataupun sekadar bercengkerama di kios-kios Orang Batak. Dalam komunikasi dengan Orang Batak, mereka cenderung untuk menggunakan bahasa yang sama. Dengan daya juang tinggi, di perantauan bisa mencapai sukses secara material. Jenis pekerjaan maupun usaha yang dilakukan di desa beragam, namun masyarakat selalu mengkaitkan bengkel mobil yang besar, bengkel motor dan tambal ban adalah spesialisasi usaha mereka.

**Tabel 5. Identitas Informan Etnik Madura**

No	Nama	Pendidikan	Umur /Jenis Kelamin	Karakter Sosial-Kultural
1	Informan X	Tidak diketahui	42 tahun/Laki-laki	Tinggal di wilayah desa lokasi penelitian sejak tahun 1978. Sebagai sukses di kawasan menempati areal seluas 2500 m2 dipinggir jalan raya strategis. Tanah dan bangunan untuk usaha maupun tempat tinggal tersebut adalah miliknya sendiri. Mencintai tanah kelahirannya sehingga segala sesuatu harus merujuk kepada kebiasaan yang dilakukan di Pulau Madura

2	Informan Y	Sekolah Menengah Pertama	37 tahun/Laki-laki	Pedagang kayu, beristrikan wanita Madura. Semula bekerja pada pangkalan kayu milik sampai belasan tahun. Setelah merasa cukup mampu, dia membuka pangkalan kayu sendiri dan berkat keuletannya, usaha semakin berkembang, sehingga dia melengkapi pula dengan penyediaan bahan-bahan bangunan lain. Menyukai acara televisi yang menayangkan film Indonesia.
3	Informan Z	Sekolah Dasar	36 tahun/Laki-laki	Ramah dan disegani oleh orang-orang Madura di desa sebagai sumber informasi yang memiliki jaringan luas. Setiap hari membaca surat kabar Pos Kota, kadang-kadang Republika atau Jawa Pos. Suka menonton televisi, khususnya tayangan olah raga tinju, sepak bola, bulu tangkis, dan acara lawak

**Sumber:** Hasil Pengolahan Data

Sebagaimana Orang Batak di desa lokasi penelitian, Orang Madura juga memiliki kekentalan logat yang khas dalam berbicara. Mereka juga cenderung terbuka ataupun blak-blakan dan mempunyai prinsip kuat dalam melakukan tindakan yang dinilai benar. Memiliki ikatan kekerabatan sangat kuat di perantauan dan secara berkala rutin berkumpul dalam satu kegiatan sosial diantara sesama Orang Madura di desa lokasi penelitian. Kesuksesan dan keberhasilan di kawasan desa pantai utara tidak ditonjolkan dalam bentuk perumahan yang mewah, tetapi lebih diutamakan menabung dan investasi di tanah kelahirannya. Kelompok etnik Madura di desa ini juga dikenal sebagai orang-orang yang rajin melakukan ritual keagamaan dan melibatkan orang desa setempat.



# BAB 6

## KEMAJEMUKAN SOSIAL, EKONOMI DAN POLITIK

---

Hubungan antar etnik di desa Kawasan Pantai Utara Kabupaten Karawang Jawa Barat berlangsung dalam suasana hidup berdampingan yang akrab tanpa sekat berarti. Interaksi dan komunikasi diantara kelompok-kelompok etnik penduduk asli dengan etnik pendatang terus berlangsung. Sementara itu interaksi di lingkungan warga pendatang yang berlainan kelompok etnik, juga berjalan sesuai dengan kebutuhan, tujuan interaksi dan komunikasi masing-masing. Tujuan komunikasi sendiri, menurut Reardon (1987: 1) untuk menghibur, mempengaruhi, beramah-tamah, memperoleh informasi, menunjukkan perhatian dan sebagainya.

Berdasarkan pengamatan mendalam, bahwa hubungan sosial yang dilakukan oleh warga setempat masih cukup kuat dan dipelihara terus-menerus, misalnya penghargaan terhadap orang-orang tertentu. Sikap ini adalah salah satu karakter budaya Sunda sebagaimana dikemukakan oleh Suharnardja (dalam Ekadjati, 1984:213-214), bahwa hubungan sosial pada Orang Sunda merupakan tingkatan-tingkatan, sehingga kewajiban masyarakat bertingkat-tingkat pula, dan harus bersifat kekeluargaan.

Dalam interaksi dan komunikasi diantara masyarakat desa yang beraneka ragam etnik, berlaku pula nilai universal yang sebenarnya dipunyai oleh masing-masing kelompok etnik. Seperti menurut Orang Batak, supaya berhati-hati dalam bertutur kata, karena pada kata melekat efek yang baik dan buruk, kita dapat membawa berkat atau bencana, kata buruk, makian, kata penghinaan, kata yang mengandung kutukan, semuanya membangkitkan kejahatan. (J.C. Vergouwen, 1986;108), atau sikap yang melekat pada orang Minangkabau, kusut menyelesaikan dan keruh menjernihkan. (Lily S. Halim, 1989)

Sikap positif semacam ini pada hakikatnya juga berlaku pada semua kelompok etnik. Pola universal lainnya yang menonjol adalah berhubungan dengan sifat modernisasi sebagaimana dikemukakan oleh Cyril E. Black (1976) yaitu kesadaran terhadap harga diri orang lain, bersedia menerima pengalaman-pengalaman baru, percaya terhadap keadilan dalam pembagian. Pluralisme etnik dengan substansi modernisasi yang terjadi di desa adalah sejalan dengan fenomena Berger yang menyatakan, modernitas berarti hidup

dengan sejumlah besar orang asing, sedangkan di desa hidup dengan sekelompok kecil manusia, kebanyakan mengenal secara akrab sejak kanak-kanak sampai tua, yang tidak kalah pentingnya, kekuasaan dan pemilikan sangat berbeda. (Peter L. Berger, 1990:43).

Tetapi meskipun pola yang universal muncul, ternyata pluralisme etnik tidak membentuk penyeragaman nilai-nilai budaya. Sebab dalam kenyataannya nilai-nilai sosial budaya yang terintegrasi, masih tetap menampilkan karakteristik nilai dari kelompok-kelompok etnik. Bahkan dalam situasi tertentu akan semakin kuat dan menonjol. Tetapi pada umumnya dalam bentuk yang terintegrasi dengan budaya setempat. Dalam arti berupaya menyesuaikan dengan karakter sosial-kultural masyarakat desa setempat. Kendati demikian, setiap kelompok etnik mengklaim memiliki nilai-nilai positif sebagai ciri etniknya. Sedangkan nilai-nilai negatif di anggap bukan karakter milik kelompok etniknya. Kalaupun nilai yang berkonotasi kurang menguntungkan bagi kelompoknya muncul, biasanya dinyatakan sebagai perilaku seorang individu sehingga tidak ada sangkut pautnya dengan karakteristik etnik.

Pengakuan nilai-nilai subjektif dalam aspek komunikasi sosial-kultural, terdapat pula dalam masyarakat Sunda sebagaimana pendapat Ayib Rosidi (dalam Ekadjati, 1984:131) yang mengemukakan, bahwa Orang Sunda mengidentifikasi ciri-ciri tentang dirinya adalah, berwatak lemah lembut, sopan, halus, berjiwa satria, sangat menenggang rasa terhadap orang lain, dan sejumlah ciri-ciri ideal. Sifat-sifat yang demikian bersifat universal sebagaimana terdapat pada semua bangsa dan suku bangsa di dunia.

Penilaian tentang unsur-unsur ideal atau positif dan negatif, tidak terlepas dari perwujudan etnosentrisme kelompok etnik yang cenderung subjektif. Masing-masing etnik mempunyai persepsi, stereotip dan *prejudice* yang erat dengan nilai-nilai sosial budaya kelompok etniknya yang selalu dikatakan lebih unggul dibandingkan kelompok etnik lain.

## **A. Kesiapan Beradaptasi Dalam Bingkai Kesetaraan**

Orang Sunda pada umumnya menyatakan ciri-ciri mereka sendiri adalah ramah, tidak sombong, lemah lembut, sopan santun, mempunyai sikap gotong royong, tidak mau dihina, taat beribadah. Mereka menilai orang yang bukan dari kelompok etniknya tidak terperangkap dalam sikap emosional yang terjebak pada membenaran etnik sendiri.

Orang-orang Sunda menyatakan bahwa kelompok etnik yang paling banyak di pedesaan kawasan industri ini, dalam hubungan sosial sangat aktif dan menguasai informasi, sehingga memperoleh kesempatan berkomunikasi dengan baik dengan semua kelompok etnik yang ada di desa. Mereka sering mengatakan, bahwa dinamika desa yang dijadikan lokasi penelitian karena keberadaan orang-orang Jawa, sebagaimana dikatakan Informan II yang dinamis, dan sering bepergian ke Kota Karawang, Bandung dan Jakarta, sebagai berikut:

*“Orang-orang Jawa pandai berkomunikasi dengan semua entitas dalam pemerintahan desa maupun Kepala Desa, sehingga mereka banyak membantu urusan desa yang penting-penting. Keadaan ini membuat mereka (Orang Sunda) sering mengatakan kegiatan di desa bergantung kepada komunitas pendatang dari Jawa”.*

Pandangan ini mencerminkan bahwa Orang Jawa dapat melakukan komunikasi dan adaptasi dengan masyarakat setempat maupun Kepala Desa. Pola ini sejalan dengan pendapat Kim (1982:344), bahwa, “komunikasi merupakan alat utama kita untuk memanfaatkan berbagai sumber daya lingkungan fisik dan sosial dalam pelayanan manusia”. Kepala Desa, masyarakat dan wilayah desa adalah sumber daya yang berhasil dimanfaatkan potensinya oleh mereka melalui komunikasi yang adaptif terhadap lingkungan sosial budaya yang berbeda.

Pergaulan mereka di kawasan pantai utara tergolong luas, tetapi kadang-kadang, tidak mustahil Orang Sunda penduduk desa setempat kurang memahami makna komunikasinya. Sebab kelompok etnik ini dipandang dalam berinteraksi dan berkomunikasi lebih banyak menggunakan simbol-simbol yang tidak dipahami, Informan V menyatakan: *“Orang Jawa banyak bergaul tetapi tidak banyak bicara sehingga tidak mudah untuk memahami apa artinya, bahkan yang di bicarakan tidak selalu diketahui”.*

Perilaku komunikasi semacam ini, sejalan dengan pemikiran Edward T. Hall (dalam Tubb dan Moss, 2006:240) dalam betuk komunikasi konteks tinggi (*High Context Comunnications*) yaitu komunikasi yang lebih terampil membaca perilaku non verbal, membaca lingkungan, berbicara lebih sedikit dan menganggap orang lain seperti apa yang dilakukannya secara individual maupun kelompok. Sedangkan budaya kontek rendah (*low context communication*) lebih menekankan komunikasi langsung dan eksplisit. Oleh sebab itu, pesan-pesan verbal sangat penting dalam interaksi antar manusia.

Dengan pola interaksi semacam ini, berkomunikasi dengan pendatang beretnik Jawa memerlukan pemahaman yang cermat termasuk mengamati bahasa tubuh. Pendapat Informan VI: *“Jika Orang Jawa menyatakan sepakat terhadap sesuatu, sesungguhnya harus dipastikan lagi secara lebih tegas”.* Tetapi pandangan Informan I yang berumur 69 tahun dan Informan VIII yang moderat dengan pengalaman luas, agak berbeda. Mereka menyatakan, *“Orang-orang Jawa pandai berkomunikasi dan pergaulannya luas”.* Pernyataan tersebut wajar karena informan I dan informan VIII adalah tokoh masyarakat yang dikenal luas di pedesaan. Sebagaimana dikemukakan sebelumnya, tokoh masyarakat pada umumnya mempunyai empati dan hubungan sosial yang lebih luas dibandingkan orang kebanyakan. (Rogers dan Shoemaker, 1971).

Dalam interaksi sosial keagamaan di desa wilayah pantai utara, mereka cukup aktif. Kegiatan ini dipakai untuk lebih memahami makna ajaran agama dan sebagai sarana bersosialisasi dengan berbagai kelompok etnik yang ada. Informan III yang berusia 72 tahun, menyebutkan:

*“Orang Jawa rajin mengikuti pengajian dan kegiatan kerohanian lainnya, untuk menambah pengetahuan dan praktek, dalam menjalankan ibadah yang sesuai dengan kaidah agama. Mereka juga mengandalkan keluhuran budi dan keteladanan tingkah laku dalam kehidupan sehari-hari”.*

Informan III yang ulama ini, menilai dari sudut pandang kepercayaan, nilai dan sikap yang memposisikan sudah memahami apa yang diceramahkan dalam setiap kali pertemuan bernuansa keagamaan di pedesaan. Tidak ada sentuhan etnosentrisme dalam koridor hubungan antar etnik di pedesaan. Informan ini tidak menonjolkan karakteristik etnisitas kelompok sendiri dengan tetap menghargai perilaku kelompok lain dalam hidup bermasyarakat dengan damai. Menurut Lustig (1988), perwujudan etnosentrisme adalah dengan “menempatkan nilai-nilai sosial, sikap dan kepercayaan milik diri sendiri dan kelompoknya sebagai suatu tatanan yang terjaga meskipun berdampingan dengan nilai-nilai kelompok lain dalam kompleksitas dan heterogenitas kehidup bermasyarakat”.

Penduduk asli desa setempat menilai Orang Jawa dalam interaksi ekonomi, ulet dan tekun dalam bekerja atau berusaha untuk memenuhi kesejahteraan. Kelompok etnik juga dikenal lebih banyak mengandalakna komunikasi nonverbal ini, juga dikenal sederhana dalam penampilan. Padahal memiliki aset yang banyak dengan membeli tanah dan rumah di desa setempat. Asumsi itu sejalan yang dikemukakan Informan I, pensiunan Pegawai Negeri Sipil yang berwibawa dan dihormati warga desa ini menjelaskan: *“kalau mereka bekerja ulet dan rajin, makanya banyak yang berhasil dan membeli tanah atau rumah di desa ini”.* Sedangkan Informan IX, laki-laki lulusan Madrasah Aliyah ini menyatakan: bahwa *“Orang Jawa meskipun sudah sukses, penampilannya secara fisik tidak berubah”.*

Kelompok etnik dengan jumlah terbanyak di Indonesia, yang tinggal di desa kawasan budaya Sunda, mau mempekerjakan atau bekerjasama dengan orang setempat maupun kelompok etnik lain yang ada di desa. Pada umumnya, mereka bekerja menjadi karyawan industri dan sebagian kecil sebagai petani pemilik lahan yang luas di desa. Selain itu, mereka yang juga menonjol dan sukses di desa adalah mereka yang menjadi PNS dan pegawai kantor perusahaan. Informan VII, pria tamatan Sekolah Dasar yang bekerja sebagai buruh tani ini menyebutkan:

*“Bapak X dan Bapak Z (menyebut beberapa Orang Jawa di desa) yang sukses itu, adalah Orang Jawa yang kaya dan bekerja sebagai pegawai pemerintah. Sedangkan Bapak Q (menyebut sejumlah orang di desa) juga Orang Jawa yang kaya, bekerja di kantor pabrik-pabrik di desa ini. Teman-teman saya banyak yang bekerja di sawah dan usaha-usaha mereka di jalan raya yang ramai”.*

Dalam interaksi bisnis, Orang Jawa mempunyai relasi luas dengan dengan pejabat pemerintah di desa, kecamatan dan kabupaten, orang-orang terpendang di desa, serta masyarakat kebanyakan. Tentu saja dalam intensitas dan frekuensi komunikasi yang berbeda yang berdampak kepada kualitas hubungan. Namun secara substantif, tidak

ada perbedaan menonjol dalam komunikasi. Informan II mengungkapkan: *"Mereka bisa melayani pembeli dari berbagai lapisan masyarakat, terhadap yang kaya, orang-orang dari kantor kecamatan, dan pembeli pada umumnya"*. Meskipun demikian tampak sangat hati-hati ketika berhadapan dengan aparat desa dan aparat pemerintah. Pandangan laki-laki berumur 35 tahun yang belum pernah bekerja di luar desanya ini, sehaluan dengan apa yang dikemukakan oleh Hall dan Whyte (1974) bahwa, "perbedaan status dan kelas sosial menyebabkan orang sulit menyatakan opininya secara bebas, menentukan pula apakah bisnis akan terjadi antara individu atau kelompok".

Pendapat-pendapat tersebut di atas menunjukkan bahwa orang-orang tersebut cukup inovatif, seperti dikemukakan oleh Rogers dan Shoemaker (1971) bahwa salah satu ciri komunikasi orang yang inovatif adalah banyak berhubungan dengan orang diluar kelompoknya, sedangkan ciri sosial ekonomisnya adalah berorientasi kepada ekonomi komersial. Mereka juga termasuk dalam karakteristik orang modern yang berusaha meniti jenjang karier dalam pekerjaan. (Etzioni, 1964).

Selain dalam interaksi ekonomi, dalam kegiatan politik di pedesaan dinamika Orang Jawa cukup menonjol. Pada kegiatan Pemilihan Umum tahun 1992, mereka sangat aktif dalam kampanye yang diselenggarakan oleh ketiga kontestan. Umumnya mereka sangat jelas orientasinya terhadap kontestan. Informan I yang tokoh masyarakat mengatakan: *"Saya melihat pendatang etnik Jawa memakai seragam ormas tertentu dalam kegiatan di Balai Desa. Dalam pemilihan umum, mereka aktif mengikuti kampanye-kampanye yang diadakan PPP, Golkar maupun PDI"*. Berdasarkan pendapat Samovar dan Porter (1982) bahwa pakaian menunjukkan komunikasi non verbal, yang membentuk makna tertentu. Dengan demikian seragam ormas sejumlah orang dari kelompok etnik ini, mengandung pula makna yang mengarah kepada kecenderungan pilihan politik.

## **B. Berinteraksi dan Berkomunikasi Menjadi Wirausaha**

Dalam kegiatan sosial di pedesaan, orang-orang Minang tampak berpartisipasi dengan memberikan dukungan dana dalam berbagai kegiatan yang diselenggarakan oleh Pemerintahan Desa maupun kawasan dusun di sekitar tempat tinggal. Dengan keterbatasan waktu, karena umumnya sibuk bekerja, maka pola partisipasi yang dilakukan tentu saja tidak dapat disamakan dengan penduduk setempat yang dalam posisi memelihara dan mempertahankan nilai-nilai kekerabatan desa. Informan IV, lulusan Madrasah Aliyah, menyebutkan; *"Orang Minang ikut berpartisipasi dalam kegiatan di desa sesuai dengan waktu yang dimiliki, dan secara rutin mereka juga memberikan dukungan dana untuk menjalankan kegiatan bersama"*.

Interaksi sosial orang-orang dari Sumatera Barat di desa lokasi penelitian memang, tidak bisa dilepaskan dari faktor usaha, ataupun bisnis yang dilakukan, sehingga masalah ketersediaan waktu untuk mengikuti kegiatan desa menjadi alasan penting untuk berpartisipasi secara aktif. Ketiadaan waktu longgar dalam interaksi sosial di desa yang

dinyatakan secara lugas dan terus terang seringkali didengar dalam interaksi antara Orang Sunda desa setempat dengan orang-orang dari kelompok etnik Minangkabau. Dalam kaitannya dengan pendapat Hall (1976) komunikasi orang Minangkabau termasuk dalam komunikasi dengan konteks rendah yang lebih menekankan pada komunikasi verbal dengan keterus terangan.

Orang Minang mempunyai pandangan kuat dalam masalah religi, Informan II yang menyukai film India dari tayangan televisi ini menyatakan: *“Orang Minang di desa ini ada yang condong ke Muhammadiyah, ada juga yang ke Nahdatul Ulama”*. Muhammadiyah merupakan organisasi pembaharu yang didirikan pada tahun 1912, tujuannya ialah menghapuskan kegiatan atau perbuatan yang berasal dari tradisi yang tidak sesuai dengan ajaran Islam, sedangkan Nahdatul Ulama (NU) suatu organisasi Islam tradisional. (Deliar Noer, 1983:5). Hakikatnya masyarakat desa tidak memperlakukan aliran dalam agama, mereka menghargai keyakinan yang berbeda. Pernyataan mengikuti orientasi keagamaan, umumnya semata-mata hanya dikaitkan dengan perbedaan saat awal bulan puasa ataupun Idul Fitri yang dirayakan oleh masyarakat desa.

Orang Minangkabau sangat ulet dalam bekerja dengan perhitungan yang matang dalam interaksi ekonomi di pedesaan. Dengan bekerja keras dan berhemat, mereka mampu membuka berbagai usaha di kawasan jalan negara pantai utara yang strategis. Kelompok etnik dari Sumatera Barat yang membuka usaha di desa, pada umumnya mempekerjakan Orang Sunda penduduk setempat dan orang dari kelompok etnik lainnya. Orang-orang Minangkabau di desa lokasi penelitian, banyak yang berprofesi sebagai sopir angkutan umum, dan karyawan industri. Tetapi yang berhasil secara ekonomi adalah mereka yang membuka rumah makan, toko kelontong, kios aneka kebutuhan dan usaha lain yang menghasilkan keuntungan memadai. Kelompok etnik Minangkabau yang membuka usaha, dalam memberikan pelayanan terhadap konsumen atau dalam hubungan bisnis tidak pernah bersikap membeda-bedakan. Informan II yang menganggap bahwa desa tempat dia bermukim adalah tempat yang tepat untuk mencari mata pencaharian berpendapat:

*“Orang Padang (seringkali diucapkan untuk menyebut kelompok etnik Minangkabau) kalau mencari pegawai, tidak memandang dari segi sukunya yang penting bisa bekerja dengan baik. Mereka kalau berdagang memberikan pelayanan yang sama kepada pelanggan atau pembeli. Misalnya kita datang ke rumah makan Padang akan dilayani dengan baik sebagai pembeli”*.

Ungkapan tersebut di atas menunjukkan bahwa orang Minang lebih menitik beratkan pada nilai kesetaraan dalam melayani pembeli demi untuk menjaga hubungan dengan pelanggan. Sikap itu sesuai dengan karakteristik kepribadian yang menerima perubahan, sebagaimana dikemukakan Rogers dan Shoemaker (1971) bahwa, karakteristik orang yang menerima perubahan adalah mempunyai motivasi tinggi untuk meningkatkan taraf hidup. Disamping itu mereka juga lebih memperhatikan kesamaan budaya dengan kelompok etnik lain, sehingga mereka mau menerima orang dari luar kelompok etniknya

untuk bekerjasama. Dikaitkan dengan pendapat Samovar, Porter dan Jain (1981), tindakan orang Minangkabau untuk mempekerjakan orang diluar kelompok etniknya adalah model komunikasi dan interaksi untuk mengurangi permasalahan potensial yang mengganggu dalam komunikasi antar budaya.

Dalam masalah interaksi politik di pedesaan, orang Minangkabau cenderung tidak aktif dalam perpolitikan yang dapat dilihat dari penampilan simbol ataupun atribut yang melekat. Bahkan mereka tidak pernah tampak melibatkan diri secara langsung dalam masalah politik pada pemilihan umum tahun 1992. Untuk urusan politik praktis di pedesaan, pada umumnya orang Minangkabau di desa lokasi industri tidak bisa ditebak karena cenderung tertutup, sehingga orang-orang Sunda penduduk setempat juga tidak banyak mengetahui kegiatan politiknya. Informan IV seorang guru salah satu madrasah di desa mengemukakan: *"Mereka lebih berfokus kepada usaha dan dagang, mereka tidak tampak dalam kegiatan politik di desa"*. Pernyataan ini, mengarah pada stereotip positif yang berkaitan dengan kesuksesan para pedagang Minangkabau di perantauan, khususnya pada desa lokasi penelitian di jalan negara pantai utara Kabupaten Karawang Jawa Barat.

### **C. Kelugasan Sebagai Landasan Keeratan Hubungan**

Orang-Orang Batak di desa lokasi penelitian pada umumnya bersosialisasi secara baik dengan warga disekitar rumahnya. Namun dengan warga di dusun-dusun pedalaman yang jauh dari jalan raya pantai utara, hubungan sebatas kepada antara pemilik usaha dan pelanggan. Dalam kegiatan yang diselenggarakan oleh pemerintah desa, orang-orang yang umumnya dari Sumatera Utara ini, khususnya yang memiliki usaha maju di kawasan pantura, selalu memberikan dana untuk mendukung kegiatan di desa. Memang partisipasinya dalam dalam perhelatan yang diselenggarakan oleh pemerintah setempat tidak dapat dilakukan secara total dengan melibatkan diri secara langsung, tetapi mereka di desa ini tetap memberikan respon positif terhadap kegiatan masyarakat setempat.

Kendati demikian, sebagai kelompok masyarakat perantauan yang berupaya mencari penghidupan yang lebih baik, Orang Batak warga desa ini selalu menunjukkan sikap kritis terhadap berbagai masalah yang ada di desa. Kekritisan yang dikemukakan bukan semata-mata prasangka berlebihan atau ketidakpercayaan terhadap kelompok lain, tetapi semata-mata untuk mengingatkan bahwa program-program pemerintah desa harus sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan dan diumumkan kepada masyarakat melalui berbagai kegiatan. Dalam kegiatan sosial di pedesaan sebagai media komunikasi dan interaksi antar warga desa melalui berbagai kegiatan, kelompok etnik yang di desa dikenal tegas ini, memberikan sumbangan dalam bentuk materi, biasanya dilakukan secara formal dengan bukti tertulis. Selain itu, sudah lazim jika mengingatkan kepada panitia pencari dana untuk efisien dalam pengeluaran.

Dengan kata lain, memberikan dukungan dana dilakukan sebisa mungkin dengan transparan. Pola ini memberikan pembelajaran yang cukup baik kepada beragam



kepanitian kegiatan sosial untuk bersifat terbuka. Dalam hal kegiatan sosial, Informan VI, pemuda setempat berumur 22 tahun yang sangat dikenal oleh anak-anak muda di desa mengungkapkan:

*“Saya pernah minta sumbangan untuk acara di Balai Desa kepada pemilik toko onderdil motor dan mobil yang terkenal di desa ini. Dia memberi sumbangan yang memadai, tetapi juga menanyakan untuk apa uang itu digunakan, mengapa tidak minta sponsor dari perusahaan yang ada di desa dan dia menyarankan penggunaan uang dilaporkan kepada warga desa”.*

Perwujudan sikap dan pernyataan tersebut tentu saja mengandung hal positif dalam menjalankan suatu kegiatan di desa, harus melibatkan juga para pemilik perusahaan atau pabrik di pedesaan sehingga dana yang dibutuhkan terpenuhi. Namun aspek yang paling penting adalah kejujuran dalam mengelola uang hasil sumbangan masyarakat.

Pada konteks ini, ada faktor krusial yang bersentuhan dengan ketidakpercayaan (*lack of trust*) dalam komunikasi antar budaya yang secara naluriah ditandai dengan sinyal verbal dan non verbal. (Samovar, Porter, dan Jain 1981). Artinya kekritisan terhadap penggunaan dana penyelenggaraan kegiatan sosial di desa, sesungguhnya disebabkan oleh ketidakpercayaan yang melembaga dan bertumpuk, terhadap sejumlah pihak yang bertanggung jawab dalam kegiatan sosial di desa.

Sebagai warga desa yang tinggal di sepanjang jalan negara Karawang, karena kesibukan bekerja, tidak sempat untuk bergaul secara rutin dengan warga desa penduduk asli. Kecuali dengan sesama orang-orang dari kelompok etnik Batak dan anak-anak muda desa yang memang gemar bergerombol di sekitar tempat usaha yangb ditekuni. Mereka mempunyai sikap yang tegas dalam memberikan penilaian terhadap sesuatu. Namun mengingat kesibukan dalam bekerja, maka frekuensi untuk berinteraksi dengan warga setempat juga tidak maksimal. Karena itu sejumlah warga desa asli kawasan pantura ini, mengharapakan agar Orang Batak yang ada di desanya bisa lebih banyak berinteraksi dengan warga di lingkungannya. Dalam konteks komunikasi antar budaya, kesulitan untuk bersosialisasi dan bergaul dengan masyarakat sekitarnya, merupakan salah satu perwujudan dari problem potensial dalam komunikasi antar budaya yaitu menarik diri (*withdrawl*) dari interaksi dan komunikasi dengan kelompok lain di masyarakat. (Samovar, Porter dan Jain, 1981).

Orang-Orang Batak di desa lokasi penelitian pada umumnya beragama Kristen Protestan, namun mereka tidak pernah mempersoalkan agama dalam bergaul dengan kelompok etnik lain yang ada di desa. Karakteristik interaksi dengan kelompok etnik lain yang melekat pada etnik Batak di desa dalam hal ekonomi dan perdagangan cukup menonjol. Mempunyai motivasi tinggi untuk bekerja keras, ulet dan hemat, demi untuk mencapai kesejahteraan yang memadai di perantauan. Keberhasilan dalam hal materi mereka tidak tampak ditonjolkan, karena lebih banyak ditabung untuk berbagai



kepentingan yang tidak konsumtif. Mereka juga tidak ada yang membeli tanah maupun rumah di desa setempat. Meskipun sukses secara ekonomi, sebagian besar yang tinggal di desa lokasi penelitian, tetap menyewa rumah atau lahan untuk berusaha di kawasan pantai utara. Bahkan diantara mereka, ada yang sudah belasan tahun tetap menyewa rumah dan tanah sebagai tempat menjalankan usahanya. Orang Batak yang membuka usaha cenderung mempekerjakan orang-orang dari kelompok etnik sendiri, atau orang-orang yang masih memiliki hubungan kekerabatan.

Mereka banyak yang bekerja sebagai karyawan pabrik, sebagian kecil memiliki usaha simpan pinjam yang tidak formal yang melayani kebutuhan keuangan masyarakat disekitar desa. Keberhasilan di desa lokasi penelitian, yang tampak menonjol adalah bengkel mobil maupun motor. Hampir setiap hari bengkel mereka dipenuhi oleh mobil dan motor yang membeli suku cadang atau service mesin dari yang ringan sampai yang terberat seperti turun mesin. Orang Batak memiliki ikatan yang kuat dengan orang yang sesama etnik dalam urusan bisnis dan perdagangan. Menurut Informan II, petani muda yang beralih pekerjaan sebagai karyawan salah satu perusahaan di desa, karena menganggap menjadi buruh tani tidak mampu memberikan kesejahteraan berpendapat:

*“Orang Batak di desa ini memiliki hubungan yang sangat erat dengan sesama mereka, terlebih lagi yang memiliki kesamaan dalam usaha. Kendati demikian, dengan kelompok etnik lain di desa tetap berjalan dengan baik, terlebih lagi terhadap mereka yang sangat dikenal”.*

Interaksi dan komunikasi intra kelompok etnik atau sesama kelompok etnik sendiri, tentu hal yang wajar karena memiliki berbagai persamaan nilai, sikap dan kepercayaan yang mampu mempererat hubungan. Walaupun begitu, mereka yang ada di desa lokasi penelitian tidak terjebak dalam mengunggulkan nilai budaya yang dimiliki dengan menafikan keberadaan kelompok lain, sehingga jauh dari unsur etnosentrisme. Menurut Lustig (1988) etnosentrisme adalah memandang kepercayaan, adat dan nilai sendiri yang paling baik, sehingga mereka lebih percaya terhadap kelompok etniknya sendiri dalam tindakan-tindakan sosial budaya dan ekonomi. Dalam interaksi yang terbuka seperti halnya komunikasi kelompok dan komunikasi publik, tidak ada gejala etnosentrisme di desa, sehingga suasana pedesaan yang aman dan penuh toleransi terjaga dengan baik

Dalam interaksi Politik, Orang Batak di desa tertutup sekali terhadap masalah politik dipedesaan. Pendapat tentang ketertutupan pilihan politik ini didukung oleh semua informan, kecuali Informan VII yang pedagang asongan dengan wilayah operasi sepanjang jalan pantura sampai ke wilayah Cirebon, menyebutkan: *“Orang Batak sering membicarakan partai politik-partai politik yang diikutinya atau dijadikan rujukan”.* Berdasarkan pendapat tersebut, dalam berkomunikasi memperhatikan setting fisik, waktu maupun manusia. (Samovar, Porter, dan Jain 1981) sehingga dalam komunikasi yang menyangkut masalah sensitif di pedesaan tidak disampaikan secara terus terang. Walaupun sesungguhnya berdasarkan pengelompokan budaya, cenderung dikaitkan

dengan budaya konteks rendah, yang lebih lugas, terus terang dan mengunggulkan komunikasi verbal, dibandingkan dengan kelompok etnik yang memiliki budaya konteks tinggi yang lebih tertutup dan mengedepankan komunikasi non verbal maupun bahasa tubuh.

#### **D. Kohesivitas Sosial dalam Kompleksitas Kemajemukan**

Orang Madura aktif dalam kegiatan sosial yang diselenggarakan oleh warga desa, khususnya yang berkaitan dengan peringatan hari besar keagamaan. Pergaulan orang-orang Madura yang berasal dari Pulau Madura maupun Jawa Timur cukup luas. Tetapi biasanya membatasi dalam pergaulan dengan lawan jenisnya, dengan kata lain laki-laki Madura akan bergaul dengan laki-laki Sunda ataupun sebaliknya. Sebab mereka memiliki batas pergaulan yang sangat ketat jika menyangkut lawan jenis. Mereka yang tinggal di desa lokasi penelitian, dikenal oleh masyarakat sekitarnya taat menjalankan ibadah sesuai dengan aturan-aturan agama. Karena itu, dalam menghadapi masalah sosial tertentu dapat sejalan dengan Orang Sunda di desa lokasi penelitian yang juga memegang prinsip agama, norma dan etika dalam kehidupan sehari-hari.

Kelompok etnik Madura memiliki keuletan dalam bekerja dan pengeluaran untuk biaya hidup dilakukan dengan terinci. Berkat keuletan tersebut, mereka berhasil membuka usaha pada sejumlah kawasan strategis pedesaan yang dinamis selama 24 jam. Banyak tempat usaha milik Orang Madura, tanahnya dibeli dari penduduk asli desa. Mereka mempekerjakan orang-orang yang satu etnik untuk bekerja di tempat usaha. Pada umumnya, pendatang dari Madura di pedesaan tidak berminat menjadi karyawan pabrik yang tersebar di desa-desa sepanjang jalan raya pantai utara.

Usaha yang digeluti Orang Madura, berkisar kepada perdagangan kayu dan barang rongsokan. Dalam urusan bisnis, mereka sangat perhatian terhadap pemuka agama di pedesaan. Oleh sebab itu, tidak mengherankan jika Orang-orang Madura yang membuka usaha akan memberi pelayanan sebaik-baiknya kepada ulama-ulama di desa lokasi penelitian.

Ulama desa dan Orang Madura mempunyai persepsi dan bahasa verbal maupun non verbal yang sama. Misalnya seorang ulama desa yang akan membeli sesuatu dari Orang Madura, mereka akan terlibat dalam pembicaraan pengalaman masing-masing saat pergi haji, lengkap dengan idiom-idiom bahasa tertentu yang mereka pahami. Tidak bias dikesampingkan, bahwa “kesamaan bahasa verbal dan non verbal membentuk komunikasi antar budaya menjadi lebih lancar” (Samovar, Porter, dan Jain 1981). Lancarnya komunikasi membangun kohesivitas hubungan yang berdampak kepada tercapainya transaksi bisnis yang menguntungkan kedua belah pihak.

Sementara itu dalam konteks politik pedesaan atau keterlibatan warga Madura dalam partai politik di desa, orang madura memegang prinsip yang tegas dan tidak mudah untuk mengikuti kehendak siapapun juga termasuk orang-orang desa yang memiliki otoritas

formal dalam pemerintahan maupun mempunyai kekuatan politik untuk mengarahkan warga. Informan IX yang berumur 51 tahun, lulusan Madrasah Aliyah yang bersatus sebagai PNS pada Instansi Pemerintah di Karawang, menyatakan: "*Orang Madura tidak mudah dipengaruhi untuk sehaluan dengan orang yang berkuasa di desa dalam aspirasi politiknya*". Kesulitan untuk mempengaruhi perilaku politik ini, karena Orang Madura, mungkin saja memiliki pengalaman yang tidak seperti harapan dalam berinteraksi dengan entitas politik di desa. Hakikatnya dalam konteks komunikasi antar kelompok yang berbeda, bisa saja muncul sikap *lack of trust* terhadap kelompok lain akibat sejumlah perbedaan krusial yang melekat.

Kalaupun para pemilik kekuasaan itu berupaya untuk memaksakan pendapat politiknya, belum tentu akan diikuti. Bahkan bisa saja semakin menjauhkan hubungan, sebab pemaksaan pendapat akan menghambat kelancaran komunikasi antar budaya yang berbeda (Samovar dan Porter, 1988). Tidak dapat dikesampingkan bahwa para pemilik otoritas dalam pemerintahan desa memang mempunyai tugas pembinaan warga desa dalam penetapan pilihan politik. Tentu saja dalam bingkai jargon-jargon keserasaian, keselarasan dan harmoni yang ditafsirkan secara integralistik sesuai kepentingan politik kekuasaan negara.

Komunikasi & Gerakan Perubahan

# BAB 7

## MENJALIN HUBUNGAN DALAM KEMAJEMUKAN

---

### A. Komunikasi Dalam Penghormatan Nilai Budaya

Orang Jawa menyatakan karakteristik yang dimiliki adalah menjaga norma, sopan santunnya tinggi, tidak menonjolkan diri, rajin dan taat pada pimpinan, gotong royong dan sejumlah sifat positif lain yang juga dimiliki oleh orang dari kelompok etnik lainnya. Pendapat tentang kelompok etnik Sunda dipilah dalam interaksi sosial, politik dan ekonomi sedangkan terhadap etnik lainnya dalam bentuk satu kesatuan pendapat.

Di pedesaan kawasan pantai utara Pulau Jawa yang majemuk, orang-orang Jawa menilai Orang Sunda di desa lokasi industri bersifat terbuka dan ramah. Meskipun kadang-kadang muncul sikap pembelaan terhadap kelompok etniknya dalam bingkai persaingan, seperti halnya dalam olah raga, tetapi dalam kehidupan sehari-hari tidak ada sikap etnosentrisme berlebihan yang dapat menghambat komunikasi antar budaya. Informan A, tokoh masyarakat di lingkungan di desa lokasi penelitian, menyebutkan: *"Dalam pertandingan olahraga memang bisa saja muncul para supporter warga desa setempat yang cenderung membela orang yang satu kelompok etnik. Memang dalam situasi yang penuh dengan persahabatan dan humor, sehingga tidak menyebabkan permusuhan di luar lapangan bulutangkis maupun volley"*.

Pernyataan-pernyataan dalam nada stereotip, walaupun bukan dalam kemasan negatif yang dilontarkan Orang Sunda terhadap Orang Jawa, berhubungan dengan setting pertandingan yang memanas namun penuh semangat kekeluargaan. Selain itu, teriakan pendukung pertandingan olah raga di desa tetap memiliki tanggung jawab dalam komunikasi, sehingga jauh dari suasana yang tidak menyenangkan. Menurut Samovar, Porter dan Jain (1981), tanggung jawab etis dalam komunikasi antar kelompok harus dijaga demi untuk menjaga hubungan baik antar pihak-pihak yang berinteraksi.

Dalam perspektif Orang Jawa, Orang Sunda di desa adalah pemeluk agama Islam yang taat dalam menjalankan ibadah. Orang Jawa menghormati ketaatan beribadah kelompok etnik penduduk asli di desa lokasi penelitian. Siklus hidup manusia selalu

dikaitkan dengan ajaran agama dan adat istiadat yang dijunjung tinggi. Ketaatan tampak dalam menjalankan agama dapat dilihat di berbagai mushala dan masjid yang seringkali dipakai sebagai tempat pertemuan warga desa. Semangat gotong-royong, khususnya diantara sesama kelompok etnik Sunda warga desa di pantai utara, berjalan dengan baik. Dalam arti perilaku tolong menolong diantara warga dalam hajatan keluarga ataupun ketika satu keluarga ditimpa musibah, dengan mudah mereka akan memberikan bantuan yang berupa materi maupun tenaga. Pola gotong royong antar warga pada umumnya, jauh lebih menonjol dibandingkan dengan kesediaan untuk bergotong royong dalam dalam konteks “perintah” aparat pedesaan dalam rangka mendukung kegiatan untuk kepentingan pemerinatahn desa maupun kecamatan

Berkaitan dengan interaksi ekonomi, penduduk asli desa, sebagian bermata pencaharian di sektor pertanian. Tetapi mereka kurang memiliki semangat kerja dalam usaha meningkatkan produktivitasnya. Menurut Informan B, pensiun Badan Usaha Milik Negara yang menetap di desa, dan pemilik sawah padi yang cukup terpendang, menyatakan:

*“Mereka adalah petani tradisional yang kurang mengantisipasi hasil pertanian yang sedang laku dipasaran. Dari dulu sampai sekarang mereka menanam jenis tanaman yang sama walaupun bibit unggul. Padahal sekarang banyak pasar dan super market minta jenis-jenis sayuran dan hasil pertanian lain seperti mentimun dan labu Jepang yang laku di pasaran”.*

Petani desa lokasi penelitian, dalam pandangan teorotis adalah petani tradisional, dimana mereka mempunyai kultur tidak inovatif dan keterbatasan aspirasi, sehingga mereka jauh berbeda dengan petani kosmopolitan yang mampu mengantisipasi pemasaran hasil pertanian. (Rogers dan Svening, 1969:26). Pensiunan BUMN yang berpengalaman dalam mengelola pertanian, adalah petani cosmopolitan yang sering berhubungan dengan pasar-pasar di perkotaan, sehingga lebih memahami permintaan konsumen. Sesungguhnya ketidak inovatifan menjadi tanggung jawab kekuasaan negara, agar petani pedesaan mampu bersaing dengan para petani kosmopolitan berlahan luas.

Kendati demikian, meskipun petani warga asli desa kurang inovatif, tetapi di segi lainnya masyarakat mereka pintar mengantisipasi perkembangan desa. Kehadiran industri dan orang-orang dari luar desa, membuka peluang baru dalam menyewakan rumah kepada pendatang dari berbagai penjuru tanah air, dengan harga yang cukup tinggi untuk ukuran harga pada tingkat pedesaan. Harga tanah melonjak dengan pesat, dan banyak tanah penduduk asli desa dijual dengan sangat mahal. Namun uang hasil penjualan tanah tersebut, tidak dimanfaatkan mendukung perekonomian dalam jangka panjang, dengan menginvestasikan untuk membeli barnag yang sifatnya produktif, tetapi seringkali habis tidak berbekas karena dipakai untuk membeli barang-barang sekunder yang sesungguhnya tidak diperlukan.

Dalam interaksi politik, Orang Jawa memandang Orang Sunda penduduk asli desa cukup aktif. Mereka tampak ikut dalam kegiatan partai politik peserta pemilihan umum, yaitu PPP, Golkar maupun PDI. Informan C, karyawan pabrik yang cukup menyenangi masalah politik menyatakan, *“Orang desa setempat masing-masing mempunyai kepercayaan terhadap ketiga kontestan peserta pemilu tahun 1997. Pada pemilu sebelumnya mereka juga kampanye untuk tiga kontestan peserta pemilu.”* Sebagai penduduk setempat, Orang Sunda tidak merasa ada yang harus dirahasiakan, termasuk sikap politiknya. Dengan kata lain, para pendukung partai berkuasa maupun bukan partai penguasa, dengan mudah dapat diketahui dari perilaku sehari-hari ketika menghadapi pemilihan umum.

Disisi lain, Orang Jawa menilai orang Minangkabau di pedesaan pantai utara Karawang, dalam hubungan sosial berjalan sebagaimana lazimnya kelompok masyarakat yang selalu sibuk dalam bekerja. Sebagai pekerja keras dan pedagang yang sukses, orang Minangkabau seperti kekurangan waktu untuk berinteraksi dengan warga setempat, karena kegiatan bekerja setiap hari yang menyita banyak kesempatan. Informan C, karyawan perusahaan, yang berumur 33 tahun menyatakan: *“Mereka sulit untuk meninggalkan usahanya sehingga sulit mencari waktu untuk berinteraksi dengan warga disekeliling desa dari berbagai kelompok etnik”*. Kelompok etnik Minangkabau pada umumnya maju dalam perekonomian, dan menguasai perdagangan eceran-toko kelontong dan bermacam kebutuhan rumah tangga, rumah makan, serta usaha jasa di sepanjang jalan negara. Sedangkan dalam kehidupan politik, tidak tampak melakukan aktivitas menonjol berkaitan dengan pemilihan umum dan terkesan tidak berkepentingan terhadap dinamika politik di pedesaan

Pendapat Orang Jawa terhadap orang Minang terfokus kepada kesibukan mengurus usaha ini ternyata tidak jauh berbeda dengan pendapat terhadap Orang Batak. Mereka menilai orang-orang dari Sumatera Utara di desa kawasan pantai utara ini, memiliki waktu yang terbatas untuk berinteraksi dengan warga desa. Walaupun demikian dengan warga desa yang ada disekeliling tempat usaha lebih banyak bersosialisasi dan berinteraksi dalam membicarakan berbagai hal yang ada disekelilingnya. Informan B, pendatang dari kota di Jawa Tengah bagian Selatan yang dituakan oleh kelompoknya di desa lokasi penelitian menyatakan: *“Mereka bergaul baik dengan orang sekelilingnya, tetapi karena kesibukan tidak bisa berinteraksi dengan warga desa lain yang jauh dari lokasi tempat usahanya”*.

Sedangkan dalam interaksi ekonomi dan perdagangan dengan kelompok lain, mereka cenderung lebih memperhatikan orang-orang yang satu etnik, atau yang memiliki kesamaan sikap dan perilaku. Karakteristik keuletan untuk hidup sebagaimana adanya, hemat, bahkan menderita pada awalnya sebelum mencapai sukses menjadi gambaran umum mereka yang sukses di desa lokasi penelitian. Tidak dapat dikesampingkan, sikap ulet, mampu untuk hidup sengsara adalah kekuatan di perantauan. Dalam kegiatan politik

maupun aktivitas yang bernuansa politik pedesaan, mereka tidak tampak aktif mengikuti aneka perhelatan politik pedesaan karena beralasan sibuk bekerja.

Dalam menilai karakteristik kelompok etnik pendatang dari Madura, Orang Jawa menggarisbawahi tentang kemampuan untuk bergaul dalam bingkai religi merupakan salah satu karakter kuat yang melekat pada Orang-orang Madura yang sukses membuka usaha di pedesaan jalan negara. Tidak dapat diabaikan, mereka aktif dalam interaksi sosial dalam berbagai perhelatan formal maupun kehidupan sehari-hari di desa. Informan C orang yang rajin pulang ke kampung halamannya ini menyatakan: *“Mereka mampu bergaul dengan baik dan menjaga norma agama dengan ketat”*. Secara substansial, religi merupakan fondasi utama dalam interaksi sosial Orang-orang Madura di desa lokasi penelitian yang juga menjunjung tinggi norma kesusilaan dan agama.

Orang Madura yang sukses diandalkan sebagai donatur dalam kegiatan sosial di desa. Rata-rata kesuksesan mereka berkaitan dengan jiwa berdagang yang didukung oleh keterampilan memadai dan keuletan dalam bekerja. Sedangkan dalam urusan politik di pedesaan, orang-orang dari Pulau Garam ini cukup transparan dan sulit untuk dipengaruhi untuk mengubah pilihan partai politiknya dalam pemilihan umum.

## **B. Merajut Hubungan, Mengembangkan Usaha**

Orang Minangkabau menyukai Orang Sunda, karena dinilai sangat ramah dan sopan, tidak kesukuan dan tidak mudah terpengaruh oleh pendapat orang lain yang bersifat negatif. Dalam menjalankan kegiatan keagamaan biasanya dikaitkan dengan tradisi yang dianut oleh masyarakat, Informan 1 menyatakan: *“Orang desa ini biasa menyelenggarakan kegiatan agama dikaitkan dengan upacara tradisional seperti bermacam-macam acara selamatan, atau sebaliknya acara tradisional dikaitkan dengan keagamaan”*. Sikap ini sejalan dengan karakter masyarakat agraris menurut Rogers dan Svenning (1969) yang menggabungkan antara tradisi dan agama dalam kehidupan sehari-hari.

Dalam konteks perekonomian desa, Orang Sunda di lokasi penelitian pandai bertani, jika tidak ada pekerjaan di sawah, mereka akan melakukan kegiatan lain yang menghasilkan uang, maupun sekadar beristirahat menunggu kegiatan berikutnya, dalam siklus pertanian di desa. Diantara mereka, tidak sedikit yang mengandalkan harta warisan orang tua. Namun yang menjadi persoalan, harta tersebut tidak dikelola dengan baik untuk modal usaha maupun hal-hal yang bersifat produktif, tetapi digunakan untuk membeli kebutuhan sekunder yang sesungguhnya kurang bermanfaat. Informan 2 mengatakan:

*“Orang desa ini, sebagian diantara mereka, kalau mendapat warisan tanah pertanian ataupun kebun, lebih suka untuk dijual atau ditukar dengan barang-barang seperti sepeda motor, televisi dan video. Tetapi dalam waktu singkat barang-barang itu sudah dijual lagi dengan harga murah”*.

Memang tidak semua memiliki perilaku konsumtif dan lebih memburu kebutuhan sekunder ketika memiliki uang, sebab diantara orang-orang desa terpendang yang



berpikiran ke depan, hasil penjualan tanah akan diinvestasikan juga untuk kegiatan yang bermanfaat seperti membangun rumah pondokan untuk disewakan kepada pendatang dan membeli mesin-mesin pendukung produksi pertanian yang disewakan kepada petani lain.

Dalam kaitannya dengan kehidupan politik, orang desa ini cenderung memiliki aspirasi sama dengan Kepala Desanya, seperti pendapat Informan 3: *“Apa yang dikatakan Kepala Desa akan diikuti oleh penduduk asli desa, termasuk dalam urusan Pemilihan Umum Tahun 1997”*. Hakikatnya Kepala Desa setempat sebagai orang yang dihormati dan diteladani, merupakan rujukan politik dari kebanyakan masyarakat desa penduduk asli.

Pertemanan dan hubungan baik orang Minang dengan sesama kelompok etnik pendatang terhadap, tampak dalam pendapat tentang kelompok etnik Jawa. Menurut mereka, Orang Jawa di desa lokasi penelitian sangat aktif dalam kegiatan sosial, khususnya kegiatan sosial yang diprogramkan oleh pemerintah. Informan 1, orang Minang yang berpengalaman di perantauan, menyatakan: *“mereka menguasai hampir semua kegiatan di desa, lebih dari penduduk aslinya, Kepala Desa sering memberikan tugas kepada mereka untuk mengajak masyarakat mendukung program pembangunan desa”*. Dalam pandangan Kincaid dan Schramm (1987), tindakan Kepala Desa tersebut berkaitan dengan kepercayaan terhadap kecakapan dan kompetensi dalam menangani masalah pedesaan, sehingga mereka banyak dipakai tenaganya untuk menyebarkan pesan-pesan pembangunan.

Dihubungkan dengan kehidupan ekonomi, pada umumnya Orang Jawa di desa lokasi penelitian, mempunyai kondisi yang stabil karena bekerja sebagai pegawai negeri atau pegawai perusahaan. Sedangkan dalam kehidupan politik pedesaan yang dikaitkan dengan kekuasaan, kelompok etnik Jawa menempati banyak posisi strategis dalam lembaga-lembaga desa. Dengan demikian mereka secara tidak langsung ikut mengendalikan jalannya pemerintahan desa, meskipun bukan penduduk asli desa.

Dalam memberikan penilaian terhadap Orang Batak, kelompok etnik Minangkabau yang memiliki frekuensi interaksi langsung paling tinggi dengan mereka, menilai bahwa sebagai sesama orang luar Pulau Jawa, Orang Batak di desa biasa diajak bertukar pikiran. Informan 1 menjelaskan: *“Kami lebih sering membicarakan persoalan desa dengan tetangga kami yang Orang Batak”*. Interaksi antara orang Minangkabau dengan Orang Batak yang intensif, karena mereka lebih banyak mengembangkan kesamaan nilai, sebagai sesama perantauan dari Sumatera. Menurut Samovar, Porter dan Jain (1981) bahwa mengembangkan kesamaan dalam nilai dan kepercayaan akan membuka peluang komunikasi yang lebih lancar.

Secara esensial, orang Minang menilai bahwa perekonomian Orang Batak memfokuskan kepada aspek hemat, pandai mengelola keuangan, pekerja keras dan aktif menabung. Karena itu, sudah menjadi hal yang umum jika penampilan mereka sederhana

dilihat secara fisik. Dalam kegiatan politik, Orang Batak cenderung menjauh dari urusan politik di pedesaan mengingat keterbatasan waktu.

Jika menilai Orang Batak berpijak kepada kelugasan, maka terhadap Orang Madura, kelompok etnik Minangkabau di desa lokasi penelitian, hanya menggarisbawahi, bahwa Orang Madura sangat taat beribadah, sering mengadakan acara keagamaan khusus untuk Orang Madura di lingkungan desa. Menurut Informan 2, tukang foto keliling yang memahami hampir setiap pelosok desa, menyatakan "*Orang dari Madura sering mengadakan pengajian untuk kalangan mereka sendiri, saya sering melihat mereka berjalan bersama dalam suasana yang khas untuk menghadiri pengajian di tempat pedagang barang bekas*". Kegiatan di lingkungan kelompok etniknya sendiri pada Orang Madura, menurut Lustig (1988) budaya akan eksis karena dipelihara dan digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Dengan pelembagaan nilai-nilai budaya dimanapun suatu kelompok berada, maka budaya itu terus melekat dan tidak akan luntur meskipun berinteraksi dengan kelompok etnik lain.

### **C. Mengedepankan Pendirian dalam Adaptasi**

Orang-Orang Batak menyatakan bahwa ciri-ciri mereka sendiri adalah suka merantau, keras, mempunyai ikatan kekerabatan yang kuat, menjaga tradisi, mampu untuk hidup sengsara sebelum sukses, kerja keras dan lain-lain sikap positif yang melekat. Dalam menilai Orang Sunda penduduk asli desa, Orang Batak menyatakan bahwa Orang Sunda mempunyai sikap ramah dan tidak membeda-bedakan suku dalam pergaulan, serta sangat menjunjung tinggi toleransi beragama. Menurut Informan Q, yang membuka usaha tambal ban mobil dan motor di pinggir jalan raya dan memahami sifat orang desa setempat, mengemukakan: "*Kami di desa ini tidak pernah diperlakukan berbeda karena berlainan agama, semuanya berjalan normal tidak ada gangguan*". Dengan demikian asumsi Smart (1991) yang menyatakan bahwa, "berbeda kepercayaan berpotensi menghambat komunikasi antar budaya tidak tampak disini, dan bahkan terbantahkan. Sebab yang menonjol justru masyarakat menerima orang lain yang berbeda nilai dan kepercayaan sebagaimana karakteristik masyarakat yang mengalami perubahan menurut Rogers dan Shocmaker (1971).

Orang desa lokasi penelitian dinilai kurang mandiri dalam menentukan sikap, sehingga mereka mudah dipengaruhi. Gotong-royong yang berlaku di masyarakat kadang-kadang tidak bersifat sukarela tetapi lebih mengandung unsur keterpaksaan. Pandangan ini adalah prasangka dari Informan R yang berpendidikan Sekolah Menengah Atas, dan cukup kritis ini menyatakan, "*Kegiatan gotong-royong di desa ini lebih menyerupai kewajiban yang harus dilaksanakan bersama tanpa paksaan*". Pada umumnya dalam kegiatan gotong-royong di desa ini, orang-Orang Batak tidak memiliki waktu untuk berpartisipasi karena kesibukan bekerja. Dengan demikian bukan sebagai upaya menghindar, tetapi sebatas karena kesibukan dalam bekerja. Berdasarkan pendapat

Samovar, Porter, dan Jain (1981), bahwa tindakan menghindar (*avoidance*) terjadi karena individu atau kelompok etnik tidak menyukai etnik lain yang berbeda, dan ini potensial untuk menghambat kelancaran berkomunikasi.

Menurut Orang Batak, orang desa setempat mempunyai kemampuan bertani dan berkebun, namun banyak hambatan yang menghadang ketika muncul industri di pedesaan. Informan P pemuka pendapat di lingkungan Orang Batak di desa, menegaskan: *"Petani disini sering kehabisan modal, untuk menutup biaya produksi mereka menjual sawah atau tanahnya sedikit demi sedikit akhirnya habis"*. Uang penjualan tanah sebagian kecil digunakan untuk menunjang usaha, yang lainnya dipakai untuk memenuhi kebutuhan sekunder yang sebetulnya kurang diperlukan. Pernyataan tersebut, sesungguhnya merupakan stereotip negatif masyarakat desa pada umumnya. Dengan demikian bukan hanya terjadi di desa lokasi penelitian saja, para petani semakin meninggalkan pola hidup bertani akibat kesulitan modal usaha.

Dalam kehidupan politik, penduduk asli desa cenderung untuk sejalan dengan Kepala Desanya, Informan Q yang bengkelnya seringkali dipakai tempat berkumpul anak-anak muda setempat, menyebutkan: *"Penduduk asli desa ini, pada umumnya mendukung Kepala Desa dalam aspirasi politiknya, mereka sering mengadakan berbagai pertemuan yang bersifat menggalang kekuatan politik di kantor desa"*. Dalam pola kekuasaan paternalistik di pedesaan, ada kecenderungan kuat masyarakat akan mengikuti tokoh-tokoh yang dituakan dan memiliki kekuasaan formal maupun informal.

Menurut Orang Batak di desa ini, kelompok etnik pendatang Jawa mempunyai hubungan yang sangat luas dengan berbagai kelompok etnik di desa. Karena itu tidak mengherankan jika berbagai pihak berupaya untuk bekerjasama dalam aneka kegiatan di desa. Sudah barang tentu termasuk para pemilik kekuasaan formal di pedesaan, juga mempunyai kecenderungan kuat untuk bekerja seiring sejalan dengan Orang Jawa di desa lokasi penelitian. Meskipun demikian ada berbagai karakteristik yang seringkali dikaitkan dengan eksistensi bahasa tubuh maupun komunikasi non verbal yang berbeda dengan komunikasi verbal. Informan P, yang secara berkala membaca surat kabar harian Sinar Indonesia Baru, terbitan Medan mengemukakan pengalamannya, *"Tidak mudah untuk menebak sikap mereka, karena apa yang dikemukakan seringkali dalam bentuk symbol dan bahasa tubuh yang tidak semua orang memahaminya. Namun saya karena banyak bergaul dengan merka, paham betul maksud yang sesungguhnya dalam berbagai pembicaraan"* Pandangan Orang Batak ini bisa dimaklumi, mengingat Orang Batak masuk dalam budaya konteks rendah yang lebih lugas, sedangkan kelompok etnik Jawa seringkali dihubungkan dengan budaya konteks tinggi yang lebih banyak mengeksplorasi komunikasi non verbal.

Orang Batak memiliki hubungan baik dengan Orang Jawa, dalam hal perekonomian desa. Mereka menilai bahwa para perantauan di desa pantura ini rata-rata cukup maju, dan bisa dipercaya dalam hal sikap maupun perilakunya. Pada umumnya mempunyai status pekerjaan yang memadai jika dihubungkan dengan perkiraan penghasilan di

pabrik. Sementara itu, dalam sikap politiknya tampak jelas dan dapat dilihat dari berbagai atribut yang melekat. Dalam kegiatan-kegiatan kampanye, aktif mendukung salah satu partai kontestan pemilihan umum. Kendati demikian, mereka tidak membeda-bedakan status kepartaiannya dalam pergaulan sehari-hari di desa.

Selain memiliki hubungan baik dengan Orang Jawa, Orang Batak juga berkawan baik dengan Orang Minang. Menurut orang dari Sumatera Utara ini, kendati kelompok etnik Minangkabau dinilai kurang berinteraksi dengan warga disekelilingnya akibat kesibukan bekerja, tetapi memiliki hubungan yang akrab sebagai sesama perantauan dari Sumatera. Informan P, tokoh masyarakat di lingkungan etnik Batak desa lokasi penelitian, menyatakan pendapatnya: *“Walaupun kami jarang bergaul dengan kelompok etnik lain tetapi dengan Orang Batak kami banyak bergaul dalam membicarakan seputar kebijakan Kepala Desa”*. Orang Minang dapat bergaul dengan akrab dengan Orang Batak karena memiliki berbagai kesamaan dalam tujuan komunikasi yang sama (Samovar, Porter dan Jain, 1981) dalam membicarakan kebijakan desa.

Orang Minang lancar dalam hubungan bisnis dengan penduduk setempat yang memasok sayuran, beras, ayam, ikan air tawar seperti mas, gurame dan nila yang banyak dibudidayakan, ke rumah makan milik Orang Padang. Orang Minangkabau ulet dan dalam berusaha tidak tanggung-tanggung mengeluarkan modal awal yang besar, sehingga usahanya tampak maju pesat. Dalam hal interaksi politik tidak diketahui dengan jelas kemana arah dukungannya, bahkan dalam pemilihan umum pun seperti tidak menghiraukan dan tidak memberikan komentar terhadap partai-partai yang bersaing memperebutkan suara.

Sementara itu, pendapat Orang Batak tentang Orang Madura, dapat dicermati dari Informan R, orang yang adaptif terhadap pemberitaan media ini menyatakan: *“Mereka memang kurang aktif dalam pergaulan di desa, tetapi banyak berhubungan dengan orang dikenal dalam satu kekerabatan yang kuat”*. Keeratan hubungan antar Orang Madura di desa dapat dimengerti, mengingat berbagai kesamaan sosial kultural yang melekat. Secara ekonomis banyak yang berhasil dalam usahanya sehingga memberikan lapangan kerja diantara mereka sendiri. Oleh sebab itulah, hampir tidak ada yang bekerja di pabrik di lingkungan desa, sebab mereka umumnya bekerja di lingkungan keluarga dalam ikatan kekerabatan yang kuat. Dalam hal politik, Orang-orang Madura dinilai mempunyai pendirian teguh dan tidak mudah dipengaruhi oleh hegemoni kekuatan politik pedesaan.

#### **D. Menjaga Martabat dan Tradisi dalam Kemajemukan**

Orang Madura, mendeskripsikan karakteristik sosial kulturalnya adalah suka merantau, dapat bergaul dengan semua orang, taat beribadah, menjaga martabat dan tradisi, tidak mau dihina, ulet, rajin, hemat, mempunyai keterampilan tertentu. Nilai-nilai tersebut melekat semua kehidupan dimanapun berada. Karena itu, mereka juga mengidentifikasi diri secara umum, mampu untuk hidup mandiri dan dapat mengembangkan usaha di

perantauan di dalam negeri maupun di luar negeri. Orang Madura juga memiliki berbagai kemiripan dengan penduduk asli desa yang dianggap baik, sopan, memiliki ikatan kekerabatan kuat dan taat beribadah walaupun bisa saja dalam lingkup ritual yang tidak selalu sama.

Informan X yang kaya raya dan akrab bergaul dengan penduduk setempat, menyebutkan:

*“Pergaulan antara laki-laki dan perempuan di lingkungan orang desa ini terikat oleh tradisi dan kebiasaan yang sudah berlangsung turun temurun. Masalah yang kadang-kadang muncul dan dihadapi warga desa pada umumnya berkaitan dengan urusan pernikahan ataupun perceraian”.*

Sesungguhnya dalam hal perkawinan ataupun perceraian merupakan problem yang selalu muncul di berbagai wilayah pedesaan di Indonesia. Ditambahkan oleh Y pedagang kayu yang memboyong istrinya dari Madura untuk hidup di desa ini, menegaskan *“Seharusnya untuk orang desa ini, kalau mau menikah harus yakin bahwa mereka berdua mampu untuk hidup bersama dengan baik supaya tidak terjadi konflik dalam rumah tangga”.* Berpijak pada pernyataan itu, memang ideal perkawinan di lingkungan anak-anak muda tanpa masalah berarti, tetapi bukan hal yang mudah jika tidak dilandasi oleh kesiapan maupun kematangan dari dua belah pihak. Namun sesungguhnya masalah-masalah dalam ikatan keluarga itu dipengaruhi pula oleh menguatnya budaya material di desa, yang sebelumnya memiliki ikatan kebersamaan. Pola gotong royongpun semakin terpinggirkan.

Dalam hal perekonomian desa, khususnya pertanian, Orang Sunda sangat terampil dan produktif. Namun di bidang lain, khususnya di bidang pekerjaan formal yang berkembang di desa, kalah bersaing dengan para pendatang dari luar desa. Informan Z berpendapat: *Mereka memang cocok di bidang pertanian, sehingga keterlibatan dalam kegiatan pabrik sangat rendah. Kalaupun membuka usaha, pada umumnya kurang berhasil karena tidak terbiasa berdagang”.* Sebagian yang memiliki modal keuangan dari hasil menjual tanah, tidak ulet dalam menjalankan usaha dan hanya mengandalkan aspek-aspek keberuntungan yang tidak terduga. Namun dalam urusan jual beli tanah dan perumahan, orang setempat lumayan pintar memainkan harga tanah, sewa rumah atau pemondokan yang berkembang pesat di kawasan lokasi industri.

Sebagaimana penilaian ataupun anggapan dari kelompok etnik pendatang yang ada desa, dalam urusan politik pedesaan, pada umumnya warga desa cenderung mengikuti Kepala Desa. Walaupun tidak mutlak seiring sejalan sebagaimana pendapat Informan X, Orang Madura yang sukses berbisnis di desa:

*“Pada Pemilu yang lalu (1992), orang desa ini sering mengikuti kegiatan kampanye dan sebelum berangkat ke kota untuk pawai, biasanya berkumpul di balai desa atau dimuka kantor kecamatan. Sekarang mereka juga sering menggunakan atribut pendukung partai yang berkuasa”.*

Hakikatnya, penduduk asli desa lokasi penelitian, dalam mengekspresikan dukungan politiknya dilakukan dengan terbuka, sehingga mudah diketahui pilihan partai politik dalam pemilu. Tentu saja ini berbeda dengan kebanyakan etnik pendatang, yang tidak secara ekspresif menunjukkan dukungannya terhadap partai politik yang berkompetisi dalam pemilu tahun 1992.

Jika dibandingkan dengan Orang Sunda penduduk asli desa, Orang Jawa lebih banyak relasi dengan berbagai kelompok etnik yang ada. Dalam pergaulan di masyarakat cukup terbuka, walaupun adakalanya persoalan tertentu tidak dinyatakan secara terus terang, tetapi dengan perumpamaan dan bahasa isyarat sebagaimana karakteristik budaya konteks tinggi. Dengan kata lain, apa yang dinyatakan secara verbal dalam komunikasi, tidak selalu sejalan dengan makna-makna denotatif tetapi lebih merujuk kepada makna yang tersirat. Dalam hal perekonomian, pada umumnya memiliki tingkatan sosial-ekonomi yang sedang-sedang saja keberhasilannya, kecuali yang mempunyai penghasilan sampingan. Dijelaskan oleh Informan Z sebagai sumber informasi yang memiliki jaringan luas menyatakan: *"Mereka yang berhasil adalah mereka yang bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil, selanjutnya membuka usaha sampingan untuk menunjang ekonominya, dengan demikian mereka mempunyai penghasilan ganda"*.

Karena kedekatannya dengan berbagai kelompok masyarakat, termasuk mereka yang aktif dalam politik, maka memiliki aspirasi politik yang tersebar merata di Golongan Karya, Partai Demokrasi Indonesia maupun Partai Persatuan Pembangunan. Jadi bukan hanya pada satu partai politik yang berkuasa saja, dalam menyalurkan pilihan politiknya. Kendati demikian, mengingat hubungannya dengan para pemilik kekuasaan di desa tergolong kuat, maka kepala desa juga memiliki kecenderungan kuat untuk bekerjasama dengan sejumlah orang dari etnik Jawa dalam rangka mencari dukungan bagi partai politik yang berkuasa.

Frekuensi interaksi dan komunikasi orang-orang Sumatera Barat dengan warga desa tidak terlalu tinggi, tetapi pada umumnya akrab dengan para pemuda desa yang berprofesi sebagai pekerja informal, yang setiap hari berkumpul di sekitar tempat usaha Orang Minang. Kios, rumah makan, toko dan tempat berdagang Orang Padang yang buka hingga larut atau dini hari dijadikan salah satu lokasi warga desa berkumpul membicarakan berbagai hal yang ada di desa maupun di luar desa. Pernyataan Informan X yang ramah terhadap warga desa, mengungkapkan *"Orang Minangkabau akrab bergaul dengan anak-anak muda yang biasa bergerombol di simpang desa salah satu pusat keramaian di jalan negara"*. Para pemuda tersebut secara tidak langsung memberikan keamanan kepada para pemilik usaha, sehingga Orang Minangkabau bersikap baik secara moral maupun material. Dalam kehidupan politik yang bisa dilihat di desa, Orang Minang tidak pernah ikut campur dalam urusan politik, walaupun masyarakat desa lokasi penelitian meyakini bahwa pendatang yang umumnya dari Sumatera Barat itu memiliki pilihan politik sebagaimana warga desa lainnya.

Dalam pandangan Orang Madura, Orang Batak mempunyai hubungan baik dengan masyarakat desa pada umumnya. Ini tampak ketika mereka diundang secara resmi dalam sebuah perhelatan seperti perkawinan, menyambut kelahiran bayi dan berbagai acara di pedesaan, biasanya ibu rumah tangga dari kelompok etnik Batak akan menyempatkan hadir. Sedangkan laki-laki cenderung untuk mengurus usahanya sepanjang hari. Dikemukakan oleh Informan Z: *“Setiap hari di tempat usaha milik Orang Batak, banyak berkumpul warga desa dari berbagai etnik dan tidak pernah ada masalah besar”*. Situasi tersebut menunjukkan bahwa, hubungan antar kelompok etnik yang ada di desa berjalan dengan baik. Mereka dapat bergaul dengan siapa saja, tanpa melihat identitas kesukuan. Kalaupun memang ada acara ritual yang dilakukan untuk komunitasnya sendiri tetapi tidak mengganggu relasi-relasi antar etnik yang sudah terbangun. Memang dalam perspektif masyarakat agraris, hubungan dengan orang luar kelompoknya tidak dapat serta merta berjalan dengan mulus, tetapi melalui proses yang cukup panjang, sebagaimana pendapat Redfield (dalam Rogers, 1969: 26), bahwa, “kultur masyarakat agraris, kurang dapat menerima dan mempercayai orang diluar kelompoknya”. Tetapi desa kawasan pantai utara Jawa Barat ini sedang mengalami perubahan akibat munculnya pabrik-pabrik di desa yang membawa nilai-nilai komersialisasi dan budaya material, sehingga masyarakatpun mengalami perubahan dalam pola pikir kehidupan sehari-hari.

Perubahan yang terjadi di desa mendorong tumbuhnya sektor-sektor ekonomi non formal di luar pertanian yang sesungguhnya menjadi sumber kekuatan kesejahteraan desa. Warga asli desa maupun pendatang dari berbagai daerah, membuka usaha untuk memenuhi kebutuhan para pekerja pabrik. Orang yang memiliki keuletan dalam berwirausaha ini, juga mewarnai dinamika perekonomian desa. Mereka pada umumnya berdagang atau membuka usaha dengan kerja keras untuk mencapai sukses. Kesibukan bekerja yang seolah-olah tanpa istirahat karena sejumlah kios buka 24 jam, berdampak terhadap minimnya aktivitas politik di pedesaan. Memang keterlibatan ataupun partisipasi secara fisik dalam politik praktis di desa tidak pernah kelihatan. Tampaknya mereka juga tidak mau berurusan dengan masalah politik di desa. Namun bukan berarti sama sekali tidak memiliki aspirasi politik, sebab masalah sikap politik dan pilihan partai politik hanya dibicarakan di lingkungan komunitasnya saja.





# BAB 8

## KEPEMIMPINAN DAN EKSPRESI MASYARAKAT

---

### A. Kekuasaan Komunikasi Sebagai Agen Modernisasi

Elite memiliki kekuasaan komunikasi yang sangat besar di pedesaan, karena mampu untuk menyebarkan pesan-pesan dalam berbagai kesempatan formal maupun non formal di masyarakat. Dengan kata lain, elite berjumlah sangat sedikit, tetapi mempunyai pengaruh besar dalam komunikasi dengan rakyat dalam konteks piramida kekuatan politik. Di antara sejumlah elite pedesaan, kepala desa sebagai elite politik dalam bingkai formal, mempunyai posisi strategis sebagai poros komunikasi pedesaan yang interaktif maupun linier. Namun dalam situasi tertentu, ketika struktur kekuatan politik di atasnya menghendaki pencapaian kepentingan dalam perspektif pemerintah, maka kepala desa akan menggunakan komunikasi top-down yang memerintah dan mengontrol dengan ketat kehidupan sosial, ekonomi dan politik warga desa.

Memang kepemimpinan kepala desa, harus difokuskan kepada pencapaian kesejahteraan ke arah yang lebih baik sebagaimana konsepsi modernisasi. Pada konteks ini, sebagai orang nomor satu di desa, sudah selayaknya jika kepala desa tampil dalam posisi agen modernisasi. Hakekatnya, jika berpijak kepada tugas dan tanggung jawab yang melekat, perubahan ke arah lebih baik menyangkut bidang kegiatan sosial, ekonomi dan politik. Kegiatan sosial mencakup pembinaan masyarakat terhadap generasi muda, kerohanian, pendidikan, olah raga dan kesenian. Bidang ekonomi atau perekonomian masyarakat, mencakup peningkatan produktivitas pertanian dan upaya-upaya yang menunjang sektor industri dan perdagangan. Sedangkan kegiatan bidang politik adalah tindakan kepala desa dalam hubungannya dengan pemilihan umum dan praktek politik yang berupa penggunaan kekuasaan untuk kepentingan politik praktis sebagai pendukung pemerintah.

Informasi berdasarkan pendapat dari penduduk asli etnik Sunda maupun kelompok etnik pendatang yang terdiri dari etnik Jawa, Minangkabau, Batak dan Madura, mempunyai berbagai macam variasi tentang pola-pola kepemimpinan kepala desa dalam

memodernisir keadaan desa dan masyarakat. Pendapat yang dikemukakan masyarakat tidak terlepas dari pengertian pendapat yang dikemukakan pada bagian terdahulu, erat berhubungan dengan persepsi. (Harsono Suwardi, 1993). Sedangkan persepsi sebagai salah satu unsur sosial budaya selain *worldview* dan organisasi sosial, terdiri dari kepercayaan (*belief*), nilai (*value*) dan sikap (*attitude*). (Samovar, Porter, dan Jain 1988)

## B. Mengkritisi Peran Penggerak Perubahan

Kepala Desa sebagai agen perubahan untuk menciptakan kesejahteraan masyarakat mencakup berbagai kegiatan yang berkaitan dengan pembinaan generasi muda sebagai tunas bangsa. Tidak mudah melakukan perubahan, mengingat nilai sosial kultural sudah melekat di masyarakat secara turun temurun. Mereka sulit untuk menerima hal baru yang berpotensi mengganggu kebiasaan yang dinilai sudah memberikan kebebasan, kenyamanan dan harmoni dalam kehidupan desa.

Dalam masalah pembinaan generasi muda, terdapat organisasi tingkat desa di bawah kendali pemerintahan desa yaitu Karang Taruna Tunas Karya. Sebagai sub-ordinat kekuatan politik pemerintah di pedesaan Karang Taruna diandalkan untuk mendukung kebijakan pemerintah maupun kekuatan politik yang berkuasa. Karang Taruna Tunas Karya diketuai oleh Orang Jawa kepercayaan Kepala Desa. Berdasarkan pendapat Informan II yang berumur 35 tahun dan sering bepergian ke kota-kota besar di Jawa Barat, menyatakan:

*“Orang kepercayaan Kepala Desa inilah yang selalu tampil dimuka umum dalam kegiatan-kegiatan kepemudaan pedesaan. Kepala Desa dianggap sudah terlalu berumur untuk selalu mengikuti kegiatan kepemudaan, bahkan hanya sekali-kali tampil dalam memberikan sambutan-sambutan untuk kegiatan yang dilakukan di desa”.*

Sedangkan Informan VI menegaskan: *“Pidato Kepala Desa tidak berbeda jauh dengan yang sering diucapkan ditempat lain”.* Pesan-pesan klise yang disampaikan merujuk kepada atasan maupun penguasa politik dalam skala nasional tidak serta merta dipercaya oleh masyarakat. Terlebih lagi sebagai agen perubahan, Kepala Desa dianggap kurang maksimal dalam upaya meningkatkan kesejahteraan sosial di lingkungan mereka dan masyarakat pada umumnya.

Keterlibatan dalam membina generasi muda yang sangat kurang, bukan berarti Kepala Desa sudah memasuki pada tahap hubungan terminal (Rogers dan Shoemaker, 1983:316) yaitu agen pembaharu yang telah berhasil mengembangkan kliennya sebagai agen pembaharuan, tetapi semata-mata kurang tertarik berurusan dengan masalah kepemudaan.

Kendati demikian dalam posisi sebagai agen modernisasi kegiatan kerohanian dan kerukunan beragama, keterlibatan Kepala Desa sangat menonjol, khususnya dilihat secara fisik partisipasinya dalam setiap kegiatan kerohanian. Kepala Desa merintis

pendirian beberapa madrasah dan majelis taklim di desa, walaupun keterlibatannya dalam masalah substansial yang berhubungan dengan kaidah-kaidah keagamaan masih dinilai belum sepenuhnya dapat dilakukan. Menyangkut pembinaan kerukunan umat beragama, Kepala Desa, memiliki posisi sebagai agen pembaharuan. Dalam pandangan teoritis, agen pembaharuan termasuk orang yang “berupaya untuk berkomunikasi memberikan pengertian pentingnya hidup berdampingan dengan pemeluk agama lain, untuk memelihara program pembaharuan dan mencegahnya dari kemacetan”. (Rogers dan Shoemaker, 1983:315). Kekhawatiran yang cukup beralasan karena masyarakat desa lokasi penelitian dapat dikategorikan kuat dalam menjalankan agama dan kepercayaannya. Ini sejalan dengan pendapat Geertz, bahwa umumnya masyarakat pantai kuat dalam menjalankan ajaran agama Islam (Hildred Geertz, 1977:4).

Dalam urusan pendidikan, Kepala Desa adalah orang yang layak dianggap sebagai agen modernisasi karena berusaha untuk meningkatkan jumlah warga desa agar berpendidikan layak dan juga menghilangkan buta huruf di pedesaan. Berdasarkan pendapat Informan IV, seorang guru desa yang seringkali dijadikan rujukan warga:

*“Upaya membantu kelancaran pembangunan Sekolah Dasar di desa, menunjukkan bahwa Kepala Desa sudah berupaya menjadikan masyarakat terdidik, tetapi sayang orang asli desa setempat tetap saja berpendidikan sebatas Sekolah Dasar yang tidak mampu memperoleh penghasilan memadai jika mereka bekerja di perusahaan”.*

Komitmennya terhadap upaya mengembangkan pendidikan, kepala desa sebagai agen perubahan mendirikan Taman Kanak-Kanak untuk mengantisipasi kebutuhan para pendatang yang bekerja di pabrik. Namun persoalannya orang setempat jarang yang bersekolah di TK tersebut, sebab pada umumnya mereka langsung masuk Sekolah Dasar. Ada berbagai alasan yang dikemukakan, dari masalah pembiayaan yang tidak terjangkau, aspek kepraktisan, manfaat yang ditafsirkan sepihak, dan longgarnya persyaratan untuk masuk SD tidak diperlukan surat tamat di TK.

Sama halnya perhatian terhadap pendidikan, dalam penilaian masyarakat penduduk asli desa etnik Sunda, Kepala Desa aktif membina dan memimpin kegiatan-kegiatan olah raga. Karena berpedoman bahwa olah raga adalah sebagai salah satu sarana interaksi dan komunikasi berbagai kelompok etnik yang ada di wilayahnya. Perhatian terhadap olah raga yang besar dapat dibuktikan dengan keberadaan satu-satunya lapangan sepak bola di kecamatan berada di wilayah desa lokasi penelitian. Bahkan salah satu lapangan bulutangkis yang terdapat di desa tersebut adalah terbaik di seluruh kecamatan. Perhatian yang besar terhadap olah raga terwujud dalam penyelenggaraan berbagai kejuaraan tingkat desa maupun tingkat kecamatan. Karena itu tidak mengherankan jika kejuaraan sepak bola tingkat kabupaten pun menggunakan lapangan sepakbola di desa ini. Kompetisi sepak bola dan bola voli antar klub di desa diselenggarakan secara rutin setiap enam bulan. Perhelatan olah raga ini mampu mencairkan hubungan antar kelompok-kelompok

etnik yang berbeda di desa yang mengalami perubahan akibat industrialisasi yang ada disekelilingnya.

Perubahan yang merambah desa, tentu saja berdampak pula terhadap keberadaan kesenian daerah yang sesungguhnya sebagai salah satu penanda kekuatan sosial kultural desa. Namun tampaknya, sikap Kepala Desa terhadap kesenian tradisional berdasarkan pendapat masyarakat desa etnik Sunda kurang memadai. Perhatian Kepala Desa dan upaya untuk meningkatkan kehidupan kesenian khususnya, kesenian tradisional dinilai masih kurang maksimal kalau tidak mau dikatakan kurang konsisten. Padahal justru kepala desa sering memanfaatkan kesenian, sebagai salah satu media komunikasi untuk menyampaikan pesan-pesan sosial, ekonomi maupun politik yang mendukung kebijakan pemerintah dan politik yang berkuasa. Informan VII buruh tani, yang juga pedagang asongan jika tidak ada pekerjaan di sawah, "*Kami kurang senang jika kesenian selalu diisi dengan pidato-pidato pembangunan*". Masyarakat Sunda lokasi penelitian di pantai utara Kabupaten Karawang memang berpandangan bahwa, kesenian adalah hiburan tanpa filosofi yang bermacam-macam. Jadi kalau pertunjukan kesenian disisipi dengan hal-hal persuasif berisi anjuran pemerintah yang berulang-ulang, masyarakat cenderung melakukan penolakan. Walaupun tentu saja tidak ditunjukkan secara frontal, tetapi dengan pengabaian terhadap makna pidato, atau tidak mendengarkan apa yang dikemukakan oleh orang nomor satu di desa ini.

Sejalan dengan pandangan tersebut adalah, apa yang dikemukakan oleh Ayib Rosidi (dalam Ekadjati, 1984:147) menyebutkan bahwa, "Orang Sunda mempunyai banyak macam ragam kesenian yang menjadi wadah untuk mengekspresikan diri sekaligus wadah untuk menghibur diri". Disini kepala desa lebih mengekspresikan kesenian untuk kepentingan pembangunan yang diprogramkan oleh pemerintah daripada kesenian sebagai ekspresi untuk membentarkan hiburan kepada warga desa.

Memang hakekatnya, kepala desa mempergunakan semua saluran komunikasi termasuk media tradisional, untuk menyampaikan pesan pembangunan. Pendapat Eapen dan Lent (dalam Jahi, 1988:104) bahwa, "media tradisional atau kesenian tradisional dapat berfungsi sebagai pembawa pesan yang lebih baik daripada media lainnya dalam berbagai aspek pembangunan sosial, ekonomi dan budaya". Dengan demikian kesenian yang dimanfaatkan untuk kepentingan politik pemerintah di pedesaan bukan hal yang mengherankan. Lebih dari itu, desa-desa yang mengalami perubahan akibat industrialisasi sudah lazim jika didalamnya terdapat kepentingan politik pemerintah yang sangat besar.

Industrialisasi yang merambah ke desa, juga ikut andil dalam menciptakan perilaku maupun pola kepemimpinan yang lebih berorientasi kepada produksi dengan skala materi lebih besar dibandingkan dengan orientasi kepada hubungan kemanusiaan yang sering terjadi di pedesaan. Karena itu, sudah lazim jika kepentingan berbagai entitas yang terkait dengan industri berupaya memperoleh kemudahan dan dukungan dari Kepala Desa. Walaupun sesungguhnya tidak menguntungkan masyarakat, khususnya

petani yang tersebar di seluruh penjuru pedesaan. Mereka yang memiliki kepedulian terhadap harmoni kehidupan sosial ekonomi desa selalu mengungkapkan kesedihannya ketika melihat tanah-tanah pertanian yang berubah fungsi menjadi pabrik-pabrik sebagai konsekuensi industrialisasi yang dicangkakan oleh pemerintah.

Beroperasinya pabrik di desa, tidak jarang menimbulkan perselisihan ataupun konflik horizontal maupun vertikal di masyarakat. Perbedaan kepentingan antara masyarakat desa dengan industri meledak menjadi demonstrasi yang cukup besar untuk ukuran di pedesaan pada tahun 1994 yang berlangsung hingga beberapa kali. Pendapat Informan IV, aktivis Majelis Ulama Desa yang disegani karena objektif dalam menanggapi permasalahan mengungkapkan:

*“Keadaan yang memicu timbulnya demonstrasi adalah pendirian pabrik pasir batu yang pada saat pembebasan tanah warga desa disebut-sebutkan akan digunakan sebagai lahan budi daya perikanan darat. Sesungguhnya sebagian besar masyarakat pada waktu itu kurang percaya dan enggan menjual tanahnya”.*

Kecurigaan merekapun akhirnya terbukti, seperti setelah membaca surat kabar, bahwa perusahaan yang akan didirikan di desa lokasi penelitian bukan budi daya perikanan darat, tetapi perusahaan penyedotan pasir dan batu. Pendapat yang senada dikemukakan pula oleh Informan I dan Informan IV: *“Memang tidak semua petani mengetahui dari media massa, tetapi mereka memperoleh informasi dari orang-orang yang dihormati di desa”.* Hal senada dikemukakan juga oleh informan lain yang menyatakan, memperoleh kabar pendirian pabrik penyedotan pasir dan batu dari pemuka desa lokasi penelitian yang dihormati. Pernyataan ini sesuai dengan model *two step flow* model yaitu tahap pertama, dari sumber informasi ke pemuka pendapat umumnya merupakan pengalihan informasi; tahap kedua dari pemuka pendapat kepada pengikutnya merupakan penyebaran pengaruh. (Everett M. Rogers, 1973).

Berdasarkan penjelasan tersebut, demonstrasi di desa antara lain berhubungan dengan komunikasi dua tahap, komunikasi banyak tahap (*multi step flow*) dan komunikasi satu arah (*hypodermic needle model*) yaitu media massa mempunyai pengaruh langsung, segera dan sangat menentukan terhadap khalayak. (Elihu Katz, 1973). Terlebih lagi dalam situasi yang memanas di desa lokasi penelitian, akibat aparat pemerintah cenderung memberikan perlindungan kepada pendirian pabrik, maka kebutuhan tentang kejelasan informasi juga semakin besar, sebagaimana Ball-Rokeach dan DeFleur, bahwa “media memasok informasi yang dibutuhkan dalam kondisi ketidak stabilan, perubahan dan konflik sosial” (Dan Nimmo, 1989:176)

Dalam kompleksitas masuknya industrilaisasi di pedesaan, masalah perekonomian masyarakat seperti pembangunan di sektor pertanian, kepala desa sebagai agen pembaharuan dianggap masih kurang menaruh perhatian besar. Pendapat Informan I: *“Kepala desa kurang memperhatikan kelembagaan pertanian, seperti Kelompok Tani,*

*Perkumpulan Petani Pengguna Air (P3A) dan Kredit Usaha tani (KUT)*”. Padahal lembaga-lembaga itu dimaksudkan untuk meningkatkan hasil pertanian yang semakin merosot. Berdasarkan Laporan Kepala Desa Tahun 1995, sektor pertanian, palawija serta sayuran sejak tahun 1988, tidak pernah mengalami kenaikan yang berarti. Bahkan untuk palawija tertentu seperti kacang hijau, kacang panjang dan sayuran misalnya mentimun dan tomat mengalami penurunan terus-menerus yang menjadikan warga desa mengalami kerugian.

Padahal, di pihak lain, perhatian penduduk asli etnik Sunda terhadap pertanian, ladang dan perkebunan sangat besar. Walaupun sudah banyak yang beralih profesi sebagai buruh pabrik, buruh bangunan, pedagang asongan, pegawai kantor perusahaan dan lain-lain, karena kultur asli mereka sebagai petani, sebagian dari mereka masih mempunyai tanah pertanian yang produktif. Sikap ini terkait dengan falsafah Orang Sunda:

*“Bertani merupakan adat kebiasaan di desa yang bukan hanya menuju kepada kekayaan, tetapi pemeliharaan terhadap nilai-nilai kebaikan yang terdapat dalam hakekat pertanian: oleh karena itu walaupun sudah bekerja menjadi pegawai, sawah peninggalan akan dipelihara dengan baik. (Mustapa 1985: 91-92).*

Sedangkan Kusnaka Adimihardja (dalam Ekadjati, 1984:172) menyatakan bahwa, “bagi Orang Sunda pertanian bukan saja untuk menghasilkan makanan, tetapi sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari kebudayaan”. Ada ikatan sosiologis dan historis terhadap pertanian bagi warga desa meskipun lingkungan sekitarnya membawa nilai-nilai baru yang mengarah kepada pengabaian pertanian dan mengunggulkan industrialisasi. Dalam perpektif warga setempat yang agraris ini, Kepala Desa dipandang sering merugikan pertanian dalam kaitannya dengan munculnya industri di desa lokasi penelitian. Informan I yang berwibawa, disegani dan sebagai pemuka pendapat yang sangat dihormati oleh warga desa mengemukakan:

*“Kepala Desa mempunyai sikap mendua, di satu sisi berpihak kepada petani dan menampung semua aspirasinya, tetapi dalam rapat desa dan forum tertentu kurang memperhatikan kepentingan petani dan lebih memperhatikan pihak lain yang sebenarnya merugikan pertanian”.*

Peran Kepala Desa sebagai agen modernisasi tidak tampak dalam permasalahan tersebut, sebab sebagaimana pendapat Rogers dan Shoemaker (1983), semestinya adalah sebagai pekerja profesional yang berusaha menjembatani dua sistem sosial berbeda untuk mencapai perubahan yang lebih baik dalam mencapai kesejahteraan. Selain itu, Kepala Desa belum berperan dalam urusan perdagangan di desa, padahal penduduk asli desa lokasi penelitian sangat mengharapkan perhatian yang besar dalam hal memberikan kegiatan-kegiatan yang dapat menunjang perdagangan di desa. Kepala Desa sangat kurang dalam memberikan jalan kepada pedagang kecil yang ingin berkembang tetapi tidak mempunyai modal. Berbagai macam kredit untuk pedagang kecil, informasinya jarang sampai kepada masyarakat yang membutuhkan, atau diumumkan dalam pertemuan di

desa yang dilakukan secara rutin. Akibatnya masalah pemberian modal kepada warga desa tidak jelas dan sebagai pedagang kecil, mereka berhutang kepada perorangan dengan bunga yang sangat tinggi.

Dalam kehidupan politik, paling tidak masalah himbauan dalam kegiatan Pemilihan umum, Kepala Desa sangat terbuka dan membebaskan warganya untuk mengaspirasikan suaranya dalam pilihannya sendiri, Informan III menjelaskan: *“Masyarakat tidak dihambat untuk ikut dalam kampanye politik”*. Suasana kampanye Pemilihan Umum tahun 1992 memang tidak terjadi konflik antar pendukung kontestan. *“Kampanye adalah tindakan komunikasi untuk mengarahkan agar pemilih memberikan suara dalam pemilihan umum, dan merupakan suatu rangkaian pertukaran yang panjang dan kadang-kadang memanas”*. (Dan Nimmo, 1989:198).

Sikap Kepala Desa ini, berakibat pada perolehan suara Golkar dalam pemilu 1992 adalah 68% suara. Jumlah yang relatif rendah untuk ukuran pedesaan di tingkat kabupaten Jawa Barat yang rata-rata mendapatkan suara 75% (penjelasan aparat Pemerintah Kabupaten Karawang). Kendati demikian, untuk Pemilihan Umum Tahun 1997, Kepala Desa menargetkan perolehan suara Golkar adalah 90%. (Laporan Kepala Desa Th.1996). Namun kenyataannya, masyarakat menganggap sampai saat pendaftaran pemilihan untuk Pemilu 1997, Kepala Desa bersikap seperti Pemilu 1992, kurang gencar mengkampanyekan politik pilihannya. Karena itu sejumlah masyarakat mengungkapkan bahwa Kepala Desa teramat percaya bahwa pilihan masyarakat akan merujuk kepada partai pemerintah yang berkuasa.

Esensinya, dalam praktek politik Kepala Desa tidak membeda-bedakan; bahkan sementara orang menganggap sangat demokratis, tidak ada seorangpun yang dihambat dalam urusan-urusan di Desa karena tidak sejalan dengan aspirasi politiknya. Orang-orang yang pernah berperan sebagai rival dalam pemilihan Kepala Desa tahun 1988, Kepala Desa tetap melakukan komunikasi dan kerjasama dalam kegiatan di desa

## **C. Kredibilitas Tokoh Dalam Bingkai Pluralisme**

### **1. Keterbukaan dalam Komunikasi Sebagai Kunci Kemajemukan**

Masyarakat Jawa di desa lokasi penelitian pada umumnya menyatakan Kepala Desa dalam membina masalah kepemudaan cukup baik. Tokoh masyarakat di lingkungan Orang Jawa di desa lokasi penelitian berpendapat: *“Banyak kegiatan pemuda adalah hasil pemikiran Kepala Desa, seperti penyelenggaraan pertandingan olah raga antara Rukun Warga, Rukun Tetangga maupun Dusun”*. Tidak dapat disangkal, Kepala Desa selalu menyebutkan olah raga dapat mempersatukan kelompok-kelompok etnik yang ada di desa dan dapat menghilangkan berbagai perbedaan sosial, budaya, ekonomi maupun politik.



Bagi Orang Jawa di desa lokasi penelitian, Kepala Desa bersikap terbuka dalam membina generasi muda, Informan B yang dituakan oleh orang-orang Jawa di desa kawasan pantura ini menyatakan: *“Ketua Karang Taruna desa ini adalah Orang Jawa pemilihan Kepala Desa karena dianggap mempunyai kemampuan untuk memimpin generasi muda dari berbagai kelompok etnik”*. Hakikatnya, kelompok etnik Jawa di desa lokasi penelitian cenderung menilai positif aktivitas kepala desa dalam kegiatan kepemudaan.

Sebagaimana peranannya dalam pembinaan generasi muda, maka kepemimpinan di bidang kerohanian juga berjalan dinamik, Orang Jawa sebagai panutan warga desa, Informan B menyatakan: *“Kegiatan pengajian dan ceramah agama frekuensinya meningkat dan tersebar di seluruh penjuru, kegiatan kerohanian dimanfaatkan Kepala Desa sebagai saluran penyebaran informasi dari pemerintah”*. Pendapat ini tidak jauh berbeda dengan yang dikemukakan masyarakat desa pada umumnya yang menggarisbawahi tentang penyebaran informasi untuk mendukung kebijakan pemerintah selalu muncul dalam berbagai perhelatan di desa.

Sementara itu, upaya untuk meningkatkan pendidikan bagi masyarakat desa di lokasi penelitian, dinilai oleh kelompok etnik Jawa masih perlu ditingkatkan. Semua informan tampaknya sepakat tentang hal itu. Informan C berpendapat: *“Rata-rata penduduk asli etnik Sunda di lokasi penelitian masih belum memadai. Bahkan masih ada yang buta huruf”*. Padahal kemampuan baca tulis merupakan aspek penting dalam modernisasi. Pernyataan yang urgensinya tinggi dikaitkan dengan pembaharuan di desa adalah pendapat Rogers dan Svenning (1969:70), bahwa *“literacy (kemampuan baca tulis) sangat penting dalam menunjang perubahan, karena dapat membaca koran yang wawasannya menjadi luas dan mempunyai sikap lebih bisa menerima modernisasi”*. Perubahan bisa dicapai dengan baik jika masyarakat mampu membaca dan menulis untuk mempermudah dalam menerima pesan-pesan pembangunan.

Jika perhatian masyarakat terhadap pendidikan masih sangat kurang, tidak demikian dengan kegiatan olah raga. Dalam menangani kegiatan olah raga Kepala Desa sangat menaruh perhatian yang besar, karena olah raga mempunyai potensi yang besar untuk menciptakan keakraban sesama warga. Ketua Saksi Olah Raga dalam struktur Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa (LKMD) adalah Orang Jawa, yang dianggap mampu mengaktifkan kegiatan olah raga oleh Kepala Desa. Kerjasama diantara keduanya sangat bagus, sehingga kegiatan olah raga sangat bergairah dan mempererat hubungan sesama warga. Namun sayangnya, kegairahan serupa tidak terjadi dalam pembinaan kesenian tradisional yang sesungguhnya sebagai karakteristik budaya masyarakat. Pembinaan kesenian yang dilakukan oleh Kepala Desa terkesan kurang memperdulikan kesenian tradisional yang berjuang untuk bertahan dalam kondisi perubahan sosial yang sangat pesat. *“Kepala Desa tidak berupaya untuk membantu kesenian tradisional yang kondisinya sangat memprihatinkan dan menjelang punah tersaing jenis hiburan modern”* (Informan



B). Jenis hiburan modern yang dimaksudkan adalah film layar tancap, karaoke keliling dan Video keliling yang berkembang pesat di desa lokasi penelitian dan sekitarnya.

Orang-orang Jawa di nilai Kepala Desa mempunyai konsistensi peran sebagai agen perubahan dalam menunjang industrialisasi yang merambah daerahnya. Himbuan untuk memberikan tempat pemondokan bagi pendatang khususnya karyawan industri, mengusahakan sambungan telepon umum disepular desa, kemudahan pemberian berbagai surat keterangan untuk bekerja di pabrik yang berlokasi di desa lokasi penelitian, menunjukkan semangat perubahan ke arah industrialisasi dari Kepala Desa dalam menyasati kondisi perkembangan desa.

Berbeda dengan perhatiannya pada industrialisasi yang sangat besar, sebaliknya Kepala Desa kurang melakukan pembinaan dalam peningkatan produksi pertanian, walaupun dalam interaksi sosialnya dengan para petani sangat baik. Dalam aspek lain, kepedulian terhadap perdagangan dinamika usaha kecil di pedesaan, orang nomor satu di desa ini memang tidak pernah mempersulit orang yang membuka usaha perdagangan maupun berwiraswasta. Pemberian surat ijin usaha dan sejenisnya cukup lancar, bahkan sering memberikan dukungan moral kepada warga yang berbisnis kecil-kecilan.

Disisi lain, Kepala Desa dinilai tidak banyak mengkomunikasikan masalah-masalah politik dengan warga desa. Dalam pemilu tahun 1997, hanya menghimbau supaya pendaftaran pemilih berjalan lancar tanpa ada kampanye terselubung. Karena itu wajar jika Kepala Desa diasumsikan cukup demokratis menghadapi orang yang bukan kelompok politiknya. Terlebih lagi, meskipun berbeda warga desa berbeda politik, namun Kepala Desa tidak pernah menghambat apabila berurusan dengan Pemerintahan Desa. (Hasil wawancara dengan Informan B). Perilaku orang nomor satu di desa itu memiliki substansi demokratis sebagaimana pendapat Berger (1990: 108), bahwa “perlakuan yang demokratis adalah perlakuan yang tidak mengandung unsur memaksa” dalam hubungan antara pemilik kekuasaan dan masyarakat.

Memang tidak dapat dipungkiri, dalam praktek politik didesa, walaupun Kepala Desa mementingkan orang-orang yang mempunyai aspirasi sama untuk mengisi ataupun aktif di berbagai lembaga pedesaan sebagai sub-ordinat kekuatan politik negara, tetapi bukan merupakan syarat yang mutlak di desa ini. Sebab secara faktual, ternyata ada orang-orang dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP) maupun Partai Demokrasi Indonesia (PDI) yang dilibatkan dalam Kegiatan-kegiatan desa. Misalnya di forum Lembaga Musyawarah Desa (LMD), Lembaga Ketahanan Mesyarakat Desa (LKMD), kelompok-kelompok kerja dalam Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK), kelompok Tani dan lain-lain institusi pedesaan yang sesungguhnya sebagai kepanjangan tangan dari pemerintah yang berkuasa.

## 2. Mendorong Perubahan Dengan Tindakan Positif

Dalam kegiatan pembinaan generasi muda, Kepala Desa kurang memperhatikan dan mengarahkan kegiatan pemuda. Dinamika kegiatan-kegiatan kepemudaan kurang diarahkan untuk meningkatkan keterampilan. Kegiatan pemuda hanyalah berkisar tentang peringatan ataupun perayaan berbagai hari besar nasional dan tingkat local urusan daerah setempat. Sedangkan usaha menciptakan kesejahteraan masyarakat seperti menggalakkan koperasi simpan pinjam yang telah direncanakan dan selalu muncul dalam retorika, ternyata sulit untuk diwujudkan dengan baik sesuai harapan masyarakat. (Hasil wawancara dengan Informan 1). Namun menyangkut kegiatan kerohanian, Kepala Desa sangat aktif jika dilihat dari frekuensi penyelenggaraannya yang dapat dilihat dari simbol-simbol fisik yang tampak di desa. Berdasarkan pendapat Informan 3, pekerja rajin yang taat beribadah: "Kegiatan kerohanian berjalan terus dan sejalan pula dengan tradisi pedesaan yang masih terus dipertahankan". Tidak dapat diabaikan, bahwa di lingkungan masyarakat tradisional, seringkali aspek religi bersentuhan dengan nilai-nilai harmoni pedesaan yang dipakai sebagai rujukan masyarakat dalam kehidupan sehari-hari.

Menurut pandangan Orang Minang, di desa kawasan industri ini, masalah pendidikan dianggap masih kurang memadai, karena tidak sejalan dengan perkembangan industri yang merambah pedesaan. Sebagian besar masyarakat hanya berpendidikan tingkat Sekolah Dasar, yang memiliki pendidikan kejuruan juga dirasakan masih sangat kurang. Padahal industri pedesaan membutuhkan banyak tenaga kerja dari sekolah kejuruan maupun pendidikan luar sekolah yang aplikatif. Di desa ini, hanya terdapat satu lembaga pendidikan yang memberikan Kursus Bahasa Inggris, Akuntansi dan Komputer. Tentu saja tidak sebanding dengan kebutuhan sejumlah perusahaan nasional maupun perusahaan asing yang membutuhkan ribuan karyawan, dan akan terus berkembang untuk tahun-tahun mendatang.

Kendati demikian, ternyata perhatian Kepala Desa sebagai agen modernisasi dalam pembinaan terhadap kesenian menunjukkan adanya upaya yang bersungguh-sungguh. Kepala Desa diakui mendorong perubahan dengan tindakan nyata untuk keopentingan bersama seluruh warga desa tanpa membeda-bedakan dari segi etnik maupun agama. Pertunjukan kesenian tradisional sering diadakan di seluruh penjuru desa, sebelum acara dimulai ada pidato panjang lebar tentang perlunya menjaga keamanan, hidup rukun dan serasi. (Hasil wawancara dengan Informan 2). Sejalan dengan itu, orang nomor satu di desa ini juga dinilai mampu menggairahkan hubungan antar etnik, melalui kegiatan olah raga. Kehidupan klub olah raga di desa sangat semarak. Dikemukakan oleh Informan 3; "*Kami orang Minang, mengenal orang-orang dari dusun lain juga karena menonton pertandingan sepak bola di dusun lain yang masih satu desa*". Hampir setiap hari di lapangan desa, tampak orang-orang yang bermain bola voli, sepak bola atau sekadar berkerumun untuk menyaksikan mereka yang sedang bermain voli atau sepak bola.

Dinamika olah raga di desa sangat semarak, hampir setiap hari ada berbagai kegiatan yang mampu menarik perhatian masyarakat setempat maupun warga pendatang yang bertempat tinggal ataupun bekerja di lokasi penelitian.

Perhatian yang besar terhadap olah raga, sejalan pula dengan upaya yang bersungguh-sungguh dalam membina urusan perdagangan desa dan kesejahteraan masyarakat. Kepala Desa memperhatikan sarana penunjang industrialisasi di desa yang berjalan amat pesat, dan mempunyai hubungan yang baik dengan karyawan perusahaan dari berbagai kelompok etnik yang sering membantu dalam berbagai urusan dengan pemerintah di Kecamatan maupun Kabupaten. Hubungan baik antara warga pendatang dengan Kepala Desa ini menjadi rujukan warga desa, dalam melakukan interaksi dan komunikasi dengan para pendatang yang bekerja di pabrik-pabrik demi untuk mencapai kesejahteraan.

Sebagai upaya meningkatkan taraf hidup, Kepala Desa yang notabene penduduk asli, tentu saja bergelut dengan masalah pertanian dan perkebunan. Karena itu memiliki kepedulian tinggi terhadap pembinaan petani dalam urusan peningkatan produksi pertanian, sayuran dan peternakan. Lembaga desa yang banyak dijumpai pada umumnya aktif menangani pertanian dengan cara-cara tradisional. Informan I yang memiliki pengalaman dan pengetahuan luas, berpendapat: "Saya tidak pernah membeli beras, sayuran, ikan dan ayam dari luar desa, semuanya langsung dari penduduk setempat, saya mempercayai mutunya, karena mereka menanganinya dengan baik". Dalam kapasitas sebagai kelompok pendatang, orang-orang Minang di desa lokasi penelitian merasa puas terhadap perlakuan Kepala Desa yang memberikan keleluasaan dalam kegiatan perekonomian, tidak mempersulit urusan perijinan di tingkat desa, pemberian jaminan keamanan untuk membuka usaha sepanjang hari bagi rumah makan dan warung-warung kelontong.

Sikap dan perilaku yang mengandung nilai positif dalam kegiatan perekonomian desa tersebut, sejalan pula dengan sikap politik Kepala Desa. Masyarakat Minangkabau berpendapat bahwa Kepala Desa layak disebut sebagai pemimpin yang menerapkan fungsi agen modernisasi dalam kehidupan politik di desa lokasi penelitian. Dalam kegiatan menjelang pemilu tahun 1997, pesan-pesan pemilik otoritas politik tertinggi di tingkat desa itu, hanya menghimbau untuk berpartisipasi dalam pemilu dan tidak pernah merekayasa pilihan partai politik rakyat dalam Pemilihan Umum. (Wawancara dengan informan 1). Tindakan ini merupakan praktek politik yang demokratis di desa. Walaupun mungkin masih seputar penampilan kulit luarnya saja dalam praktek politik pedesaan, tetapi setidaknya menunjukkan bahwa Kepala Desa bukan orang yang aktif untuk merekayasa kepentingan politik dari partai yang berkuasa. Padahal sebagai pemimpin formal yang mempunyai akses komunikasi kepada masyarakat, maka Kepala Desa setiap saat dapat mempengaruhi warga desa untuk mendukung salah satu kontestan pemilu.

### 3. Perspektif Perubahan Ke Arah yang Lebih Baik

Kelompok etnik Batak yang ada di desa lokasi penelitian, menganggap bahwa kegiatan sosial Kepala Desa dalam bentuk pembinaan pemuda tidak menghasilkan perubahan yang berarti. Masalah pemuda yang menonjol adalah masih banyaknya mereka yang menganggur dengan profesi yang tidak jelas. Tidak ada satupun kegiatan pemuda yang diorganisir oleh lembaga pemuda di desa yang menonjol dan berprestasi di tingkat Kabupaten. (Wawancara dengan Informan P).

Sedangkan dalam kegiatan kerohanian, khususnya dalam pembinaan kerukunan hidup beragama sangat bagus, tidak pernah muncul konflik dalam masyarakat yang disebabkan oleh masalah agama. Berulang kali Kepala Desa dalam pidatonya menyatakan untuk hidup berdampingan dengan agama, suku, dan kelompok lain-lain tanpa ada permusuhan, dan ini dipatuhi oleh masyarakat. (wawancara dengan Informan Z). Walaupun masyarakat asli desa lokasi penelitian di kawasan industri ini mempunyai keyakinan agama yang kuat dan tergolong rajin dalam menjalankan ritual keagamaan, tetapi berkat Kepala Desa, orang-orang Batak di desa ini yang pada umumnya beragama Kristen Protestan dapat berinteraksi dan berkomunikasi dengan masyarakat setempat secara baik dan bahkan tidak jarang yang sangat akrab. Dalam kacamata para pendatang dari kawasan Sumatera, pendidikan masyarakat di lokasi penelitian tidak ada peningkatan dari segi jumlah orang yang berpendidikan Perguruan Tinggi. Kepala Desa kurang perhatian terhadap warga desa yang tidak mampu untuk bersekolah. Orang di desa rata-rata berpendidikan rendah, sampai sekarang tidak ada yang berpendidikan sarjana. Banyak anak-anak yang tidak tamat Sekolah Dasar karena kesulitan ekonomi, sehingga mereka keluar dan bekerja sebagaimana dikemukakan oleh informan P.

Pembinaan olah raga yang dilakukan oleh orang nomor satu di desa ini tidak mengarah pada prestasi, dan mengandalkan sepenuhnya dana dari masyarakat dalam penyelenggaraan olah raga. Dalam pandangan Informan P, olah raga berjalan semarak tapi tidak ada prestasi yang dibanggakan di tingkat kabupaten. Untuk mengadakan kompetisi di desa, ditarik iuran-iuran yang pertanggung jawabannya tidak terbuka. Karena itu, sejumlah informan penelitian menyarankan mestinya iuran dibebankan saja dalam anggaran pedesaan yang terbuka, sehingga tidak perlu minta sumbangan dari masyarakat.

Dalam menangani masalah kesenian di lingkungannya, Kepala Desa kurang memiliki kreativitas untuk memelihara dan melestarikan kesenian asli penduduk yang sudah turun temurun. Ada asumsi dari para pendatang di desa ini, bahwa pembinaan kesenian tidak pernah dilakukan, dan kesenian tradisional berjalan apa adanya. Kehidupan kesenian tradisional biasa-biasa saja tidak ada yang menonjol, pertunjukan di luar kota atau di kota kabupaten juga jarang terdengar (Informa P). Namun ternyata ketidakmampuan dalam pembinaann kesenian desa tersebut, tidak terjadi dalam

menangani masuknya pabrik-pabrik ke pedesaan. Kepala Desa sangat memperhatikan industrialisasi yang merambah di desa. Sebagai penduduk asli etnik Sunda, Kepala Desa sangat memperhatikan perkembangan industri, dan berusaha merangkul semua pihak di masyarakat untuk mendukung kegiatan pabrik-pabrik yang beroperasi di pedesaan. Berkat industri, desa ini juga berkembang meskipun yang merasakan lebih banyak para pendatang dari berbagai kota di seluruh Indonesia. Kepala Desa memberi kemudahan pembebasan tanah warga desa, mengadakan pendekatan kepada pemimpin non formal supaya pembangunan industri berjalan lancar, memberikan jaminan keamanan terhadap gangguan yang kemungkinan timbul dari warga yang tidak setuju. (Wawancara dengan informan P).

Jika Kepala Desa tampil dalam sosok sebagai agen pembaharuan di bidang industri yang merambah desa, sebaliknya, dalam menangani pertanian tidak menggembirakan. Karena dinilai menghiraukan pentingnya pertanian sawah atau kebun. Kondisi ini menyebabkan para petani semakin tidak berdaya menghadapi perubahan yang begitu pesat di desanya. Sejalan dengan itu, Shanin (dalam Rogers, 1969:18) berpendapat, petani adalah mayoritas umat manusia tetapi sebagian besar miskin. Petani di lokasi penelitian tidak mempunyai pekerjaan lagi karena tanah pertanian semakin berkurang dijual untuk kepentingan pabrik (Informan Q). Kendati demikian, Kepala Desa berupaya untuk menghidupkan perdagangan di desa, dengan memberikan berbagai macam dukungan untuk memudahkan masyarakat membuka usaha, sebagaimana dituturkan oleh informan P, ketika berurusan dengan Bank untuk memperoleh pinjaman, peran Kepala Desa sangat membantu proses kelancaran keluarnya pinjaman.

Hakikatnya, tindakan Kepala Desa tidak selalu dalam penilaian positif oleh warga desa, sebab kadangkala juga tindakannya dianggap merugikan, tidak memberikan harapan ataupun mengabaikan kepentingan masyarakat desa. Dengan demikian tidak mengherankan jika dalam urusan politik, juga ada yang menilai positif maupun negatif khususnya ketika menghadapi pemilihan umum. Kepala Desa di lokasi penelitian tidak memperdulikan tentang perolehan suara bagi kelompok tertentu. Masyarakat dibebaskan untuk menyalurkan aspirasinya secara langsung, umum dan bebas rahasia. Slogan itu dilaksanakan dalam pemilu 1992, dan tetap dilaksanakan pada pemilu 1997 (Informan P). Walaupun demikian dalam menjalankan kekuasaannya, sebagai orang kuat di desa, cenderung mempercayai orang yang aspirasi politiknya sama untuk duduk dalam kepengurusan lembaga-lembaga desa, maupun dalam berbagai kepanitian di desa yang bersifat strategis dari sudut ekonomi maupun politik.

#### **4. Modernisasi dan Kehendak Perubahan Terencana**

Kegiatan-kegiatan sosial yang dilakukan Kepala Desa dalam pembinaan generasi muda tidak tampak menonjol, karena memang tidak diagendakan secara jelas dalam program pembangunan desa. Muncul sekelompok pemuda pengangguran yang tidak

memiliki pekerjaan rutin dan tindakan-tindakan yang tidak terarah. Informan Z yang disegani oleh Orang-orang Madura di desa lokasi penelitian menyatakan:

*“Pemuda cenderung dimanfaatkan untuk kepentingan upacara massal, tidak ada kegiatan yang terarah. Keadaan ini jelas tidak mengantisipasi perkembangan industri dan perdagangan desa yang akhirnya didominasi para pendatang”.*

Padahal pemuda di desa semestinya dapat dipakai sebagai kekuatan pemerintahan desa untuk ikut dalam upaya peningkatan kesejahteraan yang diatur dengan baik sesuai dengan apa yang selalu menjadi tema dari pidato-pidato para tokoh formal di kecamatan maupun di kabupaten.

Orang-orang dari kelompok etnik Madura, menilai bahwa peran kepemimpinan dari orang nomor satu di desa belum maksimal sesuai harapan warga desa, khususnya terkait kegiatan kerohanian lembag-lembaga formal keagamaan di pedesaan melibatkan masih sangat kurang melibatkan pendatang dari Madura. Padahal, dikemukakan oleh informan X sebagai pengusaha sukses menyebutkan, “Program keagamaan dari Majelis Taklim, Majelis Ulama Indonesia maupun seksi kerohanian dalam LKMD, sering diselenggarakan” Kegiatan keagamaan pada umumnya lebih banyak diikuti oleh penduduk asli dan orang-orang Jawa di desa lokasi penelitian. Sebagai kelompok etnik pendatang, Orang-orang Madura di desa ini sangat mengharapkan untuk dapat bersama-sama ikut dalam pembinaan kerohanian demi untuk menjaga hubungan baik dalam ikatan-ikatan religious.

Aspek positif yang pada umumnya melekat dalam peran Kepala Desa sebagai agen modernisasi adalah urusan pembinaan pendidikan di desa yang sangat menonjol. Jumlah sekolah maupun madrasah cukup banyak sehingga anak-anak di desa tidak perlu belajar keluar desa. Ditandaskan oleh Informan X: “Sekolah dan Madrasah di desa kawasan pantura ini cukup baik, sehingga kami menyekolahkan anak-anak disini, dan untuk tingkatan yang lebih tinggi, kami mengirimnya ke pesantren di daerah Madura”. Memang tidak jarang keluarga perantauan Madura ketika menyekolahkan anaknya yang beranjak dewasa cenderung di kampung halamannya. Dengan harapan, sebagai generasi muda harus mengenal nilai-nilai budaya dan lingkungan sosial, ekonomi dan politik daerah asalnya. Faktor ini membuat ikatan kekerabatan Orang Madura di desa perantauan lebih kuat persatuannya.

Sebagai warga pendatang yang menyatu dengan penduduk asli, perhatian terhadap kegiatan di pedesaan merupakan perwujudan dari upaya adaptasi dengan lingkungan sekitarnya. Karena itu, dalam kegiatan olah raga di pedesaan, mereka dapat memberikan penilaian terhadap peran Kepala Desa. Klub-klub olah raga ada di seluruh penjuru desa dan didukung sepenuhnya oleh aparaturnya atau perangkat pemerintahan desa. Kepala Desa sering terlibat dalam kegiatan olah raga dan biasanya memberikan sambutan-sambutan

yang isinya olah raga dapat meningkatkan semangat kekeluargaan diantara warga desa yang berasal dari berbagai daerah. (wawancara dengan Informan Z).

Pidato-pidato memberikan semangat kepada warga desa dilakukan pula dalam pentas-pentas kesenian tradisonal yang diadakan dalam bermacam-macam perayaan pedesaan. Panggung kesenian sering dimanfaatkan oleh Kepala Desa beserta aparat desa sebagai media untuk menyampaikan pesan pembangunan. Informan Y menyatakan:

*“Kepala Desa menyukai pertunjukan kesenian tradisonal dan sering ikut menonton di balai Desa dan tampak banyak ikut mengatur. Kepala Desa dimanapun juga selalu membawa pesan pembangunan untuk disebarkan kepada masyarakat yang penuh dengan muatan politis”.*

Memang ini sejalan dengan pendapat Lerner (1976), secara esensial retrorika-retrorika pembangunan mempunyai sifat ideologis dan informatoris. Pesan-pesan dari pemilik otoritas politik berusaha untuk menyisipkan pesan-pesan politik untuk menarik dukungan agar kekuasaan dan pengaruhnya tetap terjaga di masyarakat. Berdasarkan pendapat tersebut tindakan Kades dalam menyebarkan pesan pembangunan tersebut memang penuh dengan muatan politik yang perlu diikuti oleh warganya.

Upaya mengeksplorasi perkembangan wilayah yang pesat berkat kepemimpinannya menjadi hal yang umum dalam setiap komunikasi public Kepala Desa. Tidak dapat dikesampingkan, memang kelancaran pengurusan untuk keperluan pabrik pada tingkat pedesaan tidak mengalami hambatan, karena itu wajar saja jika sebagian pendatang juga berpendapat bahwa, aparatur pedesaan aktif membantu kelancaran beroperasinya industri-industri besar di lokasi penelitian desa kawasan pantai utara Kabupaten Karawang. Para pimpinan formal di desa mempunyai hubungan yang baik dengan kalangan industri. Banyak warga desa yang bekerja di pabrik karena di bantu oleh Kepala Desa, demikian pula orang-orang pabrik kalau mempunyai urusan di desa dipermudah. Mereka para pendatang dari Madura yang mempunyai matapencaharaian di desa merasa usahanya berkembang dengan baik, karena desa yang semakin ramai kedatangan orang-orang yang bekerja atau berhubungan dengan kegiatan pabrik. Menurut Peter L. Berger (1990: 46), bahwa transformasi kehidupan ataupun perubahan secara esensial juga tidak lepas dari aspek material sebagai inti modernisasi di berbagai kawasan. Di desa lokasi penelitian tampak sekali ada pergeseran perilaku masyarakat penduduk asli maupun pendatang dari berbagai kelompok etnik lebih berorientasi kepada aspek material dibandingkan dengan mempertahankan nilai-nilai sosial yang penuh dengan kebersamaan.

Kalaupun masih ada perhatian terhadap nilai sosial ekonomi yang melekat pada kehidupan pertanian, tetapi semakin terdesak oleh budaya kalkulatif dalam konteks material. Kendati demikian, dalam kondisi desa yang dikelilingi oleh industri, Kepala Desa sebagai agen modernisasi masih memilikikepedulian pada sektor agraris. Dampaknya

kebutuhan sebagian penduduk pada hasil pertanian dan perkebunan di desa terpenuhi, bahkan sisanya dapat dijual keluar desa. Informan Z yang disegani oleh Orang-orang Madura dan rajin membaca surat kabar berpendapat:

*“Kepala Desa aktif dalam membina petanian desa, penyuluhan, praktek penggunaan alat pertanian, perbaikan saluran air dan mengirimkan petani dalam berbagai pelatihan di kecamatan. Dengan demikian pertanian di desa hasilnya cukup menggembirakan dan dapat dijual keluar desa”.*

Warga Madura di lokasi penelitian merasa bahwa Kepala Desa beserta jajaran aparaturnya sangat aktif untuk menggairahkan dunia usaha. Para pimpinan formal di desa sering berbincang-bincang dalam suasana informal dengan memberikan semangat supaya warga desa baik warga asli maupun pendatang terus mengembangkan usaha dan jangan meninggalkan desa untuk kesejahteraan bersama.

Kebersamaan ini juga diharapkan muncul dalam pilihan politik dalam pelaksanaan pemilihan umum. Pembinaan politik khususnya yang menyangkut kegiatan Pemilihan Umum Tahun 1997, Informan Z menyatakan: “Kepala Desa melakukan himbauan agar masyarakat mengikuti Pemilihan Umum, Spanduk di Balai Desa bertema, Dengan Semangat Kekeluargaan Kita Sukseskan Pemilu 1997 dipakai rujukan oleh warga desa”. Walaupun dalam pengarahan-pengaruhannya Kepala Desa tidak menyampaikan pesan yang transparan untuk mengaspresiasi suara warga desa dalam kontestan tertentu, tetapi mengandung makna bahwa Kepala Desa mengharapkan masyarakat untuk tidak ragu-ragu memilih Golongan Karya. Praktek-praktek politik sejalan dengan tidakan untuk menarik simpati dan mengarahkan pilihan partai politik ini juga tampak menonjol dalam penyusunan pengurus lembaga desa seperti Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa, Lembaga Musyawarah Desa dan lain-lainnya yang para personilnya berorientasi pada partai penguasa. Dalam menyusun pengurus di lembaga-lembaga pedesaan tersebut, Kepala Desa mempunyai peran yang besar sehingga siapa yang dikehendaki untuk duduk dalam suatu jabatan, pada umumnya dapat diterima oleh Lembaga Musyawarah Desa yang merupakan partner dalam pemerintahan desa.



# BAB 9

## KEKUASAAN POLITIK DALAM KEMAJEMUKAN

---

### A. Komunikasi dan Dua Kutub Kontradiktif Penggerak Perubahan

Keanekaragaman etnik di desa lokasi penelitian membentuk pola interaksi dan komunikasi di lingkungan penduduk asli. Mereka berubah mengikuti pola interaksi dan komunikasi yang universal. Menurut Rogers dan Svenning (1969:223) kondisi tersebut dilukiskan sebagai perubahan dari interaksi yang homofili menuju kepada heterofili. Homofili menggambarkan pihak-pihak yang berinteraksi memiliki kesamaan-kesamaan sedangkan heterofili adalah ketidaksamaan pihak-pihak yang berinteraksi.

Pandangan dan sikap-sikap warga desa penduduk asli yang menganggap bahwa Kepala Desa sebagai pemimpin yang harus dipatuhi dan diteladani dalam semua tindakannya, sebagaimana dikemukakan Mustapa (1985:172) bahwa, "Orang Sunda menganut falsafah; Orang harus pandai berbakti kepada pemimpinnya, tidak boleh munafik atau merasa terpaksa". Namun persoalannya, dalam kondisi dinamika desa, sikap ini sudah berubah akibat interaksi dengan berbagai kelompok etnik pendatang, terpaan media massa, dan tujuan kesejahteraan material yang jauh lebih menonjol dibanding menjaga nilai-nilai sosial yang harmoni. Perubahan perilaku masyarakat ini sejalan dengan pendapat Aminati Etizoni (1964) yang menyatakan bahwa modernisasi menyebabkan otoritas tradisional mulai memudar.

Dipihak lain, kelompok-kelompok etnik pendatang yang datang ke desa kawasan pantai utara, karena tujuan-tujuan ekonomis dalam perpektif modernisasi, ternyata tidak setiap tindakan mencerminkan universalitas dalam sebagaimana sikap yang terikat oleh modernisasi. Sebab sebagaimana menurut Samovar dkk, kultur yang masih tampak menonjol, dalam interaksi dengan kelompok etnik lain akan semakin menguat, bahkan dalam memandang suatu persoalan masih mempunyai kecenderungan negatif terhadap kelompok lain tersebut. (Samovar, Portner, dan Jain 1981). Hakikatnya, pada satu sisi mengadopsi nilai modernisasi, tetapi di sisi lain masih mempertahankan nilai-nilai tradisional kelompok. Ini kecenderungan yang terjadi di banyak negara sedang

berkembang. Pengadopsian nilai modern dan mempertahankan nilai tradisional secara bersamaan menurut Hildred Geertz (1977) adalah perwujudan budaya rangkap yang terdapat di kota-kota di Indonesia.

Dalam keanekaragaman etnik di kawasan desa lokasi industri, masing-masing kelompok etnik menghendaki tindakan Kepala Desa mampu memberikan keuntungan material, atau moral yang sejalan dengan nilai budaya yang diikutinya. Tuntutan ini adalah tantangan bagi Kepemimpinan Kepala Desa sebagai agen modernisasi yang menjembatani kepentingan dari berbagai macam sistem sosial yang berinteraksi dan amat kompleks di lingkungan yang mengalami perubahan.

Berdasarkan uraian tersebut maka pandangan terhadap kendala maupun faktor pendukung Kepemimpinan Kepala Desa dalam fungsinya sebagai agen modernisasi dalam perspektif Orang Sunda penduduk asli, cenderung dikaitkan pula dengan nilai ekonomis, karakteristik kultur, dan intensitas interaksi dan komunikasi diantara masing-masing kelompok etnik.

Sedangkan dalam pandangan penduduk asli yang memiliki karakter kultural sama dengan Kepala Desa, terdapat berbagai faktor yang menghambat dalam pelaksanaan fungsi kepemimpinan sebagai agen modernisasi di pedesaan. Orang nomor satu di desa ini dinilai kurang memberikan kepercayaan kepada penduduk asli karena dalam berbagai kegiatan atau program desa lebih mempercayai Orang Jawa untuk menangani sejumlah permasalahan yang terdapat di desa. Walaupun tentu saja tidak semua persoalan dipercayakan kepada pendatang etnik Jawa. Masalah adat-istiadat, ritual yang berkaitan dengan upacara-upacara kerohanian khas desa tetap akan dipegang oleh penduduk asli.

*“Kepala Desa lebih banyak menyerahkan tugas-tugas yang dipandang strategis kepada orang-orang Jawa di desa ini, sedangkan penduduk asli sendiri lebih banyak dilibatkan dalam masalah yang menyangkut tradisi ataupun kepentingan warga setempat”.* (Wawancara dengan Informan 2)

Aspek lain yang dinilai sebagai kelemahan adalah pendidikan Kepala Desa yang rendah sehingga tidak mempunyai kemampuan memadai untuk memimpin desa yang mengalami perubahan besar-besaran kearah modernisasi. Kondisi ini tidak berbeda dengan yang digambarkan oleh Rogers dan Svenning (1969), bahwa agen modernisasi di desa tradisional mempunyai pendidikan rendah dan tidak jauh berbeda dengan kliennya yang juga pada umumnya berpendidikan rendah. Kepala Desa memiliki pendidikan yang kurang memadai, di sisi lain industrialisasi yang berkembang pesat dengan menciptakan banyak persoalan, menghendaki pemimpin yang memiliki pendidikan tinggi. Rogers dan Svenning (1969). Masyarakat asli desa ini, menganggap Kepala Desa meskipun berpendidikan rendah tetapi ternyata teramat kurang perhatiannya dalam masalah pertanian yang sebenarnya dikuasai. Informan I menyebutkan:

*“Masyarakat kurang menaruh perhatian terhadap informasi pertanian yang dikemukakan Kepala Desa karena sering tidak sesuai dengan kenyataan yang dihadapi, dan ketinggalan dengan kabar yang diperoleh dari surat kabar dan televisi”.*

Pernyataan ini menunjukkan bahwa orang terkemuka di desa sudah tidak dipercaya lagi dalam sebagai sumber pesan, sehingga informasi yang disampaikan juga tidak diperhatikan oleh masyarakat. Menurut Rogers dan Svenning (1969), informasi yang dipercaya oleh masyarakat karena berasal dari sumber-sumber yang kompeten. Sedangkan Schramm (1987) menyatakan mempercayai adalah tindakan penerima informasi yang digunakan bersama sebagai hal yang sah dan benar. Mencakup dua hal yaitu percaya terhadap pesan yang disampaikan yang dipercayainya sumber pesan. Kalau dalam masalah pertanian kurang perhatian tetapi terhadap masalah industri perhatiannya sangat besar, padahal penduduk asli desa pada umumnya masih banyak yang bergerak di sektor pertanian. Sektor industri belum memberikan manfaat kesejahteraan yang berarti bagi sebagian besar penduduk asli desa lokasi penelitian yang dipenuhi pabrik-pabrik. *“Keberadaan pabrik-pabrik belum banyak dirasakan manfaatnya oleh orang desa ini”.* (Wawancara dengan Informan II). Memang justru yang tampak menonjol di desa ini adalah, justru sebagian besar yang memperoleh manfaat adanya industrialisasi adalah para pendatang yang pendidikannya cukup baik dan memiliki relasi kuat dalam jaringan kerja diantara mereka.

Orang Sunda desa setempat menganggap bahwa Kepala Desa sudah terlalu lama dalam jabatan, sehingga kurang mampu menyelenggarakan kegiatan yang menggairahkan dan sebagian pendapat bahwa mereka menghendaki dinamika ke arah yang lebih baik dalam pemerintahan di desa

Meskipun banyak lontaran kritik dan ketidakpercayaan terhadap Kepala Desa, tetapi orang-orang desa penduduk asli tetap memberikan dukungan dalam beberapa program pembangunan pedesaan. Penduduk asli desa mempunyai tenggang rasa yang besar walaupun mereka merasa tidak puas terhadap kebijakan pemerintahan desa. *“Kepala Desa biar bagaimana pun juga orang yang sudah dikenal lama dan masyarakat mempunyai ikatan yang kuat sejak ayahnya menjabat Kepala Desa juga”.* (wawancara dengan Informan I).

Kepala Desa masih konsisten menjaga hubungan kekerabatan yang baik dengan warga desa tanpa membeda-bedakan status sosial ekonominya. Banyak memberikan keleluasaan dalam pembayaran iuran di desa bagi penduduk asli desa seperti Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), dana kebersihan, keamanan dan lain-lain. Meskipun demikian, berdasarkan laporan Kepala Desa tahun 1995, desa ini setiap tahun memperoleh piagam penghargaan dari pemerintah karena lunas PBB. Tindakan memberikan keleluasaan dalam pembayaran iuran desa, menunjukkan hubungan yang kuat dengan penduduk asli, dan masih berlakunya salah satu falsafah hidup Orang Sunda yang terus dipelihara yaitu:

*“Rakyat kecil harus mengetahui keinginan orang yang di atasnya dan orang yang di atasnya pun harus senantiasa mendengarkan keluhan-keluhan rakyatnya ‘ tidak pantas kalau tidak memperdulikan dan hanya ingin mendapatkan kesenangan saja dari rakyatnya. (Mustapa, 1985;187).*

Sisi positif dari peran agen pembaharuan adalah bahwa Kepala Desa dipandang inovatif dalam kegiatan-kegiatan sosial yang melibatkan hubungan antar etnik dan demokratis dalam perlakuan terhadap semua orang walaupun mempunyai perbedaan politik.

## **B. Keberadaban Komunikasi dalam Pembaharuan**

Kendala kepemimpinan Kepala Desa dalam fungsinya sebagai pelopor perubahan adalah kurang memperhatikan potensi sosial ekonomis masyarakat desa, sehingga sikap gotong royong, perhatian terhadap kesenian tradisional maupun produktivitas pertanian semakin surut. Menurut pendapat Orang Jawa *“Kepala Desa sepertinya semakin jauh dalam tindakan menyelamatkan kekayaan alam dan tradisi di desa, hubungan dengan penduduk asli semakin renggang.*(Wawancara dengan Informan A).

Memang diakui, Kepala Desa tidak memiliki keterampilan administratif dan komunikasi karena pendidikan yang tidak menunjang. Kondisi ini menyebabkan pelaksanaan tugasnya banyak yang terhambat. Kepala Desa juga dipandang sering menghindari dari warganya karena permasalahan yang rumit menyangkut kepentingan warga desa yang berurusan dengan aturan perusahaan. Dalam keadaan seperti ini, orang yang diposisikan sebagai agen pembaharuan cenderung memperhatikan kepentingan perusahaan sebagaimana yang dilakukan oleh para pemegang kekuasaan dalam struktur pemerintahan di atasnya.

Perhatian besar terhadap kepentingan pabrik juga berhubungan dengan sikap terhadap para pendatang dari beragam etnik yang merasa mendapat perlakuan layak dari Kepala Desa. Menurut Informan A: *“Kepala Desa orangnya terbuka kepada siapapun yang mempunyai urusan dengan Pemerintahan Desa tidak akan diperlakukan lain”.* Dalam pengambilan keputusan program-program pembangunan, dilaksanakan melalui musyawarah desa yang menampung usulan-usulan dari masyarakat. Pengalaman sebagai elite pedesaan karena ayahnya juga seorang kepala desa, membentuk karakter kuat dalam menjalankan dan mengatur pemerintahan desa yang masyarakatnya terdiri dari berbagai suku bangsa. Sebagai penduduk asli, termasuk orang yang konsisten menjaga agama, tradisi, dan norma-norma pedesaan. Kedekatan Kepala Desa dengan pimpinan-pimpinan perusahaan juga semakin memperkuat posisi di masyarakat maupun dalam hubungan kekuasaan dengan aparat Kecamatan dan Kabupaten.

Kekuatan peran di lingkungan kelompok etnik Sunda penduduk asli, memiliki implikasi terhadap penilaian kelompok etnik Minangkabau yang menilai bahwa

Kepala Desa dalam terlalu lunak terhadap kelompok etnik penduduk asli dalam hal iuran desa. Urusan pungutan-pungutan atau sumbangan untuk kegiatan di desa ada perbedaan pemberlakuan. Penduduk asli meskipun mempunyai usaha yang layak tetapi tidak dikenakan berbagai macam pungutan untuk bantuan pembangunan pedesaan. Sebaliknya para pendatang yang mempunyai usaha, diposisikan sebagai donatur tetap dalam kegiatan pedesaan. Padahal kegiatan di desa bukan untuk kepentingan pendatang saja tetapi seluruh masyarakat desa.

*“Kami tidak sependapat masalah iuran di desa ini, karena membedakan antara penduduk setempat dengan pendatang. Kami dianggap orang-orang kaya, sehingga setiap ada kegiatan di desa dibebani dengan iuran yang memberatkan, padahal semua itu untuk seluruh masyarakat desa, tidak pandang bulu pendatang atau penduduk asli”* (Wawancara dengan Informan 2)

Sepanjang ketentuan ini terus diberlakukan, tentu tingkat kepercayaan masyarakat akan berkurang terhadap pola kepemimpinan Kepala Desa, dan pada akhirnya terkait pula dengan stereotip dan prasangka terhadap etnik Sunda penduduk asli. Kritik juga muncul dalam hubungannya pelaksanaan pembangunan secara menyeluruh. Kegiatan pembangunan kurang dinamis dari tahun ketahun. Tidak ada perkembangan menonjol, masyarakat sudah terlalu hafal dengan aneka perhelatan yang dilakukan. Kegiatan yang paling menonjol adalah seringnya penyelenggaraan aneka upacara pemerintahan, keagamaan, dan tradisi desa setempat yang memerlukan pembiayaan besar. Kendati demikian, dengan kepercayaan diri yang tinggi, Kepala Desa tetap mengidentifikasi diri sebagai agen pembangunan yang berhasil. Dalam pidato-pidato seringkali kurang mempedulikan keadaan sekeliling yang dihadapi warga desa. Penyampaian pesan-pesan pembangunan tetap diwarnai oleh bermacam-macam keharusan ataupun kewajiban warga desa untuk berpartisipasi dalam pembangunan desa. Dalam pandangan Lerner (1976), retorika pembangunan yang bersifat ideologis dan dilakukan berulang-ulang, menjadikan masyarakat menjadi jenuh dan tidak menghirukan makna yang terkandung dalam isi pidato.

Kalaupun masyarakat Minangkabau di desa lokasi penelitian mengungkapkan sejumlah kelemahan dalam posisinya sebagai agen modernisasi, tetapi mereka juga melihat sedemikian banyak peran orang paling berkuasa di desa ini yang memiliki kekuatan sebagai agen modernisasi. Kepala desa dinilai banyak membantu kelancaran terhadap orang-orang yang akan membuka usaha di desanya. Bahkan banyak memberikan pengarahan positif dalam pengurusan perijinan di tingkat yang lebih tinggi.

Sebagai orang paling berpengaruh di wilayahnya, dia menguasai berbagai macam informasi yang berasal dari pemerintahan pusat, maupun dari sumber yang dapat dipercaya dan tidak segan-segan untuk menyebarkan informasi tersebut, tanpa melalui jalur birokrasi. Tujuannya agar warga desa mengetahui permasalahan kemasyarakatan, ekonomi maupun politik lebih awal. Informan 3 menyatakan: *“Kepala Desa banyak*

*memberi informasi meyangkut program pemerintah maupun perusahaan-perusahaan di desa".* Dengan kata lain, masyarakat desa selalu memperoleh informasi yang bermanfaat dalam kaitannya dengan pabrik-pabrik yang beroperasi di desa.

Kepala Desa juga mempunyai hubungan baik dengan pengusaha maupun warga desa. Walaupun banyak kekurangan dalam keterampilan komunikasi maupun administrasi, tetapi Kepala Desa masih cukup berwibawa karena keteladannya di masyarakat. Dalam istilah French (1978), Kepala Desa mempunyai referent power atau keteladanan oleh sifat-sifat pribadi seorang pemimpin. Sifat keteladanan akan diikuti oleh warga desa dan dijadikan pula sebagai referensi dalam hal sikap maupun tindakan warga desa yang terdiri dari berbagai suku bangsa di Indonesia.

Jika kelompok etnik Minangkabau di desa memiliki sejumlah kritik dan pujian terhadap Kepala Desa dari aspek hubungan kemasyarakatan, maka orang-Orang Batak di desa lokasi penelitian menyoroti hubungan kekuasaan formal dan transparansi. Kepala Desa dalam hal kewajiban untuk membayar iuran desa bersikap kurang terbuka, cenderung membeda-bedakan. Sebagian besar pendatang dikenakan iuran, tetapi warga desa penduduk asli bebas dari berbagai macam pungutan. Dalam berbagai pertemuan, sikap dalam pelaksanaan pembangunan pedesaan, lebih condong kepada kepentingan pemerintah kecamatan maupun kabupaten, dibandingkan peranan faktual mendukung warga desa setempat.

Kondisi ini bisa saja terjadi karena pola komunikasi kekuasaan dalam pemerintahan dari tingkat pusat sampai ke tingkat pedesaan bersifat *top-down* tanpa memberikan keleluasaan untuk berargumentasi. Banyak pesan pembangunan yang diulang-ulang, tetapi hasilnya tidak memadai sehingga masyarakat bosan mendengarnya. Hakikatnya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap Kepala Desa sebagai agen pembangunan tidak stabil. "Kepala Desa banyak kami percayai dalam hal kepemimpinan sosial karena dia sangat terbuka dalam masalah sosial di pedesaan, tetapi sering bersifat tertutup untuk masalah tertentu sehingga kami juga kurang percaya" (wawancara dengan Informan P). Tingkat kepercayaan yang berbeda terhadap suatu bidang dibandingkan bidang lain lazim terjadi dalam model kepemimpinan yang organik sesuai keahliannya.

Penilaian yang positif dari peran Kepala Desa yang sudah berkuasa kurang lebih 26 tahun, adalah kemampuan dalam menjalin pergaulan dengan masyarakat semua golongan, tanpa membedakan status sosial, ekonomi dan politik. Sikap positif ini mampu menciptakan toleransi kehidupan antar umat beragama dan kepercayaan, sehingga warga desa memperoleh perlakuan-perlakuan yang baik dan tidak dibeda-bedakan. Sedangkan dalam sosok pribadi, meskipun secara material sebagai orang mampu, tetapi mempunyai penampilan yang bersahaja. Semua masyarakat diterima dengan baik jika berurusan secara pribadi, maupun dinas. Sebagai orang asli desa setempat, masih mempunyai wibawa kuat dan memelihara tradisi-tradisi positif di desa. Dengan demikian sangat wajar jika para pendatang etnik Batak menilai bahwa Kepala Desa sebagai pemiliki

kekuasaan di desa dihormati, walaupun terkadang mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang tidak sejalan dengan harapan masyarakat desa lokasi penelitian kawasan pantai utara Kabupaten Karawang Jawa Barat.

Berbagai macam kebijakan yang tidak sejalan dengan kehendak warga desa, diekspresikan oleh kelompok etnik Madura yang menyatakan bahwa dalam melakukan fungsi agen pembaharuan ataupun agen perubahan, dinilai kurang mempunyai prinsip teguh, sehingga masyarakat memandang sebagai sikap yang tidak konsisten. Tindakan yang terlalu banyak memperhatikan kelompok kepentingan ekonomi dan politik di kawasan lokasi industri, membuat masyarakat setempat kecewa.

Padahal dalam komunikasi publik yang terbuka seringkali berjanji menampung aspirasi warga desa demi kesejahteraan, tetapi justru aspirasi dari kelompok eksternal desa yang cenderung lebih diperhatikan. Kondisi ini dikemukakan oleh Informan X, Orang Madura yang sudah lama tinggal di wilayah desa lokasi penelitian sejak tahun 1978. Disebutkan: *"Banyak orang-orang yang berkepentingan di desa dalam politik dan ekonomi yang mengakibatkan Kepala Desa sulit untuk bersikap. Mencermati gambaran tersebut, dapat diartikan betapa susahnyanya untuk bersikap dalam pembangunan masyarakat desa. Satu pihak warga desa harus dibela kepentingannya untuk mencapai kesejahteraan, di pihak lain kekuatan politik dalam kekuasaan dengan dalaih untuk kepentingan pembangunan yang lebih luas seringkali lebih diunggulkan. Akibatnya masyarakat desa yang merasa diabaikan kepentingannya.*

Dalam kegiatan tertentu Kepala Desa tidak mempunyai kewenangan yang besar karena yang lebih berkuasa dan memiliki wewenang adalah pemerintahan yang lebih tinggi, sehingga Kepala Desa semata-mata sebagai kepanjangan tangan Pemerintah Pusat yang tidak wajib tunduk terhadap semua kebijakan pusat. Akibatnya, bukan mustahil Kepala Desa lebih banyak membina jalur komunikasi vertikal keatas yaitu Kecamatan, dibandingkan membangun jalur ke bawah dengan menampung aspirasi masyarakat. Dalam arti lain Kepala Desa lebih mengutamakan urusan dekonsentratif, yang berupa tugas dari pemerintah pusat dan masalah partisipatif yang berupa urusan pemerintah pusat yang pelaksanaannya diserahkan sepenuhnya kepada Kepala Desa dan masyarakatnya. Sementara itu urusan rumah tangga desa yang paling tinggi urgensinya dalam pencapaian kesejahteraan dan kemakmuran kurang mendapat perhatian.

Terlepas dari kelemahan yang muncul dalam hubungan kekuasaan, tetapi sebagai agen pembaharuan, Kepala Desa dinilai tidak kesukuan dan terbuka terhadap semua kelompok etnik. Warga Madura yang tinggal di desa lokasi penelitian, mempunyai hubungan baik dengan Kepala Desa. Bahkan selalu memberikan dukungan bagi Orang-orang Madura yang akan membuka usaha di desa. Kepala desa selalu terbuka di kantor maupun dimana saja untuk membantu berbagai persoalan yang dihadapi warga desa dari berbagai kelompok etnik. (Wawancara dengan Informan Z).

Selain itu, sebagaimana pendapat etnik lain, Kepala Desa dinilai cukup berwibawa. Sebagaimana masyarakat menganggap orang yang patut diteladani karena menjaga norma-norma sosial dan keteguhannya dalam menjalankan ibadah. Kepala Desa juga berkali-kali menyatakan agar warung-warung dan rumah sewaan di desa lokasi penelitian yang terbuka dan menjadi jalur lalu lintas yang ramai sepanjang hari, tidak digunakan sebagai tempat berbuat yang tidak baik dari segi norma maupun agama.

Orang-orang Madura memandang Kepala Desa cukup inovatif dengan banyak memberikan informasi dan dilaksanakan di desa itu seperti halnya dalam pembinaan pertanian yang memang digeluti oleh sebagian besar warga desa. Faktor lain yang sangat mendukung posisi Kepala Desa sebagai agen pembangunan adalah dukungan dari pemerintah yang lebih tinggi, dan aparat keamanan setempat. Dengan dukungan pihak eksternal yang memiliki kekuasaan legal, maka eksistensi Kepala Desa tidak akan tergoyahkan, walaupun kredibilitasnya dilingkungan kelompok-kelompok etnik tidak stabil akibat kritik dari warga desa. (wawancara dengan Informan Z). Dukungan dari pemerintah yang lebih tinggi, membuat kedudukan Kepala Desa sangat kuat. Tetapi di sisi lain, mempunyai ketergantungan sangat besar kepada yang memberikan dukungan.

Dampaknya pola-pola komunikasi yang berhubungan dengan struktur kekuasaan lebih diperhatikan dan menjadi fokus utama dalam komunikasi publik yang menyangkut kebijakan pembangunan. Kendati demikian, Kepala Desa juga berupaya menciptakan kebedaban dalam komunikasi yang menjunjung etika dan menciptakan keseimbangan kesempatan serta hak komunikasi kepada warga desa. Dengan kata lain, komunikasi vertikal keatas, ke bawah maupun horizontal diupayakan secara seimbang demi menjaga kredibilitasnya di lingkungan masyarakat majemuk. Dalam berbagai pertemuan desa, Kepala Desa sangat menghargai pendapat warga dan juga memberikan kesempatan untuk menyampaikan berbagai problem desa untuk dipecahkan bersama-sama.



# BAB 10

## MEMBANGUN KOMUNIKASI ANTAR BUDAYA

---

### A. Kawasan Heterogin dan Pola Komunikasi Universal

Heterogenitas pedesaan dilihat dari keanekaragaman etnik dalam suatu desa, merupakan dampak perkembangan teknologi komunikasi dan transportasi. Kondisi ini dapat dilihat dari mobilitas yang tinggi dalam migrasi dari satu lokasi ke lokasi lain dalam waktu singkat. Keanekaragaman etnik, tidak hanya membawa dampak keragaman budaya, tetapi membentuk keanekaragaman sosial masyarakat yang sedang mengalami perubahan semua aspek kehidupan.

Perubahan juga menimbulkan permasalahan tersendiri bagi masyarakat, maupun pemimpin formal di pedesaan. Mereka tidak lagi berinteraksi dalam situasi homofili, tetapi bergeser dalam kontak-kontak heterofili dengan orang-orang diluar kelompok etniknya, yang mempunyai aneka perbedaan dalam cara berkomunikasi maupun berinteraksi. Dalam suasana heterofili, masyarakat desa lokasi penelitian di kawasan pantai Utara Pula Jawa, dapat hidup berdampingan, berinteraksi dan berkomunikasi dengan para pendatang dari berbagai kelompok etnik. Sementara interaksi diantara warga pendatang yang berlainan etnikpun berjalan sesuai dengan kebutuhan dan tujuan komunikasi masing-masing. Tujuan komunikasi menurut Reardon (1987:1), untuk menghibur, mempengaruhi, beramah tamah, memperoleh informasi, menunjukkan perhatian dan lain-lain. Dengan demikian, keanekaragaman etnik juga membangun komunikasi dengan aneka tujuan yang hendak dicapai. Pencapaian tujuan, seringkali muncul persamaan antara satu kelompok etnik dengan etnik lainnya. Kondisi inilah yang dapat menyatukan perbedaan dan membentuk harmoni kehidupan majemuk di pedesaan.

Tentu saja selain persamaan diantara kelompok-kelompok etnik, memang ada pola universal yang dimiliki oleh semua kelompok etnik, meskipun dalam mengekspresikan dalam komunikasi verbal berlainan. Misalnya kelompok etnik Batak percaya bahwa, "*orang harus berhati-hati bertutur kata, karena pada kata melekat efek yang baik dan buruk, kata buruk makian, kata penghinaan, kata yang mengandung kutukan, akan membangkitkan*

*kejahatan*". (Vergouwen, 1986:108). Sejalan dengan itu, "*Orang Minangkabau mempunyai prinsip kusut menyelesaikan dan keruh menjernikan*". (Lili S. Halim, 1989). Falsafah hidup tersebut, sesungguhnya dimiliki pula oleh etnik lain dalam bentuk ungkapan verbal yang berbeda tetapi bermakna sama.

Pola universal di luar konteks budaya, adalah komunikasi universal yang lebih rasional, terbuka untuk menerima informasi dari luar, dan mempraktekkan pengalaman baru sebagai suatu inovasi. Pola tersebut melekat dalam masyarakat yang mengalami perubahan, sebagaimana yang dilakukan oleh masyarakat desa kawasan pantura ini. Dalam situasi keanekaragaman dan perubahan, biasanya orang menjadi lebih inovatif karena interaksi dengan berbagai kelompok etnik. Orang yang lebih inovatif menurut Rogers dan Shoemaker (1971) adalah mereka yang sering mengadakan komunikasi interpersonal dengan anggota sistem lain, lebih sering bertatap dengan media, dan mencari lebih banyak informasi dari semua saluran.

Berkumpulnya para pendatang dari berbagai kelompok etnik dipicu pula oleh pemikiran rasional untuk mencari kehidupan yang lebih baik. Rasionalisasi dan inovasi yang muncul dalam keanekaragaman etnik mencerminkan proses modernisasi yang terjadi dalam masyarakat, seperti dikemukakan oleh Black bahwa "rasionalisasi membentuk kesadaran terhadap harga diri orang lain, bersedia menerima pengalaman-pengalaman baru, percaya terhadap keadilan dalam pembagian". (Cyril E. black, 1976). Berpijak pada hal itu, rasionalisasi berjalan sehaluan dengan upaya mengedepankan pluralisme etnik sebagai perwujudan modernisasi di pedesaan. Dalam perspektif Berger, modernisasi berarti hidup dengan sejumlah besar orang asing. Sedangkan di desa hidup dengan sekelompok kecil manusia, kebanyakan mengenal secara akrab sejak kanak-kanak sampai tua, dan yang tidak kalah pentingnya adalah kekuasaan maupun kepemilikannya sangat berbeda.

Pola komunikasi dan interaksi umum yang muncul dalam pluralisme etnik, ternyata tidak membentuk penyeragaman nilai budaya. Perbedaan budaya justru tampak makin menonjol apabila terjadi interaksi dan komunikasi dengan budaya lain dalam setting tertentu yang kurang mendukung. Misalnya situasi yang bagi kelompok etnik tertentu dinilai tidak sesuai dengan norma yang dianut. Disamping itu, ada kecenderungan nilai-nilai budaya tidak serta merta dapat sepenuhnya terintegrasi dalam tatanan budaya setempat dimana mereka berada. Sebab ada nilai-nilai sosial kultural yang masih dipelihara dan dilembagakan eksistensinya oleh masing-masing etnik, dengan tujuan tidak menghilangkan nilai sosial-budaya yang dimiliki dan diyakini kebenarannya.

Dengan kata lain, dalam keanekaragaman etnik justru bisa saja muncul klaim budaya superior yang dimiliki oleh kelompok etnik dalam bingkai etnosentrisme. Nilai positif diakui sebagai ciri kelompok etniknya, sedangkan nilai-nilai negatif dianggap bukan mewakili ciri etniknya, tetapi sebagai karakter yang melekat pada individu. Disini ada subjektivisme ketika melakukan penilaian terhadap kelompoknya sendiri. Berkaitan

dengan karakter etnik yang subjektif itu, Ayib Rosidi (dalam Ekadjati, 1984:131) mengungkapkan:

*“Orang Sunda menyatakan ciri-cirinya yaitu berwatak lemah lembut, sopan, halus, berjiwa satria, sangat menenggang rasa terhadap orang lain dan sejumlah ciri ideal belaka dan universal terdapat pada semua bangsa dan suku bangsa di dunia”.*

Hasil pengamatan di desa lokasi penelitian pantai utara, menunjukkan gejala yang sama sebagaimana yang masing-masing etnik mengungkapkan ciri-ciri etniknya sendiri yang serba positif. Hampir semua kelompok etnik ketika mengidentifikasi kelompoknya, cenderung lebih terkait dengan aspek kebaikan dibandingkan factor negatif. Jika saja ada sesuatu yang kurang menguntungkan yang melekat pada etniknya, lazimnya berhubungan dengan hal yang normatif, dan terjadi pada semua kelompok masyarakat yang memiliki status sosial ekonomi masih rendah.

Penilaian tentang unsur ideal atau positif dan negatif, tidak terlepas dari perwujudan perilaku etnosentrisme, stereotip, ataupun prasangka yang dilakukan secara tidak sadar dan subjektif. Dalam hubungan antar etnik di desa, setiap kelompok mempunyai sikap etnosentrisme, stereotip dan prasangka terhadap kelompok etnik lain. Walaupun demikian, upaya masing-masing kelompok etnik untuk memahami budaya lain tetap tampak dalam interaksi sehari-hari yang berjalan dengan baik.

Pemaparan disini merupakan rangkuman dari uraian sebelumnya yang lebih komprehensif, dan mencakup pandangan kelompok etnik Sunda terhadap kelompok etnik pendatang atau sebaliknya. Disamping itu, interaksi yang terjadi diantara kelompok etnik pendatang dipakai sebagai penunjang dalam pembahasan hubungan antar etnik pendatang dan penduduk asli. Sedangkan pendapat-pendapat yang berhubungan dengan peran Kepala Desa sebagai agen modernisasi di lingkungan desa yang sedang berubah merupakan faktor penting untuk mengetahui gambaran yang lebih lengkap posisi orang nomor satu di desa ini sebagai penggerak perubahan kearah yang lebih maju.

Pandangan terhadap peran Kepala Desa lebih menitikberatkan pada pendapat yang muncul sebagai hasil interaksi antara penduduk asli desa, dengan kelompok-kelompok etnik pendatang, dalam situasi perubahan sosial yang terjadi, sebagai akibat perkembangan teknologi komunikasi dan informasi. Orientasi pembahasan, dimaksudkan untuk mengetahui bagaimana pandangan Orang Sunda terhadap pendatang dari etnik Jawa, Minangkabau, Batak dan Madura, di desa lokasi penelitian yang berubah akibat industrialisasi di wilayah itu.

Pendapat Orang Sunda, penduduk asli desa terhadap setiap etnik pendatang, meliputi kegiatan sosial yang diselenggarakan pemerintah desa dan interaksi sosial dengan masyarakat sekitarnya. Dalam bidang ekonomi, menyangkut interaksi dalam tindakan ekonomis yang mengacu pada keuntungan materi untuk meningkatkan taraf hidup. Sedangkan untuk bidang politik, meliputi interaksi-interaksi politik, khususnya

keterlibatan fisik yang dapat diketahui oleh lawan interaksinya dalam kaitan dengan dukungan terhadap kontestan peserta pemilihan umum tahun 1992 dan tahun 1997. Dalam konteks pendapat Manheim (1975:8), sebagai gaya umum partisipasi langsung dimana orang melibatkan diri sendiri dengan figur politik yang diketahui khalayak. Keterlibatan secara langsung dalam menetapkan pilihan partai politik di pedesaan merupakan potret nyata kondisi politik Indonesia.

Pendapat kelompok etnik Sunda penduduk asli desa terhadap kelompok-kelompok etnik pendatang di desa lokasi penelitian tercantum dalam tabel di bawah ini.

**Tabel 6. Pendapat Kelompok Etnik Sunda tentang Kelompok Etnik Pendatang Dalam Hubungan Antar Etnik meliputi Bidang Sosial, Ekonomi, dan Politik**

<b>Kelompok Etnik</b>	<b>Bidang Sosial</b>	<b>Bidang Ekonomi</b>	<b>Bidang Politik</b>
Jawa	Aktif, komunikasi fleksibel, menguasai bidang strategis. Pergaulan luas, hal tertentu ada jarak sosial, melakukan kompromi situasional, menjaga agama dan budaya	Ulet, rajin, sukses tetap sederhana, investasi di desa, bekerja tidak memandang etnik. Petani maju, karyawan industri, PNS. Kedekatan dengan elite formal dan tokoh masyarakat	Aktif dalam kegiatan politik. Jelas orientasinya pada partai politik dalam pemilihan umum
Minangkabau	Kurang aktif, partisipasi kalkulatif *) Pergaulan selektif, aspek social cost melekat, prinsip kuat dalam kompromi, moderat dalam kehidupan beragama	Ulet, penuh perhitungan, hemat, menguasai kawasan strategis, investasi bidang tertentu, kerja dg berbagai kelompok etnik. Profesi sopir angkutan kota, karyawan industri Sukses membuka rumah makan, warung dan toko kelontong. Pealayan sama terhadap konsumen	Tertutup pilihan politiknya, tidak aktif dalam kehidupan politik di pedesaan
Batak	Kurang aktif, tidak perhatian, meneliti kebijakan desa. kurang bersosialisasi untuk urusan tertentu, tidak terlalu kompromis. Pada umumnya memiliki agam berbeda dengan penduduk asli	Ulet bekerja, hemat, keberhasilan materi tidak ditonjolkan, tidak mau investasi di desa, cenderung bekerja dan mempekerjakan kelompok etniknya. Karyawan industri, sukses dalam usaha jasa dan keuangan. Melayani kelompok etniknya lebih baik	Tertutup, tidak m e n g h i r a u k a n perkembangan politik di desa dalam pemilihan umum
Madura	Aktif dalam kegiatan sosial tetapi selektif. Pergaulan luas, kompromi dalam hal tertentu. Taat dalam beribadah.	Ulet, hemat, menguasai kawasan strategis, sebagian harta diinvestasikan di desa, bekerja dengan etniknya, tidak suka kerja pabrik. Sukses dalam perdagangan kayu dan barang bekas. Melayani konsumen ulama lebih baik	Memiliki pilihan politik terbuka, sangat sulit untuk dipengaruhi oleh partai yang bukan pilihannya.

**Sumber:** Hasil Pengolahan Data

Dalam kegiatan sosial yang melibatkan kelembagaan di desa, Orang Jawa adalah yang paling aktif. Bahkan menguasai bidang yang strategis, menguasai tentang seluk beluk kegiatan pemerintah dan ketenaga kerjaan, sehingga mereka mempunyai kesempatan berkomunikasi dengan semua kelompok etnik yang ada di desa. Kepala Desa memberikan kepercayaan terhadap Orang Jawa cukup tinggi. Ini dapat dilihat diantara kelompok etnik ini banyak yang menjadi komunikator pembangunan, dalam posisi sebagai poros dari lingkaran kekuasaan formal pemerintahan desa.

Sementara itu, orang Minangkabau yang lebih dikenal sebagai Orang Padang, lebih menitikberatkan untuk memberi dukungan materi dalam kegiatan sosial di desa. Sedangkan Orang Batak cenderung berpartisipasi terbatas dalam kegiatan sosial di desa. Sebagaimana orang Minangkabau, dukungan terhadap kegiatan sosial pedesaan dilakukan dalam wujud memberikan bantuan dana kegiatan sosial. Dalam berbagai kegiatan sosial desa yang memungut dana dari warga desa, para pendatang kelompok etnik Batak meminta kepada panitia kegiatan untuk melaporkan keuangan secara transparan. Sebab, kegiatan sosial untuk kepentingan bersama itu dibiayai oleh warga desa bersama-sama, sehingga laporan keuangan juga harus diketahui oleh warga desa. Dari ilustrasi tersebut, sesungguhnya setiap etnik pendatang di lokasi penelitian terikat oleh stereotip. Walaupun yang muncul adalah stereotip positif tetapi menunjukkan bahwa, kemajemukan dalam kehidupan sosial pedesaan tidak serta merta akan mengubah perilaku menjadi sama, sebab setiap etnik pendatang masih memiliki nilai, sikap dan kepercayaan turun temurun yang dilembagakan.

Fenomena lain yang menarik dari pendapat penduduk asli etnik Sunda adalah Orang Jawa mempunyai sifat adaptif dalam semua aspek kehidupan di desa yang sedang mengalami perubahan. Mereka akan mendekati diri dengan tokoh masyarakat, elite pedesaan maupun orang terpandang lainnya di desa seperti Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, aparat pemerintah dan tokoh formal yang ada dalam pemerintahan desa. Walaupun etnik lain seperti orang Minangkabau dan Orang Batak menyatakan, hubungan Orang Jawa luas tetapi kadang-kadang muncul jarak sosial tertentu dengan warga pada umumnya. Dalam arti lain, status sosial ekonomi masih menjadi pertimbangan dalam komunikasi dan interaksi orang-orang Jawa tertentu, dengan penduduk asli maupun para pendatang di desa lokasi penelitian.

Sedemikian adaptifnya Orang Jawa dengan lingkungan fisik maupun non fisik, sehingga orang desa setempat melukiskan, suatu ketika eksistensi nilai sosial budaya yang ada di desa akan luntur, sebagaimana pendapat De Vos dan Dola (1982) bahwa, ciri-ciri budaya kelompok tertentu termasuk suku bangsa dapat saja larut ke dalam kebudayaan dominan yang dijadikan kerangka acuan bagi masyarakat yang bersangkutan. Pendapat tersebut mungkin saja terjadi bersama dengan perubahan sosial yang sedang berlangsung di desa lokasi industri di kawasan pantai utara Kabupaten Karawang.

Sebenarnya Orang Jawa menyesuaikan dengan lingkungan di desa, bermula karena ketidakmampuan ekonomi di daerah asal, atau daerah perantauan lain sebelumnya. Mereka datang ke desa ini tanpa modal materi yang cukup, dan hanya mengandalkan tenaga, sehingga menyesuaikan dengan lingkungan sekitar adalah sebagai suatu kewajiban untuk memperoleh eksistensi di lingkungan masyarakat yang kaya sumber daya alam dan sebagai lumbung padi wilayah Jawa Barat. Meskipun migrasi Orang Jawa masih dalam satu negara bahkan satu pulau, tetapi pendapat Kim (1988) dapat menggambarkan pola adaptasi Orang Jawa di desa lokasi penelitian. Dikemukakan, bahwa kekuatan dominan masyarakat pribumi dalam mengontrol beberapa sumber daya, mengakibatkan lebih banyak perubahan pada budaya imigran, oleh karena itu kebutuhan imigran untuk berkomunikasi dan beradaptasi dengan sistem sosial budaya pribumi lebih kuat. Dengan demikian, perkiraan bahwa suatu saat budaya warga desa akan luntur, dan lebih banyak mengikuti budaya para pendatang yang notabene memiliki sejumlah keunggulan dalam kualitas hidup.

Tetapi sebagaimana pendapat Orang Sunda, bahwa Orang Jawa mempunyai sifat kompromi yang dikaitkan dengan situasi tertentu, mengandung arti bahwa kesepakatan terhadap perilaku sosial tidak selalu bersifat mutlak, bergantung kepada situasi komunikasi dan interaksi yang sedang berlangsung. Bisa saja tindakan yang memiliki perubahan nilai budaya berlangsung dalam kadar yang situasional pula. Ini dapat dilihat dalam interaksi fisik, seperti pengakuan dan penghormatan terhadap tokoh masyarakat setempat, partisipasi dalam kegiatan kerohanian yang aktif. Walaupun orang setempat menyatakan bahwa agama Orang Jawa kadangkala terkait pula dengan ritual kebudayaan maupun tradisi yang berlangsung turun temurun.

Orang Jawa pergaulannya luas tetapi dalam hal tertentu seperti berjarak. Selain itu, tidak mudah untuk memahami pola komunikasi verbal yang dilakukan mengingat komunikasi non verbal yang tampak, justru menunjukkan perbedaan. Secara sederhana dapat dikemukakan, perbedaan antara komunikasi verbal dan non verbal menunjukkan ketidakterbukaan maupun tidak terus terang. Tentu saja alasan untuk tidak berterus terang biasanya juga dihubungkan dengan upaya menjaga pergaulan agar tetap berjalan dengan baik. Meskipun sesungguhnya dalam pandangan etnik lain ternyata diasumsikan sebagai hambatan. Ketidak terus terangan sikap Orang Jawa menurut Tjahyono (1989:6-7):

*“Orang Jawa mempunyai jalan pikiran yang dualistik dalam melihat sesuatu dalam dua kelompok yang baik dan buruk. Dua sikap ini kadang-kadang dikemas dalam suatu sikap sehingga Orang Sunda dan kelompok etnik lainnya kurang memahami secara pasti termasuk dalam berkomunikasi, apa yang diucapkan secara verbal belum tentu sesuai dengan isi hatinya. “*

Fenomena ini sesuai dengan yang dikemukakan oleh Hall (1976:91) sebagai *High Context Communication* yang mengandalkan komunikasi dengan sedikit bicara atau dalam penggunaan kata-kata, tetapi mempunyai banyak arti yang tersirat didalamnya.

Dalam pandangan penduduk asli etnik Sunda, kehidupan ekonomi, rata-rata kelompok etnik pendatang dapat hidup layak. Orang Madura dan orang Minangkabau menguasai kawasan strategis di jalan negara yang membelah desa lokasi penelitian. Kelompok etnik Madura dan Batak dinilai lebih berorientasi kepada mereka yang satu etnik dalam mempekerjakan buruh/karyawan di tempat usahanya. Orang-orang yang umumnya berasal dari Sumatera Utara ini, mempunyai kecenderungan mempekerjakan atau bekerjasama dengan kelompok etniknya lebih kuat dalam interaksi bisnis. Mereka juga akan memberikan perhatian yang lebih besar dalam urusan bisnis dengan orang yang memiliki karakteristik budaya yang sama. Sementara itu, Orang Madura memberikan pelayanan yang baik kepada pelanggan, tetapi akan lebih baik lagi dalam memberikan pelayanan kepada para ulama di desa. Kesamaan dalam persepsi tertentu memang menciptakan hubungan dan komunikasi yang lebih lancar dibandingkan dengan perbedaan yang ada.

Bishop (dalam Gudykunst, 1979) menyatakan, persepsi yang sama berpengaruh terhadap hubungan antar pribadi yang lebih lancar. Sedangkan ketidaksamaan dalam budaya menyebabkan hubungan yang kurang akrab, kesamaan budaya dapat diwujudkan dalam persamaan persepsi yang akan meningkatkan kualitas hubungan pada level intimasi. Sehaluan dengan pendapat itu, Altman dan Talyor (1973) maupun Miller dan Steinberg (1975) mengungkapkan bahwa perbedaan maupun persamaan budaya akan berpengaruh dalam membangun hubungan diantara individu yang berkomunikasi dan berinteraksi.

Berdasarkan pendapat tersebut maka pelayanan kelompok etnik Batak yang lebih baik dalam hubungan bisnis dengan sesama etnik Batak dipengaruhi oleh persamaan persepsi, nilai dan sikap yang terkandung dalam budaya mereka. Lebih dari itu, "*Orang Batak menganut prinsip solidaritas yang kuat dimanapun mereka berada*". (Vergouwen, 1986:352). Namun meskipun Orang Madura memiliki budaya berbeda dengan ulama setempat yang beretnik Sunda, tetapi ulama diposisikan mempunyai beberapa persepsi yang sama dalam masalah kaidah dalam menjalankan agama. Menurut Smart (1991:75), bahwa agama adalah sumber yang mempengaruhi kebudayaan dan komunikasi diantara orang-orang yang berhubungan. Dengan demikian, perbedaan budaya tidak akan menghambat penghargaan terhadap para ulama di desa lokasi penelitian.

Faktor lain yang membentuk persamaan persepsi diantara Orang Madura dan ulama adalah diantara mereka, banyak yang mempunyai dasar pendidikan kurang lebih sama, yaitu pesantren. Samovar, Porter dan Jain (1991) menyatakan, bahwa persepsi selain dipengaruhi kepercayaan, nilai dan sikap juga dipengaruhi oleh organisasi sosial. Pendidikan agama, maupun pendidikan lain pada umumnya di pesantren sebagai

organisasi sosial, berperan penting dalam meletakkan dasar-dasar keagamaan yang mampu membentuk persepsi sama Orang Madura dan ulama desa lokasi penelitian.

Pola interaksi bisnis yang terjadi di lingkungan Orang Madura maupun Orang Jawa berbeda dengan prinsip orang Minangkabau yang memberikan pelayanan terhadap semua relasi bisnis sama, tanpa membedakan orang terhormat, orang kaya atau orang sesuku. Berdagang adalah kalkulasi yang saling menguntungkan penjual maupun pembeli, sehingga perlakuan terhadap konsumen juga diikat oleh kesepakatan yang tidak merugikan kedua belah pihak. Pola ini menunjukkan orientasi rasional yang kuat dalam modernisasi untuk mencapai kesejahteraan yang independen terhadap orientasi tradisional. (Etzioni, 1964). Dalam perspektif Rogers dan Shoemaker (1971) sikap orang Minangkabau ini dapat dikelompokkan ke dalam ciri-ciri sosial ekonomi anggota masyarakat yang lebih inovatif, yaitu lebih berorientasi pada ekonomi komersial, produk yang dihasilkan adalah dijual, bukan untuk konsumsi dalam lingkungan terbatas.

Dalam kehidupan ekonomi pedesaan, kebiasaan Orang Batak yang masih melekat dan dipertahankan di desa lokasi penelitian, adalah memberikan pinjaman uang kepada mereka yang membutuhkan dengan perhitungan bunga tertentu yang tidak merujuk kepada bunga dari lembaga-lembaga keuangan formal yang mendapat legalitas dari pemerintah. Kebiasaan ini menurut Vergouwen (1986: 158) bahwa:

*”Hukum utang Batak mempunyai beberapa sisi keras, suku bunga tinggi akibat kurangnya uang tunai. Orang Madura menjunjung tinggi tradisi untuk tidak bergaul dengan lawan jenisnya karena di daerah asalnya bisa berakibat fatal”.*

Pendapat ini juga didukung oleh Orang Jawa dan diakui pula oleh Orang Batak pendatang di desa lokasi penelitian. Sedangkan terkait dengan tradisi Orang Madura, pada intinya bahwa etnik Madura ketat dalam seleksi pergaulan dengan lawan jenisnya. Norma-norma dalam hubungan antara laki-laki dan perempuan di kalangan Orang Madura pendatang, diberlakukan seperti di daerah asalnya. Dalam konteks ini, bukan berarti hanya berlaku dalam interaksi dan komunikasi antar Orang Madura saja, tetapi menyangkut dengan kelompok etnik setempat maupun kelompok etnik pendatang lainnya juga diposisikan sama dalam hubungan antara

Berdasarkan pengamatan, bahwa penilaian (bisa dalam konotasi stereotip maupun prasangka) dari kelompok etnik penduduk asli terhadap pendatang etnik Jawa, khususnya yang berkaitan dengan penilaian bahwa Orang Jawa menguasai kehidupan sosial pedesaan, karena frekuensi komunikasi dan interaksi penduduk asli desa dengan Orang Jawa lebih sering terjadi dibandingkan dengan frekuensi interaksi Orang Sunda dengan kelompok etnik Minangkabau, Batak maupun Madura. Kondisi ini sejalan dengan pendapat Samovar, Porter, dan Jain (1981), yang pada intinya bahwa prasangka dan stereotip dipelajari dari pengalaman dalam hubungan dengan individu maupun kelompok lain, radio, surat kabar



dan televisi. Disamping itu, juga berdasarkan pengalaman ataupun penuturan dari orang tua, saudara, kelompok lainnya yang dipercaya sebagai sumber informasi.

Di desa lokasi penelitian sudah biasa terdengar pernyataan yang mengandung prasangka seperti *“Tidak heran kalau didesa ini i banyak Orang Jawa yang menguasai bermacam-macam hal, dimana-mana ada Orang Jawa, ditempat yang jauh diseberang juga banyak pendatang Jawa”*. Mereka mengetahui bahwa di tempat lain pun banyak Orang Jawa berdasarkan informasi dari berbagai sumber seperti surat kabar, televisi maupun radio. Dengan demikian prasangka dan stereotip diperkuat pula oleh keterdedahan (terpaan) media massa yang menginformasikan tentang keberadaan kelompok etnik Jawa yang banyak menguasai berbagai segi kehidupan di Indonesia.

Dalam kehidupan politik, Orang Sunda tidak perhatian terhadap kelompok-kelompok etnik pendatang kecuali Orang Jawa yang dikatakan jelas orientasi pilihan politiknya. Sedangkan Orang Madura dianggap mempunyai prinsip kuat, tidak mudah dipengaruhi, dan dalam berpolitik sangat tergantung dari para pemuka pendapat dilingkungan mereka sendiri, yang bukan mustahil tidak sejalan dengan pilihan politik Kepala Desa. Berdasarkan penelitian Saleh Soeandi (1988) di daerah pedesaan Madura, Partai Persatuan Pembangunan cukup kuat, bahkan di beberapa desa partai yang mengusung agama Islam sebagai salah satu prinsip perjuangannya ini mengungguli Golongan Karya.

Pandangan Orang Sunda terhadap Orang Jawa ini didukung oleh kelompok-kelompok etnik lain. Dikatakan oleh penduduk asli desa, Orang Batak dan Minangkabau, kurang perhatian pada masalah politik di desa. Dengan demikian aspek modernisasi seperti dikatakan oleh Inkeles (dalam Etzioni, 1964) bahwa masyarakat modern aktif dalam percaturan politik, tidak tampak pada kedua etnik tersebut yang ada di desa lokasi penelitian. Dikaitkan dengan komunikasi, Dan Nimmo (1989: 146) menyatakan, ada orang-orang yang bergaya tertutup yang merahasiakan pilihannya dan sangat memuji kerahasiaan dalam politik. Sebenarnya orang Minangkabau dan Orang Batak tetap berpolitik, tetapi merahasiakan partai pilihannya pada pemilihan umum.

Secara singkat apa yang dikemukakan oleh kelompok etnik Sunda penduduk asli desa bersentuhan dengan karakteristik yang terkait dengan stereotip, prasangka dan tujuan materi yang ditunjang oleh sikap etnosentrisme dan keterdedahan media. Stereotip dapat berbentuk positif maupun negatif. Ini sejalan dengan pendapat Secord dan Backman (1979:30), “dalam stereotip ada sifat-sifat yang menyenangkan, dan adapula sifat yang atribusinya tidak menyenangkan”. Semua aspek berdiri sendiri atau saling melengkapi dalam tindakan tertentu. Misalnya dalam berdagang, melekat pula karakteristik nilai sosial budaya, sehingga tidak semata-mata didasarkan pada prinsip-prinsip ekonomi yang mencari keuntungan sebesar-besarnya tetapi ada pula nilai sosial yang merekatkan komunikasi antar manusia.

## B. Mengintegrasikan Perbedaan dalam Komunikasi Universal

Para pendatang di desa pantai utara Kabupaten Karawang Jawa Barat, walaupun pada umumnya menyatakan mereka mampu beradaptasi dengan lingkungan, dan berupaya untuk mengambil nilai positif yang dimiliki masyarakat setempat, tetapi ada nilai sosial budaya masyarakat setempat yang dianggap kurang sejalan dan berpotensi menghambat kelancaran interaksi dan komunikasi diantara pendatang dengan penduduk asli.

Sebenarnya karakteristik penduduk asli desa sepintas sulit untuk dideskripsikan secara spesifik, mengingat kondisi sosial dan ekonomi sama dengan masyarakat lainnya yang tinggal di desa. Disamping itu, dilihat dari aspek geografis, kawasan ini mudah dijangkau dengan transportasi darat. Sebab terletak di jalan negara, dan tersedia berbagai kemudahan angkutan umum yang menjadikan mobilitas masyarakat dapat dilakukan setiap saat. Dengan demikian komunikasi dan interaksi warga desa terjadi bukan hanya dengan berbagai kelompok etnik di wilayah desa sendiri saja, tetapi juga dengan beragam masyarakat yang melintas di wilayahnya yang sibuk sepanjang hari selama 24 jam.

Pola interaksi antar kelompok etnik di desa, membentuk pola komunikasi yang berlaku umum dan universal, serta disepakati oleh mereka yang melibatkan diri di dalamnya. Persoalan yang kemudian muncul, adalah kesepakatan sosial di antara mereka tidak selalu dipatuhi, karena pengaruh nilai sosial budaya yang dipelihara oleh masing-masing kelompok etnik dalam kehidupan sehari-hari tidak semuanya dapat beradaptasi dengan nilai, sikap dan kepercayaan kelompok etnik lain. Gambaran ini tampak pada pendapat Lusting (1988), bahwa budaya yang akan eksis, disebabkan oleh pengikut-pengikutnya yang berupaya untuk selalu melaksanakan apa yang terkandung di dalamnya, melalui pola-pola kebiasaan dalam kehidupan sehari-hari. Sementara itu, Samovar, Porter, dan Jain (1981) menyatakan bahwa budaya hadir dimanapun dalam kehidupan kita. Dengan demikian, pada hakikatnya budaya akan selalu melekat pada kelompok etnik, dimanapun mereka berkomunikasi dan berinteraksi dengan lingkungan fisik maupun non fisik.

Sehubungan dengan hal itu, untuk mengetahui pandangan dari kelompok etnik pendatang terhadap kelompok etnik Sunda dalam interaksi sosial, ekonomi, dan politik di desa lokasi penelitian dapat dilihat dalam tabel 2 di bawah ini.

**Tabel 7. Pendapat Kelompok-Kelompok Etnik Pendatang**

### Tentang Kelompok Etnik Sunda Meliputi Bidang Sosial Ekonomi Dan Politik

Kelompok Etnik Pendatang	Kelompok Etnik Sunda		
	Bidang Sosial	Bidang Ekonomi	Bidang Politik
Jawa	Terbuka, ramah, lebih percaya pada kelompoknya untuk hal tertentu, agamanya kuat. Mudah dipengaruhi, gotong royong luntur.	Petani yg kurang inovatif, tidak ulet, boros dan konsumtif. Mampu mengantisipasi keadaan yang berubah	Masing-masing punya orientasi pilihan politik yang jelas. Meskipun mayoritas cenderung ke partai penguasa

BAB 10: Membangun Komunikasi Antar Budaya

Minangkabau	Ramah, sopan tidak kesukuan, menjaga tradisi dan agama. Mudah dipengaruhi, gotong royong kuat.	Pandai bertani, kurang semangat kerja. Penggunaan uang untuk hal yang tidak produktif. Mengadalkan warisan tanah.	Pilihan politik sejalan dengan Kepala Desa
Batak	Ramah dan sopan, tidak kesukaan Toleransi agama tinggi. Tidak mandiri dalam sikap dan perilaku. Gotong royong dilakukan dengan terpaksa.	Pandai bertani, kurang ulet, seringkali kehabisan modal. Mengandalkan warisan tanah keluarga.	Sebagian besar berorientasi pada pilihan politik Kepala Desa
Madura	Baik dan sopan, hubungan sesama etnik kuat, menjaga norma dan agama. Mudah terpengaruh dalam urusan, kurang gotong royong.	Ekonomi Pandai bertani. Spekulasi kuat dalam jual beli tanah, semangat kerja kurang. Kurang perhitungan. Bisnis tanah dan sewa rumah	Pada umumnya dalam berpolitik sejalan dengan Kepala Desa, walaupun ada yang terpaksa.

**Sumber:** Hasil Pengolahan Data

Berdasarkan tabel tersebut dapat diketahui pada umumnya Orang Sunda dapat bergaul dengan baik dengan para pendatang dari berbagai kelompok etnik yang mencari kehidupan dan penghidupan di desa lokasi penelitian. Ini diakui oleh kelompok etnik yang menyatakan, bahwa penduduk asli sebagai tuan rumah, ramah mau menerima orang lain. Terkandung dalam pernyataan ini tentu saja seperangkat nilai positif yang dimiliki kelompok etnik Sunda. Sifat ini yang dipakai sebagai keteladanan oleh para pendatang, sehingga mereka pada umumnya merasa senang tinggal di kawasan pantai utara Jawa Barat ini. Tidak ada gangguan atau konflik yang berkepanjangan yang dialami oleh para pendatang. Walaupun pada awal kedatangan, banyak yang mengalami hambatan untuk bersosialisasi maupun mendapat gangguan dari sebagian kecil kelompok masyarakat setempat, yang sesungguhnya juga tidak disukai oleh warga desa.

Pendapat tentang Orang Sunda yang berhubungan dengan sikap lebih condong untuk bergaul dengan kelompok etniknya, semata-mata berhubungan dengan kepentingan tertentu menyangkut penyelenggaraan tradisi ataupun ritual desa yang memang lebih cocok dilakukan bersama dengan kelompok etniknya yang memiliki nilai, sikap dan persepsi yang sama. Fakta lain sikap mengelompok ini, muncul apabila warga desa asli terdesak dalam kompetisi sosial maupun ekonomi. Seumpama berebut pengaruh untuk dipercaya Kepala Desa atau kurang berhasil dalam mencapai kesejahteraan material meskipun berusaha dalam bidang yang sama. Sedangkan Orang Madura tetap melihat bahwa orang desa lokasi penelitian ini, memiliki semangat kelompok tinggi dengan melihat pola interaksi sehari-hari yang cenderung dengan kelompok etniknya.

Penilaian para pendatang di desa, pada umumnya menyatakan Orang Sunda kuat dalam kehidupan beragama. Ungkapan ini dapat dimaklumi. Terlebih lagi bagi sebagian kecil pendatang dari kelompok etnik Jawa yang merasa masih kurang dalam memahami masalah keagamaan. Penilaian positif juga disebutkan oleh Orang Batak, yang memuji Orang Sunda desa setempat memiliki toleransi tinggi, mengingat pendatang dari etnik Batak mendapat perlakuan sangat baik meskipun berbeda agama. Di lain pihak orang Minang dan Orang Madura melihat kehidupan beragama Orang Sunda dibandingkan dengan nilai yang berlaku di lingkungan sendiri. Kedua kelompok etnik ini, menilai bahwa orang desa setempat masih kuat menjaga tradisi nenek moyang, sehingga kegiatan kerohanian ataupun keagamaan juga berjalan seiring dengan tradisi yang sudah berlangsung turun temurun. Kendati demikian dalam perspektif Orang Madura, pergaulan antara laki-laki dan perempuan harus diawasi, mengingat perkawinan dan perceraian di desa ini mudah terjadi. Di lingkungan Orang Madura, masalah perkawinan dan pergaulan antara laki-laki dan perempuan merupakan salah satu sumber konflik yang bisa saja diselesaikan melalui serangan fisik. Di pihak lain Orang Sunda menurut Suhamihardja (dalam Ekadjadi, 1984:216), *berprinsip bahwa kawin hari ini, besok bercerai, lebih baik daripada anak perempuan tidak kawin sama sekali atau kawin dalam usia lanjut*. Ditambahkan oleh Suhamihadja, bahwa *mayarakat petani di daerah Karawang, musim panen identik dengan musim perkawinan sedangkan musim paceklik identik dengan musim perceraian*.

Dalam masalah gotong-royong, Orang Jawa menilai Orang Sunda desa setempat sikap dan perilaku gotong royong sudah memudar, karena Orang Jawa menerapkan konsep gotong-royong terlalu luas, sebagaimana dikemukakan oleh Kuncaraningrat (1977:16), bahwa gotong-royong sebagai suatu sistem pengerahan tenaga dalam pertanian, merupakan suatu sistem tolong-menolong dalam kehidupan sosial, dan gotong-royong juga sebagai sistem nilai yang menjiwai kebudayaan. Di lain pihak di desa lokasi penelitian, gotong-royong semakin pudar karena mobilitas penduduk, perkembangan industri dan perdagangan yang semuanya berorientasi pada kesejahteraan materi. Ini sejalan dengan pendapat Orang Batak yang menyatakan sikap dan perilaku gotong-royong di lingkungan penduduk asli etnik Sunda, dilakukan tidak dengan partisipasi penuh yang terikat oleh keterlibatan fisik, mental dan emosi, tetapi hanya keterlibatan fisik saja. Gotong royong di desa lokasi penelitian sesungguhnya masih memberikan sanksi sosial terhadap mereka yang tidak ikut serta didalamnya, tetapi karena kondisi masyarakat desa semakin materialistis, maka sanksi sosial tidak dihiraukan lagi.

Pendapat-pendapat yang menyatakan bahwa Orang Sunda warga desa pantai utara ini mudah dipengaruhi, didasarkan kenyataan bahwa warga desa terlalu baik dan terbuka kepada semua orang, termasuk terhadap orang-orang yang sebenarnya sedang mencari keuntungan seperti para pedagang kebutuhan konsumtif dan sekunder yang ditawarkan dengan sistem angsuran bunga tinggi. Kelompok etnik Minangkabau dan Batak menilai bahwa pengaruh dari luar desa yang sangat kuat berasal dari pendatang etnik

Jawa. Kondisi ini terlihat jelas dalam aktivitas sosial sehari-hari maupun dalam lembaga-lembaga pedesaan sebagai sub-ordinat kekuasaan pemerintahan desa. Dalam menilai sikap dan perilaku, Orang Jawa menilai Orang Sunda dapat cepat berubah khususnya jika terkait dengan nilai-nilai positif yang tidak bertentangan dengan keyakinan yang melekat pada kelompoknya. Sementara Orang Madura lebih tegas memberikan penilaian, dengan menyatakan Orang Sunda mudah karena terlalu baik, kadang-kadang dikelabui oleh mereka yang berniat tidak baik dan mencari keuntungan sendiri. Pendapat ini muncul karena merajalelanya calo tanah dan kaki tangan perusahaan yang memberikan informasi keliru kepada warga setempat, sehingga mereka dapat dengan mudah menjual tanahnya. Padahal bagi Orang Madura, menganggap tanah tidak dapat diperjual belikan dengan mudah. Lebih celaka lagi, uang hasil penjualan tanah tidak dipakai untuk kepentingan produktif tetapi untuk membelanjakan barang konsumtif. Disisi lain mereka seringkali kehabisan modal dan mencari modal melalui hutang dengan bunga yang tinggi untuk menggarap sawah ataupun kebun yang dimiliki.

Di sektor ekonomi, kelompok etnik pendatang sepakat bahwa Orang Sunda pandai bertani. Tetapi Orang Jawa tidak sependapat, mereka menyatakan bahwa Orang Sunda desa setempat kurang inovatif dalam masalah pertanian. Pandangan yang mendukung adalah tidak ada diversifikasi usaha pertanian yang mampu memberikan nilai tambah dalam penghasilan di sektor pertanian. Seharusnya sebagian lahan bisa untuk ditanami dengan sayuran dan palawija yang sedang laku di pasaran, sehingga memberikan penghasilan tambahan, selain hasil dari tanaman utama di lahan tersebut.

Karakteristik lain yang menarik pada orang setempat, adalah mampu mengantisipasi perkembangan dan perubahan. Mereka dipandang dapat mendayagunakan tempat tinggal untuk pemondokan para pendatang, pekerja pabrik-pabrik di kawasan desa. Banyak tanah-tanah kosong yang dibangun khusus untuk rumah petak untuk disewakan. Selain itu, penduduk asli desa dapat dapat mengendalikan harga tanah sesuai dengan perkembangan industri di desa. Walaupun seperti kata Orang Madura, ternyata penduduk setempat karena terlalu baik dan berterus terang dalam masalah penjualan tanah, maka seringkali justru dikelabui oleh para makelar tanah dari luar desa atau dari luar kota yang memang berprofesi dalam urusan jual beli tanah untuk kepentingan pabrik maupun usaha lainnya. Dinamika desa di sektor ekonomi, secara substantif memposisikan aspek material, efisiensi dan kerja keras sebagai faktor penting yang mampu mendorong tercapainya kesejahteraan masyarakat desa.

Dalam interaksi politik dan suasana perubahan dari desa yang diwarnai lahan pertanian produktif, menjadi desa yang di sebagian wilayahnya tumbuh industri dengan pesat, ternyata kecenderungan warga desa untuk memiliki kemandirian dalam berpolitik tidak tampak. Orang desa setempat memiliki kecenderungan kuat untuk mengikuti politik dominan dalam kekuasaan pemerintahan desa, dibandingkan aktif berpolitik dalam partai lain yang bukan partai pemerintah. Dengan kata lain, warga desa pada umumnya

sejalan dengan pilihan politik Kepala Desa yaitu Golongann Karya. Bagimanapun juga penduduk asli desa lokasi penelitian ini, secara historis masih menjaga dan menghargai otoritas tradisional yang dimiliki oleh Kepala Desa sebagai pemuka adat setempat yang tindakannya dipakai rujukan.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat diketahui bahwa kelompok etnik pendatang dalam memberikan pendapat terhadap kelompok etnik Sunda penduduk asli desa masih menggunakan ukuran kepercayaan, nilai dan sikap sebagaimana yang berlaku dilingkungan budayanya. Walaupun dalam aspek tertentu unsur-unsur itu akan hilang, karena faktor kepentingan yang dominan bagi individu maupun kelompok dalam hidup bermasyarakat di desa. Fenomena ini sejalan dengan konsep budaya super kultur, yaitu serangkaian gaya hidup yang padu dalam berbudaya rangkap, intinya, untuk beberapa aspek tetap mempertahankan budaya asli, sedangkan pada aspek lain mengikuti tujuan universal dengan dasar persamaan-persamaa. (Geertz, 1981). Dari pendapat ini, masyarakat desa lokasi penelitian, baik penduduk asli maupun pendatang mempunyai kecenderungan budaya rangkap. Pada satu segi tetap mempertahankan karakter budayanya, tapi disisi lain mereka akan memakai pola interaksi dan komunikasi yang lebih umum diterima oleh semua pihak dalam perubahan sosial pada desa multi etnik.

Pendapat berbeda-beda tentang Orang Sunda di lokasi penelitan, juga disebabkan oleh kadar komunikasi diantara kelompok etnik pendatang dengan penduduk asli, sehingga anggota kelompok etnik yang semula memahami Orang Sunda berdasarkan stereotip dan prasangka tertentu, dapat berubah karena frekuensi interaksi dan komunikasi yang dilakukan. Kincaid dan Schramm (1977) menyatakan, komunikasi merupakan salah satu pengalaman terpenting bagi manusia. Pihak-pihak yang turut serta dalam komunikasi, mau tidak mau pasti mengalami beberapa perubahan sikap dan perilaku. Perubahan dalam diri peserta komunikasi dapat berupa perubahan kecil belaka, atau adakalanya komunikasi merubah sama sekali gambaran yang dimiliki seseorang mengenai dirinya begitu pula tentang alam kehidupannya.

### **C. Menelisik Perubahan Peran Pemimpin dalam Kemajemukan Etnik**

Keanekaragaman etnik di salah satu desa kawasan pantai utara Kabupaten Karawang, Jawa Barat, merupakan suatu perwujudan dari dinamika wilayah penyangga industrialisasi di kota-kota besar. Dengan kondisi masyarakat setempat yang masih mengandalkan sektor agraris sebagai modal utama, tiba-tiba mereka dipacu untuk menyelaraskan dengan kehadiran industri di desanya. Keadaan yang antagonis ini, menimbulkan perbedaan kepentingan bagi individu, kelompok maupun lembaga yang memandang wilayah pedesaan dalam semua segi, perlu didayagunakan oleh masyarakat desa itu sendiri maupun pemerintah. Orang yang paling berperan untuk mendayagunakan semua potensi desa untuk kesejahteraan warganya adalah Kepala Desa. Dalam menggali potensi desa pada situasi perubahan sosial, perlu tindakan kepemimpinan yang mencakup peran

sebagai agen perubahan atau Agen Modernisasi. Dalam konteks ini, sebagai pejabat formal yang memiliki pengaruh luas, maka Kepala Desa juga harus mampu sebagai pelopor gerakan pembaharuan kearah yang lebih baik demi kesejahteraan masyarakat.

Peran sebagai agen modernisasi dalam keanekaragaman etnik menuntut Kepala Desa untuk berinteraksi dengan orang-orang dari berbagai etnik, yang masing-masing mempunyai nilai budaya yang berbeda. Interaksi dan komunikasi antar etnik dimaksudkan untuk memperoleh dukungan dalam peran agen modernisasi yang dikaitkan dengan kepercayaan, nilai dan sikap dalam budayanya, atau memberikan keuntungan-keuntungan ekonomis. Sementara itu, pilihan dalam sikap tidak mendukung, selain karena faktor nilai budaya dan orientasi ekonomis, ditujang pula oleh informasi dan terpaan media yang sejalan dengan perubahan sosial.

Eksistensi media massa sebagai faktor penyumbang perubahan sosial, termasuk bergesernya sikap-sikap masyarakat menjadi lebih dinamis dalam menyiasati kehidupan desa. Berdasarkan asumsi-asumsi tersebut, untuk lebih jelasnya, dapat dilihat pada pembahasan tentang Kepala Desa sebagai agen modernisasi, yang menggerakkan perubahan kearah yang lebih baik.

Penelaahan tentang agen modernisasi, tidak dapat dilepaskan dari pengertian modernisasi. Menurut Cyril E.Black (1976), modernisasi merupakan proses bertahap dari tatanan yang primitif dan sederhana, menuju tatanan yang maju dan kompleks. Modernisasi dikatakan sebagai proses homogenisasi dengan tendensi dan struktur yang sama, modernisasi juga sebagai proses yang tidak bergerak mundur dan tidak bisa dihentikan.

Berdasarkan pendapat Black, hakikatnya modernisasi adalah perubahan kearah kemajuan dengan tendensi dan struktur yang sama. Seorang pelopor modernisasi harus mampu menerapkan gerakan perubahan di masyarakat dalam bidang kehidupan sehari-hari yang melekat. Dengan demikian agen modernisasi adalah orang yang mempunyai peranan dalam proses melakukan perubahan kearah yang lebih baik. Agen modernisasi dikenal pula sebagai agen pembaharuan ataupun agen perubahan, yaitu petugas profesional yang berusaha mempengaruhi atau mengarahkan keputusan inovasi orang lain, selaras dengan yang diinginkan lembaga perubahan (Rogers dan Shoemaker, 1983)

Selanjutnya dalam perkembangannya, sebagai orang yang mampu menggerakkan perubahan, agen modernisasi menjadi mata rantai penyambung antara dua sistem sosial atau lebih, yang menghubungkan antara sistem sosial yang memelopori perubahan, dengan sistem sosial untuk menjadi klien dalam usaha perubahan. (Rogers dan Shoemaker, 1983). Peran lainnya menurut Havelock (1973), maupun Rogers dan Shoemaker (1983) adalah, menciptakan perubahan yang diinginkan, berkaitan dengan masalah yang rumit, antara lain mencakup kondisi masyarakat, aspek inovasi, dan kemampuan individual yang berhubungan dengan dinamika sosial, ekonomi dan politik.



Dalam peran menciptakan perubahan yang diinginkan, kemampuan individual erat hubungannya dengan kepemimpinan, yang merupakan kemampuan untuk mempengaruhi orang lain, guna memperoleh tujuan dan maksud tertentu. (Myers dan Myers, 1988). Jika dihubungkan dengan peran agen perubahan, aspek kepemimpinan yang dimiliki oleh agen modernisasi menjadi suatu modal kuat untuk mengajak masyarakat mengikuti gerakan perubahan kearah lebih baik yang diinginkan. Dalam konteks ini, pembahasan terhadap kepemimpinan Kepala Desa sebagai agen perubahan ataupun pembaharuan, melihat pula sampai sejauh mana tugas-tugas perubahan berhasil dilaksanakan oleh Kepala Desa sebagai orang yang paling bertanggung jawab dalam pembangunan di tingkat pedesaan. Sebagaimana sudah dijelaskan, bahwa desa lokasi penelitian ini, merupakan desa kawasan pantai utara yang masih memiliki karakter desa tradisional. Namun pertumbuhan industri, yang diwarnai dengan munculnya pabrik-pabrik, menjadikan desa asli ini mengalami perubahan lingkungan fisik dan non fisik yang sangat cepat. Terlebih lagi, berkembangnya teknologi komunikasi dan informasi di wilayah pedesaan, menjadikan situasi sejumlah kawasan pedesaan menjadi sangat heterogin jika dilihat dari segi etnisitas, yang memiliki karakteristik kompleks.

Perubahan dalam semua segi kehidupan di pedesaan, membawa akibat bukan semata-mata pada perubahan konstelasi sosial, ekonomi dan politik, tetapi juga perubahan dalam pola-pola komunikasi diantara sesama warga desa, baik yang satu kelompok etnik maupun yang berlainan etnik. Akibat lebih jauh lagi adalah perubahan pola-pola komunikasi yang dipakai oleh para tokoh formal maupun informal di pedesaan, yang semula diwarnai oleh pengaruh otoritas tradisional dalam budaya petunjuk dan pengarahan, semakin bergesar menjadi komunikasi interaktif, antara masyarakat dan pemimpin dalam pola yang lebih egaliter. Manifestasi dari pola komunikasi dua arah yang demokratis ini, menyebabkan masyarakat berani secara terbuka memberikan kritik, ketidakpuasan maupun masukan bagi Kepala Desa dalam kapasitas sebagai pelopor gerakan perubahan dan pembaharuan, demi kesejahteraan warga desa.

Sejumlah orang dalam kelompok masyarakat di pedesaan, berpendapat, bahwa tindakan yang dilakukan Kepala Desa pada satu segi mengandung peran agen modernisasi yang positif dalam konteks gerakan perubahan, tetapi dari segi lain tidak tampak unsur-unsur tersebut. Bahkan terkesan stagnan tanpa bergerak maju, dan mengalami kemunduran dalam nilai-nilai sosial yang menjadi acuan warga desa. Gambaran yang lebih jelas tentang pendapat berbagai kelompok etnik terhadap peran Kepala Desa sebagai agen modernisasi yang melakukan gerakan perubahan adalah sebagaimana yang ada pada Tabel 8.



**Tabel 8. Kepemimpinan Kepala Desa sebagai Agen Modernisasi ditinjau dari Kegiatan Sosial, Ekonomi dan Politik Berdasarkan Pendapat Kelompok Etnik Penduduk Asli dan Pendatang**

Bidang Kegiatan	Kel. Etnik Sunda	Kelompok Etnik Pendatang			
		Jawa	Minangkabau	Batak	Madura
Pembinaan Generasi Muda	TL	L	TL	TL	TL
Kerohanian	L	L	TL	L	TL
Pendidikan	L	TL	TL	TL	L
Olah Raga	L	L	L	TL	L
Kesenian	TL	TL	L	TL	L
Industri	TL	L	L	L	L
Perdagangan	TL	L	L	L	L
Pertanian	TL	TL	L	TL	L
Pemilihan Umum	L	L	L	L	TL
Praktek Politik	L	L	TL	TL	TL

**Sumber:** Hasil Pengolahan Data **Keterangan:** L = Layak, TL = Tidak Layak

Tabel tersebut mencakup tiga bidang kegiatan sosial, ekonomi dan politik yang dilakukan Kepala Desa. Bidang Sosial meliputi: pembinaan generasi muda, kerohanian, pendidikan, olah raga, dan kesenian. Bidang Ekonomi mencakup: industri, perdagangan, dan pertanian. Sedangkan Bidang Politik terdiri dari pemilihan umum dan praktek politik.

Dari tabel ini, dapat diketahui bahwa pendapat masing-masing kelompok etnik berbeda dalam memandang kelayakan Kepala Desa sebagai agen modernisasi. Layak dapat diartikan sebagai kepastian, kesesuaian, atau kemampuan orang nomor satu di desa ini, dalam melaksanakan tugas-tugas pemerintahan desa, yang mengandung peran sebagai agen modernisasi yang mampu melakukan gerakan perubahan. Sedangkan pernyataan tidak layak, adalah jika Kepala Desa dipandang tidak mampu menjalankan tugas pemerintahan desa dalam peran sebagai agen modernisasi yang diharapkan warga dari berbagai kelompok etnik di desa.

Dalam kondisi heterogenitas etnik, dan berbagai macam perubahan-perubahan yang terjadi di pedesaan, kelompok etnik yang menyatakan layak dalam salah satu kegiatan, ternyata dapat menyatakan tidak layak dalam segi kegiatan lainnya yang ditangani oleh Kepala Desa. Pada konteks ini, termasuk orang-orang Sunda warga asli desa, tidak selalu mendukung kebijakan Kepala Desa, walaupun mereka merasa memiliki ikatan satu etnik. Demikian pula orang-orang yang bukan satu etnik dengan Kepala Desa, tidak selalu berbeda atau tidak mendukung program Kepala Desa, sebagaimana tampak dalam berbagai kasus di desa. Para pendatang ini justru memberikan respon positif kepada Kepala Desa dalam menjalankan perannya sebagai agen perubahan.

Dalam kegiatan sosial yang berhubungan dengan pembinaan olah raga, satu-satunya kelompok etnik yang menyatakan bahwa Kepala Desa layak dalam menjalankan fungsi agen modernisasi hanya kelompok etnik Jawa. Pernyataan ini dapat dimaklumi, mengingat Orang Jawa di desa ini, merasakan hasil pembinaan yang dilakukan oleh Kepala Desa. Orang Jawa memegang kendali dalam kegiatan generasi muda di desa lokasi penelitian. Anak-anak muda kepercayaan Kepala Desa yang membantu menyebarkan pesan-pesan pembangunan di lingkungan generasi muda, pada umumnya orang yang cukup terdidik. Namun sebaliknya, ketiga etnik lain, tidak melihat tindakan Kepala Desa layak sebagai agen modernisasi yang mampu menciptakan gerakan perubahan kearah yang lebih baik. Pendapat ini pada umumnya dititikberatkan pada masalah pengangguran di kalangan generasi muda yang cukup banyak jumlahnya. Hampir di setiap pusat-pusat keramaian di wilayah desa, memang tampak anak-anak muda yang tidak memiliki pekerjaan jelas. Keadaan ini tidak terjadi di lingkungan para pendatang etnik Jawa. Hampir seluruh anak muda etnik Jawa sebagai pendatang di desa ini, mempunyai pekerjaan dan usaha yang jelas. Orang Minang dan Orang Batak selain melihat banyaknya anak muda penduduk setempat yang menganggur, mereka melihat bahwa Kepala Desa kurang menunjukkan upaya untuk membina generasi muda, sehingga anak-anak muda mempunyai kegiatan yang kurang terarah dan tidak memberikan manfaat sosial maupun ekonomi.

Orang Sunda warga setempat, disamping memendam ketidakpuasan dan kecewa terhadap masalah pengangguran di desa, juga merasa tidak dipercaya oleh Kepala Desa dalam urusan kegiatan kepemudaan. Kepala Desa secara faktual lebih mengandalkan Orang Jawa untuk memimpin organisasi pemuda di desa seperti Ketua Karang Taruna, dan Ketua Seksi Pemuda dalam Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa.

Dalam kegiatan kerohanian, kelompok Etnik Sunda, Jawa dan Batak menyatakan bahwa Kepala Desa layak disebut sebagai agen modernisasi. Sementara itu, kelompok etnik Sunda dan Jawa, lebih menitik beratkan pada pengamatan terhadap maraknya aktivitas kerohanian seperti pengajian, peringatan hari besar keagamaan, dan pembangunan sarana fisik dalam kegiatan penunjang kerohanian, seperti pembangunan masjid, mushola, madrasah dan majelis taklim. Dalam aspek ini, Orang Jawa menambahkan, bahwa unsur pemahaman keagamaan yang baik dari Kepala Desa, menjadikan tradisi pedesaan tetap bisa berjalan seiring dengan kehidupan kerohanian yang meningkat. Sedangkan Orang Batak, sebagai kelompok etnik yang mempunyai agama berbeda dengan masyarakat desa setempat, pada umumnya mereka menilai baik, karena selain melihat frekuensi kegiatan keagamaan yang tinggi, juga mengkaitkan pada toleransi hidup beragama yang dijunjung tinggi di desa kawasan pantai utara ini.

Kendati demikian, kelompok etnik Minang tidak melihat adanya unsur perubahan kearah yang lebih baik dalam kegiatan sosial kerohanian, sebab dikatakan yang menonjol justru acara seremonial terkait dengan acara tradisional khas desa ini. Sejalan dengan itu, Orang Madura yang menurut berbagai kelompok etnik kuat dalam menjalankan agama,

lebih banyak melihat bahwa acara kerohanian kurang melibatkan kelompok etnik Madura yang sesungguhnya juga mempunyai perhatian besar terhadap kegiatan kerohanian. Kondisi ini mengakibatkan penilaian terhadap Kepala Desa masuk pada koridor tidak layak, karena dianggap kurang berperan dalam menciptakan masyarakat yang konsisten terhadap norma-norma agama. Orang Madura juga menyoroti banyaknya peserta dalam berbagai kegiatan rohani, tetapi disisi lain belum sepenuhnya dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari di desa.

Kelayakan sebagai agen modernisasi, dalam pelaksanaan pendidikan diakui oleh Orang-orang Sunda dan Orang Madura, yang melihat banyaknya sekolah formal di desa lokasi penelitian. Berbeda dengan mereka, adalah Orang Jawa dan Orang Batak, yang melihat tidak ada unsur kelayakan peran sebagai agen pembaharuan, dengan mengkaitkan rata-rata masyarakat desa penduduk asli berpendidikan rendah. Pendapat ini juga disepakati oleh Orang Minang yang melihat pada umumnya pendidikan warga desa masih kurang layak, jika dihubungkan dengan kesempatan kerja di pabrik.

Namun keempat kelompok etnik ternyata sepakat tentang kelayakan peran Kepala Desa, sebagai agen modernisasi dalam menggairahkan olah raga. Dikemukakan oleh informan Jawa bahwa, Kepala Desa memakai sarana olah raga demi untuk meningkatkan hubungan baik antar kelompok etnik di desa. Tetapi Orang Batak menilai lain, karena menghubungkan dengan prestasi yang belum memadai di bidang olah raga. Selain itu, kegiatan olah raga hanya mengandalkan pungutan warga desa, sehingga mereka menyatakan Kepala Desa tidak layak sebagai pelopor perubahan kearah lebih baik di bidang olah raga.

Jika sebagian warga menilai pembinaan olah raga berhasil, dan Kepala Desa layak sebagai agen perubahan, sebaliknya masalah kesenian, Kepala Desa tidak dinyatakan layak sebagai orang yang mampu dalam melakukan pembinaan kesenian tradisional. Pendapat ini dikemukakan oleh orang-orang dari kelompok Sunda, Orang Jawa dan Orang Batak. Orang Sunda dan Orang Jawa prihatin dengan sikap Kepala Desa yang tidak tergugah melihat kesenian tradisional semakin punah. Kesenian tradisional seperti sandiwara panggung jarang dipentaskan, diganti dengan pertunjukan organ tunggal, dan kesenian temporer lain yang semakin disukai anak-anak muda pedesaan. Orang Batak juga berpendapat, pertunjukan kesenian yang diselenggarakan pemerintahan desa dalam berbagai perhelatan, seringkali justru memberatkan warga. Sebab biaya penyelenggaraan ditanggung oleh warga desa. Sementara yang menyatakan Kepala Desa berperan yang layak dalam membina kesenian desa, adalah kelompok etnik yang hanya menyoroti eksistensi orang nomor satu di desa ini, dalam hal kerajinan menghadiri pertunjukkan kesenian tradisional yang diselenggarakan warga desa.

Dalam kegiatan ekonomi, yang terdiri dari upaya menunjang sektor industri, perdagangan dan pertanian, terdapat beberapa kenyataan yang menarik untuk ditelaah lebih rinci. Penilaian terhadap keterlibatan Kepala Desa pada sektor industri

dan perdagangan, keempat kelompok etnik pendatang sepakat bahwa Kepala Desa membawakan peran yang mendukung kelancaran industrialisasi yang beroperasi di desa. Mereka menyatakan demikian, karena kelompok-kelompok etnik pendatang adalah orang yang menikmati kesejahteraan dari munculnya pabrik-pabrik di desa lokasi penelitian. Memang bukan berarti bekerja sebagai karyawan atau pekerja di pabrik, tetapi bisa saja usaha mereka bersentuhan dengan orang-orang yang bekerja di pabrik, maupun menyediakan kebutuhan bagi pekerja pabrik. Karena itu, sangat wajar jika kelompok-kelompok etnik pendatang mengakui bahwa Kepala Desa memiliki peran sangat berarti dalam industri di pedesaan. Aspek lainnya yang mendukung kelayakan sebagai penggerak perubahan adalah, sikap dan perilaku aparat pemerintahan desa di bawah kendali Kepala Desa, yang cenderung membela kepentingan para pendatang yang berurusan dengan pabrik di pedesaan.

Khususnya untuk pertanian, dua kelompok etnik pendatang yaitu Madura dan Minang, menyatakan Kepala Desa layak dalam menjalankan peran sebagai agen perubahan di bidang pertanian. Orang Minangkabau melihat kelayakan dari sisi produktivitas pertanian masyarakat setempat, yang mampu memenuhi kebutuhan mereka terhadap beras, sayuran palawija, unggas dan ikan air tawar. Sedangkan Orang Madura membandingkan dengan daerahnya yang tergolong kurang subur, dengan tanaman dominan jagung dan singkong, maka melihat hasil pertanian di desa ini, sebagai suatu hal yang jauh lebih baik dibandingkan di tempat asalnya. Disamping itu, dua kelompok etnik tersebut melihat keterlibatan Kepala Desa secara fisik dalam pembentukan bermacam-macam kelompok tani, merupakan ukuran keberhasilan dalam menjalankan peran agen pembaharuan.

Menarik untuk ditelaah lebih lanjut adalah pendapat penduduk asli, yang cenderung tidak menempatkan Kepala Desa layak sebagai pelopor gerakan perubahan kearah yang lebih sejahtera di sektor ekonomi. Mereka kecewa terhadap tindakan-tindakan Kepala Desa yang mengabaikan kerugian-kerugian tanah pertanian milik warga akibat pabrik-pabrik yang beroperasi di desa melakukan pencemaran lingkungan dan membuat kesuburan tanah menjadi berkurang. Memang tingkat kepercayaan terhadap Kepemimpinan Kepala Desa memudar, dan terus turun drastis sejak kasus demonstrasi menentang pendirian salah satu pabrik yang dianggap merusak lingkungan. Dalam konteks ini, Kepala Desa dipandang sebagai orang yang bertanggung jawab memberikan informasi keliru tentang jenis pabrik yang akan beroperasi di desa. Misalnya dikatakan perusahaan pengembangan pertanian, perikanan darat, maupun peternakan, tetapi kenyataannya, pabrik tersebut berusaha di bidang penambangan sumber daya alam setempat, yang sudah tentu merugikan sebagaimana warga desa. Akibat masalah ini, informasi dari aparat desa kurang akurat, maka masyarakat lebih mempercayai media massa, dan sumber lain yang lebih kompeten memberikan informasi aktual. Kekecewaan dan ketidakpercayaan terhadap Kepala Desa semakin besar, setelah janji bahwa industrialisasi akan memberikan lapangan kerja yang luas bagi penduduk asli desa etnik Sunda, ternyata hanya janji yang

tidak kunjung terwujud dengan baik. Namun sebenarnya kondisi ini tidak sepenuhnya dapat memposisikan Kepala Desa mengingkari janji. Sebab pabrik-pabrik yang beroperasi di pedesaan menetapkan persyaratan tertentu bagi warga desa yang akan bekerja. Celaknya aneka persyaratan tersebut tidak semuanya dapat dipenuhi oleh warga desa penduduk asli, seperti masalah pendidikan minimal Sekolah Menengah Atas. Sedangkan sebagai buruh kasar di pabrik, memang ada yang tidak menetapkan syarat pendidikan, tetapi pola kerja pabrik yang teratur dan terjadwal dengan baik, menyebabkan penduduk desa yang sudah memperoleh kesempatan kerja tidak mampu bertahan lama. Mereka terbiasa bekerja mengatur jadwalnya sendiri, dan terperangkap dalam budaya kerja yang tidak produktif, sehingga keteraturan kerja dianggap membelenggu kebebasan.

Dalam pengamatan sekelompok etnik pendatang, menunjukkan bahwa Kepala Desa wajib berfokus untuk memberikan perhatian terhadap masalah pertanian. Sebab, ada anggapan keterlibatannya, hanya untuk memenuhi syarat yang diperlukan dalam kelembagaan pertanian desa seperti Kelompok Tani dan Perkumpulan Tani Pengguna Air (P3A), dan Kredit Usaha Tani (KUT). Kelembagaan pertanian yang dimaksudkan untuk mengintrodusir ide baru dalam peningkatan produksi padi, ternyata tidak mempunyai kegiatan teratur seperti dalam tujuan yang telah ditetapkan. Produksi pertanian, palawija serta sayuran sejak tahun 1988 tidak mengalami kenaikan yang berarti bahkan palawija dan sayuran mengalami penurunan produksi yang cukup tajam (Laporan Kepala Desa Tahun 1995).

Orang Jawa sebagai pendatang di desa ini, pada umumnya berpendapat bahwa Kepala Desa harus meningkatkan perhatian terhadap masalah pertanian. Bahkan Orang-orang Jawa aktif membela tanah pertanian supaya tetap dimanfaatkan untuk sawah atau kebun, dan menentang pembangunan pabrik yang berpotensi merusak lingkungan desa yang subur. Dalam masalah pertanian Orang Jawa dan Orang Sunda mempunyai persepsi yang sama, bahwa Kepala Desa wajib menjaga kelestarian tanah pertanian. Ketidakmaksimalan Kepala Desa dalam kegiatan pembangunan bidang pertanian ini, juga dikemukakan oleh Orang Batak yang ada di desa lokasi penelitian. Gambaran ini sejalan dengan keyakinan Orang Batak, "dalam tradisi menjaga lingkungan yang harmoni, mencemari lingkungan desa, adalah suatu pelanggaran berat". (Vergouwen, 1986). Dalam pencemaran lingkungan yang terjadi di desa, orang yang harus bertanggung jawab adalah Kepala Desa, karena dinilai ikut andil dalam memberikan informasi yang berbeda kepada masyarakat desa.

Walaupun sesungguhnya, belum tentu Kepala Desa juga mengetahui sepenuhnya apa saja yang akan diproduksi oleh pabrik-pabrik di wilayahnya. Terlebih lagi pembangunan bersifat *top-down*, rantai perijinan didominasi oleh pemerintah pusat beserta organ-organ kekuasaan yang sangat mungkin tidak melibatkan pemerintahan desa, atau sangat minim dan tidak signifikan keterlibatan aparat pemerintah desa dalam pendirian pabrik-pabrik di wilayah desa yang subur.

Dalam perannya di bidang politik, yang menyangkut kegiatan pemilu tahun 1997, kecuali kelompok etnik Madura, keempat kelompok etnik yaitu Sunda, Jawa, Minang dan Batak, sepakat menyatakan adanya unsur agen pembaharuan yang dilakukan oleh Kepala Desa. Tetapi untuk praktek politik atau tindakan politik, hanya etnik Jawa dan Sunda yang menyatakan bahwa Kepala Desa tidak membeda-bedakan orang berdasarkan partai politik yang diikuti. Alasannya, tidak ada kelompok pendatang yang dihambat dalam urusan dengan pemerintahan desa karena perbedaan politik, atau pilihan partai politiknya. Bahkan Kepala Desa mengajak bekerjasama dengan mereka yang berbeda pilihan politik dalam aneka kegiatan di desa lokasi penelitian yang sedang berubah.

Peran dalam politik yang dinilai cukup baik ini, menunjukkan bahwa pola kepemimpinan Kepala Desa dalam kehidupan politik adalah sebagai bentuk dari gaya kepemimpinan demokratis. Menurut French (1978:52) kepemimpinan demokratis adalah gaya kepemimpinan dengan kesederajatan (equalitarian), terjadi komunikasi dua arah, pemimpin berkonsultasi dengan anak buah untuk merumuskan tindakan dan keputusan bersama yang tidak mencakup semata-mata tentang tujuan organisasi. Berdasarkan pengertian French, maka unsur yang menonjol dalam gaya kepemimpinan Kepala Desa adalah kesederajatan dan komunikasi dua arah. Bukan kekuasaan otoriter satu arah, yang memberikan kekuasaan besar pada pemimpin (Astrid S. Susanto, 1974). Kendati demikian, ternyata dalam penetapan pengurus lembaga-lembaga desa yang menjadi kepanjangan tangan pemerintahan desa, Kepala Desa tetap memiliki kecenderungan untuk lebih memperhatikan mereka yang satu kelompok politik walaupun tidak satu etnik.

Berdasarkan uraian tentang pendapat kelompok-kelompok etnik tersebut, menunjukkan bahwa pendapat yang dikemukakan masih diwarnai oleh persepsi yang dipengaruhi oleh kepercayaan, nilai sikap, organisasi sosial dari worldview (Samovar, Porter dan Jain, 1988). Tetapi faktor tersebut tidak bersifat mutlak di desa yang sedang mengalami perubahan, mengingat karakteristik modernisasi berfokus pada pencapaian kemakmuran dan keadilan. Menurut Etzioni (1964) ciri masyarakat yang semakin modern adalah, semakin independen terhadap otoritas tradisional, melemahnya otoritas tradisional diikuti menguatnya hubungan sosial yang bersifat rasional dan bisnis, dibandingkan ikatan emosional (Rogers dan Shoemaker, 1971).

Perwujudan dari menguatnya proses modernisasi di pedesaan adalah, keberanian penduduk asli desa untuk berbeda pendapat dengan Kepala Desa. Walaupun mereka mempunyai tradisi dan ikatan emosional kuat tetapi berani untuk menyatakan tidak sependapat dalam peran tertentu, yang dipandang tidak dapat mengubah keadaan desa menjadi lebih baik. Karena itu, orang asli desa beretnik Sunda, cenderung pasif untuk mengakui peran Kepala Desa sebagai pelopor dalam pembaharuan perekonomian masyarakat desa. Sikap warga desa penduduk asli tersebut sejalan dengan pendapat Rogers (1985), bahwa pembangunan harus memiliki unsur pemerataan penyebaran

informasi, keuntungan sosial dan ekonomi kepada masyarakat. Merujuk kepada pendapat itu, penilaian orang Sunda terhadap peran Kepala Desa sebagai pelopor gerakan perubahan, mengarah pada posisi yang kurang menguntungkan dan bersifat negatif.

Meskipun pengaruh modernisasi cukup menonjol, tetapi dalam keadaan tertentu, nilai tradisional masih kuat di lingkungan kelompok etnik pendatang di desa. Ini dapat dilihat bagaimana Orang Batak yang menyatakan Kepala Desa masih belum sesuai untuk disebut sebagai pelopor gerakan perubahan di bidang pertanian. Orang Batak memang tidak ada yang berurusan dengan usaha pertanian di desa ini, tetapi mereka yang di tempat asalnya juga bersentuhan dengan pertanian dan perkebunan, tentu memahami pola hidup agraris yang harus mengedepankan lahan pertanian untuk kemakmuran desa.

Disamping pandangan positif dan negatif yang dihubungkan dengan tradisi maupun nilai ekonomis, terdapat penilaian yang menggabungkan kedua unsur tradisi dan ekonomi, seperti persepsi Orang Sunda tentang tanah pertanian, bahwa *pemeliharaan tanah pertanian adalah wajib bagi orang Sunda walaupun orang tersebut sudah sukses di bidang lainnya*. (Mustapa, 1985). Prinsip ini disepakati oleh Kepala Desa maupun warga desa penduduk asli sebagai orang Sunda yang menjunjung tradisi turun-temurun.

Faktor lain yang ikut membentuk pendapat kelompok-kelompok etnik berbeda terhadap peran Kepala Desa, adalah eksistensi media massa yang lebih transparan memberikan informasi tentang pembangunan pabrik-pabrik di desa. Padahal Kepala Desa dan aparat pemerintah yang tampak aktif dalam hal negosiasi, pengukuran tanah warga, dan hal lain terkait pembebasan tanah tidak pernah secara jelas memberi informasi kepada warga desa. Mungkin saja memang aparat desa tidak memperoleh informasi yang lengkap tentang peruntukan tanah, mengingat masalah ini seolah-olah sebagai kebijakan pusat dan desa tinggal menerima saja. Ketidaktransparanan informasi yang berkembang di lingkungan desa inilah yang membuat warga masyarakat mencari sumber informasi dari media massa. Dengan demikian, dapat disimpulkan media massa mempunyai peran dalam perubahan yang terjadi di masyarakat, dan mendorong untuk berani mengkritisi pola kepemimpinan aparatur desa yang tidak sesuai dengan harapan. Sehaluan dengan kondisi ini, DeFleur (1988) menyatakan, pengaruh media terhadap individu maupun kelompok, telah berhasil menumbuhkan pembaharuan yang berjalan pesat, pembaharuan berwujud perubahan (*change*) maupun pembangunan (*development*) yang pada umumnya diartikan suatu proses berlanjut yang menyangkut hubungan antara media dengan massa.

Sejalan dengan DeFleur, tentang perubahan yang terjadi di pedesaan, A. Muis (1983) dalam penelitiannya menemukan, "keterdedahan penduduk pedesaan pada televisi, menimbulkan perilaku komunikasi bebas, yang disertai dengan keberanian mereka untuk mengkritik orang-orang yang dalam posisi kepemimpinan". Selama ini komunikasi diantara pemimpin dan penduduk desa bersifat satu arah, dari pimpinan ke penduduk desa. Apa yang terjadi di masyarakat, adalah kebijakan pemilik otoritas formal maupun

otoritas tradisional dalam kehidupan bermasyarakat yang menyangkut berbagai segi kehidupan.

Berdasarkan uraian tentang terpaan media, desa kawasan pantai utara Jawa Barat ini lokasinya mudah dijangkau. Media massa dapat diakses maupun ditemukan dengan gampang khususnya di pusat-pusat keramaian desa. Oleh sebab itu, hampir sebagian besar penduduknya berhubungan dengan media massa. Warga desa sering membandingkan yang dilihat atau dibaca dari media massa, sebagai acuan untuk mengekspresikan tindakan dan sikap tidak setuju, terhadap berbagai persoalan yang tidak sesuai dengan kepentingan atau tidak sesuai dengan nilai-nilai dalam kelompok budaya yang dipercaya.

Dengan demikian bahwa masyarakat desa lokasi penelitian yang mengalami perubahan konstelasi sosial, ekonomi dan politik, sesungguhnya tidak terlepas dari peran media massa. Perubahan memberikan dampak terhadap sikap masyarakat dalam menerima atau mempercayai informasi dari Kepala Desa. Informasi yang dianggap tidak layak untuk dipercaya, karena tidak menyampaikan kebenaran isi pesan yang sesungguhnya. Misalnya dalam urusan pembebasan tanah untuk membangun pabrik-pabrik di wilayah desa, seringkali pesan yang disampaikan ke masyarakat berbeda dengan yang sesungguhnya akan dilaksanakan oleh para pemilik modal.



# BAB 11

## KOMUNIKASI ANTAR BUDAYA MENDORONG PERUBAHAN

---

### A. Saluran Komunikasi Sebagai Fondasi Perubahan

Keanekaragaman budaya di pedesaan menciptakan pola keragaman sosial dalam kehidupan di desa. Disisi lain masyarakat membentuk komunikasi dan interaksi yang lebih bersifat universal, untuk tujuan ekonomis sebagaimana dalam prinsip modernisasi menurut Berger; yang salah satu intinya adalah, hidup dan berinteraksi dengan sejumlah besar orang asing diluar kelompoknya dengan tujuan utama transformasi kehidupan material yang lebih baik (Peter L. Berger, 1990:43-46). Berdasarkan asumsi ini, keanekaragaman etnik mengakibatkan berbagai macam perubahan dalam aspek sosial ekonomi yang berkembang dan menciptakan tujuan rasional, untuk mencapai kesejahteraan material. Namun disatu segi nilai, sikap dan kepercayaan diri budayanya masih tetap dipelihara oleh masing-masing kelompok etnik.

Sebagaimana telah dijelaskan, media massa merupakan suatu saluran penting yang mendorong besar warga desa untuk melakukan perubahan, maka pandangan masyarakat, juga diwarnai oleh keterlibatan mereka dengan media massa. Lerner (1992) menyatakan, bahwa media massa merupakan kekuatan dinamis dalam modernisasi untuk menyebarkan hasrat hidup baru yang lebih baik dengan kesejahteraan yang faktual. Rogers melengkapinya dalam kaitannya dengan masyarakat desa sebagai berikut: meskipun eksistensi media massa ini diakui sebagai faktor yang menunjang perubahan, tetapi saluran komunikasi untuk menciptakan perubahan di pedesaan mencakup dua saluran yaitu media massa dan komunikasi interpersonal. Dua Pendapat ini terasa cocok dengan kondisi desa Pantai Utara Jawa di Kabupaten Karawang Jawa Barat ini. Pada satu sisi masyarakat masih mengandalkan pola-pola tradisional dalam komunikasi antar pribadi untuk menyebarkan pesan atau isu-isu pembangunan yang mereka terima dari pemuka pendapat. Sementara itu, terpaan media massa yang bertubi-tubi mengakibatkan informasi yang terdapat dalam media massa dianggap sebagai sumber informasi yang

relevan, dan layak untuk dipercaya sehingga masyarakat memakainya sebagai pedoman untuk bermasyarakat.

Dampak dari proses modernisasi, media massa memberikan informasi beragam dan berbeda dengan pesan yang disampaikan para pemilik kekuasaan. Di pihak lain, pemeliharaan nilai-nilai budaya asli yang dimiliki oleh masing-masing etnik pendatang di desa. Memiliki subjektivitas dalam memberikan penilaian terhadap Kepala Desa sebagai penggerak perubahan yang kompleks. Dalam melakukan fungsi perubahan sebagaimana yang melekat pada agen modernisasi, tindakannya selalu dipandang oleh masing-masing kelompok etnik dari sudut yang menguntungkan bagi kelompoknya. Keadaan ini dikatakan sebagai bentuk-bentuk dukungan dalam menjalankan peran agen perubahan. Sedangkan yang tidak memberikan kontribusi untuk kehidupan yang lebih baik dianggap sebagai kendala dalam menjalankan peran sebagai agen perubahan yang melekat dalam diri orang paling berkuasa di desa. Untuk lebih jelasnya bagaimana pendapat masyarakat tentang kendala dan faktor-pendukung kepemimpinan Kepala Desa sebagai Agen Modernisasi dapat diketahui dari Tabel 9 di bawah ini.

**Tabel 9. Pendapat Kelompok Etnik Penduduk Asli dan Pendatang Terhadap Kendala & Faktor-Faktor Pendukung Kepemimpinan Kepala Desa Sebagai Agen Modernisasi**

Kelompok Etnik	Kendala	Faktor Pendukung
Sunda	Kurang memberikan kepercayaan terhadap penduduk asli. Lebih memperhatikan kelompok etnik pendatang Pendidikan masih rendah. Tidak konsisten dalam bidang pertanian. Lebih perhatian terhadap industri di desa dibandingkan pertanian. Terlalu lama dalam jabatan dan statis.	Memiliki semangat dalam melindungi kelompok etnik Memiliki banyak pengalaman. Sifat kekerabatan masih menonjol. Disegani dan dihormati. Inovatif dalam masalah perekonomian desa. Demokratis dalam politik dan pemilihan umum
Jawa	Kurang perhatian terhadap potensi alam dan sosial. Tidak memiliki keterampilan administrasi. Menghindar dari masalah yang rumit. Lebih condong kepada kepentingan modal kuat disektor industri. Kemampuan komunikasi publik rendah.	Mempunyai empati tinggi terhadap pendatang. Tidak kesukuan dalam pelayanan publik dan pergaulan Demokratis dalam memilih pengurus lembaga-lembaga desa. Pengalaman dalam pemerintahan desa hubungan baik dengan orang pabrik/perusahaan di desa Menjaga agama dan tradisi.

BAB 11: Komunikasi Antar Budaya Mendorong Perubahan

Minangkabau	Kecenderungan pendatang dijadikan donatur. Kurang memperhatikan peningkatan sumber daya manusia. Kurang dinamis dalam menjalankan pemerintahan Terlalu banyak kegiatan dan seremoni yang tidak efisien Kurang memperhitungkan situasi komunikasi dalam pidato.	Banyak membantu kelancaran usaha dan perdagangan. Hubungan baik dengan pengusaha. Kesungguhan dalam menunjang industrialisasi di desa Sebagai sumber informasi yang dipercaya. Memiliki sejumlah sifat-sifat keteladanan. Didukung kekuatan eksternal dalam struktur pemerintahan maupun elite
Batak	Kurang terbuka dalam pendanaan kegiatan desa Lebih condong kepada pemerintah pusat dibanding kepada warga desa. Pesan-pesan pembangunan disampaikan berulang-ulang. Kredibilitas di lingkungan warga desa tidak stabil.	Tidak membedakan status sosial, ekonomi dan politik. Toleransi agamanya tinggi. Terbuka terhadap warga yang berkepentingan. Memiliki kewibawaan di masyarakat Mampu menjaga tradisi desa yang positif.
Madura	Terlalu banyak kelompok kepentingan terlibat dalam pemerintahan desa. Wewenang tidak transparan jika berhadapan dengan elite dalam struktur pemerintahan yang lebih tinggi. Otoritasnya di masyarakat tidak stabil. Mengutamakan tugas pemerintahan pusat dibandingkan dengan pemerintahan desa. Terlalu banyak pesan yang disampaikan.	Tidak kesukuan. Terbuka dalam menunjang industri dan perdagangan. Agamanya taat dan kuat. Berwibawa dan patut diteladani. Inovatif dalam pembangunan ekonomi Didukung oleh elite pemerintahan maupun tokoh masyarakat

**Sumber:** Hasil Pengolahan Data

Tabel di atas menggambarkan kendala yang terjadi, dan faktor yang mendukung kepemimpinan Kepala Desa sebagai penggerak perubahan berdasarkan pendapat kelompok etnik Sunda, dan kelompok etnik pendatang Jawa, Minang, Batak dan etnik Madura. Menurut kelompok etnik Sunda, Kepala Desa kurang memberikan kepercayaan kepada penduduk asli, dan lebih memperhatikan para pendatang khususnya Orang Jawa untuk menangani beraneka macam kegiatan. Pendapat ini didukung pula oleh orang Minang yang sudah lama menjadi warga desa yang menyatakan bahwa Orang Jawa menguasai lembaga-lembaga desa karena memiliki kedekatan hubungan dengan elite dalam struktur pemerintahan di kecamatan maupun kabupaten.

Sebagai pimpinan tertinggi di desa, dalam urusan pembinaan generasi muda, olah raga dan politik, memang kelompok etnik Jawa menonjol aktivitasnya. Karena itu Kepala Desa mengikutsertakan dalam berbagai kegiatan-kegiatan tersebut. Bahkan memberikan kepercayaan kepada pendatang kelompok etnik Jawa, untuk menggairahkan kegiatan-kegiatan, demi kemajuan desa. Gambaran tentang keberadaan pendatang etnik Jawa tersebut, sejalan dengan pendapat Kincaid dan Schramm (1987), bahwa kepercayaan

dilandasi oleh kecakapan dan kompetensinya dalam menangani berbagai kegiatan desa yang beragam dan memerlukan penanganan baik. Pada konteks ini, Kepala Desa menilai Orang Jawa memiliki kompetensi sehingga diikutsertakan dalam kegiatan-kegiatan pembangunan desa. Namun fakta penting penilaian tentang kelayakan peran Kepala Desa sebagai agen modernisasi selalu bermuara pada terpenuhinya kepentingan-kepentingan individual maupun kelompok. Artinya, Orang Sunda maupun Orang Jawa, dalam menilai kepemimpinan Kepala Desa, mengkaitkan pula dengan kepentingan masing-masing yang bukan mustahil bisa subjektif.

Pendidikan Kepala Desa yang rendah menurut Orang Sunda, adalah kendala dalam melaksanakan agen modernisasi. Pendapat ini didukung oleh Orang Jawa yang menitik beratkan pada kemampuan administrasi Kepala Desa yang rendah. Menurut Kim (1982:346) "pendidikan terlepas dari konteks budayanya ternyata memperbesar kapasitas seseorang untuk lebih mampu berkomunikasi dan menghadapi pengalaman baru bermasyarakat serta tentang hidup". Rogers (1969) melihat ada signifikansi hubungan antara pendidikan dan kedudukan sebagai agen modernisasi, dengan menyatakan, bahwa agen pembaharuan di desa yang sedang mengalami proses modernisasi, selayaknya mempunyai kesempatan mengenyam pendidikan, formal yang lebih lama dibandingkan dengan kliennya. Berdasarkan pendapat itu, pendidikan Kepala Desa selayaknya harus lebih tinggi dari sekadar lulusan Sekolah Dasar. Tetapi pejabat yang mengangkat Kepala Desa, memang tidak berpijak kepada syarat ijazah minimal Sekolah lanjutan Pertama, tetapi lebih berpedoman pada pengalaman yang sederajat dengan Sekolah Lanjutan Pertama, sehingga syarat pendidikan bagi Kepala Desa menjadi subjektif. (Josef Riwukaho, 1991). Subjektivitas pengangkatan Kepala Desa dalam hal pendidikan ini, terjadi juga di desa lokasi penelitian kawasan pantai utara Kabupaten Karawang Jawa Barat.

Warga desa dalam kelompok etnik Sunda melihat kurang dinamisnya Kepala dalam menggerakkan penggerak perubahan kearah yang lebih baik, disebabkan Kepala Desa sudah terlalu lama menjabat, sehingga pemerintahan berjalan apa adanya, terkesan hanya mempertahankan status quo. Dalam pandangan Orang Batak, masalah ini berhubungan dengan kredibilitas Kepala Desa yang tidak stabil. Pada satu sisi diunggulkan, namun dalam hal lain dinilai memiliki kekurangan-kekurangan yang signifikan dalam menjalankan pemerintahan desa. Dalam kondisi ini, masyarakat desa, akhirnya mencari tokoh-tokoh lain yang dipercaya sebagai rujukan dalam tindakan ataupun sebagai sumber informasi. Menurut Rogers dan Kincaid (1981) kredibilitas memang dapat bergeser kearah yang lebih tinggi, maupun kearah yang lebih rendah. Selanjutnya Kincaid dan Schramm (1987) menambahkan bahwa kalau kredibilitas seorang tokoh turun, masyarakat akan mencari cadangan pemuka pendapat atau tokoh lain yang lebih mempunyai kemampuan memberikan informasi yang layak dipercaya.

Kendala dalam kepemimpinan sebagai agen pembaharuan dalam pandangan Orang Madura, karena terlalu banyaknya kelompok kepentingan dalam pembangunan di desa. Kelompok kepentingan itu, terdiri pengusaha, aparat pemerintah dari tingkat desa sampai

provinsi, kelompok kepentingan politik dan komunitas lain-lainnya yang membuat Kepala Desa tidak mempunyai kemandirian. Khusus mengenai pemerintah dalam struktur di atasnya yang lebih bernafsu menciptakan perubahan, membuat wewenang Kepala Desa sebagai pimpinan tertinggi desa menjadi tidak jelas. Otoritasnyapun melemah, karena menghadapi struktur kekuasaan dari luar yang lebih kuat dan didukung pula kekuatan politik dominan. Dengan kata lain, Kepala Desa cenderung memposisikan sebagai kepanjangan tangan pemerintah pusat dengan segala urusan sosial, ekonomi dan politik yang melekat, dibandingkan melakukan fungsi sebagai wakil masyarakat dalam tugas otonomi desa.

Kekuatan dari luar desa yang terlalu besar dan posisi marginal Kepala Desa dalam pengambilan keputusan terhadap masalah pedesaan yang muncul, membentuk sikap sebagian masyarakat dalam zona penolakan terhadap orang-orang dari luar tersebut, karena dinilai memaksakan kehendak dalam upaya menciptakan perubahan. Kondisi ini sejalan dengan pendapat Ray (1973), bahwa perubahan yang dilakukan oleh orang-orang dari luar kelompok cenderung dalam zona penolakan. Misalnya dalam pembebasan tanah untuk perusahaan, gerakan disiplin, rumah sehat, dan lain-lainnya tidak serta merta cepat diterima oleh warga desa ketika yang memperkenalkan adalah orang-orang asing dari luar desa. Dalam pandangan Rogers dan Svenning (1969) kasus tersebut dapat dinyatakan sebagai *contact change* yaitu perubahan yang terjadi karena diperkenalkan oleh sumber-sumber yang berasal dari luar kelompoknya tidak mudah diterima karena berbagai kekhawatiran yang berujung kepada prasangka negatif.

Kendala yang cukup menonjol dalam kegiatan Kepala Desa selaku penggerak perubahan, menurut kelompok etnik pendatang, adalah kemampuan komunikasi yang rendah, kurang memperhatikan *setting* dalam berkomunikasi. Dua hal yang menurut Samovar, Porter dan Jain (1981) harus diperhatikan dalam mengatasi hambatan komunikasi dengan kelompok etnik lain. Menurut Terry (dalam Toha, 1991), kemampuan berkomunikasi adalah sesuatu yang semestinya dimiliki oleh seorang pemimpin, karena pemimpin mempunyai kesempatan yang lebih luas untuk berkomunikasi dengan masyarakatnya sehingga pola komunikasi yang dipakai pemimpin sering menjadi sorotan yang menarik. Sementara Katz dan Kahn (1966:23) menyebutkan, kemampuan komunikasi perlu dimiliki karena komunikasi adalah proses sosial yang mempunyai relevansi terluas di dalam memfungsikan setiap kelompok, organisasi atau masyarakat.

Faktor lain sebagai kendala kepemimpinan yang mampu menggerakkan perubahan, adalah terlalu banyak pesan-pesan pembangunan yang disampaikan dan dilakukan berulang-ulang, sehingga masyarakat menjadi jenuh. Menurut Miller (1963:81), informasi yang diberikan berulang-ulang membuat orang akan menghindari informasi yang datang, karena merasa sudah terlalu banyak informasi. Sedangkan menurut Kincaid dan Schramm (1987), tindakan Kepala Desa tersebut dapat dikategorikan sebagai komunikator yang tidak memahami karakteristik khalayaknya.

Fakta menarik yang terkait dengan peran Kepala Desa sebagai agen perubahan, pada umumnya berpijak pada otoritas tradisional, karakteristik modernisasi, dan hubungannya dengan kekuasaan pemerintah yang lebih tinggi. Dalam otoritas tradisional antara lain dikemukakan, Kepala Desa sebagai tokoh masyarakat desa yang mempunyai kewibawaan, keteladanan dan dihormati oleh rakyat, menjaga tradisi dan agama. Pendapat tersebut dikemukakan oleh semua kelompok etnik pendatang, dan ini mencerminkan penghargaan terhadap budaya setempat yang menghargai tokoh di lingkungannya. Sikap ini sesuai dengan saran Ruben (dalam Samovar dan Porter, 1991), supaya komunikasi dengan orang-orang setempat (*host*) lebih lancar, perlu menghargai budaya lain, bersikap fleksibel, menjaga hubungan dan toleransi terhadap budaya tuan rumah.

Dalam karakteristik yang mendukung peran agen modernisasi, faktor utama mengarah kepada empati, inovasi dan demokrasi yang melekat dalam sikap maupun perilaku Kepala Desa. Ini sehaluan dengan pendapat Rogers dan Svenning (1969:227), agen pembaharuan mempunyai empati yang sangat tinggi, dibandingkan dengan pengikutnya. Sedangkan menurut Roger dan Shoemaker (1971), orang-orang yang inovatif mempunyai kemampuan untuk memproyeksikan dirinya kedalam peranan orang lain (empati) yang lebih besar. Dengan memiliki empati yang besar, Kepala Desa dapat melakukan komunikasi dengan semua lapisan masyarakat dari berbagai kelompok etnik yang ada di desa tanpa hambatan berarti.

Dari bermacam-macam jenis dukungan, Orang Sunda dan Orang Jawa berpendapat, pengalaman Kepala Desa berkomunikasi dengan berbagai kelompok etnik dalam menghadapi persoalan di pedesaan dapat menutupi kekurang-kekurangan yang dimiliki seperti pendidikan rendah dan kemampuan administrasi. Pendapat yang sama dari dua kelompok etnik tersebut, yaitu sifat demokratis dalam kepemimpinan agen modernisasi. Walaupun dalam sorotan yang berbeda, Orang Sunda menekankan demokratis pada aspek pelaksanaan politik, dan Orang Jawa menilai demokratis menekankan pada pemilihan pengurus lembaga-lembaga desa yang dipandang strategis itu kepada orang-orang yang dinilai mampu tanpa melihat etniknya.

Kelompok etnik Jawa dan Minang, menyatakan hubungan baik antara Kepala Desa dengan pengusaha, atau menurut Orang Madura Kepala Desa terbuka dalam menunjang industri dan perdagangan. Semua kelompok etnik memberikan dukungan dalam melaksanakan peran sebagai penggerak perubahan kearah yang lebih baik. Pada sisi lain, Orang Jawa menyatakan Kepala Desa yang lebih condong kepada pelaksanaan dan pelayanan yang dapat menunjang kelancaran industri dikatakan sebagai hambatan, sebab seharusnya Kepala Desa lebih peduli terhadap masalah pertanian. Sedangkan dukungan dikaitkan dengan bantuan sarana, prasarana fisik, dan terserapnya tenaga kerja desa pada industri yang membuka pabrik-pabrik di desa.

Pernyataan yang menyebutkan, kredibilitas Kepala Desa tidak stabil, karena dianggap kurang kompeten dalam melaksanakan tugas-tugas sebagai agen pembaharuan

di desa ternyata tidak disepakati oleh orang Minang. Sebab orang Minangkabau masih menganggap bahwa Kepala Desa merupakan sumber informasi yang layak dipercaya, karena mereka banyak memperoleh informasi seputar peraturan yang berkaitan dengan perekonomian di tingkat desa yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Karawang. Senada dengan itu, menurut Orang Sunda dan Orang Madura, Kepala Desa mempunyai jiwa inovatif dalam melaksanakan kegiatan pemerintah desa. Inovasi dalam perspektif Rogers dan Shoemaker (1971) adalah gagasan, tindakan, atau barang yang dianggap baru oleh seseorang. Kebaruan inovasi diukur secara subjektif menurut pandangan individu yang menangkapnya. Artinya seseorang dapat menilai beda tentang inovasi di pedesaan.

Orang Sunda memandang sifat inovatif dari Kepala Desa dari kegiatan sosial seperti pemabangunan majelis taklim, menggairahkan interaksi antar kelompok etnik melalui kegiatan olah raga, kebebasan berpolitik dan lain-lain tindakan yang mencerminkan sifat inovasi. Sementara itu Orang Madura juga melihat banyak inovasi yang diterapkan oleh Kepala Desa di lingkungannya dalam hal menyediakan penunjang fisik kegiatan kerohanian, pertanian dan kegiatan pemerintahan lain, yang disebar luaskan dalam melalui pesan-pesan pembangunan dalam setiap perhelatan desa yang formal maupun aneka kegiatan informal dari warga desa. Penyebaran gagasan-gagasan baru kepada khalayak, menurut Rogers dan Shoemaker (1971) sebagai difusi yaitu proses dimana ide-ide baru dikomunikasikan dalam sistem sosial. Kepala Desa memang sering menyampaikan beragam ide untuk meningkatkan kesejahteraan sosial ekonomi warga desa. Terlepas dari apa yang disampaikan itu diterima, ditolak atau masyarakat skeptis, tetapi upaya terus-menerus dalam proses penyampaian gagasan baru berjalan pada setiap kesempatan perhelatan di desa.

## **B. Komunikasi Antar Kelompok Etnik dan Rasionalisasi Perubahan**

Berbagai permasalahan yang terjadi di desa lokasi industri, mempunyai hubungan dengan teori-teori komunikasi. Tampak di lokasi penelitian bahwa heterogenitas desa dari segi etnik, membawa pengaruh besar dalam komunikasi diantara masyarakat desa. Penduduk asli desa yang semula berkomunikasi dan berinteraksi dengan sesama kelompok etniknya dalam situasi homofili, berubah menjadi heterofili dimana pihak-pihak yang berinteraksi sangat berbeda dalam pola komunikasi, perilaku dan berbagai karakteristik lain (Rogers dan Svenning, 1969).

Dalam kondisi multi etnik di desa, interaksi dan komunikasi antara satu kelompok etnik dengan kelompok etnik lain, membentuk pola komunikasi universal yang lebih rasional, untuk tujuan ekonomis sebagaimana pendapat Rogers dan Shoemaker (1971), salah satu karakteristik komunikasi masyarakat modern dan masyarakat yang sedang mengalami perubahan sosial berorientasi pada tujuan material yang kuat dibandingkan tujuan sosial. Namun kekuatan mencapai kesejahteraan material, ternyata tidak mampu

menghilangkan sama sekali nilai budaya yang dimiliki oleh kelompok-kelompok etnik. Bahkan mereka mempunyai kecenderungan memiliki budaya rangkap seperti pemikiran Hildred Geertz (1981) yaitu pada satu sisi mengikuti pola hidup modern termasuk didalamnya pola komunikasi, pencarian informasi dan interaksi, tetapi disisi lain masih tetap mempertahankan nilai budayanya. Walaupun sesungguhnya unsur-unsur sosial budaya yang mengandung nilai, kepercayaan, dan sikap, tetap berperan dalam menentukan cara berkomunikasi seseorang dengan orang lain. (Samovar, Porter dan Jain, 1981). Secara faktual, sebagai desa multi etnik yang sedang mengalami perubahan sosial, ekonomi dan politik, ternyata masing-masing kelompok etnik, masih mempunyai sikap yang mengarah kepada stereotip, prasangka dan etnosentrisme terhadap kelompok lain di desa lokasi industri. Dalam berbagai permasalahan di desa yang ditemukan, muncul gejala stereotip, prasangka, dan etnosentrisme. Padahal sikap macam itu menurut Samovar, Porter dan Jain (1981) sebagai problem potensial dalam komunikasi antar budaya, dan secara langsung akan menghambat terjadinya interaksi serta komunikasi yang lebih lancar diantara orang-orang yang beda budaya dan kelompok.

Munculnya stereotip, prasangka dan etnosentrisme, biasanya diakibatkan oleh kondisi yang berlawanan, yaitu dalam situasi ketidakmampuan atau justru keunggulan dalam persaingan terbuka ataupun terselubung diantara kelompok-kelompok etnik yang ada di desa. Misalnya, dalam perebutan pengaruh terhadap masyarakat, pencapaian jabatan dalam organ-organ pemerintahan desa, kegiatan sosial, kesempatan untuk menikmati kehidupan yang lebih layak secara ekonomis, dan kecenderungan lainnya yang menunjukkan keunggulan budayanya.

Perwujudan dari sikap-sikap stereotip dan prasangka yang sangat menonjol dilakukan oleh masing-masing kelompok etnik, adalah ketidakpercayaan (*lack of trust*) dan penarikan diri (*withdrawl*) dalam interaksi dan komunikasi dengan orang-orang yang berbeda etnik. Disamping itu tidak jarang muncul pula *antilocution* yang mendiskusikan kelompok lain dari segi negatifnya (Samovar, Porter dan Jain, 1981). Menilai kelompok lain dari aspek negatif biasanya berhubungan dengan ketidaksejalana sikap maupun perilaku yang tidak menguntungkan bagi kelompoknya. Meskipun ada berbagai ketidakcocokan diantara warga desa yang berbeda etnik tetapi aspek untuk mencari kehidupan yang lebih baik dengan aspek material sebagai basis utama perilaku mereka, ternyata tidak ada gesekan ataupun konflik yang destruktif dalam dinamika kehidupan desa. Semua berjalan dengan baik, kehidupan masyarakat juga berlangsung dengan harmoni dalam kendali Kepala Desa pelopor gerakan perubahan.

Bertitik tolak dari kondisi itu, sebagai desa tradisional yang sedang mengalami perubahan dan berpenduduk multi etnik, Kepala Desa dihadapkan pada tuntutan untuk melaksanakan kegiatan sebagai agen godernisasi yang sesuai dengan kepentingan kelompok etnik dari segi sosial, ekonomi maupun politik yang berkembang di desa, yang sesungguhnya tidak berbeda jauh dalam konstelasi nasional. Dengan kata lain,



desa ini merupakan salah satu gambaran nyata dinamika perubahan secara nasional dalam konteks sosial, ekonomi maupun politik. Tuntutan sebagai agen perubahan ini mutlak harus dilakukan, bahkan sebagai sumber informasi yang mempunyai kekuasaan komunikasi sangat kuat dalam masyarakat, Kepala Desa juga dituntut mampu bertindak transparan dalam memberikan informasi kepada warga desa. Bagaimanapun juga pemerataan informasi merupakan salah satu aspek yang melekat dalam modernisasi masyarakat sebagaimana dikemukakan oleh Smelser (1964), bahwa modernisasi dalam kaitannya dengan modernisasi adalah harapan masyarakat terhadap pemerataan memperoleh informasi yang benar dan dapat dipercaya dari sumber yang kompeten (Dasmar Nurdin, 1985).

Persoalannya, harapan masyarakat yang demikian, tidak mudah untuk dilaksanakan, sebab orang paling berkuasa di desa ini mempunyai keterbatasan internal dan eksternal, sebagai dampak perubahan sosial di desa dan perkembangan teknologi komunikasi yang membuka kesempatan warga desa memperoleh informasi bermutu dari berbagai sumber lain yang dipercaya. Dalam kasus di desa ini, Kepala Desa sebenarnya masih mengandalkan otoritas tradisional sebagai sumber kekuatan dalam menjalankan kekuasaannya, tetapi sebaliknya seperti pendapat Rogers dan Shoemaker (1987) bahwa masyarakat tradisional yang mengalami frekuensi terpaan media massa tinggi, cenderung mengalami perubahan sosial yang semakin menjauhkan diri dari nilai tradisional. Artinya di desa yang sedang berubah, terdapat dua kutub yang berbeda di masyarakat. Satu aspek mengusung nilai tradisional untuk mempertahankan kekuasaan dan pengaruh yang bersumber pada kepercayaan turun temurun. Di pihak lain, ada nilai-nilai modernisasi yang rasional dan terus berkembang memarginalkan otoritas berbasis tradisi.

Kekuatan media massa tampak nyata di desa kawasan industri yang sedang berubah. Media massa memberikan kontribusi besar dalam pemenuhan informasi yang mengandung kebenaran dan dipercaya oleh khalayak (Rogers dan Svenning, 1969). Keadaan ini menyebabkan media massa lebih kuat pengaruhnya dan dipercaya dibanding sumber-sumber informasi lain, termasuk informasi formal dalam piramida kekuasaan pemerintah (Kincaid dan Schramm, 1987). Misalnya, warga desa lebih percaya kepada informasi dari media massa untuk urusan pembebasan tanah untuk pendirian pabrik dibanding pesan-pesan yang didifusikan bertubi-tubi dari aparat pemerintahan desa maupun organ-organ kekuasaan negara lain yang seringkali muncul di desa dalam hubungannya dengan pembangunan pabrik.

Hakikatnya, masyarakat desa masih tetap menghendaki kompetensi sumber berita, terutama tindakan Kepala Desa dalam mendifusikan pesan-pesan pembangunan sebagai salah satu tugas agen modernisasi (Rogers, 1971). Tetapi dalam praktek penyebaran informasi di pedesaan, memang sering mengalami distorsi karena kepentingan pemerintahan yang lebih tinggi (Hernando Gonzales, 1988). Dampaknya, masyarakat tidak selamanya memberikan kepercayaan terhadap sumber pesan yang ada dalam

lingkaran elite pemilik otoritas formal. Dalam pandangan Rogers dan Kincaid (1981), bahwa kredibilitas sebagai sumber pesan dapat tergeser kearah yang kuat, maupun lemah. Dikaitkan dengan aspek faktual di desa ini, Kepala Desa sebagai sumber pesan bagi khalayaknya memang tidak mempunyai tingkat kredibilitas yang stabil tetapi terus berubah sejalan dengan tuntutan warga desa penduduk asli maupun pendatang yang beragam, sesuai dengan dinamika sosial, ekonomi dan politik.

Dalam hubungan dengan kelompok-kelompok etnik pendatang, masih ada faktor yang menghambat interaksi dan komunikasi dalam kehidupan di desa. Masalah yang sangat menonjol adalah kekuasaan diandalkan sebagai alat untuk menguasai informasi, dan perbedaan-perbedaan tujuan komunikasi (Samovar, Porter dan Jain, 1981). Dalam konteks ini, Kepala Desa secara sadar ataupun tidak sadar, dalam berkomunikasi dengan warga desa identik dengan pemberian perintah yang wajib dilaksanakan. Dalam model komunikasi *top-down* dalam bingkai pesan yang bergerak linier, tentu saja tidak memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk menyampaikan aspirasinya. Walaupun apa yang diperintahkan Kepala Desa sebagai suatu kewajiban itu, sesungguhnya tidak memberikan dampak positif bagi warga desa dalam mencapai kesejahteraan sosial, ekonomi dan politik.

Faktor-faktor tersebut di atas merupakan sumber terjadinya kemacetan dalam komunikasi antar budaya atau antar kelompok yang berbeda. (Samovar, Porter dan Jain, 1981). Dalam situasi semacam ini, sangat mungkin terjadi, Kepala Desa maupun masyarakat, mempunyai sikap tidak percaya (*lack of trust*) satu sama lain, sehingga akses komunikasi yang lancar tidak tercapai. (Samovar, Porter dan Jain, 1981). Jika komunikasi tidak berjalan dengan baik, maka interaksi yang terjadi juga tidak mampu membangun sinergi dalam koridor kemajemukan masyarakat desa. Faktor ini menjadi tantangan dan tugas berat dari Kepala Desa sebagai orang yang paling bertanggung jawab dalam menjalankan perubahan kearah lebih baik.

Dalam masalah kelayakan sebagai agen perubahan, masing-masing kelompok etnik berpendapat senada, bahwa Kepala Desa layak dianggap sebagai agen modernisasi apabila melakukan tindakan yang mampu merubah keadaan yang lebih baik. Aspek ini sejalan dengan pendapat Cyrill Black (1976) yang menegaskan, agen modernisasi harus bertindak membawa pengikutnya mencapai tujuan yang ditetapkan dalam pencapaian kesejahteraan. Tetapi ternyata pandangan ini subjektif sekali, karena secara esensial, pendapat tersebut tidak terlepas dari kepercayaan, nilai dan sikap yang dianut oleh budayanya. (Samovar, Porter dan Jain, 1988), sehingga dalam memberikan pendapat dan pandangan terhadap peran Kepala Desa sebagai agen modernisasi, selalu akan mengkaitkan keuntungan-keuntungan yang masih sejalan dengan kepercayaan, nilai dan sikap budaya yang dimiliki. Dalam perspektif Rogers dan Svenning (1969), agen modernisasi akan diterima dengan baik, jika tidak membawa inovasi yang bertentangan dengan kepercayaan dan nilai yang berlaku dalam masyarakat.

Kendala pelaksanaan agen modernisasi adalah jika tindakan-tindakan Kepala Desa menghambat interaksi dan komunikasi dengan berbagai kelompok etnik. Misalnya perilaku *avoidance* dan *discrimination* terhadap kelompok-kelompok yang tidak disukai dapat berakibat komunikasi antar kelompok tidak berjalan dengan baik dalam membangun pemahaman makna bersama (Samovar, Porter dan Jain, 1988). Namun perilaku menghindar dan diskriminatif ini tidak dilakukan oleh Kepala Desa. Walaupun, bisa saja diantara warga desa terjadi tindakan semacam itu tetapi hanya kasus tertentu yang tidak sampai mengganggu hubungan antar kelompok etnik di desa lokasi penelitian. Sedangkan dukungan masyarakat desa bahwa Kepala Desa layak diposisikan sebagai agen modernisasi, jika orang nomor satu di desa tersebut, dapat memberikan kontribusi positif secara ekonomis, dan berlangsungnya komunikasi yang baik karena berbagai kesamaan persepsi maupun tujuan berkomunikasi antara Kepala Desa dengan warganya yang seetnik, maupun berlainan etnik. Seperti dikemukakan oleh Altman dan Taylor (1973), dampak ekonomis akan meningkatkan komunikasi dan hubungan yang lebih erat, karena masing-masing pihak merasa memperoleh keuntungan. Dalam pandangan Samovar, Porter dan Jain (1981), upaya-upaya yang memberikan dukungan terhadap tindakan Kepala Desa berakumulasi, karena penggunaan strategi untuk meningkatkan efektivitas komunikasi antar budaya, yang pada intinya memperkecil perbedaan, dan memperbesar persamaan kerangka pemikiran serta pemahaman terhadap budaya kelompok etnik lain.



# BAB 12

## KEMAJEMUKAN ETNIK SEBAGAI PILIHAN

---

### A. Menuju Kemajemukan Etnik Demi Kesejahteraan

Desa kawasan pantai utara di Kabupaten Karawang Provinsi Jawa Barat ini, mempunyai masyarakat yang terdiri dari berbagai kelompok etnik penduduk asli desa, dan kelompok etnik pendatang. Keanekaragaman etnik terjadi sebagai dampak perkembangan teknologi komunikasi dan transportasi yang membelah desa agraris penghasil padi dan sayuran. Tersedianya jalan tol Jakarta-Cikampek yang melengkapi jalan negara pantai utara sebelumnya yang dikenal pula sebagai jalan Daendels, menyebabkan mobilitas yang tinggi, sehingga banyak individu maupun kelompok-kelompok yang berkepentingan, datang mencari penghidupan lebih baik ke desa ini. Melihat lokasi yang strategis, para pemilik modal juga untuk mendirikan pabrik-pabrik di desa. Orang-orang dari berbagai daerah di seluruh Indonesia juga berbondong-bondong datang untuk bekerja dan memperoleh penghasilan yang memadai di pedesaan yang subur dan dipenuhi pabrik-pabrik modern.

Munculnya pabrik di desa sebagai salah satu simbol industri dan modernisasi, menjadikan desa lokasi penelitian ini berkembang dengan pesat ditinjau pembangunan fisik dan perubahan non fisik yang terikat oleh tumbuhnya nilai-nilai baru di masyarakat yang lebih komersial, dan mulai meninggalkan pola-pola perilaku sosial dan kekerabatan yang sudah melembaga. Kehadiran orang-orang dari berbagai daerah yang berlainan etnik, menjadikan penduduk asli desa yang mempunyai pola hidup bertani, mengalami persoalan baru dalam bidang kehidupan disekelilingnya. Penduduk asli yang notabene masih tradisional dalam perilaku sosial-ekonomi, tiba-tiba dipacu untuk menyesuaikan dengan pola hidup industri yang serba rasional, dan berhadapan dengan para pendatang yang memiliki perilaku dan gaya hidup berbeda dengan norma-norma pedesaan yang dianggap harmonis. Perbedaan-perbedaan sikap dan perilaku ini, tidak jarang menimbulkan konflik kepentingan yang tersembunyi maupun yang nyata dalam kehidupan masyarakat desa. Tidak dapat dipungkiri, masyarakat desa yang masih bercorak agraris,

sulit untuk memahami pola kerja dan sifat-sifat yang melekat dalam komunitas industri yang berpotensi merugikan pola hidup bertani penduduk asli desa.

Walaupun muncul aneka perbedaan kepentingan antar penduduk asli dan pendatang di desa yang sedang berubah, tetapi industrialisasi yang melanda desa agraris tidak dapat dicegah. Sebab program pembangunan, pembaharuan dan modernisasi yang ditetapkan pemerintah, harus tetap berjalan sesuai dengan perencanaan. Dengan demikian, apapun yang terjadi dalam proses industrialisasi di pedesaan, masyarakat setempat harus bisa menerima kehadiran pabrik-pabrik dengan segala dampaknya yang merugikan atupun menguntungkan. Kejadian demi kejadian dalam pembangunan pabrik yang menyita lahan pertanian, akhirnya diterima masyarakat setempat dengan pasrah, tanpa reaksi berlebihan terhadap pesan-pesan pembangunan bertubi-tubi yang disuarakan oleh kekuasaan negara di tingkat pusat sampai tingkat desa.

Bertitik tolak dari sini, pula orang-orang dari berbagai penjuru tanah air datang ke desa kawasan pantai utara Karawang ini, dengan satu tujuan yaitu mencari kehidupan yang lebih baik, bekerja sebagai pegawai pabrik, atau bekerja dalam bidang-bidang yang menunjang dinamika industri di sektor formal maupun informal pedesaan. Migrasi besar-besaran ke desa ini, membentuk keanekaragaman sosial-budaya, ekonomi dan politik. Tetapi disisi lain, masyarakat membentuk pola komunikasi dan interaksi universal yang lebih rasional, untuk tujuan ekonomis sesuai dengan prinsip modernisasi, yaitu hidup dengan sejumlah orang diluar kelompoknya dengan tujuan utama adalah transformasi kehidupan material.

Pola komunikasi dan interaksi universal yang digunakan oleh masing-masing kelompok etnik, ternyata tidak serta merta membentuk penyeragaman unsur budaya seperti kepercayaan, nilai dan sikap dalam masyarakat. Sebaliknya dalam masalah tertentu, karakteristik etnisitas masih menonjol sehingga jika masing-masing pihak tidak memiliki semangat kemajemukan dalam satu wilayah yang harmoni, bukan mustahil akan memicu pertikaian dan konflik antar kelompok-kelompok yang berbeda di desa. Beruntung bahwa, media cetak maupun media elektronik seperti televisi banyakewartakan tentang perlunya integrasi nasional dalam kemasakan versi kekuasaan negara, yang mengedepankan pentingnya kemajemukan. Walaupun tampak klise, karena dari sudut pandang sepihak, tetapi setidaknya media massa dapat dipakai pula sebagai salah satu rujukan oleh para elite pedesaan dalam rangka menciptakan kehidupan yang damai di desa. Tidak dapat dinafikan, bahwa karakteristik etnik yang terkait dengan nilai komunalisme dan etnosentrisme bisa saja semakin melemah sejalan dengan keterdedahan media massa di pedesaan. Warga desa diikat oleh satu kepentingan yang lebih besar yaitu tujuan kesejahteraan dan kemakmuran yang tidak lagi menghiraukan perbedaan etnisitas dalam mencari penghasilan. Media massa memang mempunyai kekuatan dalam mengarahkan masyarakat pada tujuan material masyarakat. Selain media massa, kekuatan lain yang mampu memperkuat, memperlemah atau bahkan manghilangkan sama sekali nilai-nilai

budaya masyarakat adalah intensitas dan frekuensi interaksi maupun komunikasi antar pribadi yang bersifat negatif dan provokatif dengan mendiskusikan pihak-pihak lain yang tidak disukai dari sisi kekurangannya.

Dalam kondisi yang demikian, Kepala Desa dituntut melakukan kegiatan sebagai penggerak perubahan yang sesuai dengan aspirasi masyarakat desa yang pada satu sisi berusaha mempertahankan nilai sosial-budaya, tetapi disisi lain terikat oleh nilai material yang kalkulatif memperhitungkan untung rugi dalam tindakannya. Desa yang sebenarnya masih mengandalkan tradisi sebagai kekuatan dalam mengatur warganya, dituntut untuk menyesuaikan dengan kemasam semua sifat modernisasi yang berfokus pada satu tujuan kesejahteraan masyarakat. Tuntutan itu tidak mudah untuk dilaksanakan dengan cepat, mengingat karakteristik Kepala Desa dengan otoritas tradisional mamudar sejalan dengan berkembangnya industri di desa. Selain itu, Kepala Desa meskipun memiliki otoritas formal dalam struktur pemerintahan paling rendah, yang sebenarnya dapat dipakai sebagai ujung tombak pencapaian kemakmuran, ternyata tidak mempunyai batasan kewenangan jelas dalam menghadapi kelompok kepentingan yang didukung oleh elite politik, pemilik modal dan organ-organ negara dalam struktur kekuasaan di tingkat pusat.

Namun persoalannya, keterbatasan gerak dan kewenangan Kepala Desa bukan hanya terbentur pada ketidakberdayaan menghadapi kekuatan elite politik, pemilik modal maupun kekuasaan negara, sebab sebagai individu yang mencerminkan karakter agen perubahan yaitu tingkat pendidikan masih rendah, sedangkan sifat inovatif masih belum maksimal jika dibandingkan dengan gerak laju industri pedesaan yang progresif dan dinamika tuntutan masyarakat majemuk. Memang Kepala Desa yang semula bergerak dalam kutub homofili dengan kondisi masyarakat yang memiliki karakteristik sejenis, menjadi heterofili yang kompleks dan memiliki beragam kehendak yang berhubungan dengan keuntungan-keuntungan ekonomis. Dalam kondisi keanekaragaman etnik, warga desa penduduk asli maupun pendatang seperti tidak memperdulikan wujud-wujud pembangunan fisik yang tampak di desa sebagai hasil kepemimpinan Kepala Desa. Peran sebagai agen modernisasi secara esensial melekat jika warga desa dapat menikmati kesejahteraan dan nilai-nilai budayanya tidak terganggu.

Pandangan-pandangan kelompok etnik yang menjadi kendala bagi Kepala Desa dalam menjalankan peran agen modernisasi, selain berhubungan dengan nilai budaya, tujuan materi, terpaan media massa dan intensitas komunikasi antar pribadi, juga didasarkan pada kekecewaan terhadap Kepala Desa yang lebih memperhatikan kelompok etnik tertentu ibandingkan kelompok-kelompok etnik lain. Tindakan ini memunculkan kecemburuan sosial di desa. Walaupun tidak sampai menyulut konflik terbuka yang menjurus pada tindakan-tindakan destruktif dalam kehidupan bermasyarakat.

Desa kawasan pantai utara ini, walaupun mempunyai permasalahan yang begitu kompleks, tetapi secara fisik pemerintahan desa memang berjalan dengan baik. Masyarakat

dari berbagai kelompok etnik, hidup berdampingan, berinteraksi, berkomunikasi menurut pola tertentu atau sesuai kebutuhan masing-masing. Kepala Desa tetap dalam jabatan dan diposisikan sebagai orang yang dihormati. Kalaupun dukungan masyarakat semakin berkurang, tidak membuat Kepala Desa berhenti untuk terus bertindak sebagai pelopor gerakan perubahan ke arah yang lebih baik. Karena itu, orang kuat di desa ini juga tetap berupaya untuk berkomunikasi dan berinteraksi dengan berbagai kelompok etnik yang terdapat di desa, dengan harapan terbentuk kemajemukan etnik di desa yang harmoni dan sejahtera.

## **B. Berfokus Pada Gerakan Perubahan**

Dalam penelaahan akademis terhadap gerak laju perubahan di pedesaan kawasan pantai utara Jawa Barat ini, berbagai faktor positif yang menguntungkan masyarakat, dan dampak negatif yang menghambat pencapaian kesejahteraan sosial, ekonomi dan politik muncul secara bergantian. Kondisi tersebut merupakan hal yang sering terjadi dalam dinamika pembangunan desa di negara-negara sedang berkembang dalam konstelasi sosial, ekonomi maupun politik. Namun terkait dengan perubahan di desa lokasi penelitian ini, kompleksitas perubahan dari kawasan agraris menjadi kawasan pabrik-pabrik sebagai simbol industrialisasi, komunikasi memiliki peran penting sebagai pendukung perubahan. Sebagai upaya untuk menciptakan kesamaan makna, komunikasi diantara Kepala Desa dan warga desa yang multi etnik memegang kunci keberhasilan gerakan perubahan. Oleh sebab itu, sudah selayaknya jika pihak-pihak yang berkepentingan dalam pembaharuan pedesaan, dalam hal ini elite di tubuh pemerintahan, tokoh masyarakat maupun pemilik modal harus memahami komunikasi yang beradab, agar warga desa berpartisipasi mendukung kehendak pemerintah.

Mengingat penelaahan terhadap kondisi desa yang sedang berubah mencakup penggunaan berbagai macam teori, metode dan konsep dalam ilmu komunikasi yang beragam, maka secara akademis penelitian ini masih perlu dikembangkan dan lebih terspesialisasi dalam berbagai kajian ilmu komunikasi yang lebih rinci dan aplikatif. Misalnya topik yang masih menarik untuk diteliti lebih lanjut dari penelitian ini adalah pola-pola komunikasi dalam kekuasaan yang dipakai oleh para pemimpin melalui berbagai macam gaya kepemimpinan dalam suasana perubahan sosial di pedesaan yang majemuk dari segi etnisitas. Juga masih perlu dikembangkan lebih lanjut, pembahasan terhadap topik-topik komunikasi politik, yang merujuk kepada komunikasi antar budaya dalam kaitannya dengan etnik dominan desa dengan kelompok etnik mayoritas dalam skala nasional.

Penelaahan komunikasi politik dalam konstelasi pembangunan sosial, ekonomi dan politik dalam situasi pluralisme politik dapat juga dibahas atau dikaji lebih mendalam berkaitan dengan peran kepemimpinan desa dalam gerakan perubahan. komunikasi organisasi dengan meneliti lebih lanjut aspek komunikasi dalam pelaksanaan



pemerintahan desa; dan komunikasi massa yang menyangkut akibat-akibat terpaan media massa di pedesaan. Di sisi lain, mengingat penelitian ini menggunakan metode kualitatif, maka masih memungkinkan untuk diadakan penelitian dengan permasalahan yang sejenis tetapi menggunakan metodologi kuantitatif yang sesuai dari aspek teoritis maupun metodologis.

Dalam konteks praktikal lain, kebijakan dalam penelitian yang paling mendasar, adalah bahwa di lingkungan keanekaragaman etnik, problem-problem potensial komunikasi antar budaya, adalah masalah krusial yang selalu muncul dalam manifestasinya yang laten maupun transparan. Dengan mengaplikasikan strategi untuk meningkatkan komunikasi antar budaya oleh masyarakat, penguasa maupun kelompok kepentingan pada level individual atau kelompok, maka masalah-masalah yang timbul dalam interaksi antar etnik menjadi berkurang, demikian juga komunikasi dan interaksi sesama warga desa akan berjalan sesuai dengan kebutuhan masyarakat organik untuk memperoleh kesejahteraan material. Hakikatnya, di desa yang berpenduduk multi etnik, perlu penerapan program yang berkaitan dengan strategi komunikasi antar budaya dalam menghadapi kelompok etnik yang berbeda karakter. Tidak dapat disangkal, bahwa kelompok-kelompok ini meskipun mempunyai tujuan sama dalam mencari kehidupan dan penghidupan yang lebih baik, tetapi dalam proses pencapaiannya melakukan jalan yang masing-masing berlainan.

Sementara itu, dalam upaya menghadapi perkembangan teknologi komunikasi, dan transportasi dipedesaan serta perubahan konstelasi sosial, ekonomi, politik dan semua segi kehidupan, kebutuhan akan kebenaran informasi sangat diperlukan masyarakat yang semakin luas wawasannya. Karena itu, keterbukaan dalam penyampaian informasi, dan pembukaan akses komunikasi yang mampu menampung aspirasi masyarakat desa adalah sebagai masalah yang urgensinya tinggi untuk diperhatikan, dan dilaksanakan secara demokratis dan konsisten oleh semua pihak yang mempunyai kepentingan di pedesaan.





# DAFTAR PUSTAKA

## **Buku**

- Altman, Irwin dan Dalmás Taylor.1973. *Social Penetration: The Development of Interpersonal Relationship*, New York: Holt, Rinehart & Winston
- Barth, Fredrik. 1988. *Kelompok Etnik dan Batasannya*, Jakarta: UI Press
- Bass, Bernard M.1981. *Stogdill's Handbook of Leadership, A Survey of Theory And Research*, New York: The Free Press, New York
- Berger, Peter L.1982. *Pyramids of Sacrifice: Political Ethics And Social Change*, Terjemahan Rachman Tolleng, Jakarta: LP3ES
- Berger, Peter L.1990. *The Capitalist Revolution, Fifty Propositions about Prosperity, Equality And Liberty*, Terjemahan Mohamad Oemar, Revolusi Kapitalis, Jakarta: LP3ES, Jakarta
- Black, Cryill E.1976. *Comparative Modernization: A Reader*, New York: The Free Press.
- Bogdan, Robert Dan Steven J. Taylor.1992. *Introduction To Qualitativ Research Methods*, Terjemahan Arief Furchan, Surabaya: Penerbit Usaha Nasional
- Bowers John W and James J. Bradac.1982. *Issues in Communication Theory: A Metatheoretical Analysis*, Communication Yearbook 5.
- Dahl, Robert A, *Modern Political Analysis*, New Delhi, Prentice Hall of India, 1978.
- Damanik, Jahutar. 1974. *Hukum adat Simalungun*, Medan: P.D. Aslan
- Davis, Keith.1962. *Human Relation At Work*, Tokyo: Mc.Graw Hill Book Co, Inc, Kogakusha Co Ltd
- Depari, Edward dan Colin MacAndrew. 1988. *Peranan Komunikasi Massa dalam Pembangunan*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press

- De Vos, George & Ross R. Lola, ed. 1982. *Ethnic Identity-Cultural Continuities And Change*, Chicago: The University of Chicago Press
- Ekadjati,Edi S.1984. *Masyarakat Sunda dan Kebudayaanannya*, Jakarta: Giri Mukti Pustaka
- Etzioni, Amitai and Eva Etzioni.1964. *Social Change*, New York: Basic Book
- French, Wendel L.1978. *The Personnel Management Process*, Fourth Edition, Boston: Houghton Mifflin Company
- Geertz, Hildred.1981. *Aneka Budaya dan Komunitas di Indonesia*, Jakarta: YIIS dan FIS-UI
- Giddens, Anthony.1986. *Capitalism And Social Modern Theory: An Analysis of Writing of Marx, Durkheim and Max Weber*, terjemahan Soeheba Kramadibrata. Jakarta: UI Press
- Gudykunst, William B.1988. *Culture and the Development of Interpersonal Relationship*,Communication Yearbook 12.
- Hall, Edward T.1976. *Beyond Culture*, New York: Anchor Book
- Hall, Edward T & William Foote White. 1974. *Experiences in Commuication*, Wayne Austin Shrope (ed),, New York, HBJ
- Warper.1977. *Dictionary of Modern Thought*, New York Harper And Row
- Havelock, Ronald.G.1973. *The Change Agent's Guide Innovation in Education*, Englewood Cliffs, NJ: Educational Technology Publications.
- Hennesy, Bernard.1990. *Public Opinion* terjemahan Amiruddin Nasution, Jakarta: Penerbit Erlangga
- Horton, Paul & Charles L. Hunt.1980. *Sociology*, New York: Mc.Graw Hill: Book Company
- Jahi, Amri (ed).1988. *Komunikasi Massa dan Pembangunan Pedesaan Di Negara-Negara Dunia Ketiga: Suatu Pengantar*, Jakarta: PT. Gramedia
- Kartodirdjo, Sartono, (ed).1990. *Kepemimpinan Dalam Dimensi Sosial*, Jakarta: Penerbit LP3ES
- Katz, Daniel dan Robert L. Kahn.1966. *The Social Psychology of Organization*, New York: John Willey And Sons
- Kim, Young Yun.1988. “ *Communication And Acculturation*” dalam Samovar and Porter,Intercultural Communication: A Reader, Belmont California: Wadsworth Publ. Co
- Lee, Everett S.1987. *A Theory of Migration*, Yogyakarta: PPK Universitas Gadjah Mada
- Menta, SR.1972. *Emerging Pattern of Rural Leadership*, New Delhi: Willy Eastern
- Miller, G.R, And M. Steinberg.1975. *Between People, A New Analysis Of Interpersonal Communication*, Chicago Science Research Associates
- Miller G.1963. *The Magical Number Seven, Plus or Minus Two: Some Limits on our Capacity for Processing Information*, *Psychological Review*

- Mills, C. Wright.1963. *The World Outside And The Picture In Our Head*, dalam Alan Costy (ed) *Mass Media And Mass Man*, New York: Rinehart And Winston
- Moleong, Lexy J.1993. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT.Remaja Rosda Karya
- Munir, Rony dan Prijono Tjiptoherijanto.1981. *Penduduk dan Pembangunan Ekonomi*, Jakarta: Bina Aksara
- Mustapa, R.H. Hassan.1985. *Adat-Istiadat Orang Sunda*, terjemahan Maryati Sastrawijaya, Bandung: Penerbit Alumni Bandung
- Myers, Michele Tolela and Gail E. Myers.1982. *Managing By Communication*, Mc.Graw Hill International Book Co
- Nasution, Zulkarimein.1988. *Komunikasi Pembangunan: Pengenalan Teori dan Penerapannya*, Jakarta: Rajawali Pers
- Ndraha, Taliziduhu.1991. *Dimensi-Dimensi Pemerintahan Desa*, Jakarta: Penerbit Bumi Aksara
- Nimmo, Dan. 1993. *Komunikasi Politik: Komunikator, Pesan dan Media*, Terjemahan Jalaluddin Rakhmat, Bandung: PT.Rosda Karya
- Nimmo, Dan. 1989. *Komunikasi Politik: Khalayak dan Efek*, terjemahan Jalaluddin Rakhmat, Bandung: PT.Rosda Karya
- Noer, Deliar.1983. *Administrasi Islam di Indonesia*, Jakarta: Penerbit CV. Rajawali
- Prasadja, Buddy. 1981. *Pembangunan Desa dan Masalah Kepemimpinannya di Pedesaan*, Jakarta: Rajawali Pers
- Rachmat,Jalaluddin.1985. *Psikologi Komunikasi*, Bandung: Penerbit Remaja Karya
- Ray, Michael L.1973., *Marketing Communication And The Hierarchy of Effects*, dalam Model For Communication Research, Peter Clarke (ed), Beverly Hill: Sage Publication
- Reardon, Kathleen.1987. *Interpersonal Communication: Where Minds Meet*, Belmont, California: Wadsworth Publishing Co
- Riwukaho, Josef.1991. *Prospek Otonomi Daerah di Negara Republik Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pers
- Robbin, Stephen P.1980. *The Administrative Process*, New Delhi: Prentice Hall of India
- Rogers, Everett M. 1985. *Komunikasi Pembangunan*, terjemahan Dasmur Nurdin, Jakarta: Penerbit LP3ES
- Rogers, Everett M And Ronny Adhikarya. 1978. *Communication And Inequitable Development: Narrowing The Socio-Economic Benefits*, Media Asia 5
- Rogers, Everett M and Lynne Svenning.1969. *Modernization Among Peasant*, New York: Holt, Rineheart and Winston Inc
- Rogers, Everett M.1971. *Diffusion of Innovations*, TNew York: The Free Press
- , 1971. *Komunikasi dan Pembangunan*, Jakarta: Penerbit LP3ES

- Rogers Everett M and Floyd F. Shoemaker.1971. *Communications of Innovations, A Cross Culture Approach*, New York: The Free Press
- Rogers, Everett M & F. Floyd Shoemaker.1987. *Memasyarakatkan Ide-Ide Baru*, terjemahan Drs. Abdillah Hanafi, Surabaya: Penerbit Usaha Nasional
- Rogers, Everett M and Lawrence Kincaid.1981. *Communication Networks*, New York: The Free Press
- Ruben, Brent D.1988. *Humman Communication And Cross Culture Effectiveness*, dalam Samovar and Porter, *Intercultural Communication: A Reader*, Belmont, California: Wadsworth Publishing Co
- Samovar, Larry A, Richard E. Porter and Nemi C. Jain.1981. *Understanding Intercultural Communication*, Belmont, California: Wadsworth Publishing Co,
- Silverman, David.1993. *Interpreting Qualitative Data; Methods for Analysing Talk, Text and Interaction*, Sage Publications
- Singarimbun, Masri dan Sofian Effendi.1989. *Metode Penelitian Survey*, Jakarta: Penerbit LP3ES, Jakarta
- Smart, Reginald.1988. *Religion-Caused Compilcation Communication*, dalam Samovar and Porter, *Intercultural Communication: A Reader*, Belmont, California: Wadsworth Publishing Co,
- Smelser, Neil.1964. *Toward a Theory of Modernization*, dalam Amitai Etzioni And Eva Etzioni, *Social Change*, England: Cambridge University Press.
- Soekanto, Soerjono.1981. *Sosiologi Suatu Pengantar, Cetakan ke tujuh*, Jakarta UI Press
- Soesanto, Astrid S.1977. *Komunikasi dalam Teori dan Praktek*, bandung: Penerbit Binacipta
- Suwardi, Harsono.1993., *Peranan Pers Dalam Politik di Indonesia*, Jakarta: Penerbit Sinar Harapan
- Tehrani, M.1979. *Development Theory And Communication Policy The Changing Paradigm* dalam Voight And Hanneman (Ed) *Progress in Communication Sciences Vol. 1*, Noorwood, NJ: Able Publishing Co.
- Terry, George R.1958. *Office Management And Control*, Illinois: Richard D. Irwin Inc Home Word
- Tjokroamidjojo, Bintoro.1980. *Pengantar Administrasi Pembangunan*, Jakarta: Penerbit LP3ES, Jakarta
- Toha, Miftah. 1994. *Perilaku Organisasi*, Jakarta: Rajawali Pers
- Van Den Ban, A.W.1981. *Interpersonal Communication And The Diffusion of Innovation*, dalam *Extension Education And Rural Developmnet*, Bruce R. Crouch And Shankariah Chamala, New York: John Willey And Sons

- Vergouwen, J.C.1986. *Masyarakat dan Hukum Adat Batak Toba*, Jakarta: Penerbit Pustaka Azet
- Vredendregt, J.1980. *Metode dan Teknik Penelitian Masyarakat*, Jakarta: Penerbit P.T Gramedia
- Widjaja, A.W.1985. *Pola Kepemimpinan dan Kepemimpinan Pancasila*, Bandung: Penerbit Armico
- Wright, Charles R. 1975. *Mass Communication: A Sociological Prespective*, New York: Random House

### **Artikel**

- Black, Joe F. 1979. *Perbandingan Sistem Politik*, Yogyakarta: UGM
- Dahlan, Alwi. 1983. *Budaya Komunikasi di Indonesia: Beberapa Pengamatan*, Jakarta: LIPI
- Hassan, Ahmad Mustapa. 1983. *The Mass Media as An Agent of Change*, Media Asia Volume 10
- Koentjaraningrat. 1977. *Sistem Gotong Royong dan Jiwa Gotong Royong*, Berita Antropologi No.30 Tahun IX
- Lee, Everett S. 1987. *A Theory of Migration*, terjemahan Hans Daeng, PPK, Yogyakarta: UGM
- Liliweri, Alo. 1994. *Prasangka Sosial dan Komunikasi Antar Etnik*, Jakarta: Prisma, LP3ES
- Medis, Piyasoma. 1980. *Communication And Community Development*, Media Asia Volume 7
- Muis, Abdul. 1983. *Some Implications of Television Exposure Among Traditional Peasants: A Case from South Sulawesi Island*, Media Asia 10
- Muis, Abdul. 1984. *Communicating New Ideas to Traditional Villagers: An Indonesian Case*, Media Asia 11
- Sendjaja, Sasa D. 1991. *Peranan Ilmu dan Ilmuan dalam Menjawab Perubahan Dunia Komunikasi*, Seminar Nasional Ilmu Komunikasi, Surabaya
- Soesanto, Astrid S. 1974. *Komunikasi dan Media*, dalam Prisma No: 3, Jakarta: Penerbit LP3ES
- Tjahjono. 1989. *Pusat sebagai Ide dalam Lanskap Jawa*, Jakarta: LP-UI.

### **Sumber yang Tidak Diterbitkan**

- Halim, Lili Sontani.1989. *Istilah Kekeabatan Dalam Bahasa Minangkabau*, Thesis, UI
- Hardjana, Andre A.1994. *Budaya Organisasi: Sebuah Kerangka Pemahaman*, Jakarta
- Silalahi, Ullert. 1989. *Kepemimpinan Kepala Desa Dalam Pembangunan*, Thesis, UI

Komunikasi & Gerakan Perubahan

Soeaedi, Saleh, *Elite dan Pembangunan di Madura*, Thesis, UI, 1986.

### **Sumber Lain**

Kompas, tanggal 16 Juli 1995 dan 15 November 1995.

Laporan Kepala Desa 'Lokasi Penelitian' Kabupaten Daerah Tingkat II Karawang, Tahun 1995.

Monografi Desa 'Lokasi Penelitian' Kabupaten Daerah Tingkat II Karawang, Tahun 1994.

Monografi Desa 'Lokasi Penelitian' Kabupaten Daerah Tingkat II Karawang, Tahun 1995.

Nova, Tabloid Mingguan, No 394/VIII tanggal 10 September, Jakarta, Tahun 1995

Rencana Umum tata Ruang Kota ( RUTRK) Kecamatan, Bappeda Kabupaten Daerah Tingkat II Karawang, Tahun 1992/1993.

Ummat, Majalah Dwimingguan No:21, Tahun 1996.

Undang-Undang No.5 Tahun 1974 tentang *Pokok-Pokok Pemerintahan Di Daerah*, Kantor Menko Ekuin dan Wasbang, Jakarta, 1984.

Undang-Undang No.5 Tahun 1979 tentang *Pemerintahan Desa*, Kantor Menko Ekuin dan Wasbang, Jakarta, 1984.





# LAMPIRAN

## Pluralisme dan Retorika Politik

Oleh: Eko Harry Susanto  
(Kompas, 31 Maret 2009)

Menjelang Pemilu 2009, isu pluralisme seolah-oleh menjadi senjata ampuh bagi sejumlah partai politik yang selama ini dikenal memiliki massa yang cenderung homogen dari aspek ideologi.

Namun yang menjadi pertanyaan adalah, sejauhmana pluralisme memang menjadi orientasi total, dalam arti bukan sekadar retorika, tetapi ada kesungguhan mengaplikasikan konsep keanekaragaman dari sudut universal. Sebab, gencarnya perbincangan tentang pluralisme dari elite politik akhir-akhir ini, ternyata belum bisa merasuk ke massa di akar rumput, yang sesungguhnya sebagai sasaran agar menyadari betapa pentingnya semangat kebhinekaan dalam kehidupan bernegara.

Konflik antar ataupun intra kelompok yang tidak kunjung usai di berbagai wilayah tanah air, prasangka (*prejudice*) yang dipelihara secara terlembaga terhadap komunitas lain yang berbeda dalam nilai, sikap dan pandangan dunia (*worldview*), dan tindakan-tindakan yang mengatasnamakan kebenaran sepihak, merupakan bukti faktual bahwa kesediaan hidup dalam keanekaragaman yang harmonis menjadi barang mahal.

Dalam penelaahan tentang keanekaragaman masyarakat, Diana L. Eck (2007), intinya menyatakan bahwa, pluralisme merupakan keterlibatan secara energetik dengan keragaman, bukan toleransi tetapi pencarian secara aktif untuk memahami perbedaan-perbedaan. Pluralisme juga bukan relativisme, tetapi komitmen, berbasis kesediaan untuk berdialog-mengkritik dan mau dikritik.

Dari pernyataan tersebut, terdapat berbagai persoalan yang harus dilakukan oleh partai politik yang gencar menyuarakan pluralisme. Mereka harus bersedia menempatkan orang-orang dari luar garis ideologi utamanya, dalam sebuah jabatan politik strategis,

demi menciptakan sebuah sinergi partai. Mensinkronkan kekuatan dari kelompok yang beraneka ragam dalam sebuah semangat pluralisme, adalah pencapaian (*achievement*) positif partai, sehingga akan memiliki pengaruh besar di masyarakat.

Eksistensi di masyarakat yang heterogin adalah tujuan utama, oleh karena itu, partai politik sebaiknya mengkampanyekan perlunya toleransi. Memang tampak sederhana bagi para politisi atau sekelompok elite, tetapi tidak bisa dipungkiri bahwa prasangka kelompok masih terus hidup di berbagai komunitas. Oleh karena itu partai harus mencari perbedaan yang ada di masyarakat, dan memanfaatkannya sebagai salah satu landasan, dalam membangun basis partai yang kuat.

Prinsipnya, partai politik mengemas dan mendiseminasikan perbedaan bukan sebagai ancaman yang menakutkan bagi konstituen mayoritas partai, tetapi justru sebaliknya, bisa membentuk sebuah komunitas dalam tubuh partai plural yang kuat. Namun persoalannya, masih terlampau banyak, diferensiasi yang ada di masyarakat justru diorganisasikan untuk membangkitkan semangat kelompok.

Jika konsisten berpijak pada ide keanekaragaman, alangkah baiknya jika partai politik tidak selalu mengunggulkan keyakinan dasar secara sepihak. Sebab partai plural, adalah sebuah komitmen “kebersamaan” terhadap perbedaan. Walaupun, sesungguhnya orientasi terhadap pluralisme, tidak perlu menanggalkan maupun mengisolasi identitas ideologisnya. Justru keberagaman adalah kekuatan sejati dalam demokrasi bernegara.

Tetapi tidak bisa dipungkiri bahwa jalan menuju kondisi itu memerlukan proses panjang. Partai politik harus tidak bosan-bosannya membuka dan memfasilitasi dialoag integratif antar kelompok di akar rumput sebagai basis konstituen, bukan dalam seminar dan diskusi elite yang tidak membumi. Ini mubazir karena tidak memiliki implikasi langsung di masyarakat. Harus diakui saat ini, betapa langkanya dialog antar kelompok yang langsung melibatkan rakyat kebanyakan, demi memperkuat semangat kebhinekaan.

Kalaupun partai politik gencar menyuarakan pluralitas, tetapi pemaparan Elizabeth Fuller Collins, dalam tulisan tentang Indonesia: Sebuah Budaya Kekerasan?, di Asian Survey, Juli 2002, bisa membuat pesimis. Dikemukakan bahwa, kekerasan muncul karena kegagalan lembaga-lembaga politik dan hukum, untuk menyediakan perangkat/ aturan bagi penyelesaian konflik, mengatasi keluhan penguatan identitas komunal untuk mengendalikan sumber ekonomi, dan penggunaan kekerasan oleh negara (*state-sanctioned violence*) untuk menghasut atau menekan konflik.

Tidak bisa dinafikan, meski banyak dibantah oleh elite politik dan pemerintah dengan aneka dalih, tetapi secara subsatansial konflik dan kekerasan di Indonesia seringkali dipicu oleh berbagai perbedaan yang menyangkut karakteristik etnik maupun keyakinan dasar sebuah kelompok. Jelas ini berpotensi mengganggu semangat keanekaragaman dalam dalam berpolitik di masyarakat heterogin.

Dengan kata lain, pluralisme yang nyaring disuarakan oleh partai politik, bisa saja hanya dianggap retorika yang tidak membumi di masyarakat, sehingga tidak akan berpengaruh banyak dalam menangguk konstituen pada pemilihan umum tahun 2009

### **Komunikasi Memperkuat Kebinekaan**

**Oleh: Eko Harry Susanto**

**(Suara Karya, 26 Mei 2011)**

**D**emokrasi politik pasca reformasi kenegaraan, memicu kekerasan antar kelompok dan mendorong menguatnya perilaku radikalisme, yang tidak lagi menghiraukan eksistensi kebhinekaan sebagai landasan kehidupan bernegara.

Jika kondisi ini tidak diselesaikan secara tuntas dengan tindakan nyata, dalam arti hanya melalui jargon dan retorika pencitraan, maka pluralisme sebagai pilar kekuatan bangsa akan menghilang lebih cepat. Implikasi lebih jauh adalah munculnya disintegrasi bangsa berbais semangat sektarian, yang lebih mengedepankan kepentingan kelompok.

#### **Komunikasi Antar Kelompok**

Tanpa mengesampingkan aspek legal, keamanan, dan pendekatan sosial dari pemerintah maupun sejumlah entitas yang peduli terhadap terjaganya kebhinekaan, alangkah baiknya jika segenap elemen masyarakat berusaha meminimalisir konflik, melalui pendekatan komunikasi antar kelompok yang dapat menyatukan perbedaan.

Pendekatan komunikasi antar kelompok untuk meredam konflik, secara substantif menurut Samovar, Porter dan Mc.Daniel (2005), adalah upaya menumbuhkan nilai-nilai bersama yang menghasilkan rasa aman, saling menghargai dan menghindari konflik. Titik tolak meminimalisir konflik adalah, menghilangkan nilai sektarian yang memiliki relasi kuat dalam menumbuhkan sikap komunalisme. Sebab, perilaku yang menutup diri terhadap kelompok lain ini berbahaya bagi masyarakat majemuk seperti di Indonesia.

Selain itu, komunalisme sebagai semangat kelompok, cenderung mematu-matu diri, bahwa nilai-nilai komunitasnya jauh lebih unggul dibandingkan keyakinan yang dianut oleh kelompok lain. Jika suatu kelompok merasa paling unggul, maka representasi yang mudah dideteksi adalah, mereka selalu menafsirkan bahwa nilai positif hanya dimiliki oleh kelompoknya.

Pelembagaan sikap yang tidak menghiraukan nilai sosial budaya kelompok lain itu, akan menyulut pertikaian di lingkungan masyarakat yang multi etnik. Dengan

kata lain, menjauhkan upaya untuk hidup berdampingan secara harmonis, sebagaimana harapan masyarakat.

Namun tantangan kebhinekaan, sebagai landasan kehidupan berbangsa dan bernegara bukan sebatas berkembangnya semangat komunalisme saja, tetapi minimnya empati dalam hubungan antar manusia, juga menjadi pemicu menguatnya semangat kelompok yang berpotensi mengabaikan kebhinekaan. Padahal, empati merupakan partisipasi emosional dan intelektual secara imajinatif yang mampu mengikat perbedaan dalam bingkai kebhinekaan yang harmoni dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Secara faktual, berbagai tindak kekerasan, radikalisme dan konflik antar kelompok di Indonesia memang dipicu oleh menguatnya semangat sub-nasional yang berbahaya bagi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Karena itu, melalui pendekatan komunikasi antar kelompok yang menghilangkan sekat sektarian dan komunalisme dalam bentuk semangat kebersamaan harus segera diwujudkan.

Namun yang lebih penting adalah, bagaimana elite politik dan elite dalam kekuasaan negara maupun tokoh masyarakat pada umumnya, mewujudkan komunikasi yang menjunjung tinggi tolereransi terhadap perbedaan. Sebab, dalam belunggu kebebasan dengan dalih demokrasi, komunikasi antar kelompok yang integratif justru menghadapi tantangan berat.

### **Menyuarakan Kebhinekaan**

Model kepemimpinan yang mampu menyatukan suara dalam bingkai “bebas dari kepentingan” kelompok, dan demi keadilan bagi semua orang, semakin langka ditemukan. Pola komunikasi antar elite di berbagai lapisan kekuasaan, juga tidak mencerminkan piramida kepercayaan masyarakat. Dalam arti, tidak ada satupun pimpinan yang mampu memposisikan sebagai pucuk sebuah segitiga informasi yang dijadikan rujukan utama, dalam berbagai penyelesaian konflik dan kekerasan yang bernuansa sektarian.

Memang tidak bisa dikesampingkan, bahwa kebebasan berkomunikasi yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar 1945 harus dikedepankan. Namun bukan berarti setiap elite bisa menyuarakan kepentingannya yang tidak lepas dari nilai kebhinekaan. Terlampau banyak komentar elite yang mengkritik kekerasan akibat komunalisme, menjadi suatu anti klimak di ujung kalimatnya yang penuh dengan basa-basi perkecualian.

Betapa banyaknya pembicaraan publik yang dieksplorasi media, jika ditelaah dalam bingkai objektif, secara terselubung berbalik arah seperti mendukung tindak kekerasan. Tentu saja retorika elite yang semacam ini, seperti memberikan pengesahan terhadap tindakan kekerasan berbasis perbedaan kelompok.

Mencermati kondisi itu, untuk menghilangkan naluri sub-nasional maupun komunalisme yang berpotensi memicu tindakan kekerasan dan radikalisme, tentu saja bukan sebatas menggalakkan nilai Pancasila yang disinyalir memudar.

Tetapi, yang lebih aktual untuk dilaksanakan adalah, bagaimana para elite memiliki kesepakatan dalam komunikasi yang mampu menjaga terpeliharanya masyarakat majemuk di Indonesia. Dengan kata lain, elite politik dan elite dalam kekuasaan negara, meskipun memiliki perbedaan ideologi dalam menyejahterakan rakyat, tetapi harus sepakat untuk melakukan komunikasi yang beradab, demi menegakkan kebhinekaan kehidupan berbangsa dan bernegara.

Namun persoalannya, dalam perangkap demokrasi integralistik yang menafikan perbedaan, dan demi meraih popularitas di masyarakat, para elite justru cenderung mengeksplorasi retorika yang bersifat sektarianisme, sebagai basis kekuatan kelompok. Oleh sebab itu, sangat wajar jika berkembang anggapan bahwa upaya mengikis semangat sektarian, berjalan seperti siklus, tampaknya maju ke depan tetapi sesungguhnya mengalami kemunduran.

### **Meredam Atau Melembagakan Konflik**

**Oleh: Eko Harry Susanto**  
(Suara Pembaruan, 5 Januari 2012)

**D**emokrasi politik pasca reformasi kenegaraan yang mengunggulkan kebebasan, seringkali justru memicu konflik antar kelompok, yang tidak lagi menghiraukan eksistensi kebhinekaan sebagai basis kehidupan berbangsa di Indonesia.

Perbedaan kelompok, etnisitas, agama dan keyakinan dalam kerangka perbedaan "kepercayaan", mewarnai berbagai konflik yang terjadi pada tahun 2011. Catatan akhir tahun Lembaga Studi Advokasi Masyarakat (Elsam), terdapat 63 konflik terkait kebebasan berkeyakinan sepanjang tahun 2011. Kondisi tersebut, amat memprihatinkan, mengingat nilai kebhinekaan bangsa Indonesia sudah sangat dikenal luas. Berbagai kalangan internasional membanggakan, bahwa Indonesia mampu mengatasi kesulitan dalam menyikapi perbedaan, dan berhasil mewujudkan Bhineka Tunggal Ika sebagai landasan kehidupan berbangsa dan bernegara.

Kebhinekaan menjadi sebuah kekuatan karena sejak dulu telah ada tradisi "*care and share*" yang tidak lain adalah semangat gotong royong, yang tumbuh diantara rakyat yang berjiwa ramah di alam yang kaya-raya (Shinzo Abe, 2007). Oleh sebab itu, seharusnya bangsa Indonesia, terus menjaga citra keanekaragaman yang sudah dikenal oleh masyarakat di manca negara tersebut.

### **Nilai Sektarianisme**

Dengan tidak mengabaikan aspek legal-formal dalam upaya menjalankan hukum, menjaga keamanan nasional, dan melakukan pendekatan sosial yang telah dilaksanakan oleh pemerintah maupun lembaga swadaya masyarakat, alangkah baiknya jika segenap elemen masyarakat dalam memasuki tahun 2012, berusaha meminimalisir konflik melalui model komunikasi antar budaya, diantara orang-orang yang berbeda keyakinan dasar (nilai), sikap dan kepercayaan. Sebab perbedaan nilai, sikap maupun kepercayaan, akan selalu tumbuh secara alamiah dalam lingkungan masyarakat majemuk, dan tidak mungkin dicegah dengan cara yang mengunggulkan semangat kekerasan komunal maupun tindakan sektarian.

Pendekatan komunikasi antar budaya harus menjadi pedoman para elite untuk meredam konflik antar kelompok. Komunikasi diantara mereka yang berbeda budaya tersebut merupakan upaya untuk menumbuhkan pemahaman nilai dan makna bersama, yang menghasilkan rasa aman, saling menghargai dan menghindari konflik. Titik tolak menumbuhkan makna bersama diawali dengan, menghilangkan komunikasi yang terikat oleh kultur sektarianisme. Kultur ini menganggap nilai komunitasnya, lebih unggul dibandingkan keyakinan yang dianut oleh kelompok lain. Perwujudan sektarianisme sejalan dengan etnosentrisme ekstrim, yang menafsirkan nilai kebenaran, kejujuran, kesantunan bermasyarakat dan bernegara hanya dimiliki oleh kelompoknya.

### **Ruang Negosiasi**

Jika sektarianisme dieksplorasi secara demonstratif, akan memicu semangat sub-nasional yang berujung kepada konflik antarkelompok di lingkungan masyarakat heterogin. Karena itu, yang harus dilakukan oleh para elite adalah memperkecil pemikiran sektarian dengan menghindari sikap yang tidak menghargai keyakinan dasar orang yang memiliki karakteristik budaya dan keyakinan berbeda.

Pelembagaan sikap sektarian dan komunalisme yang tidak menghiraukan nilai-nilai sosial budaya kelompok lain ini, diprediksikan akan dilakukan oleh sejumlah entitas politik, demi memperoleh dukungan massa menghadapi kondisi politik yang memanas di tahun 2012. Dikhawatirkan tokoh masyarakat, pemuka pendapat dan sejumlah elite, tampaknya akan semakin demonstratif mengelola "ketidakpercayaan" terhadap komunitas lain, sebagai salah satu ketahanan sosial kelompoknya. Jika ini terjadi, sudah barang tentu akan menyulut pertentangan dan semakin menjauhkan upaya untuk hidup berdampingan secara damai.

Faktor lain yang harus diperhatikan adalah, tidak bersikap antipati dengan kelompok yang berbeda, karena akan mendorong munculnya komunikasi eksklusif yang rentan pertikaian bernuansa sektarian. Karena itu dalam komunikasi dan interkasi di lingkungan masyarakat yang heterogin, harus berpijak kepada perilaku yang saling menyesuaikan diri.

Penyesuaian perilaku di lingkungan masyarakat majemuk harus berjalan dua arah sebagaimana dikemukakan oleh Edward T.Hall dan William F. Whyte (2002), harus ada ruang-ruang negosiasi dalam setiap anggota kelompok, untuk menghargai nilai-nilai kelompok lain yang memiliki perbedaan. Jika penyesuaian diri berjalan tidak seimbang, akan berbahaya, karena mendorong munculnya rasa superior dari komunitas yang merasa unggul dalam jumlah maupun kualitas hidup.

Lebih celaka lagi, ketimpangan penyesuaian diri akan berdampak terhadap pelembagaan stigma negatif, yang menempatkan kelompok lain lebih rendah, tidak berarti dan marginal dibandingkan dengan kelompoknya. Dalam perspektif komunikasi antar kelompok, pelembagaan stigma merupakan sikap yang banyak mewarnai kehidupan masyarakat majemuk. Meski sebagai hal yang umum, namun jika dikemas dengan aroma kebencian dan sinisme, bisa menjadi biang keladi perpecahan masyarakat yang paling membahayakan. Terlebih lagi, pada tahun-tahun mendatang, politik komunalisme akan menguat sejalan dengan menghangatnya suhu politik menuju pemilihan umum 2014.

Secara empirik, berbagai konflik antar kelompok di Indonesia juga dipicu oleh pelembagaan stigma negatif dalam nuansa "stereotip" yang melekat pada pihak-pihak yang bertikai. Mengekspresikan stereotip negatif terhadap kelompok lain, berhubungan erat dengan munculnya kecurigaan, kesangsian dan ketidakpercayaan terhadap pihak-pihak yang tidak disukai dalam interaksi dan komunikasi di lingkungan masyarakat majemuk.

Berpijak kepada pemahaman terhadap model komunikasi antar kelompok, maka sudah sepantasnya jika segenap elite dalam tubuh pemerintah dan masyarakat pada umumnya, menerapkan pola interaksi antar kelompok yang membangun pemahaman nilai dan makna bersama untuk meredam konflik dan tindak kekerasan. Namun persolannya, dalam dinamika politik yang semakin menghangat di tahun 2012, nilai-nilai perbedaan tampaknya justru akan dilembagakan untuk memburu kekuasaan ataupun memperkuat keunggulan posisi kelompok dalam persaingan politik yang tidak menghiraukan lagi nilai kebhinekaan masyarakat Indonesia.

## **Komunikasi dan Konflik Antarkelompok**

**Oleh: Eko Harry Susanto**

**(Bisnis Indonesia, 3 September 2012)**

**K**onflik antarkelompok di Sampang Madura, semakin menambah daftar panjang keberingasan massa yang dipicu oleh perbedaan keyakinan, dan berlindung dibalik demokratisasi politik maupun kebebasan berekspresi pasca reformasi kenegaraan.

Perbedaan keyakinan seolah memicu berbagai konflik yang tersebar di berbagai penjuru tanah air. Data dari berbagai lembaga swadaya masyarakat menunjukkan bahwa konflik antarkelompok semakin mengkhawatirkan. Bahkan The Wahid Institute, selama 2011 sudah mencatat terjadi 93 kasus intoleransi beragama.

Sejumlah pihak menuduh bahwa negara tidak hadir dalam upaya mencegah terjadinya konflik, dan pemerintah dinilai gagal melindungi rakyat dari ancaman kerusuhan.

Memang dalam pembelaannya, institusi yang bertanggung jawab terhadap keamanan dan ketentraman warga, selalu mengedepankan langkah-langkah hukum dalam upaya mendeteksi terjadinya konflik dan keberingasan massa.

Oleh sebab itu, dengan tidak menafikan tindakan maupun pendekatan legal formal yang sudah dilakukan pemerintah, alangkah baiknya jika segenap elemen masyarakat yang peduli terhadap nilai-nilai kemajemukan, berusaha meminimalisir konflik melalui strategi komunikasi antarbudaya diantara orang-orang yang berbeda nilai, sikap dan kepercayaan (belief).

Model komunikasi antarbudaya untuk meredam konflik, secara substantif menurut Samowar, Porter dan Mc.Daniel (2005), adalah upaya menumbuhkan nilai-nilai bersama yang menghasilkan rasa aman, saling menghargai dan menghindari konflik.

Titik tolak meminimalisasi konflik adalah menghilangkan etnosentrisme yang menganggap nilai-nilai kelompoknya jauh lebih unggul dibandingkan keyakinan yang dianut oleh kelompok lain.

Perwujudan etnosentrisme yang paling ekstrem dan mengkhawatirkan dalam masyarakat majemuk, adalah menafsirkan nilai kebenaran, kejujuran, kesantunan relasi antarmanusia, kehidupan bermasyarakat dan bernegara hanya dimiliki oleh kelompoknya.

Celakanya, jika etnosentrisme dieksplorasi secara demonstratif, berpotensi memicu konflik lingkungan masyarakat yang heterogen.

Gejala awal dari munculnya konflik ini adalah individu, kelompok maupun komunitas yang ada di masyarakat mengembangkan sikap yang bermuara kepada ketidakpercayaan (*lack of trust*) terhadap orang-orang yang memiliki karakteristik berbeda.



Oleh sebab itu, semua pihak yang ada di masyarakat, harus melakukan tindakan untuk memperkecil sikap etnosentrisme, demi untuk mencegah konflik antarkelompok.

Pelembagaan sikap etnosentrisme yang sejalan dengan sikap komunalisme, sektarianisme dan semangat sub-nasiona, yang tidak menghiraukan nilai-nilai sosial budaya kelompok lain, akan menyulut pertentangan di wilayah yang berpenduduk multi etnik.

Tindakan itu, semakin menjauhkan upaya untuk hidup berdampingan secara damai, jika para tokoh masyarakat, pemuka pendapat dan sejumlah elite politik maupun elite dalam kekuasaan negara justru sengaja mengelola ketidakpercayaan sebagai salah satu basis ketahanan sosial kelompoknya, faktor lain yang harus diperhatikan adalah selayaknya jika para tokoh masyarakat di berbagai bidang kehidupan sosial, ekonomi dan politik, tidak melakukan penarikan diri (*withdrawl*) ketika berinteraksi dan berkomunikasi dengan kelompok yang berbeda.

Penarikan diri dalam relasi antarkelompok, mendorong munculnya komunikasi eksklusif yang berakhir dengan pertikaian, karena tidak memberikan kesempatan kepada komunitas lain untuk melakukan interkasi secara seimbang.

Di lingkungan masyarakat yang heterogen dari sudut entensitas, keyakinan dan budaya interaksi harus berpijak kepada upaya mengeksplorasi kesamaan karakteristik dan mengedepankan empati kepada orang-orang yang bukan berasal dari kelompoknya.

Empati dalam perspektif komunikasi antarkelompok merupakan partisipasi emosional dan intelektual secara imajinasi pada pengalaman orang lain, atau secara sederhana di artikan, bagaimana menempatkan posisi diri sendiri dalam kedudukan orang lain.

Penghambatan empati terhadap entitas yang berbeda, akan menghambat harmonisasi dalam hidup bermasyarakat.

Kesulitan empati, biasanya terkait pula dengan stereotip, yang menggeneralisasikan kesamaan perilaku seseorang dengan karakter kelompoknya. Sikap ini dinilai emosional dan mengganggu pluralism yang diunggulkan dalam kehidupan bermasyarakat.

Dalam wacana komunikasi antarbudaya, faktor stereotip adalah sikap yang paling banyak mewarnai kehidupan masyarakat majemuk.

### **Perpecahan Masyarakat**

Meski sebagai hal yang umum, jika dikemas dengan aroma kebencian dan sinisme, bisa menjadi biang keladi perpecahan masyarakat yang paling membahayakan.

Hakikatnya, berbagai konflik antarkelompok di Indonesia juga dipicu oleh faktor stereotip terhadap keyakinan dasar yang melekat pada pihak-pihak yang bertikai.

Mengekspresikan stereotip terhadap kelompok lain, berhubungan erat dengan munculnya prasangka dalam bentuk kecurigaan, kesangsian dan ketidakpercayaan terhadap pihak-pihak yang tidak disukai

Di sisi lain, prasangka terkait oleh sikap mendiskusikan sisi negatif orang diluar kelompoknya (*antilocution*) dan kecendrungan menghindari dari kelompok yang tidak disukai (*avoidance*).

Sikap diskriminatif ini, berujung kepada serangan fisik (*violence*) dan pemusnahan terhadap kelompok lain dengan cara satu per satu maupun massal (*extermination*).

Konflik horisontal antar kelompok yang berbeda keyakinan di Sampang Madura, merupakan perwujudan dari prasangka yang berujung kepada penyerangan fisik terhadap komunitas yang dinilai tidak sejalan dengan keyakinan dasar kelompok dominan yang ada di wilayahnya.

Dalam skala makro, konflik antarkelompok yang berbeda keyakinan di berbagai penjuru Tanah Air, seringkali diwarnai dengan serangan fisik yang merobek nilai-nilai kebinekaan masyarakat.

Berpijak kepada pemahaman terhadap strategi komunikasi antarkelompok, maka sudah sepantasnya jika segenap elite dalam tubuh pemerintah dan masyarakat pada umumnya, mengaplikasikan model interaksi antar kelompok secara konsisten demi mengembangkan kesadaran kolektif untuk mencegah konflik dan tindak kekerasan yang cenderung meningkat.

Namun persoalannya, dalam belenggu kebebasan, justru nilai-nilai perbedaan cenderung dipakai untuk mencari kekuasaan, ataupun memperkuat keunggulan posisi kelompok dalam persaingan yang tidak menghiraukan lagi nilai kebinekaan.

### **Keberingasan Massa dan Kegagalan Komunikasi Elite**

**Oleh: Eko Harry Susanto**

**(Suara Karya, 9 September 2012)**

**K**onflik antarkelompok yang dipicu oleh perbedaan nilai, sikap dan kepercayaan, kembali mengoyak harmonisasi kehidupan masyarakat. Sumbawa sebagai salah satu basis pluralisme di Indonesia Timur juga terkoyak oleh pertikaian antar kelompok dalam jerat SARA yang membahayakan integrasi nasional

Secara esensial, konflik antar kelompok yang tidak menghiraukan nilai kebersamaan merupakan persoalan serius bangsa yang mengancam fondasi kebhinekaan. Oleh sebab itu, untuk mencegah ataupun meminimalisir konflik, para elite dalam kekuasaan negara, bukan hanya mengeksplorasi kecaman dengan berpijak pada aspek legal-formal,

tetapi harus mengedepankan strategi komunikasi berbasis empati terhadap kelompok masyarakat yang memiliki sejumlah karakter berbeda.

Namun yang menjadi persoalan, dalam menyikapi konflik antarkelompok, justru komunikasi para elite dalam tubuh kekuasaan, jauh dari sikap mengedepankan empati dalam kemajemukan. Justru yang dilakukan adalah menyalahkan pihak yang kalah atau mereka yang berbeda dengan karakteristik mayoritas sebagai biang keladi konflik maupun keberingasan massa. Ini sejalan dengan Jajak pendapat harian Kompas (10/12/20-12), yang menunjukkan bahwa, hanya 32,3 persen responden yang menegaskan puas terhadap peran negara dalam menjaga kebinekaan, 60,8 menyatakan tidak puas, sedangkan 6,9 mengemukakan tidak tahu.

Padahal menurut Melvin Urofsky (2001:5), dalam menegakkan demokrasi dan menjaga kemajemukan, melindungi hak mereka yang terpinggirkan dan minoritas, harus tumbuh dari empati ataupun kehendak mayoritas dalam masyarakat. Penyejajaran kedudukan adalah bagian penting dari perkembangan demokrasi universal yang menghargai toleransi.

Semangat untuk menjadi makin inklusif dan mengulurkan tangan pada mereka yang memiliki keyakinan dasar tidak sehaluan dengan kelompok mayoritas, bukan hanya melindungi terhadap perlakuan semena-mena, namun harus memberikan kesempatan untuk berpartisipasi dalam semua bidang kehidupan yang setara, sebagai warga negara yang memiliki kesamaan hak serta tanggung jawab terhadap kemajemukan.

### **Empati Bukan Kekalahan**

Dalam upaya membangun harmonisasi hubungan antar kelompok, mengedepankan empati merupakan sumber kekuatan hubungan integratif di lingkungan masyarakat majemuk (Samovar, Porter dan Jain, 2005). Mencaci, menyalahkan kelompok lain dari sisi negatif pada ruang-ruang publik, adalah amunisi yang dapat mendorong munculnya konflik yang menjurus kepada keberingasan massa.

Sebaliknya, dengan menggunakan komunikasi empati, yang memposisikan seandainya mereka yang berbeda adalah "kelompok saya", maka perbedaan nilai, sikap dan kepercayaan justru menjadi kekuatan dalam mencapai kesejahteraan. Dengan demikian, sudah sepantasnya jika para pemilik otoritas dalam pemerintahan, menjalankan komunikasi yang mengeksplorasi empati terhadap kelompok berbeda nilai, sikap dan kepercayaan.

Memang tidak mudah mengedepankan empati, sebab mereka yang seharusnya bertanggung jawab terhadap terjaganya pluralisme, malah terjerat oleh politisasi agama, etnis dan semangat sub-nasional, yang menafsirkan empati sebagai bentuk "kekalahan" menghadapi kelompok lain. Bahkan lebih mengkhawatirkan lagi, perilaku empati terhadap keberagaman disejajarkan dengan tindakan membela kelompok lain yang berbahaya bagi pelembagaan nilai-nilai individual yang bersifat sektarian.

Mengutip pendapat Bennet (1979), bahwa empati adalah kejujuran diri sendiri dalam komunikasi antarkelompok yang memiliki karakter tidak sama. Berempati bukan berarti kehilangan jati diri yang mengabaikan norma yang diyakini secara individual maupun kelompok, tetapi hanya penundaan sementara terhadap identitas diri, dari atribut egosentris demi menghargai pihak lain.

Sejalan dengan itu, Hall (1967) juga menyatakan, individu berada dalam gelembung busa sabun yang selalu melekat dalam komunikasi dengan pihak lain tanpa kehilangan ruang privat yang memiliki batas jelas. Dengan kata lain, komunikasi yang empati merupakan ekspresi dari kejujuran penghargaan terhadap diri sendiri untuk menyesuaikan dengan tuntutan kehidupan masyarakat majemuk yang memiliki keragaman perilaku sosial ekonomi dan politik.

Menyikapi kondisi tersebut, yang menjadi pertanyaan, apakah para elite di tubuh pemerintahan yang pada umumnya terkooptasi oleh belenggu kekuatan politik praktis, bersedia mengedepankan empati ketika nafsu berkuasa dalam aroma pencitraan, dipakai untuk menarik dukungan massa. Jawabnya tentu teramat langka elite birokrasi “yang bermain politik” mau berempati secara jujur kepada mereka yang minoritas dan tidak menjanjikan dukungan politik.

Kalaupun komunikasi empati mewarnai blantika retorika para elite, semata-mata dalam bingkai formal yang tidak membumi. Jelas ini tidak sejalan dengan tindakan ideal, yang mensyaratkan bahwa, pesan empati untuk menjaga toleransi dalam kemajemukan harus dititikberatkan di lingkungan komunitas sendiri, bukan di ruang publik yang heterogin.

Aksioma komunikasi menegaskan, komunikasi empati dan pesan toleransi dalam koridor “homogenitas” jauh lebih efektif untuk diterima anggota kelompoknya, karena ada kejujuran, kelugasan dan jauh dari dramaturgi pencitraan.

Namun yang menjadi persoalan, jerat politik “kuantifikasi” dalam kontestasi memburu kekuasaan lokal maupun nasional, menunjukkan bahwa elite telah gagal membangun komunikasi yang empati terhadap mereka yang berbeda dan minoritas. Akibatnya, konflik antar kelompok dalam nuansa perbedaan nilai, sikap dan kepercayaan terus terjadi dan semakin memarginalkan fondasi keanekaragaman masyarakat dalam kehidupan bernegara.

## Negara, Konflik dan Empat Pilar Kebangsaan

Oleh: Eko Harry Susanto

(Suara Karya, 23 Juli 2013)

**K**eberingasan massa di berbagai penjuru tanah air semakin mewarnai konflik yang bernuansa perbedaan agama, keyakinan dan kepercayaan. Bahkan potret buram kehidupan masyarakat majemuk itu seperti bersaing dengan upaya para elite dalam menyuarakan penegakan empat pilar kebangsaan yang bertumpu kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Negara Kesatuan Republik dan Bhineka Tunggal Ika sebagai pedoman masyarakat dalam negara yang beradab.

Namun di pihak lain, negara sebagai entitas yang paling bertanggung jawab terhadap keamanan dan ketenteraman masyarakat, seperti tidak berdaya mengatasi aneka konflik yang muncul setiap saat. Karena itu tidak mengherankan jika berbagai kalangan menyebutkan bahwa pemerintah belum mampu melindungi masyarakat dari konflik dalam bingkai perbedaan agama dan keyakinan dasar yang muncul di berbagai lapisan masyarakat.

### Menafikan Isu Sensitif

Walaupun secara faktual berbagai konflik, diwarnai oleh isu sensitif dalam belunggu perbedaan karakter dalam agama dan keyakinan, tetapi kita teramat jarang mendengar pengakuan dari pihak-pihak yang bertanggung jawab di tubuh pemerintah, mengakui bahwa pertikaian, perseteruan, penyerangan dan kerusuhan yang terjadi bermotif perbedaan dalam keyakinan pada ranah keagamaan. Justru yang kerap terdengar adalah, elite dalam kekuasaan negara mengkambinghitamkan emosi masyarakat semata sebagai pemicu konflik antar kelompok-kelompok yang ada di masyarakat.

Menafikan substansi perbedaan keyakinan dalam agama sebagai pemicu konflik, merupakan gambaran kelemahan negara dalam membangun integrasi nasional yang merujuk kepada penguatan empat pilar kebangsaan yang mengunggulkan Pancasila, UUD 1945, NKRI dan Bhineka Tunggal Ika. Padahal oleh Rodney A. Smola (2001), menggarisbawahi, bahwa kekuasaan yang mengabaikan fakta di sekelilingnya dan menutup hak masyarakat untuk mengetahui kondisi yang sebenarnya dalam mengelola negara, akan menghancurkan kekuasaan pemerintah itu sendiri”.

Karena itu, sudah selayaknya jika pemerintah transparan mengakui adanya konflik antar kelompok dalam nuanasa perbedaan agama dan keyakinan di berbagai wilayah nusantara. Dengan transparansi, maka pemerintah bisa membangun kesadaran masyarakat tentang perpecahan NKRI di depan mata. Bagaimanapun juga ketika para elite dalam poros-poros kekuasaan negara mereduksi fakta konflik, dengan mengeksplorasi

pemicu yang seringkali hanya persolan sepele, maka masyarakat juga menafikan bahaya perbedaan agama dan keyakinan di sekelilingnya.

Namun mereduksi fakta konflik bernuansa perbedaan termasuk ketidakmampuan mengatasinya, bukan hanya persoalan kinerja aparatur pemerintah menghadapi keberingasan massa. Sebab ada kecenderungan, berbagai entitas dalam tubuh pemerintah, melakukan pembiaran terselubung terhadap aneka bentrokan yang bersifat sektarian. Sikap ini mudah ditebak, mengingat elite dalam kekuasaan, memiliki ketergantungan terhadap kekuatan pihak-pihak yang bertikai untuk dijadikan pendukung dalam kompetisi politik lokal maupun nasional.

Pada konteks ini, sinyalemen Sidney Jones, dalam Kuliah Umum Hak Asasi Manusia di KontraS Jakarta, dalam satu kesempatan di Jakarta tahun 2011, menarik untuk dicermati. Secara esensial, dikemukakan, pegiat HAM kurang agresif untuk mendekati kalangan birokrat dan politikus dalam mewujudkan gagasan demokrasi yang mengusung kemajemukan.

Akibatnya, elite dalam pemerintahan lebih mengakomodasikan kekuatan komunitas berbasis nilai sektarian yang memiliki massa, dan mampu memberikan dukungan dalam persaingan politik, dibandingkan menjalankan roda pemerintahan untuk semua pihak tanpa diferensiasi agama dan keyakinan. Karena itu, tidak mengherankan jika kecenderungan perilaku sektarian tumbuh signifikan di lembaga-lembaga pemerintah. Jelas ini representasi dari kesepakatan para elite negara untuk “mematuhi” kehendak “pemilik massa” yang mempunyai kekuatan paksa mengontrol dari luar jalannya pemerintahan.

### **Tanpa Standar**

Melalui komunikasi verbal dan non verbal, tentu tidak sulit mengenali berkembangnya semangat perbedaan di institusi negara yang notabene harus bertanggung jawab terhadap utuhnya kebhinekaan. Bahkan tidak aneh, entitas negara yang seharusnya gencar menanamkan pentingnya empat pilar kebangsaan pada usia belia, terperangkap juga dalam perilaku epigon membangun perbedaan sejak dini secara terselubung.

Karena itu, tanpa bermaksud mengedepankan pola penyosialisasian model Penataran Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (P4) yang sudah menghilang pada era reformasi, tetapi pembentukan karakter “pluralisme yang menjaga empat pilar kebangsaan” di lembaga-lembaga pemerintah, dalam bingkai “demokrasi” harus ditegakkan. Tujuannya agar aparatur pemerintah tidak semakin jauh terperangkap dalam penafsiran ideal terhadap nilai dan keyakinan dasar yang bersifat sepihak sesuai dengan pemilik otoritas di institusinya.

Memang kemasam dalam membangun karakter, sikap dan perilaku birokrasi pemerintahan sangat ideal, karena diwarnai oleh jargon, moto, kata-kata mutiara yang menyejukkan dalam nada menghargai eksistensi kelompok yang berbeda agama,

kepercayaan maupun keyakinan dasar. Namun terlampau sulit mengimbangi kekuatan pesan-pesan bernada “pembeda” yang sudah mendominasi berbagai lapisan dalam tubuh birokrasi pemerintahan.

Dengan demikian, tidak aneh jika konflik, pertikaian, kerusuhan dan keberingasan massa yang terjadi di tanah air, masih saja diwarnai oleh isu perbedaan yang berpotensi memarginalkan empat pilar kebangsaan. Sebab, hakikatnya, dalam masyarakat paternalistik sebagaimana di Indonesia, massa sesungguhnya hanya meniru tindakan organ-organ kekuasaan negara yang memiliki pengaruh dominan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

### **Intoleransi dan Ambiguitas Elite**

**Oleh: Eko Harry Susanto**

**(Suara Karya, 06 Desember 2013)**

**K**onflik dan bentrokan antar-kelompok massa dalam nuansa perbedaan agama maupun keyakinan yang memakan korban terus terjadi di berbagai penjuru Nusantara. Padahal, Instruksi Presiden No. 2 Tahun 2013 tentang Gangguan Keamanan Dalam Negeri sudah memberikan tanggung jawab penanganan konflik kepada pemerintah daerah. Tetapi, peran elite politik dan kekuasaan negara di berbagai tingkatan, tetap memberikan kontribusi melembaganya konflik dalam nuansa intoleransi yang mengancam kebhinekaan.

Padahal Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) terus mewanti-wanti perlunya kerukunan hidup beragama demi kelangsungan jalannya negara dan pemerintahan. Ketika berpidato di depan anggota DPR, Agustus lalu, Presiden SBY pun menegaskan untuk terus menjaga toleransi beragama dan berkeyakinan demi Indonesia yang damai dan berkeadilan.

Namun, pernyataan itu dinilai sudah tidak sesuai dengan kecenderungan para politisi dan elite di tubuh pemerintah yang lantang membingkai konflik dalam nuansa intoleransi secara terselubung. Pada umumnya mereka menolak bahwa munculnya konflik disertai kekerasan akibat perbedaan agama dan kepercayaan masyarakat. Mereka condong mencari penyebab lain, dari yang bersifat sederhana sampai kompleksitas pertikaian global dengan mengkambinghitamkan ketidakadilan perlakuan kelompok dominan terhadap mereka yang termarginalisasi.

Seharusnya elite politik maupun kekuasaan negara menjadi ujung tombak toleransi, bukan memanasakan situasi dengan menghubungkan pada ketimpangan politik internasional, dan menganggap remeh-temeh pemicu konflik di Indonesia. Wilbur

Schramm (1976), ahli komunikasi yang mendalami interaksi antar-manusia dengan damai, menyatakan pemerintah adalah aktor utama yang harus membangun jembatan penghubung antar-kelompok berbeda dengan menumbuhkan rasa saling bergantung antara satu kelompok dan kelompok lain.

Sikap 'toleransi abu-abu' seringkali muncul dari para pejabat publik di negara yang harusnya tetap menjunjung tinggi kebhinekaan. Dalam konflik Sampang yang hingga kini menyisakan pengungsi di negeri sendiri, misalnya. Bentrokan itu dinilai hanya persoalan pribadi yang sama sekali tidak berhubungan dengan perbedaan keyakinan. Sementara dalam konflik yang membawa korban harta dan nyawa di Lampung Selatan, sejumlah elite lokal dan nasional menyatakan bahwa pertikaian berdarah itu akibat masalah sepele di antara pemuda-pemudi setempat, yang dibesar-besarkan oleh SMS dan pemberitaan media.

Kemudian, dalam kasus penyerangan massa di Cikeusik Banten yang dieksplorasi dalam bingkai musibah di luar kekuasaan manusia. Sedangkan kerusuhan Temanggung Jawa Tengah, elite di tubuh pemerintah dengan ringan menyatakan bahwa keberingasan massa yang terjadi dipicu oleh ketidakpuasan masyarakat, terhadap vonis terdakwa kasus penistaan agama yang bersifat sangat pribadi.

### **Akar Konflik**

Elite di tubuh pemerintahan dan politisi seharusnya tidak mengingkari akar konflik karena perbedaan agama dan keyakinan yang tumbuh di masyarakat. Mereka perlu menyadari sebagai rujukan masyarakat pada umumnya, karena itu harus memiliki ketulusan dalam mengedepankan aspek faktual bahwa konflik maupun bentrokan antar-kelompok memang disebabkan oleh perbedaan agama dan keyakinan. Karena itu, selayaknya jika para elite mengedepankan perlunya hidup berdampingan secara damai. Di mana pun mereka berada sudah selayaknya konsisten menyuarakan pentingnya kemajemukan demi kehidupan berbangsa dan bernegara yang aman.

Secara esensial, menyuarakan perlunya toleransi beragama dan keyakinan bukan hanya dalam komunikasi di hadapan 'korban' demi menarik simpati yang berujung kepada meningkatnya elektabilitas menghadapi Pemilu 2014. Dalam berbagai kesempatan, khususnya di lingkungan 'kelompok sendiri' para elite politik dan pemerintah harus menyuarakan pentingnya kebhinekaan dan toleransi.

Memang, akibat jerat politisasi birokrasi di berbagai tingkatan pemerintah, para pejabat publik dalam upaya 'menggalang kekuatan', bisa saja dengan mudah menyalahkan korban konflik meskipun sebelumnya menyatakan prihatin terhadap kasus intoleransi. Karena itu, tidak mengherankan jika muncul pernyataan yang mengarah kepada pengunggulan nilai sektarian yang mengklaim kebenaran sepihak, membangkitkan komunalisme, melembagakan etnosentrisme dengan mengunggulkan etniknya sebagai



yang terbaik, dan menumbuhkan semangat sub-nasional yang tidak menghiraukan kebhinekaan bernegara.

Mencermati kondisi itu, sudah selayaknya jika pimpinan pada organ-organ kekuasaan pemerintah, tidak mereduksi adanya pertikaian agama dan keyakinan, dengan mencari kambing hitam konflik yang merugikan korban. Sebab, kejujuran dan transparansi berjalan linier dengan kepercayaan masyarakat kepada pemerintahan Presiden SBY yang gencar menyuarakan perlunya toleransi dalam kehidupan beragama

Pertanyaannya, apakah Presiden SBY beserta sub-ordinat kekuasaannya mampu membangun jembatan antar-kelompok yang semakin rapuh dengan memberi perlindungan kepada mereka yang berbeda? Sebab, Laporan Human Right Watch Divisi Asia pada awal Maret 2013, bertajuk Pelanggaran terhadap Minoritas Agama di Indonesia, menunjukkan bahwa pemerintah gagal melindungi kelompok minoritas dari berbagai kekerasan atas nama agama.

Tentu saja, penilaian kurang mengenakan ini bukan gegabah, sebab elite dalam kekuasaan negara harus membuktikan dengan membangun toleransi faktual dan bukan sebatas menyalahkan kelambanan pemerintah daerah dalam merespon konflik dan mengeksplorasi jargon kemajemukan sebagai pemantas demokrasi dalam kehidupan beragama dan berkeyakinan.

**Kebhinekaan Versus Legalitas Nilai Sektarian**  
**Oleh: Eko Harry Susanto**  
**(Kolom di Majalah Ikatan Sarjana Komunikasi Indonesia/ ISKI,**  
**Nomor 01/Oktober 2011)**

**P**entingnya kebhinekaan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, sudah terlalu sering dieksplorasi di berbagai perhelatan politik tingkat lokal maupun nasional. Namun di sisi lain, kekerasan antar kelompok dan perilaku radikalisme yang menafikan kemajemukan justru semakin sering terjadi di berbagai pelosok tanah air.

Oleh sebab itu, menjadi pertanyaan disini, sejauhmana retorika tentang perlunya kebhinekaan dari para pemuka masyarakat, tokoh politik maupun elite dalam kekuasaan negara, benar-benar dipakai rujukan oleh masyarakat pada umumnya. Selain itu, benarkah mereka yang menyuarakan kemajemukan, konsisten menyuarakan di hadapan publik sendiri.

Sebab, disinyalir bahwa jargon-jargon kemajemukan yang dieksplorasi, hanyalah pemantas pidato para elite, ketika mereka berada di luar komunitas maupun kelompoknya.

Sementara itu, teriakan lantang mendukung pluralisme, hanya muncul pada saat perhelatan yang memang mengusung topik kebhinekaan bernegara.

Tentu saja sudah menjadi kelaziman, dalam hiruk pikuk berbicara di depan publik harus menyesuaikan dengan tema yang telah ditetapkan. Jadi, dengan kata lain, retorika kemajemukan, dengan segala atribut penghargaan terhadap keanekaragaman, semata-mata muncul dalam kemasan seremoni, yang mengutuk kekerasan dan radikalisme berbasis semangat kelompok.

### **Komunitas Internal**

Padahal, di lingkungan masyarakat yang masih mengunggulkan nilai paternalistik, justru yang diperlukan adalah, menyuarakan pluralisme di lingkungan komunitasnya sendiri. Dikemukakan oleh Samovar, Porter dan Mc.Daniel (2005) dalam penelaahan tentang komunikasi antar budaya, bahwa mengeksplorasi fondasi keberagaman lebih tepat jika dimulai dari lingkungan kelompok sendiri, atau yang memiliki kesamaan dalam keyakinan dasar (*value*), kepercayaan (*belief*) dan pandangan terhadap alam semesta (*worldview*).

Tujuannya jelas, sebagai orang yang dipercaya di kelompoknya, massa ataupun pengikut tidak akan ragu-ragu menjalankan perintah untuk memelihara pluralisme dalam interaksi dan komunikasi antar manusia.

Secara substantif, toleransi terhadap kemajemukan harus diawali dari lingkungan sendiri, dalam situasi yang memiliki persamaan. Karena itu, kesungguhan elite dalam mendukung kemajemukan yang bisa dipegang sebagai acuan pengikutnya adalah, ketika yang bersangkutan mendifusikan kebhinekaan di tengah komunitas yang memiliki nilai, sikap dan kepercayaan yang sehaluan dengan dirinya. Pada konteks ini, tentu saja termasuk komunitas yang berupaya menutup diri dan sensitif terhadap kelompok berbeda.

### **Pelebagaan Nilai**

Namun sesungguhnya, sikap inkonsisten elite dalam mendukung kemajemukan, bukan semata-mata dipicu kebebasan politik yang mengabaikan kebhinekaan dan Pancasila sebagai dasar negara, sebagaimana tuduhan banyak pihak, yang mengkhawatirkan terjadinya disintegrasi bangsa.

Sebab, secara empirik, politisasi nilai sektarian yang menguat sesungguhnya didukung oleh kelompok elite di berbagai lembaga, termasuk dalam kekuasaan negara. Hegemoni nilai komunalisme yang mengunggulkan *worldview* kelompok, juga menghasilkan atribut, perilaku dan idiom Bahasa komunalisme, yang mengentalkan semangat perbedaan di masyarakat majemuk.

Celakanya, sampai saat ini, dengan dalih demokrasi dalam bernegara, maka politik pengabaian pluralisme yang bersifat sektarian, tetap dipelihara secara tersembunyi, melalui regulasi yang tidak sejalan dengan basis kebhinekaan.

Pelebagaan nilai sektarian dalam konteks legalitas, sudah tentu berdampak negatif terhadap eksistensi kebhinekaan, sebagai fondasi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sebab, masyarakat pada umumnya, menganggap bahwa semangat perbedaan dan komunalisme yang mengunggulkan norma kelompok, memang disahkan oleh negara, dan memperoleh dukungan dari elite yang memiliki otoritas kuat di masyarakat.

Karena itu, tidak aneh jika gegap gempita mendukung pelestarian Pancasila yang sarat nilai kebhinekaan, seperti tidak memiliki dampak berarti. Perilaku sektarian yang diwarnai oleh tindakan kekerasan antar kelompok dan perilaku radikalisme tetap menjadi gejala umum dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Komunikasi & Gerakan Perubahan